



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KABUPATEN BOALEMO  
TAHUN 2017 - 2022**



**BUPATI BOALEMO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO**  
**NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 284).

28. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BOALEMO**  
**dan**  
**BUPATI BOALEMO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO  
TAHUN 2017 - 2022

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;

2. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Boalemo;
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan Daerah Kabupaten Boalemo;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 – 2031 yang selanjutnya disebut RTRWK adalah dokumen perencanaan tata ruang untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2031;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2011 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMP adalah dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk periode 5 (lima) tahunan;

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan;
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boalemo adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
15. Kerangka Pendanaan adalah rancangan anggaran secara garis besar untuk program dan kegiatan yang disusun dalam rangka mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
16. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang;
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
19. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah;
21. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
24. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
25. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN**

#### **Pasal 2**

Sistematika RPJMD terdiri atas :

- a. Bab I      Pendahuluan
- b. Bab II     Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Bab III    Gambaran Keuangan Daerah
- d. Bab IV    Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
- e. Bab V     Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- f. Bab VI    Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- g. Bab VII   Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- i. Bab IX    Penutup

#### **Pasal 3**

Isi dan uraian lebih lanjut terkait sistematika RPJMD Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud pada pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) RPJMD Kabupaten Boalemo merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas daerah, dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRWK, serta memperhatikan RPJMP dan RPJMN.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
- a. Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam menyusun RKPD;
  - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

#### **Pasal 5**

Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

#### **Pasal 6**

Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

#### **Pasal 7**

BAPPEDA melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah.

### **BAB IV**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD**

#### **Pasal 8**

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

#### **Pasal 9**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin :
  - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada bupati melalui kepala BAPPEDA.

## **Pasal 11**

- (1) Kepala BAPPEDA menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA.

## **Pasal 12**

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
  - a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah; dan
  - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah

dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

### **Pasal 13**

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada bupati.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 14**

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator sasaran dan program dalam RPJMD tetapi tidak mengubah target pencapaian indikator sasaran dan program akhir pembangunan jangka menengah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, kebijakan umum anggaran pendapatan, serta belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

### **Pasal 15**

RPJMD dapat disesuaikan dalam hal RTRW dan RPJPD yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD telah mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 15 November 2017

**BUPATI BOALEMO,**



**DARWIS MORIDU**

Diundangkan di Talamuta

Pada Tanggal 15 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned over the name H.A. ETANGO.

H.A. ETANGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017  
NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOALEMO : (6/53/2017)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO**  
**NOMOR 6 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 - 2022**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas daerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Periode 2017 - 2022 merupakan periode III dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2025. Penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas

### **Pasal 2**

Cukup Jelas

### **Pasal 3**

Cukup Jelas

### **Pasal 4**

Cukup Jelas

### **Pasal 5**

Cukup Jelas

### **Pasal 6**

Cukup Jelas

### **Pasal 7**

Cukup Jelas

### **Pasal 8**

Cukup Jelas

### **Pasal 9**

Cukup Jelas

### **Pasal 10**

Cukup Jelas

### **Pasal 11**

Cukup Jelas

### **Pasal 12**

Cukup Jelas

### **Pasal 13**

Cukup Jelas

### **Pasal 14**

Cukup Jelas

### **Pasal 15**

Cukup Jelas

**Pasal 16**

Cukup Jelas

**Pasal 17**

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR 303

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

NOMOR : 6

TAHUN : 2017

TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 -  
2022

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2011 – 2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sehubungan dengan telah dilantiknnya Bapak Hi. Darwis Moridu sebagai Bupati Boalemo dan Ir. Anas Yusuf sebagai Wakil Bupati Boalemo pada Tanggal 22 Mei 2017 untuk masa jabatan 2017 - 2022, maka Pemerintah Kabupaten Boalemo berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Periode 2017 - 2022 merupakan periode III (ketiga) dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Boalemo Tahun 2011–2025, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut ini :

#### **1. Pendekatan Politik**

Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses demokrasi yang didalamnya menawarkan rencana program, karena rakyat sebagai pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program

pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Pendekatan Teknokratik.

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

3. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan yang bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

4. Pendekatan Bawah-Atas (bottom-up)

Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022 dijabarkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RPJMD

- a. Pembentukan Tim Penyusun Materi RPJMD Kabupaten Boalemo
- b. Orientasi mengenai RPJMD
- c. Penyusunan Agenda Kerja Tim RPJMD
- d. Pengumpulan data dan informasi

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD

- a. Pengolahan data dan informasi
- b. Penyusunan rancangan visi dan misi KDH
- c. Perumusan visi dan misi
- d. Perumusan Tujuan dan sasaran
- e. Perumusan Strategi dan arah kebijakan

- f. Perumusan kebijakan Umum dan Program Pembangunan daerah
  - g. Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
  - h. Penetapan Indikator kinerja
  - i. Pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) Kabupaten
  - j. Pelaksanaan Forum konsultasi
  - k. Pembahasan rancangan untuk memperoleh masukan dan saran
3. Penyusunan Rancangan RPJMD
  4. Melaksanakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun untuk menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJMD
  5. Menyusun Rancangan akhir RPJMD dengan memuat hasil kesepakatan dan komitmen Musrenbang RPJMD
  6. Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan Gubernur Gorontalo
  7. Pembahasan dan Penetapan RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2017 – 2022.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022 serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis yaitu :

1. RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.
3. RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD).

4. RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal dan Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan.
5. RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.
6. RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan penyusunan RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2025;

### **1.3. Hubungan Antara Dokumen**

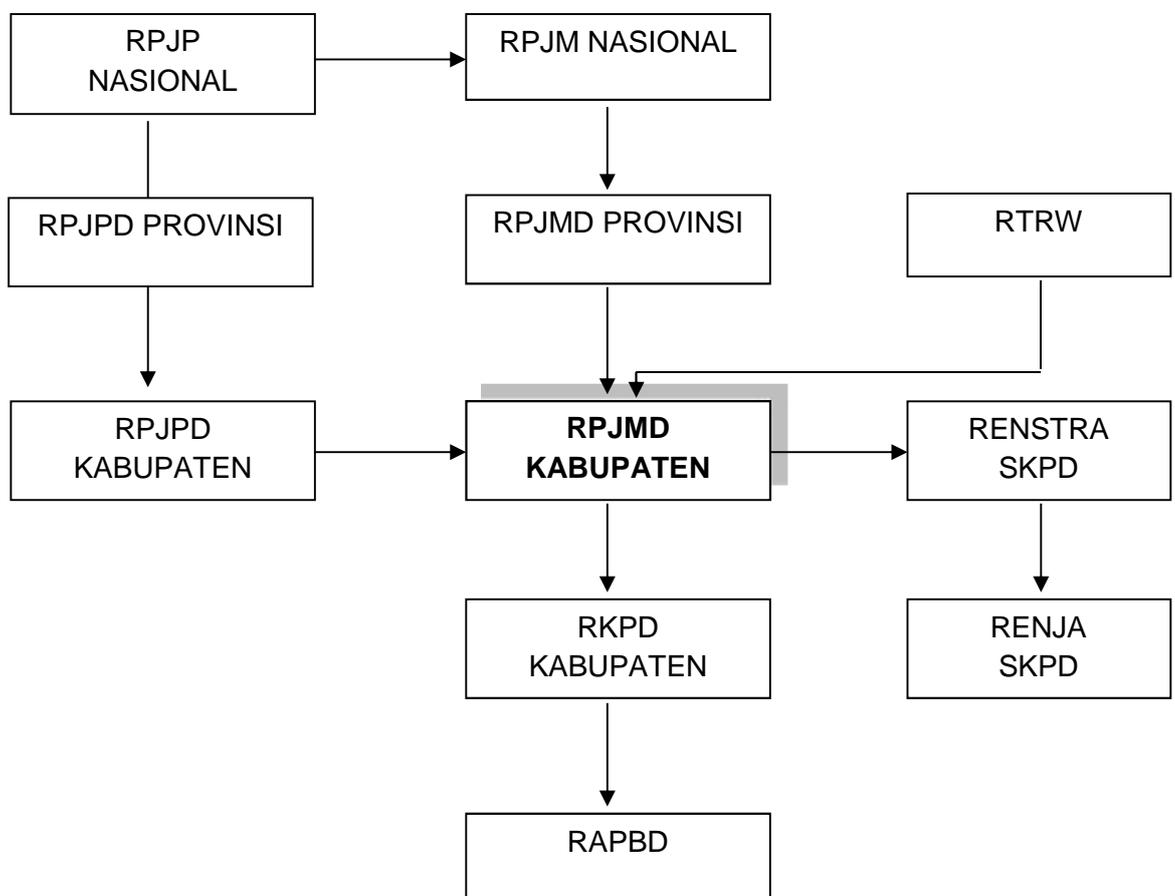
Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dan berangkat dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah.

RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, Lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo, sehingga dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, RPJPD Provinsi Gorontalo, RPJMD Provinsi Gorontalo, RPJPD Kabupaten Boalemo dan RTRW Kabupaten Boalemo. RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan akan dipedomani dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu,

RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk lebih jelasnya hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya pada gambar atau skema berikut ini:

Gambar 1.1.  
Skema Hubungan Antar Dokumen



#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

**BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

**BAB II     GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

**BAB III    GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

**BAB IV    PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

- 4.1. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
- 4.2. Isu Strategis

**BAB V     VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

## **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

- 6.1. Strategi
- 6.2. Arah Kebijakan
- 6.3. Pembangunan Daerah

## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

- 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan
- 7.2. Program Perangkat Daerah

## **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- 8.1. Indikator Kinerja Utama
- 8.2. Program dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

## **BAB IX PENUTUP**

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Boalemo sesuai visi, misi dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2017-2022, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergi, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

#### **b. Tujuan**

Adapun tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 adalah :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan masalah dan isu strategis daerah yang menjadi dasar

prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan serta sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah periode 2017-2022.

2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun kedepan;
3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2017-2022 yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boalemo 2011-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada 2017-2022;
5. Menjadi alat ukur kinerja tahunan dan lima tahunan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

Bab ini memberikan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Boalemo yang meliputi aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Hal tersebut merupakan gambaran tentang potensi dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Boalemo yang menjadi sumber daya pokok dalam pembangunan Kabupaten Boalemo lima tahun ke depan.

#### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

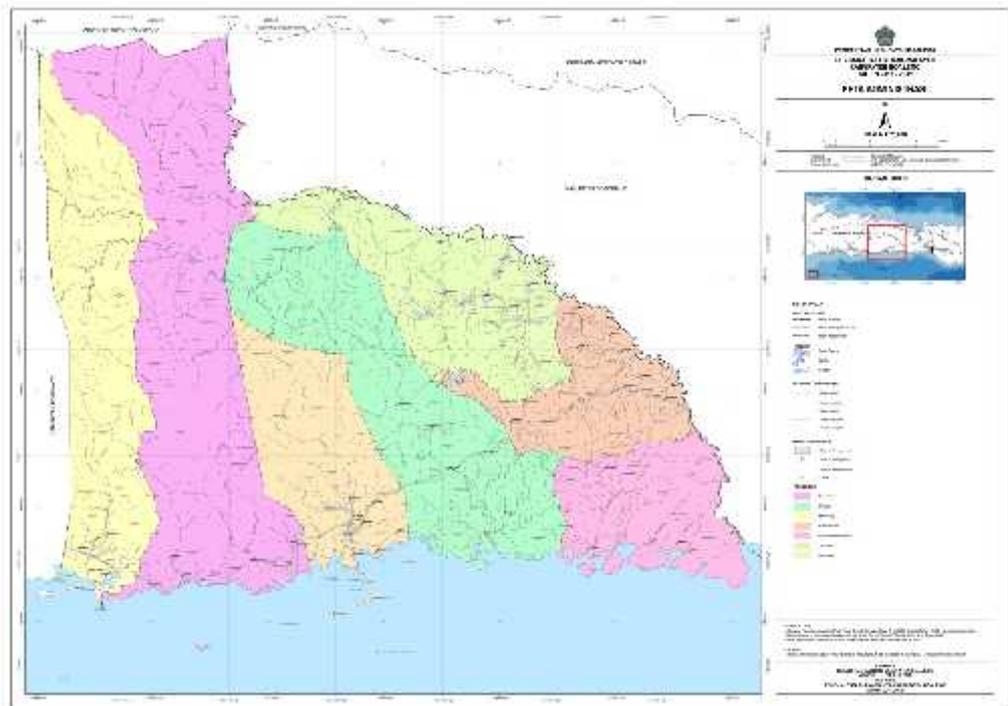
##### **2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

###### **A. Luas dan Batas Wilayah**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo merupakan dasar dibentuknya Kabupaten Boalemo. Berdasarkan undang-undang tersebut, Kabupaten Boalemo terdiri dari 5 (lima) kecamatan dengan luas wilayah sebesar 6.606,89 km<sup>2</sup>. Selanjutnya seiring dengan perkembangan pembangunan, Kabupaten Boalemo dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato. Dengan demikian, Kabupaten Boalemo secara administrasi mengalami perubahan yaitu mempunyai 7 (tujuh) kecamatan dengan luas wilayah sebesar 1.828,75 km<sup>2</sup>. Luas tersebut apabila dibandingkan dengan luas Provinsi Gorontalo sebesar 14,7 persen. Sedangkan batas Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :

- J Sebelah Utara : Kabupaten Gorontalo Utara;
- J Sebelah Selatan : Teluk Tomini;
- J Sebelah Timur : Kabupaten Gorontalo;
- J Sebelah Barat : Kabupaten Pohuwato.

Gambar 2.1  
Peta Administrasi Kabupaten Boalemo

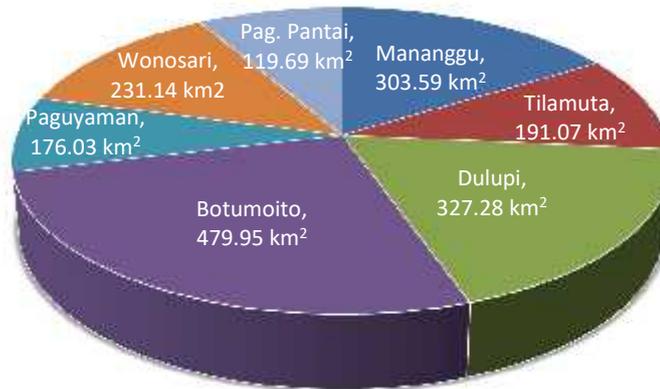


Sumber : Bappeda Kab. Boalemo, 2017

Secara Administrasi, Kabupaten Boalemo terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Manangu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Paguyaman, Wonosari dan Paguyaman Pantai dengan ibukota kabupaten di Kecamatan Tilamuta dan jumlah desa sebanyak 82 (delapan puluh dua) desa. Kecamatan Botumoito merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu sebesar 479,95 Km<sup>2</sup> atau 26,24% dari luas Kabupaten Boalemo secara keseluruhan. Sedangkan Kecamatan Paguyaman Pantai merupakan kecamatan dengan luas terkecil, yaitu sebesar 119,07 Km<sup>2</sup> atau 6,54% dari luas Kabupaten Boalemo.

Grafik 2.1

Luas Wilayah per kecamatan di Kabupaten Boalemo



Sumber : RTRW Kab. Boalemo tahun 2011-2031

B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Boalemo terletak antara 0° 23' 55" – 0° 55' 38" Lintang Utara, dan 122° 01' 12" – 122° 39' 17" Bujur Timur, Kabupaten Boalemo mempunyai 6 (enam) kecamatan pesisir yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat besar. Panjang garis pantai Kabupaten Boalemo menggunakan data Garis Pantai BIG edisi 2013 adalah 190,99 km. Panjang garis pantai tersebut sudah termasuk garis pantai pulau-pulau kecil di Kabupaten Boalemo yang berhadapan dengan Teluk Tomini (Pantai Selatan)

C. Kondisi Topografi

Kondisi topografi di Kabupaten Boalemo bervariasi, ada yang datar, bergelombang hingga berbukit. Namun demikian, wilayah Kabupaten Boalemo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, Kabupaten Boalemo mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda. Gunung Pontolo di Kecamatan Mananggu merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 970 m di atas permukaan laut. Selain punya banyak gunung, kabupaten ini juga dilalui banyak

sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Paguyaman yang terletak di Kecamatan Paguyaman dengan panjang 139,50 km. Sedang sungai terpendek adalah Sungai Tilmuta dengan panjang 13,7 km yang terletak di Kecamatan Tilmuta. Kawasan yang mempunyai kemiringan lahan 0-8% adalah kawasan yang berada dibagian Utara dan Barat wilayah Kabupaten Boalemo. semakin ke Timur kemiringan semakin besar karena kawasan tersebut merupakan perbukitan yang membentang dari Utara ke Selatan. Kondisi fisik wilayah Kabupaten Boalemo secara umum memiliki karakteristik wilayah pesisir. Kota tumbuh pada dataran rendah di sepanjang pinggir pantai dengan limitasi perkembangan berupa kondisi topografi wilayah yang berbukit. sedangkan wilayah datar berada pada tempat-tempat yang saat ini merupakan pusat-pusat permukiman. Kondisi geomorfologi/bentang alam merupakan elemen penting dalam penentuan kesesuaian pemanfaatan lahan atau kemampuan daya dukung lahan. Kabupaten Boalemo dikelilingi oleh daerah belakang (hinterland) berupa dataran yang termasuk dalam kelas kelerengan agak curam yaitu berkisar antara 15% sampai dengan 40% dan kelerengan di atas 40% (sangat curam) serta beberapa bagian wilayah dengan kelerengan antara 2% hingga 15% (landai). Kelerengan yang cukup tinggi merupakan limitasi dalam pengembangan pusat-pusat permukiman di Kabupaten Boalemo terutama ke arah Selatan. wilayah-wilayah dengan kelerengan di atas 15 % dimanfaatkan untuk perkebunan dan hutan. Tinggi rata-rata permukaan tanah di Kabupaten Boalemo dari permukaan laut adalah 30,14 m.

Tabel 2.1  
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Boalemo

No	Kecamatan	Ketinggian (m)
1.	Mananggu	0 - 2.000
2.	Tilamuta	0 - 2.000
3.	Botumoito	0 - 2.000
4.	Dulupi	0 - 1.350
5.	Paguyaman	0 - 700
6.	Paguyaman Pantai	0 - 900
7.	Wonosari	25 - 1.400
	<b>Kabupaten Boalemo</b>	<b>0 - 2.000</b>

Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2017

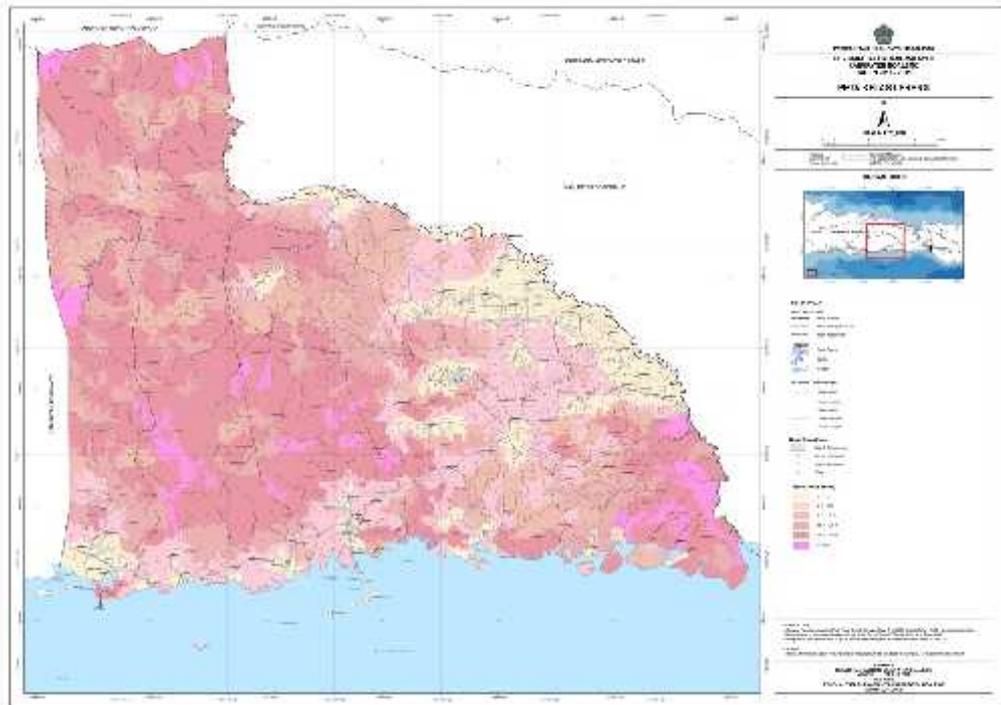
Untuk Kelerengan di Kabupaten Boalemo juga bervariasi mulai dari kelerengan 0 - 8% sampai > 45%. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Boalemo pada umumnya berada pada kelerengan 0-8% dan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Paguyaman Pantai. Kecamatan Paguyaman dan Wonosari memiliki luasan lahan datar terluas (sekitar 13.000 ha). Di seluruh kecamatan terdapat semua kelas lereng karena batas kecamatan dibuat memanjang dari wilayah pesisir di Selatan hingga wilayah berbukit di Utara yang berbatasan dengan kabupaten Gorontalo. Untuk lebih jelasnya kelerengan di Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2  
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Boalemo

Kecamatan	0 - 8 %	8 - 15 %	15 - 25 %	25 - 40 %	> 40 %	Grand Total
Botumoito	1,678.99	7,152.70	18,466.12	25,856.14	11,548.81	64,702.76
Dulupi	5,068.61	4,510.67	4,209.53	2,872.82	7.07	16,668.71
Mananggu	2,756.61	3,857.41	9,120.82	11,690.66	4,483.04	31,908.53
Paguyaman	13,280.16	2,703.81	4,113.41	7,515.87	1,261.52	28,874.77
Paguyaman pantai	122.73	1,867.07	3,394.60	2,146.54	863.92	8,394.87
Tilamuta	5,292.03	4,653.70	12,090.04	15,965.69	9,770.01	47,771.47
Wonosari	13,541.22	5,052.40	3,661.99	414.35		22,669.95
<b>Grand Total</b>	<b>41,740.35</b>	<b>29,797.77</b>	<b>55,056.50</b>	<b>66,462.07</b>	<b>27,934.37</b>	<b>220,991.07</b>

*Sumber : RTRW Kab. Boalemo, 2011 - 2031*

Gambar 2.2  
Peta Kelas Lereng Kab. Boalemo



*Sumber : RTRW Kab. Boalemo, 2011 - 2031*

#### D. Kondisi Morfologi

Secara garis besar, morfologi di Kabupaten Boalemo dapat dibagi menjadi beberapa bagian (menurut klasifikasi Badan Planologi

Kehutanan, yaitu dataran, kipas lahar, lembah alluvial, pantai, pegunungan, perbukitan dan rawa pasang surut. Setiap satuannya mempunyai ciri dan kenampakan yang khas baik dari bentuk gunung, perbukitan, kemiringan lereng maupun pola alirannya. Perbedaan bentuk bentang alam ini umumnya disebabkan oleh adanya perbedaan jenis dan macam batuan, struktur geologi, ketahanan batuan terhadap proses-proses geodinamik dan vegetasi penutupnya.

Pola aliran radial dicirikan oleh aliran yang menyebar dari satu tempat, umumnya menempati daerah yang dibangun oleh hasil aktivitas gunung api. Pola aliran radial ini dijumpai pada daerah yang sangat luas, yaitu pada daerah-daerah perbukitan. Bentuk lembah di daerah ini umumnya berbentuk huruf "V" dengan erosi vertikal yang kuat, dengan demikian pada daerah ini mempunyai stadium sungai muda.

Pola aliran sub paralel dicirikan oleh bentuk aliran yang hampir sejajar. Pola aliran ini menempati daerah-daerah dataran dan daerah hampir datar yang dijumpai di bagian timur laut utara dan sepanjang jalan Trans Sulawesi.

#### E. Klimatologi

Keadaan iklim di Kabupaten Boalemo ditandai dengan keadaan curah hujan dan intensitas hujan, sedangkan kondisi iklim sendiri ditandai dengan keadaan dimana suatu wilayah mempunyai keadaan bulan basah dan bulan kering. Dengan tipe iklim yang ada di Kabupaten Boalemo maka berdasarkan Schmidt dan Ferguson, wilayah ini termasuk iklim dengan Tipe C yaitu iklim sedang yang merupakan daerah tidak kering dan tidak basah. Kabupaten Boalemo dipengaruhi oleh iklim laut dan iklim pegunungan dengan temperatur berkisar antara 22° C – 34° C.

Intensitas hujan merupakan nilai perbandingan antara curah hujan dengan hari hujan baik dalam bulanan maupun tahunan. Berdasarkan

jumlah hari hujan di masing-masing kecamatan, rata-rata hari hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Januari hingga Juni dan hari hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juli hingga September.

Curah hujan di Kabupaten Boalemo pada Tahun 2016 rata-rata mencapai 123,75 mm<sup>3</sup>/bulan dengan jumlah hari hujan rata-rata 8,83 hari hujan/bulan. Rata rata kelembaban relatif udara adalah 79,42 % dan presentasi penyinaran matahari rata-rata pada tahun 2016 sekitar 65,95 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.3  
Rata - rata Suhu dan Kelembapan Udara Menurut Bulan  
di Kabupaten Boalemo

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembapan Udara (%)		
	Maks	Min	Rata-	Maks	Min	Rata-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	31,1	23,9	27,9	89	60	79
Februari	32,9	24,1	26,0	88	59	73
Maret	34,1	24,3	28,6	93	54	74
April	34,7	24,8	27,5	89	56	75
Mei	33,3	24,9	28,0	92	66	84
Juni	32,4	24,1	26,4	93	65	81
Juli	32,6	23,5	27,4	93	69	85
Agustus	33,3	23,3	27,7	89	58	77
September	33,4	23,5	26,7	90	62	78
Oktober	33,2	23,6	27,3	91	68	84
November	33,5	24,2	27,1	91	64	79
Desember	32,4	24,1	27,3	92	68	84

*Sumber : Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo, BMKG, 2017*

Tabel 2.4  
Rata - rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan  
Penyinaran Matahari dan Jumlah Curah Hujan menurut Bulan  
di Kabupaten Boalemo

Bulan	Tekanan Udara (mb)	Kecepatan Angin (knot)	Penyinaran Matahari (%)	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Hari Hujan
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)
Januari	1.011,9	4	68,3	30	5
Februari	1.011,3	5	80,4	41	5
Maret	1.011,4	5	80,6	107	8
April	1.010,6	4	66,3	190	13
Mei	1.009,9	3	59,6	151	11
Juni	1.010,6	3	62,8	315	13
Juli	1.008,7	2	61,9	202	9
Agustus	1.009,9	4	76,5	55	5
September	1.010,1	3	58,3	87	9
Oktober	1.009,8	2	55,7	132	11
November	1.009,5	2	64,6	92	10
Desember	1.008,8	3	56,4	83	7

*Sumber Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo, BMKG, 2017*

## F. Hidrologi

### 1. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu hamparan kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkan melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik (outlet). Oleh karena itu, pengelolaan DAS merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan yang pada dasarnya merupakan usaha-usaha penggunaan sumber daya alam di suatu DAS secara rasional untuk mencapai tujuan produksi pertanian yang optimal dalam waktu yang tidak terbatas (lestari) dengan upaya untuk menekan kerusakan seminimal mungkin sehingga distribusi aliran merata sepanjang tahun. DAS juga merupakan suatu ekosistem dimana unsur organisme dan lingkungan biofisik serta unsur

kimia berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat keseimbangan inflow dan outflow dari material dan energi.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo disebutkan bahwa sistem pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan berbasis Wilayah Sungai yaitu Wilayah Sungai Paguyaman yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional. Adapun Wilayah Sungai Strategis Nasional yang melintas di Kabupaten Boalemo adalah DAS Paguyaman, DAS Limba, DAS Olibuhu, DAS Tumba, DAS Bolangga, DAS Bubaa, DAS Tumbihi, DAS Limbatihu, DAS Tabongo, DAS Dulupi, DAS Sambati, DAS Tilamuta, DAS Lamu, DAS Botumoito, DAS Tapadaa, DAS Salilama, DAS Tabulo.

Sedangkan nama sungai yang terdapat di Kabupaten Boalemo adalah Sungai Tabulo, Nantu, Tilamuta, Tapadaa, Tabongo, dan Paguyaman. Pola aliran sungai-sungai yang ada di Kabupaten Boalemo tersebut pada umumnya memiliki pola radial, dengan sebagian besar merupakan sungai musiman yaitu sungai yang meresapkan air hujan ke dalam tanah, atau disebut juga sungai influent [Asdak, 2002]. Sedangkan sungai pola radial merupakan ciri khas sungai yang mengalir di daerah gunung berapi pada batuan alluvial [Lillesand, 2004], hal ini sesuai dengan kualifikasi produk sebaran batuan, bahwa jenis batuan adalah alluvial bekas aktivitas gunung berapi.

Tabel 2.5

Nama Sungai, Panjang Aliran dan Kecamatan yang Dilalui  
di Kabupaten Boalemo

Sungai	Panjang Aliran (km)	Kecamatan yang Dilalui
(1)	(2)	(3)
Tabulo	16,25	Mananggu
Nantu	27,90	Tilamuta
Tilamuta	13,70	Tilamuta
Tapadaa	14,40	Botumoito
Tabongo	15,20	Dulupi
Paguyaman	139,50	Paguyaman Wonosari Tilamuta Mananggu

Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2016

## 2. Cekungan Air Tanah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bahwa Daerah aliran air tanah disebut Cekungan Air Tanah. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Pada Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 12 pada Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan air tanah berdasarkan pada Cekungan Air Tanah dan ketentuan mengenai pengelolaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, bahwa kondisi hidrologi berdasarkan wilayah Cekungan Air Tanah di Kabupaten Boalemo, terdiri atas :

### a. Cekungan Air Tanah (CAT) Molombulahe

Cekungan Air Tanah (CAT) Molombulahe terletak di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo. Khusus di Kabupaten Boalemo, CAT

Molombulahe terdapat di Kecamatan Paguyaman. Secara Geografis, CAT Molombulahe terletak di sekitar  $122^{\circ} 21' 27.24''$  -  $122^{\circ} 45' 20.84''$  Bujur Timur dan  $00^{\circ} 34' 21.85''$  -  $00^{\circ} 46' 30.52''$  Lintang Utara, dengan luas sebesar kurang lebih  $433 \text{ km}^2$ .

Cekungan Air Tanah (CAT) Mahinoto

Cekungan Air Tanah (CAT) Mahinoto terletak di Kabupaten Boalemo Kecamatan Wonosari. Secara Geografis, CAT Mahinoto terletak di sekitar  $122^{\circ} 13' 52.84''$  -  $122^{\circ} 26' 39.50''$  Bujur Timur dan  $00^{\circ} 44' 46.55''$  -  $00^{\circ} 48' 10.63''$  Lintang Utara, dengan luas sebesar kurang lebih  $75 \text{ km}^2$ .

b. Cekungan Air Tanah (CAT) Soginti

Cekungan Air Tanah (CAT) Soginti terletak di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Khusus di Kabupaten Boalemo, CAT Soginti berada berada di Kecamatan Mananggu. Secara Geografis, CAT Soginti terletak di sekitar  $121^{\circ} 59' 7.08''$  -  $122^{\circ} 10' 17.66''$  Bujur Timur dan  $00^{\circ} 27' 17.64''$  -  $00^{\circ} 35' 38.66''$  Lintang Utara, dengan luas sebesar kurang lebih  $59 \text{ km}^2$ .

## G. Penggunaan Lahan

### 1. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Oleh karena itu, Kawasan budidaya dapat diartikan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan yang terkait. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang. Kriteria teknis sektoral

kawasan budidaya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria ruang kawasan budidaya menentukan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang menghasilkan nilai sinergi terbesar untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan.

Kawasan budidaya di Kabupaten Boalemo terdiri dari :

- ) Kawasan hutan produksi;
- ) Kawasan hutan rakyat;
- ) Kawasan pertanian;
- ) Kawasan perikanan;
- ) Kawasan pariwisata;
- ) Kawasan permukiman.

Tabel 2.6

Luas Arahkan Kawasan Budidaya di Kabupaten Boalemo

NO	KAWASAN BUDIDAYA	LUAS (Ha)
1	Kawasan Hutan Produksi	
	- Hutan Produksi Terbatas	43.582,69
	- Hutan Produksi Tetap	14.395,15
	- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	4.958,72
2	Kawasan Hutan Rakyat	7.283,31
3	Kawasan Pertanian	
	- Perkebunan	9.101,35
	- Pertanian Lahan Kering/ Ladang	39,290
	- Sawah Irigasi Teknis	4.187
	- Sawah Irigasi Sederhana	35
	- Sawah Tadah Hujan	676
4	Kawasan Perikanan	161,42
5	Kawasan Pariwisata	291,36
6	Kawasan Permukiman	
	- Permukiman Perkotaan	519,7
	- Permukiman Pedesaan	2.596,8

Sumber : RTRW Kab. Boalemo Tahun 2011-2031

## 2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kabupaten Boalemo terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Keberadaan dan terpeliharanya kawasan lindung di Kabupaten Boalemo sangatlah penting. Pada wilayah dengan curah hujan yang tinggi, kawasan lindung menjadi penyangga bencana banjir, longsor, dan erosi.

Hutan Lindung yang merupakan salah satu kawasan lindung, dapat menjaga menjaga kelestarian sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Boalemo untuk mendukung dan melindungi kawasan budidaya potensial yang ada di bawahnya, dan untuk menjaga kelestarian ragam hayati, demi kepentingan masa kini maupun masa depan penduduk Boalemo. berdasarkan SK Menhut No. 325/Menhut-II/2010, Hutan Lindung di Kabupaten Boalemo sebesar kurang lebih 28.990,07 Ha atau 15,85 % dari total luas wilayah Kabupaten Boalemo. Sedangkan luas kawasan konservasi (Cagar Alam) di Kabupaten Boalemo adalah sebesar kurang lebih 10.917,92 Ha atau 5,97 % dari total luas wilayah Kabupaten Boalemo.

Luas kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi (Cagar Alam) berdasarkan kecamatan di Kabupaten Boalemo secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7  
Luas Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi (Cagar Alam)  
di Kabupaten Boalemo

No	Kecamatan	Hutan Lindung		Kawasan Konservasi (Cagar Alam)	
		Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Mananggu	4,832.14	16.67	-	-
2	Botumoito	9,174.04	31.65	10,916.23	99.98
3	Tilamuta	6,129.14	21.14	-	-
4	Dulupi	3,994.09	13.78	-	-
5	Paguyaman	280.90	0.97	-	-
6	Wonosari	384.86	1.33	1.69	0.02
7	Paguyaman Pantai	4,194.90	14.47	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>28,990.07</b>	<b>100,00</b>	<b>10,917.92</b>	<b>100.00</b>

*Sumber : RTRW Kab. Boalemo Tahun 2011-2031*

### 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan Wilayah di Kabupaten Boalemo berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2031. Melihat kondisi wilayah Kabupaten Boalemo, maka potensi pengembangan wilayah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

#### A. Potensi Pengembangan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan hutan produksi dilakukan dengan pemanfaatan hutan dan pelestarian hasil (kayu dan non kayu), sehingga diperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi yang maksimal bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Kebijakan pengembangan hutan produksi di Kabupaten Boalemo adalah :

- ) Mengembangkan areal lahan hutan produksi secara selektif;

- ) Mengembangkan agro forestry (hutan perkebunan) di areal sekitar hutan lindung sebagai zona penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan kawasan budidaya terbangun.

Hutan produksi di Kabupaten Boalemo terdiri dari : Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi yang Dapat Dikoinversi (HPK). Penyebaran lokasi hutan produksi berdasarkan masing-masing kecamatan di Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8  
Luas Hutan Produksi Berdasarkan Kecamatan  
di Kabupaten Boalemo

No	Kecamatan	Luas (Ha)		
		HPT	HP	HPK
1	Mananggu	12,122.60	5,317.53	2,494.15
2	Botumoito	15,596.21	3,813.03	1,286.04
3	Tilamuta	4,288.15	1,550.19	-
4	Dulupi	9,300.45	511.60	98.64
5	Paguyaman	889.60	1,026.00	-
6	Wonosari	134.72	-	679.89
7	Paguyaman Pantai	1,250.96	2,176.80	-
<b>Jumlah</b>		<b>43,582.69</b>	<b>14,395.15</b>	<b>4,958.72</b>

Sumber : RTRW Kab. Boalemo Tahun 2011-2031

## B. Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian

Lahan pertanian di Kabupaten Boalemo terdiri dari sawah dan pertanian lahan kering (ladang). Sawah di Kabupaten Boalemo sepanjang tahun dapat ditanami padi karena tersedianya air yang berasal dari hujan dan irigasi baik irigasi teknis maupun irigasi sederhana. Sedangkan pertanian lahan kering biasanya beragam, saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami jagung atau palawija, misalnya: kacang hijau, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan Ubi jalar.

Kebijakan pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Boalemo adalah :

- ) Mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah di perdesaan;
- ) Meningkatkan kualitas lahan pertanian.

Pemanfaatan Kawasan pertanian di Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :

#### 1. Pertanian Lahan Kering

Pertanian lahan kering adalah kegiatan pertanian yang dilakukan di lahan kering dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya hanya mengharapkan dari curah hujan. Pengembangan berbagai komoditas pertanian di lahan kering merupakan salah satu pilihan strategis untuk meningkatkan produksi dan mendukung ketahanan pangan. Biasanya pada saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami jagung, atau palawija, misal: kacang hijau, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Kawasan pertanian lahan kering yang dimaksud adalah tegal/ladang. Luas tegal/ladang di Kabupaten Boalemo mengalami penurunan karena dimanfaatkan untuk lahan terbangun dan lain-lain. Adapun penyebarannya berada di seluruh kecamatan. Untuk peningkatan nilai manfaat dilakukan melalui penerapan sistem pergiliran, tumpang sari dan sebagainya.

#### 2. Sawah

Sawah adalah usaha pertanian yang dilaksanakan pada tanah basa dan memerlukan air. Jenis tanaman yang utama untuk pertanian sawah adalah padi. Pengolahan lahan sawah dilakukan secara intensif dan merupakan pertanian menetap. Adapun jenis sawah yang ada di Kabuapten Boalemo adalah sebagai berikut :

##### a. Sawah Irigasi

Sawah irigasi merupakan sistem pertanian dengan pengairan yang teratur, tidak bergantung terhadap curah hujan karena

pengairan dapat diperoleh dari sungai, embung atau bendungan. Pertanian sawah irigasi biasanya panen dua kali setahun. Jenis sawah irigasi yang ada di Kabupaten Boalemo adalah sawah irigasi teknis dan sawah irigasi sederhana.

Kriteria penentuan kawasan yang sesuai untuk sawah irigasi adalah yang mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan yang meliputi:

- ) Ketinggian < 1.000 meter;
- ) Kelerengan < 40%;
- ) Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm; dan
- ) Curah hujan antara 1500 – 4000 mm pertahun.

Berdasarkan kesesuaian lahan untuk sawah irigasi teridentifikasi sebaran luas panen lahan sawah irigasi di Kabupaten Boalemo adalah di Kecamatan Mananggu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari dengan jenis komoditas berupa padi sawah.

b. Sawah Tadah Hujan

Sawah tadah hujan adalah sawah yang mendapatkan air hanya pada saat musim hujan sehingga sangat tergantung pada musim. Sawah tadah hujan di Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Mananggu, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari.

Adapun luas sawah berdasarkan masing-masing kecamatan di Kabupaten Boalemo dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 2.9  
Luas Sawah Berdasarkan Kecamatan  
di Kabupaten Boalemo

No	Kecamatan	Sawah Irigasi (Ha)		Jumlah	Sawah Tadah Hujan (Ha)		Jumlah	Total
		Teknis	½ Teknis		Pompanisasi/ Sederhana	Tadah Hujan		
1	Manunggu	389	-	389	-	23	23	412
2	Botumoito	-	35	35	-	-	-	35
3	Tilamuta	-	-	-	-	-	-	-
4	Dulupi	-	-	-	150	-	150	150
5	Paguyaman	1.700	-	1.700	-	72	72	1.772
6	Paguyaman Pantai	-	-	-	-	-	-	-
7	Wonosari	2.355	156	2.511	230	286	516	3.027
<b>Jumlah</b>		<b>4.444</b>	<b>191</b>	<b>4.635</b>	<b>380</b>	<b>381</b>	<b>761</b>	<b>5.396</b>

*Sumber : Dinas Pertanian Kab. Boalemo, 2017*

### C. Potensi Pengembangan Kawasan Perkebunan

Perkebunan merupakan budidaya tanaman pangan maupun non pangan yang berfungsi untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dan memelihara sumber daya alam yang dilakukan baik oleh rakyat maupun oleh perusahaan. Kebijakan pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Boalemo adalah mengembangkan areal lahan komoditas perkebunan khususnya di daerah perdesaan seluruh kabupaten secara selektif.

Kawasan perkebunan di Kabupaten Boalemo diarahkan pada pengembangan perkebunan dengan komoditi yang potensial untuk dikembangkan yaitu cengkeh, kakao, kelapa, kelapa sawit dan tebu dengan menyesuaikan ketinggian lahan.

Adapun kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Boalemo terdiri dari :

- ) Kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, terdapat di Kecamatan-kecamatan Manunggu, Botumoito, Tilamuta, Paguyaman, dan Paguyaman Pantai;

- ) Kawasan peruntukan perkebunan kakao, terdapat di Kecamatan-kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Wonosari, Paguyaman dan Paguyaman Pantai;
- ) Kawasan peruntukan perkebunan kelapa, terdapat di Kecamatan-kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Wonosari Paguyaman dan Paguyaman Pantai;
- ) Kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit, terdapat di Kecamatan-kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Wonosari Paguyaman dan Paguyaman Pantai;
- ) Kawasan peruntukan perkebunan tebu, terdapat di Kecamatan-kecamatan Dulupi, Paguyaman dan Wonosari; dan
- ) Kawasan peruntukan perkebunan lainnya, terdapat di Kecamatan-kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Wonosari Paguyaman dan Paguyaman Pantai.

Adapun luas perkebunan berdasarkan komoditas pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Boalemo secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10

Luas Perkebunan Berdasarkan Komoditas  
pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Boalemo

No	Kecamatan	Luas Tanaman Perkebunan (Ha)				
		Kelapa	Kelapa Sawit	Kakao	Cengkeh	Tebu
1	Mananggu	1.609,97	-	548,96	87,00	-
2	Botumoito	2.134,70	-	404,00	326,00	-
3	Tilamuta	1.558,00	110,00	174,65	30,00	-
4	Dulupi	992,00	1.603,77	414,50	155,00	656,77
5	Paguyaman	1.374,50	972,59	1.488,25	52,00	4.082,24
6	Paguyaman Pantai	1.199,20	2.515,25	947,23	42,00	2.269,79
7	Wonosari	616,85	319,30	279,93	147,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>9.485,22</b>	<b>5.520,91</b>	<b>4.254,42</b>	<b>839,00</b>	<b>7.008,80</b>

*Sumber : Dinas Pertanian Kab. Boalemo, 2017*

#### D. Potensi Pengembangan Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengembangan kawasan peternakan harus memperhatikan optimalisasi sumber daya lokal dan strategi kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Boalemo adalah meningkatkan intensitas budidaya peternakan. Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Mananggu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman Pantai. Adapun kegiatan peternakan di Kabupaten Boalemo dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Ternak hewan besar, meliputi peternakan sapi dan kuda;
2. Ternak hewan kecil, meliputi peternakan kambing dan babi;
3. Ternak Unggas, meliputi peternakan ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging dan ayam pedaging.

Adapun jumlah populasi jenis ternak di Kabupaten Boalemo tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11  
Jumlah Populasi Ternak, 2016

No	Jenis Ternak	Jumlah (Ekor)
1	Sapi Potong	37.463
2	Kambing	7.961
3	Babi	2.661
4	Kuda	104
5	Ayam Buras	122.102
6	Ayam Petelur	14.712
7	Ayam Pedaging	113.064
8	Itik	12.190

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Boalemo, 2017

#### E. Potensi Pengembangan Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Kebijakan pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Boalemo adalah :

- ) Meningkatkan kemampuan dan teknologi budidaya perikanan air tawar;
- ) Mengembangkan budidaya perikanan air tawar, air payau dan laut;
- ) Mengembangkan komoditas perikanan dilakukan secara luas oleh masyarakat maupun badan usaha yang diberi izin di wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat; dan
- ) Mengembangkan sektor perikanan yang terpadu dengan kegiatan wisata serta memenuhi kebutuhan kawasan lain di luar wilayah

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Boalemo pada umumnya terpecah di beberapa wilayah kecamatan. Adapun kawasan peruntukan perikanan meliputi:

1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap dikembangkan di wilayah pesisir dan laut yang terdiri dari Kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Paguyaman dan Paguyaman Pantai.
2. Kawasan peruntukan budidaya perikanan yaitu :
  - ) Kawasan peruntukan budidaya perikanan laut dan perikanan air payau terdapat di Kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi dan Paguyaman Pantai; dan
  - ) Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar terdapat di Kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Paguyaman dan Wonosari.
3. Kawasan pengolahan hasil perikanan yaitu pengembangan minapolitan di Kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Paguyaman dan Paguyaman Pantai didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar yang dapat menunjang kegiatan usaha perikanan.

Tabel 2.12

Produksi Perikanan Tangkap  
pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Boalemo

No	Kecamatan	Produksi Perikanan Tangkap (ton)		
		2014	2015	2016
1	Mananggu	295,06	509,77	735,65
2	Botumoito	497,63	654,57	860,44
3	Tilamuta	12.327,94	12.873,43	13.502,77
4	Dulupi	408,89	612,19	805,60
5	Paguyaman	433,35	594,75	724,16
6	Wonosari	-	-	-
7	Paguyaman Pantai	699,87	979,69	979,69
<b>Jumlah</b>		<b>14.662,74</b>	<b>16.195,80</b>	<b>17.608,30</b>

*Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Boalemo, 2017*

Tabel 2.13

## Produksi Perikanan Budidaya

Berdasarkan Jenis di Kabupaten Boalemo

No	Jenis Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)		
		2014	2015	2016
1	Budaya Laut	11,13	224,88	133,56
2	Budaya Air Payau	179,50	434,04	85,14
3	Budaya Air Tawar	1.056,20	752,07	301,19
<b>Jumlah</b>		<b>1.246,83</b>	<b>1.410,99</b>	<b>519,89</b>

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Boalemo, 2017

#### F. Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan

Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B dan C. Kebijakan pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Boalemo adalah :

- ) Mengendalikan penambangan batuan di sungai maupun di gunung agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan dan bahaya banjir, abrasi maupun longsor;
- ) Mengembangkan budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan; dan
- ) Mengembangkan sumber daya baru pengganti bahan tambang yang akan habis.

Kabupaten Boalemo memiliki potensi untuk dikembangkan pada sektor pertambangan yang tersebar di semua wilayah kecamatan. Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Boalemo terdiri atas :

1. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam yaitu berupa kawasan peruntukan pertambangan emas, perak dan tembaga terdapat di Kecamatan Mananggu, Talamuta, Dulupi, Wonosari dan Paguyaman.

2. Kawasan pertambangan mineral batuan meliputi :

- ) Kawasan peruntukan pertambangan granit granodiorit terdapat di Kecamatan Mananggu, Tilamuta, Paguyaman, Dulupi, Wonosari dan Paguyaman Pantai;
- ) Kawasan peruntukan pertambangan basal terdapat di Kecamatan Botumoito dan Tilamuta;
- ) Kawasan peruntukan pertambangan dasit terdapat di Kecamatan Mananggu, Tilamuta, dan Dulupi;
- ) Kawasan peruntukan pertambangan batu gamping terdapat di Kecamatan Paguyaman Pantai;
- ) Kawasan peruntukan pertambangan sirtu terdapat di Kecamatan Wonosari; dan
- ) Kawasan peruntukan pertambangan tanah liat terdapat di Kecamatan Paguyaman dan Wonosari.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal, maka diarahkan eksplorasi tambang ini akan mampu menyebabkan bertambahnya tingkat perekonomian wilayah Kabupaten Boalemo dan sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat. Selain itu harus pula dipikirkan pembangunan sumber pendapatan baru dari hasil keuntungan penambangan ini, serta revitalisasi fungsi lingkungan pasca tambang.

**G. Potensi Pengembangan Kawasan Industri**

Kawasan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. Kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Boalemo adalah :

- ) Mengembangkan agro industri terutama yang berbasis hasil komoditi sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;

- ) Mengembangkan kawasan agro industri skala sedang di PKW, PKL dan PKLp; dan
- ) Mengembangkan usaha industri kecil dan industri rumah tangga yang tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman.

Di Kabupaten Boalemo kawasan peruntukan industri dikembangkan untuk menunjang komoditi unggulan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata. Adapun kawasan peruntukan industri di Kabupaten Boalemo meliputi :

1. Kawasan peruntukan industri besar terdapat di Kecamatan Mananggu, Tilamuta, Wonosari dan Paguyaman;
2. Kawasan peruntukan industri sedang terdapat di Kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Paguyaman, Wonosari dan Paguyaman Pantai; dan
3. Kawasan peruntukan industri rumah tangga terdapat di Kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Paguyaman, Wonosari dan Paguyaman Pantai.

Berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Boalemo, pengembangan industri di Kabupaten Boalemo dimaksudkan untuk menunjang komoditi unggulan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan pariwisata. Industri skala kecil yang tidak berdampak gangguan terhadap fungsi sekitarnya dapat dikembangkan pada PKL maupun PPK.

Dalam pengembangan industri tersebut, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- ) Menciptakan keterpaduan dalam pengembangan wilayah perkotaan;
- ) Penetapan program-program terpadu antar sektor dan antar daerah;
- ) Penetapan pedoman investasi; dan
- ) Penyusunan mekanisme implementasi oleh pihak pemerintah dan swasta.

Industri yang paling dominan di Boalemo adalah industri furniture dan pengolahan lainnya. Pada tahun 2014 banyaknya industri furniture dan pengolahan lainnya yang ada di Boalemo berjumlah 146. Sedangkan tenaga kerja yang ada di industri furniture dan pengolahan lainnya berjumlah 425. Selain industri furniture dan pengolahan lainnya, industri makanan dan minuman juga ada di Boalemo sebanyak 69, dengan tenaga kerja sebanyak 277.

#### **H. Potensi Pengembangan Kawasan Perdagangan**

Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan tersebut. Kebijakan pengembangan kawasan di Kabupaten Boalemo adalah :

- ) Mengembangkan kawasan potensi ekonomi di PKW, PKL dan PKLp;
- ) Mengembangkan pasar hasil industri pertanian; dan
- ) Meningkatkan akses koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan pasar.

Kawasan peruntukan perdagangan mempunyai fungsi antara lain :

1. Memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan antar masyarakat yang membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual (sisi penawaran);
2. Menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang dominan terhadap PDRB.

Tabel 2.14  
Jumlah Pedagang Menurut pada setiap Kecamatan  
di Kabupaten Boalemo Tahun 2016

No	Kecamatan	Banyaknya Pedagang		
		Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III
1	Mananggu	400	-	69
2	Botumoito	-	312	120
3	Tilamuta	750	-	-
4	Dulupi	-	125	117
5	Paguyaman	1.965	-	-
6	Wonosari	1.338	175	127
7	Paguyaman Pantai	-	-	142
<b>Jumlah</b>		<b>4.468</b>	<b>612</b>	<b>506</b>

*Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Boalemo 2017*

#### I. Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Kebijakan pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Boalemo adalah :

- ) Pengembangan industri pariwisata budaya dan alam yang ramah lingkungan;
- ) Mengembangkan penerapan ragam nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat;
- ) Melestarikan situs warisan budaya komunitas lokal masyarakat kabupaten Boalemo;
- ) Mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada; dan
- ) Mengembangkan promosi dan jaringan industri pariwisata secara global.

Pengembangan sektor pariwisata sangat strategis karena menghasilkan multi dampak baik positif maupun negatif. Sifat budaya yang dialektis

berpeluang terjadinya proses pelunturan atau pudarnya jati diri budaya lokal karena masuknya budaya-budaya luar baik melalui para wisatawan maupun teknologi informatika dan komunikasi. Selain itu, peningkatan aksesibilitas ke kawasan-kawasan preservasi juga dapat menurunkan kualitas lingkungan dan terganggunya habitat berbagai flora dan fauna langka mempunyai resiko semakin punahnya ragam hayati. Tentu saja berbagai dampak positif akan terwujud apabila sektor pariwisata ini dikembangkan secara aktif, diantaranya tumbuh berkembangnya lapangan kerja seperti pemandu wisata, jasa transportasi, perhotelan, restoran, informasi, komunikasi, cinderamata, kesenian, serta perdagangan jasa maupun produk lainnya yang bermuara ke peningkatan ragam sumber dan volume pendapatan masyarakat lokal.

Secara umum, rencana kawasan pariwisata di Kabupaten Boalemo, merupakan kawasan yang potensial dikembangkan sebagai tujuan maupun obyek wisata meliputi:

a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri atas:

- ) Tarian etnis Minahasa, Tarian etnis Sangihe Talaud, Hadra etnis Jawa Tondano di Kecamatan Mananggu;
- ) Perkampungan suku Bajo, Tarian suku Bajo, Tarian di atas bara api, Tarian etnis Arab, Tarian Pakarena di Kecamatan Talamuta;
- ) Wisata Ngaben di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari; dan
- ) Reog Ponorogo, Tarian Kuda Lumping, Tari Kecak Bali, Pencak silat NTB di Kecamatan Wonosari.

b. Kawasan peruntukan pariwisata alam, terdiri atas:

- ) Pulau Bitila, wisata pantai Kramat, danau teratai, di Kecamatan Mananggu;

- J Pantai Boalemo Indah, pemandian air panas Dulangea, Taman Laut Pulau Monduli di Kecamatan Botumoito;
  - J Pulau Cinta, Pulau Pasir Putih, Pulau Mohupomba, wisata alam air terjun Ayuhulalo, air terjun Dulamayo dan air terjun Tenilo di Kecamatan Tilamuta;
  - J Taman Polohungo, air terjun Tangga Barito di Kecamatan Dulupi;
  - J Taman laut Pulau Limba, teluk Bubaa di Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
  - J Ekowisata Sungai Paguyaman, Sungai Moliliulo, dan Hutan Nantu di Kecamatan Wonosari.
- c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan yaitu kolam renang di Kecamatan Tilamuta

Pada tahun 2015, jumlah hotel/penginapan yang ada di Kabupaten Boalemo adalah 14, yang seluruhnya merupakan hotel non-bintang. Angka ini turun dibanding tahun 2013 yang menunjukkan bahwa ada 18 hotel/penginapan di Kabupaten Boalemo. Hotel/penginapan dengan paling banyak kamar dan tempat tidur adalah Hotel Grans Amalia, Hotel Citra Ayu dan Hotel Putra Tunggal

Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Kabupaten Boalemo tahun 2015 rata-rata adalah 33,78. Ini berarti setiap bulan di tahun 2015 rata-rata ada sepertiga kamar penginapan yang terisi dari seluruh kamar yang tersedia.

#### **J. Potensi Pengembangan Kawasan Permukiman**

Kawasan permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan. Kebijakan pengembangan kawasan di Kabupaten Boalemo adalah :

- J mencegah tumbuh berkembangnya perumahan di kawasan lindung termasuk kawasan lindung setempat, seperti hutan

lindung, lahan dengan kemiringan di atas 30%, bantaran sungai, dan sempadan pantai;

- ) mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti longsor, banjir, dan gempa;
- ) bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKW dan PKL yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal dengan ketinggian sedang; dan
- ) mengembangkan permukiman perdesaan berlandaskan kearifan nilai budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

Luas lahan permukiman di Kabupaten Boalemo mencapai 3.116,61 Ha. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan diharapkan memperhatikan kawasan rawan bencana.

#### 1. Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah kawasan yang kegiatan utamanya adalah non agraris dan lebih menonjolkan pada kegiatan pemerintahan, pelayanan jasa sosial dan ekonomi. Untuk mengatur sistem kota-kota dalam suatu wilayah, dan pembentukan deliniasi kawasan perkotaan, diperlukan penataan terhadap kawasan perkotaan, yang ditujukan untuk :

- ) Mencapai tata ruang perkotaan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang dalam pengembangan kehidupan manusia secara luas;
- ) Meningkatkan fungsi kawasan perkotaan secara serasi dan seimbang antara perkembangan lingkungan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat; dan
- ) Mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan di Kabupaten Boalemo dikembangkan di Tilamuta sebagai bagian dari Ibukota Kabupaten Boalemo dan berfungsi sebagai pusat distribusi utama (Pusat Pelayanan Utama). Sedangkan konsentrasi wilayah lainnya yaitu Kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Wonosari, Paguyaman dan Paguyaman Pantai.

Pada kawasan perkotaan diarahkan pengembangannya untuk berbagai kegiatan perkotaan yang meliputi; permukiman perkotaan, sarana dan prasarana permukiman (fasilitas sosial dan umum), infrastruktur (jaringan jalan dan angkutan, air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi, kawasan fungsional kota (perdagangan/komersil, pemerintahan, jasa/perkantoran, industri, dan terminal). Pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa dan Tsunami harus menyediakan tempat evakuasi berupa lapangan terbuka atau bukit di tempat ketinggian 20 m di atas permukaan laut.

## 2. Kawasan Pedesaan

Kawasan pedesaan merupakan kawasan dengan kegiatan utamanya berorientasi pada kegiatan pertanian/agraris, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi pertanian. Pada kawasan pedesaan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris. Kawasan permukiman pedesaan yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana pedesaan seperti jalan, irigasi, drainase, prasarana pengolahan limbah cair maupun padat diarahkan pembangunannya tetap menjaga kelestarian alam. Bangunan-

bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan arsitektur lokal berupa rumah panggung.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan di Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Paguyaman, Wonosari dan Paguyaman Pantai.

### **2.1.3. Wilayah Rawan Bencana**

Wilayah rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan Rawan bencana merupakan kawasan lindung, yakni kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penentuan kawasan rawan bencana bisa dilihat dari berbagai aspek tergantung pada jenis ancaman.

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di Kabupaten Boalemo diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak kepada masyarakat.

Secara geologis, wilayah Kabupaten Boalemo terdiri atas kawasan rawan bencana sebagai berikut :

#### **1. Bencana Alam**

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan bencana yang diakibatkan oleh gejala alam. Wilayah di Kabupaten Boalemo yang merupakan wilayah rawan bencana alam terdiri atas :

- ) Kawasan rawan tanah longsor yang terdapat di Kecamatan Mananggu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman Pantai;
- ) Kawasan rawan gelombang pasang yang terdapat di Kecamatan Mananggu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman Pantai;

- ) Kawasan rawan banjir yang terdapat di Kecamatan Mananggu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Paguyaman, dan Kecamatan Wonosari.
- ) Kawasan rawan gempa bumi, terdapat di Kecamatan Mananggu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman Pantai;
- ) Kawasan rawan gerakan tanah, terdapat di Kecamatan Mananggu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman Pantai;
- ) kawasan yang terletak di zona patahan aktif, terdapat di Kecamatan Mananggu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman Pantai;
- ) kawasan rawan tsunami, terdapat di Kecamatan Mananggu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
- ) kawasan rawan abrasi terdapat di Kecamatan Mananggu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman Pantai.

2. Bencana yang Timbul Akibat Kesalahan Manusia  
Bencana yang Timbul Akibat Kesalahan Manusia

Untuk bencana yang timbul akibat kesalahan manusia, teridentifikasi sebagai berikut:

- ) Kawasan rawan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kurangnya atau rusaknya sarana dan prasarana jalan, misalnya rusaknya jalan, kurangnya rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain.
- ) Kawasan rawan kebakaran merupakan kawasan yang sangat berpotensi terjadi kebakaran. Kawasan ini terletak di daerah kumuh baik kumuh perkotaan maupun kumuh pedesaan.

#### 2.1.4. Demografi

Perencanaan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan demografi. Penduduk merupakan subyek dan sekaligus obyek dalam penyelenggaraan pembangunan. Dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan pembangunan, informasi tentang demografi mempunyai posisi sangat strategis. Komposisi dan distribusi penduduk merupakan modal dasar dalam menentukan keberhasilan pembangunan sehingga harus dikelola dengan baik.

##### 1. Jumlah Penduduk

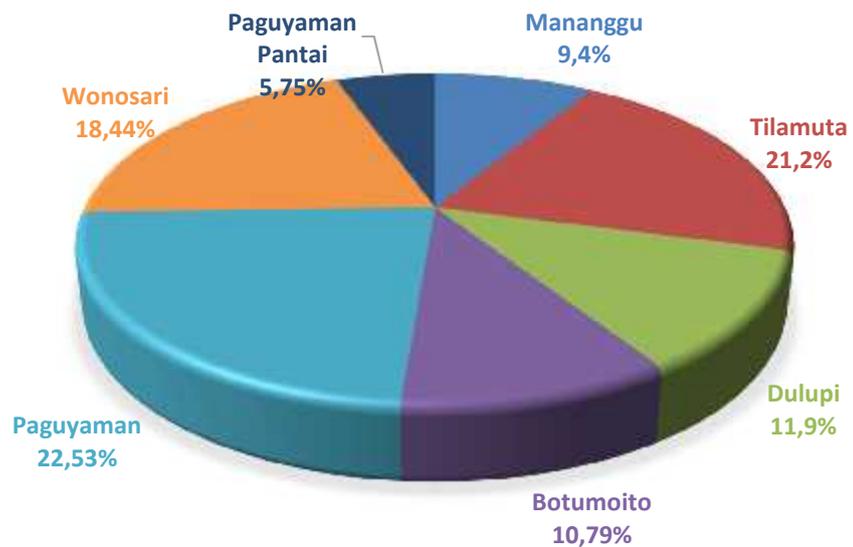
Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Boalemo tercatat sebesar 143.259 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebesar 73.176 jiwa atau 51,08% dan perempuan sebesar 70.083 jiwa atau 48,92%. Dengan demikian rasio jenis kelamin antara penduduk laki-laki dan perempuan adalah sebesar 104,41. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Boalemo menurut masing-masing kecamatan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15  
Jumlah Penduduk pada Masing-Masing Kecamatan  
di Kabupaten Boalemo Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Org/Km <sup>2</sup> )
1	Mananggu	303,59	13.466	32,19
2	Tilamuta	191,07	30.364	52,07
3	Dulupi	327,28	17.043	44,36
4	Botumoito	479,95	15.451	183,32
5	Paguyaman	176,03	32.271	68,86
6	Wonosari	231,14	26.422	158,91
7	Paguyaman Pantai	119,69	8.242	114,31
<b>Jumlah</b>		<b>1.828,75</b>	<b>143.259</b>	<b>78.34</b>

Sumber : BPS Kab. Boalemo 2017

Grafik 2.2  
 Prosentase Jumlah Penduduk pada Masing-Masing Kecamatan di  
 Kabupaten Boalemo Tahun 2016



*Sumber : Pengendalian Penduduk & Capil Kab. Boalemo, 2017*

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Paguyaman mempunyai jumlah penduduk paling banyak yaitu sebesar 32.271 jiwa atau 22,53% dengan kepadatan penduduk sebesar 68,86 orang/km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Paguyaman Pantai mempunyai jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 8.242 jiwa atau 5,75 % dengan kepadatan penduduk sebesar 144,31 orang/km<sup>2</sup>.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Boalemo tahun 2016 berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16  
Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur  
di Kabupaten Boalemo Tahun 2016

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 4	4.529	4.278	8.807
2	5 – 9	6.676	6.150	12.826
3	10 – 14	8.162	7.828	15.990
4	15 – 19	7.610	6.935	14.545
5	20 – 24	7.272	7.081	14.353
6	25 – 29	5.847	5.541	11.388
7	30 – 34	5.879	5.807	11.686
8	35 – 39	5.624	5.665	11.289
9	40 – 44	5.732	5.544	11.276
10	45 – 49	4.872	4.385	9.257
11	50 – 54	3.579	3.345	6.924
12	55 – 59	2.640	2.633	5.273
13	60 – 64	2.002	2.013	4.015
14	65 – 69	1.289	1.296	2.585
15	70 – 74	814	829	1.643
16	75 +	649	753	1.402
<b>Jumlah</b>		<b>73.176</b>	<b>70.083</b>	<b>143.259</b>

Sumber : Pengendalian Penduduk & Capil Kab. Boalemo, 2016

Berdasarkan tabel diatas, apabila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0 – 14 tahun) jumlahnya sebesar 37.623 jiwa atau 26,26 % dan penduduk usia produktif (usia 15 – 59 tahun) jumlahnya sebesar 95.991 jiwa atau 67%, serta penduduk usia lanjut (usia > 60 tahun) jumlahnya sebesar 9.645 jiwa atau 6,73 %. Penduduk Kabupaten Boalemo mayoritas beragama Islam yaitu pada tahun 2016 sebesar 96,83%. Sedangkan Protestan sebesar 1,42%, Katolik sebesar 0,12%, dan Hindu sebesar 1,63%. Keanekaragaman agama yang ada di

Kabupaten Boalemo mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik dimasyarakat. Salah satu prasyarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jumlah penduduk Kabupaten Boalemo berdasarkan agama yang dianut secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.17  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Penganut Agama  
di Kabupaten Boalemo Tahun 2016

No	Kecamatan	Agama				
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Mananggu	12.409	990	67	-	-
2	Tilamuta	30.094	235	26	9	-
3	Dulupi	16.899	132	5	-	7
4	Botumoito	15.432	18	-	1	-
5	Paguyaman	31.436	128	6	701	-
6	Wonosari	24.219	517	61	1.623	-
7	Paguyaman Pantai	8.234	8	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>138.723</b>	<b>2.028</b>	<b>165</b>	<b>2.334</b>	<b>7</b>

*Sumber : Pengendalian Penduduk & Capil Kab. Boalemo, 2016*

Pada tahun 2016, Prosentase penduduk Kabupaten Boalemo usia 10 tahun keatas yang tidak mengenyam pendidikan adalah sebesar 36,96%, sedangkan yang telah menamatkan pendidikan SD/MI adalah sebesar 37,04%, yang telah menamatkan pendidikan SMP/MTs adalah sebesar 10,29% dan yang telah menamatkan pendidikan SMA/SMK adalah sebesar 11,92% serta yang telah menamatkan pendidikan perguruan tinggi adalah sebesar 3,79%. Adapun deskripsi persentase penduduk Kabupaten Boalemo usia 10 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi tahun 2013 – 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah tertinggi di Kabupaten Boalemo Tahun 2013-2016

No	Ijazah Tertinggi	2013	2014	2015	2016
1	Tidak Punya Ijazah (%)	42,80	45,91	47,47	36,96
2	SD / MI (%)	30,40	24,21	26,20	37,04
3	SMP / MTs (%)	11,60	13,62	11,66	10,29
4	SMA / SMK / MA (%)	11,50	12,76	9,69	11,92
5	Perguruan Tinggi (%)	3,70	3,50	4,98	3,79

Sumber : BPS Kab. Boalemo 2017

## 2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Boalemo tahun 2010 – 2015 adalah sebesar 2,88 % dan tahun 2014 – 2015 sebesar 2,92 %. Berdasarkan persentase laju pertumbuhan penduduk tersebut, maka proyeksi penduduk Kabupaten Boalemo tahun 2017 – 2020 berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19  
 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur  
 di Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2020

No	Kelompok Umur	Proyeksi Penduduk Kab. Boalemo (Jiwa)			
		2017	2018	2019	2020
1	0 – 4	15,555	15,852	16,155	16,435
2	5 – 9	15,822	16,145	16,495	16,816
3	10 – 14	14,968	15,190	15,453	15,744
4	15 – 19	14,733	14,833	14,953	15,074
5	20 – 24	13,551	13,801	14,015	14,194
6	25 – 29	13,444	13,928	14,410	14,833
7	30 – 34	12,617	12,931	13,304	13,742
8	35 – 39	12,037	12,186	12,376	12,537
9	40 – 44	11,254	11,519	11,746	11,967
10	45 – 49	9,664	10,073	10,469	10,818
11	50 – 54	7,683	8,095	8,525	8,948
12	55 – 59	5,956	6,277	6,623	6,994
13	60 – 64	4,276	4,528	4,792	5,050
14	65 – 69	3,145	3,342	3,557	3,785
15	70 – 74	1,838	1,976	2,126	2,281
16	75 +	1,790	1,901	2,025	2,158
	<b>Jumlah</b>	<b>158,333</b>	<b>162,577</b>	<b>167,024</b>	<b>171,376</b>

*Sumber : BPS Kab. Boalemo 2017*

Adapun deskripsi penduduk Kabupaten Boalemo pada periode tahun 2011 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20  
Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur dan Rasio Jenis  
Kelamin di Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	141.030	141.547	142.580	142.624	143.259
2	a. Laki - laki (jiwa)	72.114	71.924	73.890	72.779	73.176
3	b. Perempuan (jiwa)	68.916	69.623	71.690	69.845	70.083
4	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	105,00	103,30	103,07	104,20	104,41

*Sumber : BPS Kab. Boalemo 2017*

### 3. Struktur Ketenagakerjaan

Struktur Ketenagakerjaan di Kabupaten Boalemo tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja adalah 64.177 jiwa atau dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 46.064 jiwa, SMA sebanyak 11.793 jiwa dan perguruan tinggi sebanyak 6.260 jiwa. Sedangkan Jumlah pengangguran sebanyak 3.069 jiwa dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 426 jiwa, SMA sebanyak 2.414 jiwa dan perguruan tinggi sebanyak 229 jiwa. Adapun untuk penduduk yang sekolah sebanyak 10.632 jiwa, yang mengurus rumah tangga sebanyak 25.656 jiwa dan lainnya sebanyak 2.083 jiwa. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Boalemo Tahun 2015, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.21

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Boalemo Tahun 2016

No	Jenis Kegiatan	Tingkat Pendidikan (Jiwa)			Jumlah
		≤ SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
1	Bekerja	46,064	11,793	6,260	64,117
2	Pengangguran	426	2,414	229	3,069
3	Sekolah	7,939	2,470	223	10,632
4	Mengurus Rumah Tangga	21,513	3,456	687	25,656
5	Lainnya	1,797	286	-	2,083
<b>Jumlah</b>		<b>77,739</b>	<b>20,419</b>	<b>7,399</b>	<b>105,557</b>

Sumber : BPS Kab. Boalemo 2017

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2015 menunjukkan bahwa pertanian masih merupakan sektor andalan bagi penduduk Boalemo karena sekitar 59,26 % penduduk Boalemo bekerja pada sektor ini. Disusul oleh sektor jasa kemasyarakatan 16,13 %, lainnya 10,31 %, perdagangan 9,04 % dan industri 5,26 %. Turunnya persentase tenaga kerja di sektor pertanian salah satunya disebabkan oleh musim kemarau panjang

#### 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK di Kabupaten Boalemo pada tahun 2015 mencapai 63,65 % atau naik 0,13 % dari tahun 2014, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 67.186 jiwa dan bukan angkatan kerja sebanyak 38.371 jiwa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT Kabupaten Boalemo tahun 2015 naik mencapai 4,57% dengan jumlah bekerja sebanyak 64.117 jiwa dan pengangguran sebanyak 3.069 jiwa. TPT 4,57 % artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) terdapat empat sampai lima orang pengangguran.

Penduduk umur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan utama di Kabupaten Boalemo pada tahun 2015 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.22

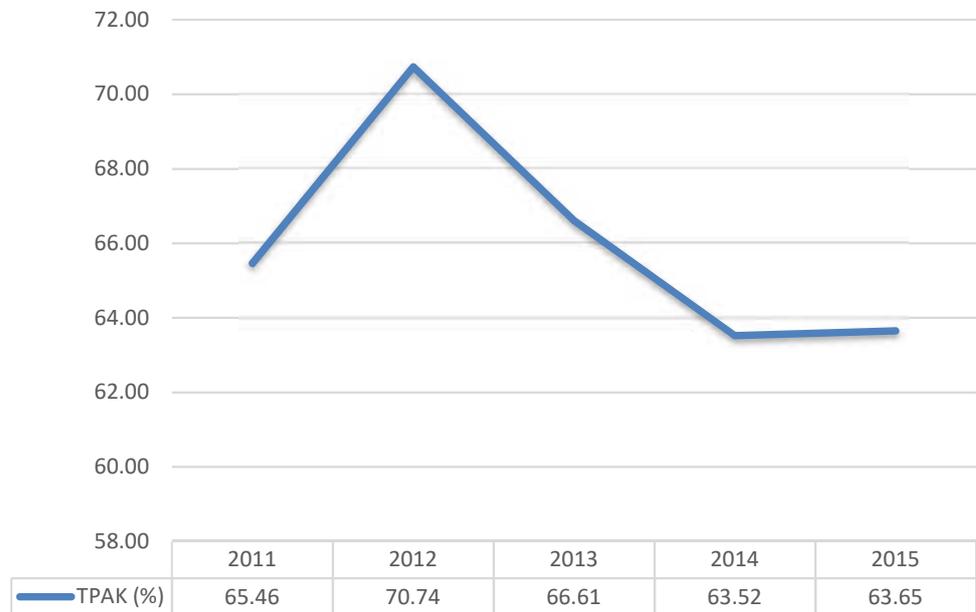
Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama  
di Kabupaten Boalemo Tahun 2014 - 2015

No	Jenis Kegiatan Utama	2014	2015
<b>1</b>	<b>Angkatan Kerja (Jiwa)</b>	<b>64,846</b>	<b>67,186</b>
	1. Bekerja	63,504	64,117
	2. Pengangguran	1,352	3,069
<b>2</b>	<b>Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)</b>	<b>37,243</b>	<b>38,371</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>102,099</b>	<b>105,557</b>
<b>3</b>	<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)</b>	<b>63.52</b>	<b>63.65</b>
<b>4</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	<b>2.08</b>	<b>4.57</b>

Sumber : BPS Kab. Boalemo 2017

Gafik 2.3

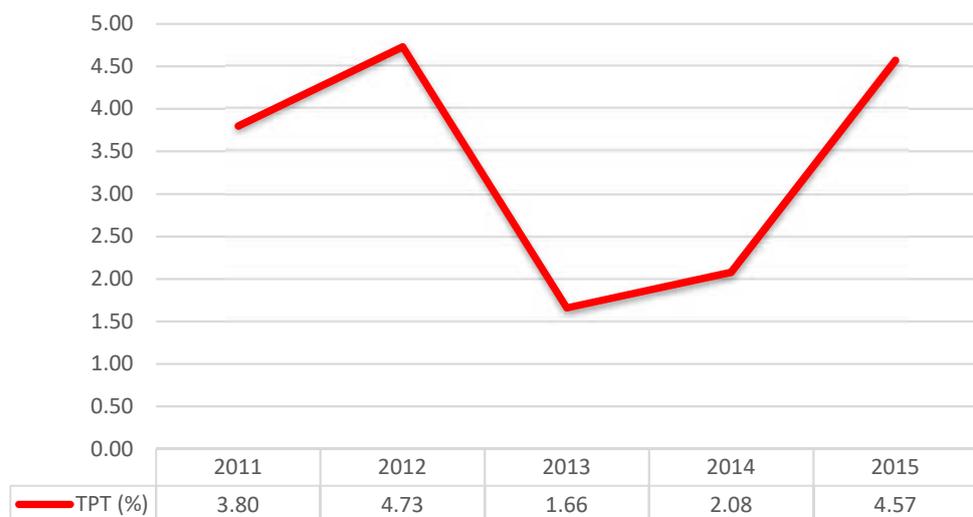
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  
di Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2015



Sumber : BPS Kab. Boalemo 2017

Gafik 2.4

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
di Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2015



Sumber : BPS Kab. Boalemo 2017

## **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan social serta seni budaya dan olah raga.

### **2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

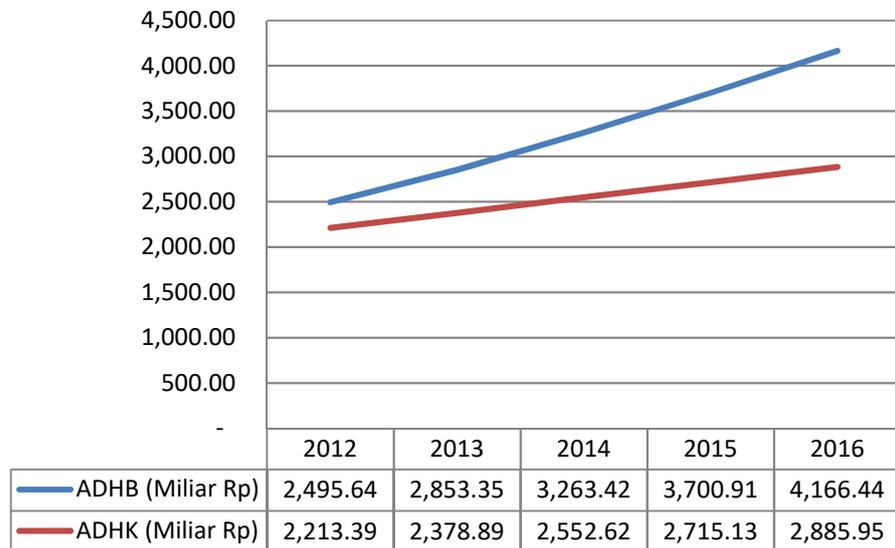
#### **A. Pertumbuhan PDRB**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi makro di suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB dapat memberikan gambaran tentang kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah tersebut. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain: (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) Untuk mengetahui struktur perekonomian; (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB per kapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

Oleh karena itu, kemajuan perekonomian Kabupaten Boalemo dapat dilihat melalui pertumbuhan PDRB. Adapun pertumbuhan PDRB Kabupaten Boalemo tahun 2012 – 2016 dapat dilihat melalui grafik berikut ini :

Grafik 2.5

PDRB Kabupaten Boalemo Tahun 2012 – 2016

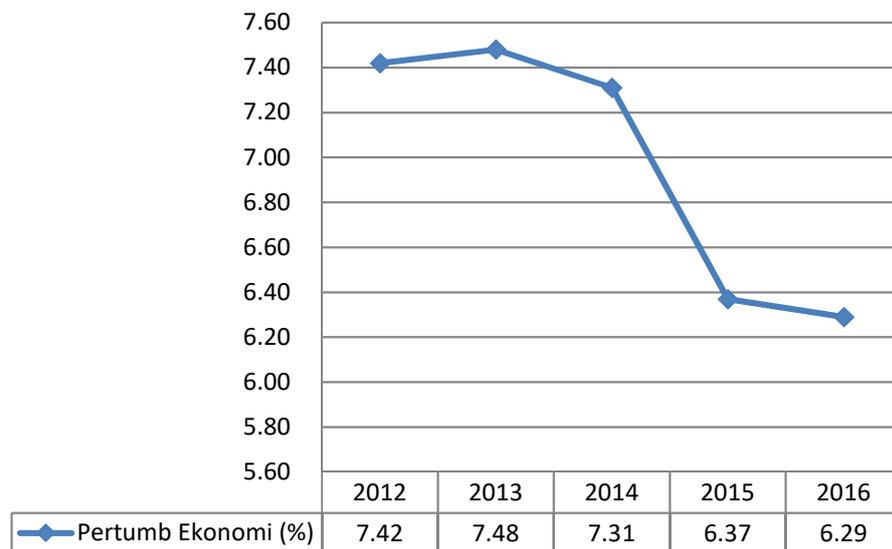


Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2016

Perekonomian Kabupaten Boalemo pada tahun 2016 yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 4.166,44 miliar, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp. 3.700,91 miliar. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan besarnya mencapai Rp. 2.885,95 miliar, meningkat dari tahun 2015 yang sebesar Rp. 2.715,13 miliar.

Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boalemo tahun 2012 – 2016 dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Grafik 2.6  
 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boalemo  
 Tahun 2012 – 2016

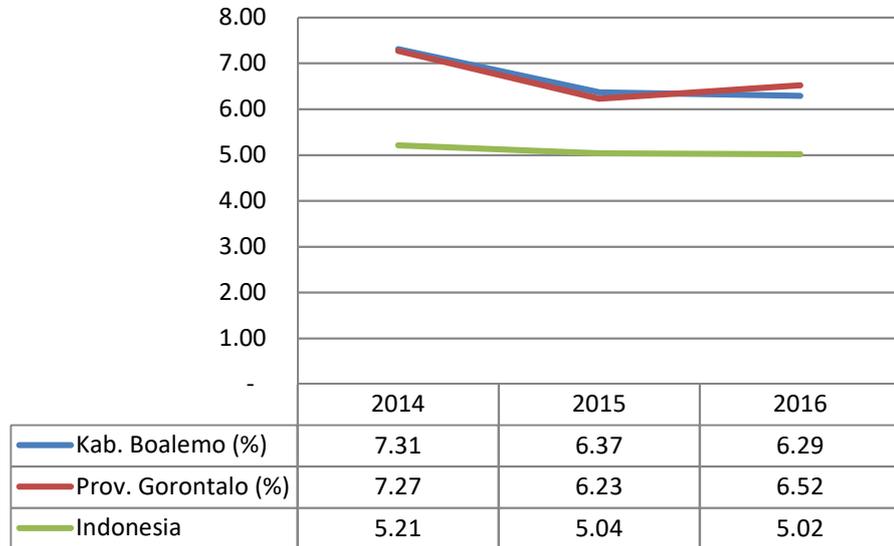


*Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2017*

Berdasarkan grafik diatas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boalemo mulai tahun 2012 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan yaitu dari 7,42% di tahun 2012 dan 7,48% di tahun 2013. Akan tetapi pada tahun 2014 sampai dengan 2016, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yaitu pada tahun 2014 sebesar 7,31%; pada tahun 2015 sebesar 6,37% dan pada tahun 2016 sebesar 6,29%. Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan perekonomian nasional maupun perekonomian provinsi Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam grafik berikut ini :

Grafik 2.7

Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Prov. Gorontalo dan Kab. Boalemo  
Tahun 2014 - 2016



Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2017

Meskipun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boalemo mengalami perlambatan, akan tetapi terjadi kenaikan kinerja ekonomi di setiap sektor. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB Kabupaten Boalemo tahun 2016 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan setiap sektor ekonomi sebagai pembentuk dari PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.23

Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) per Sektor Ekonomi  
Kabupaten Boalemo Tahun 2014 – 2016

SEKTOR EKONOMI		2014	2015	2016
A	Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	1,815,496.91	2,029,026.55	2.276.602,01
B	Pertambangan Dan Penggalian	13,570.61	15,325.97	16.062,01
C	Industri Pengolahan	60,924.84	69,240.27	77.393,58
D	Pengadaan Listrik Dan gas	526.13	476.87	629,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	592.11	651.77	780,98
F	Konstruksi	229,863.58	273,332.15	303.203,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	361,342.36	426,783.32	507.955,98
H	Transportasi Dan pergudangan	73,369.82	85,170.64	96.271,56
I	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	43,911.29	52,506.45	60.231,54
J	Informasi dan Komunikasi	42,527.20	48,031.55	55.295,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	56,584.97	66,552.78	81.277,64
L	Real Estate	39,821.06	46,094.93	52.940,61
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	1,711.40	2,000.10	2.217,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	267,925.53	291,436.76	302.609,28
P	Jasa pendidikan	107,543.64	120,124.03	134.015,60
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan Sosial	103,643.19	123,051.60	141.885,17
R,S,T,U	Jasa Lainnya	44,005.95	51,103.67	57.065,93
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>3,263,360.59</b>	<b>3,700,909.41</b>	<b>4.166.437,33</b>

Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2017

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2015 berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan yaitu semula tahun 2015 sebesar Rp 2,029,026.55 juta menjadi Rp 2.276.602,01 juta pada tahun 2016. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian sejalan dengan program Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kedaulatan pangan antara lain melalui Program Ketahanan Pangan dan Program Pencetakan Sawah Baru. Selain itu, kondisi cuaca yang kondusif serta bantuan sarana dan prasarana perikanan oleh Pemerintah Daerah berdampak pada meningkatnya hasil tangkapan ikan nelayan. Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi yang paling besar terhadap besarnya PDRB di Kabupaten Boalemo. Sedangkan sektor Pengadaan Listrik dan Gas merupakan penyumbang paling kecil terhadap besarnya PDRB di Kabupaten Boalemo. Hal ini disebabkan Kabupaten Boalemo tidak mempunyai Sumber Daya Alam yang mendukung terhadap sektor tersebut. Sedangkan sektor Konstruksi mempunyai nilai pertumbuhan yang paling tinggi, hal ini dikarenakan banyaknya pembangunan di Kabupaten Boalemo seperti jalan, jembatan, dan fasilitas penunjang ekonomi lainnya.

Pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih memberikan kontribusi yang paling besar terhadap besarnya PDRB. Sektor ini mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.441.425,25 juta dan pada tahun 2016 sebesar Rp 1.515.382,09 juta. Sedangkan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang memberikan kontribusi yang paling kecil terhadap besarnya PDRB yaitu, pada tahun 2015 sebesar Rp 479,09 juta dan pada tahun 2016 sebesar Rp 540,51 juta. Berikut tabel PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Boalemo Tahun 2014 - 2016.

Tabel 2.24  
 Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) per Sektor  
 Ekonomi Kabupaten Boalemo Tahun 2014 – 2016

SEKTOR EKONOMI		2014	2015	2016
A	Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	1,378,947.56	1,441,425.25	1.515.382,09
B	Pertambangan Dan Penggalian	12,123.49	12,916.04	13.271,29
C	Industri Pengolahan	49,009.66	51,532.73	54.564,00
D	Pengadaan Listrik Dan gas	670.01	705.91	816,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	466.55	479.09	540,51
F	Konstruksi	175,198.46	193,510.64	208.391,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	277,266.47	299,487.12	334.990,56
H	Transportasi Dan pergudangan	60,184.89	66,347.07	72.005,51
I	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	30,715.58	33,668.84	36.682,82
J	Informasi Dan Komunikasi	37,986.43	41,705.70	45.676,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	44,484.96	49,838.63	59.029,78
L	Real Estate	33,432.92	36,206.01	39.151,65
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	1,444.38	1,538.81	1.610,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	231,933.51	245,734.49	245.829,92
P	Jasa pendidikan	92,342.90	100,286.44	105.892,28
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan Sosial	88,027.39	98,363.09	107.980,76
R,S,T,U	Jasa Lainnya	38,370.38	41,385.10	44.135,57
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>2,552,605.54</b>	<b>2,715,130.96</b>	<b>2.885.951,71</b>

*Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2017*

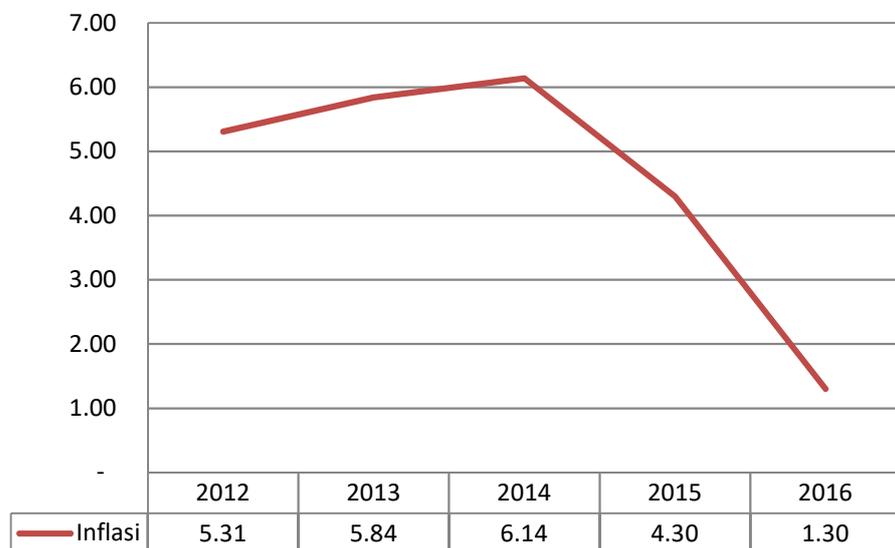
#### B. Laju Inflasi

Salah salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang

dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Boalemo sama dengan tingkat inflasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Adapun deskripsi inflasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo taun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 2.8

Inflasi Provinsi Provinsi Gorontalo, 2012 - 2016



Sumber : BPS Prov. Gorontalo, 2017

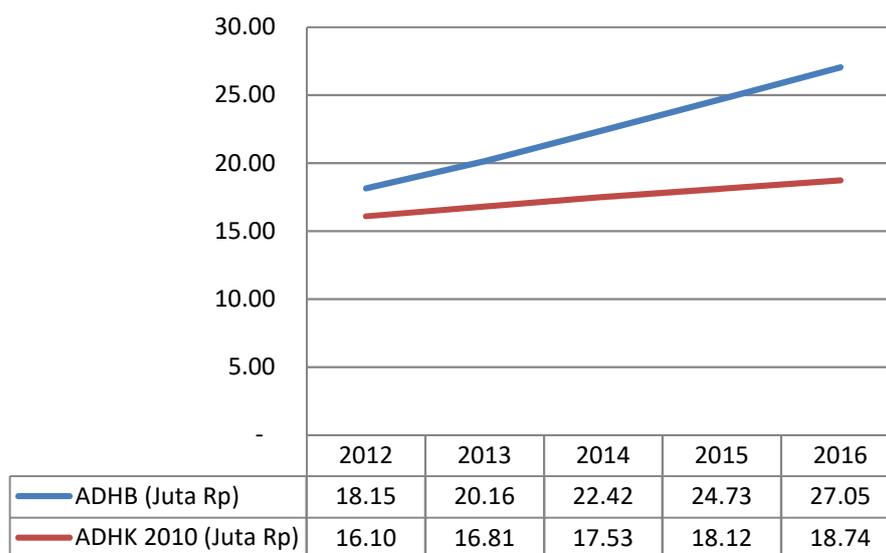
Berdasarkan tabel diatas, inflasi di Provinsi Gorontalo tahun 2012 – 2015 mengalami pola fluktuasi. Tingkat inflasi paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,14 %. Hal tersebut diakibatkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak serta beberapa bahan pokok lainnya di pasar. Sedangkan tingkat inflasi paling kecil terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,30 %.

### C. PDRB Perkapita

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah adalah PDRB Perkapita. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Adapun gambaran mengenai perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Boalemo tahun 2012 – 2015 adalah sebagai berikut :

Grafik 2.9

PDRB per Kapita Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2016



Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2017

Dalam kurun waktu 2012 – 2015 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, PDRB per kapita Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 24.420.000,00 dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 26.920.000,00. Begitu juga dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan, dalam kurun waktu 2012 – 2015 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 PDRB

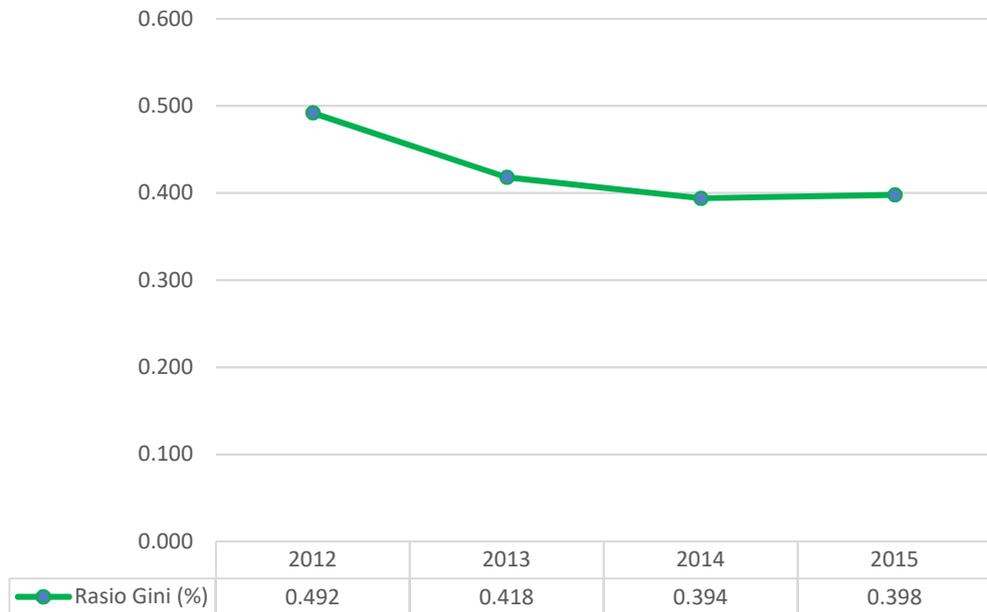
per kapita kabupaten Boalemo sebesar Rp. 18.030.000,00 dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 18.650.000,00.

#### D. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusi diantara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang mempunyai jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Penghitungan rasio gini pada publikasi ini dilakukan dengan cara mengurutkan penduduk berdasarkan pengeluaran dari terkecil hingga terbesar. Selanjutnya penduduk dibagi menjadi 10 bagian (desil). Rasio Gini Kabupaten Boalemo tahun 2012 – 2015 dapat dilihat pada Grafik berikut ini :

Grafik 2.10

Rasio Gini Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2015



Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2016

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan indeks gini Kabupaten Boalemo terlihat kecenderungan tren menurun dari tahun 2012 sampai tahun 2014 dari 0,492 menjadi 0,394, hal ini bagus karena berarti hasil-hasil pembangunan makin merata dirasakan penduduk. Namun pada tahun 2015 terjadi kenaikan rasio gini menjadi 0,398 walau tidak signifikan, hal ini bisa dikarenakan dampak lain kenaikan harga BBM. Nilai rasio gini Kabupaten Boalemo tahun 2015 masih tergolong sedang.

#### E. Tingkat Kemiskinan

Dalam rangka pengentaskan kemiskinan pasti tidak akan lepas dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator utama dalam melihat besarnya kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah banyaknya penduduk miskin. Secara konseptual, kemiskinan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Kemiskinan Relatif dan

Kemiskinan Absolut. Perbedaan antara keduanya tersebut terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun nonmakanan. Standar kehidupan minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimal non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (Garis Kemiskinan Non Makanan).

Tabel 2.25

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin,  $P_1$ ,  $P_2$  dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Boalemo Tahun 2014 - 2016

No	Indikator	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	30.500	32.190	32.290
2	$P_0$ (Persentase Penduduk Miskin)	20,79 %	21,67 %	21.11%
3	$P_1$ (Indekas Kedalaman Kemiskinan)	4,24	4,77	
4	$P_2$ (Indeks Keparahan Kemiskinan)	1,31	1,45	
5	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	292.557	309.227	332.297

Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2017

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa Penduduk miskin Kabupaten Boalemo pada tahun 2016 berjumlah 32.290 orang atau 21,11 %, jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan penduduk miskin pada 2015 yang berjumlah 32.190 orang atau 21,67%. Kenaikan penduduk miskin ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat dalam menaikkan harga BBM. Imbas kenaikan harga BBM tentu memiliki dampak rantai terhadap kenaikan harga komoditas lainnya. Hal inilah yang membuat inflasi tinggi dan daya beli masyarakat menurun.

Selain dari jumlah penduduk miskin yang meningkat, indeks kedalaman kemiskinan juga meningkat dari 4,24 pada September 2014 menjadi 4,77 pada maret 2015. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin rata-rata pengeluarannya makin menjauh ke bawah dari garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan juga menunjukkan hal yang sama mengalami peningkatan dari September 2014 sebesar 1,31 menjadi 1,45 pada maret 2015. Hal ini menunjukkan gap antar penduduk miskin makin melebar.

### **2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

#### **A. Aspek Pendidikan**

Salah satu faktor penting yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga akan berdampak pula terhadap kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan social dari aspek pendidikan diukur melalui beberapa indikator, diantaranya meliputi Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Rata-rata Lama Sekolah serta Tingkat Kelulusan.

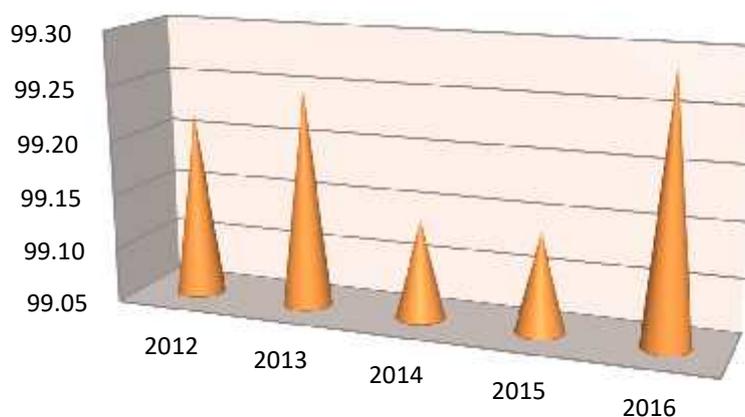
## 1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Dalam perencanaan pembangunan wilayah, AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana masyarakat di suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Grafik 2.11

Angka Melek Huruf di Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2016



	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Melek Huruf (%)	99.22	99.25	99.14	99.14	99.29

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Boalemo, 2017

Berdasarkan Grafik diatas, Angka Melek Huruf di Kabupaten Boalemo mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 Angka melek Huruf di Kabupaten Boalemo sebesar 99,22%, pada tahun 2013

sebesar 99,25%, pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 99,14, serta tahun 2016 sebesar 99,29%.

## 2. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Tabel 2.26  
Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2015 - 2016

No	Kelompok Umur	APS (%)	
		2015	2016
1	7 – 12 Tahun	99,24	99,63
2	13 – 15 Tahun	88,97	86,85
3	16 – 18 Tahun	58,64	66,68
4	19 – 24 Tahun	18,23	29,10

*Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Boalemo, 2017*

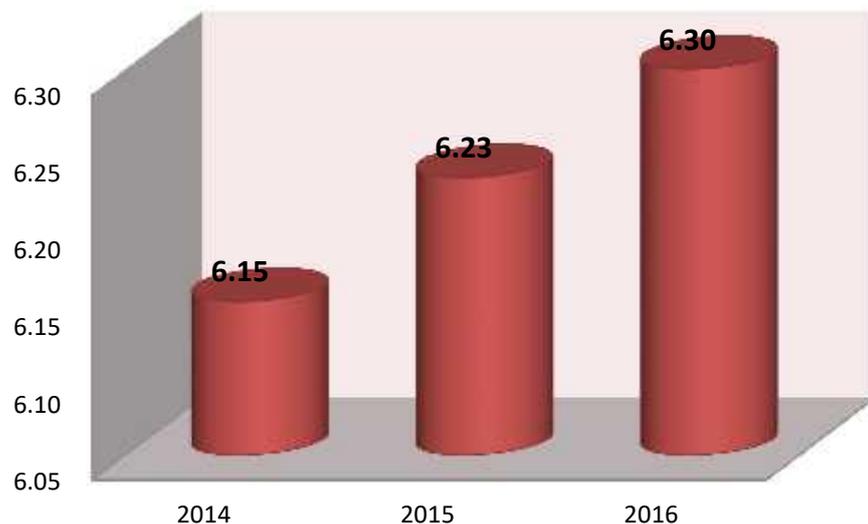
Berdasarkan tabel diatas, APS Boalemo pada tahun 2016 mengalami kenaikan di semua kelompok umur. Pada kelompok umur 7 - 12 tahun, penduduk yang aktif mengikuti pendidikan di sekolah sebesar 99,63 %. Sedangkan pada kelompok umur 13 – 15 tahun, penduduk yang aktif sekolah sebesar 86,85 %. Selanjutnya untuk Kelompok umur 16 – 18 tahun dan 19 - 24 tahun masing-masing yang bersekolah hanya 66,68% dan 29,10%.

### 3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal merujuk pada standar UNDP. Kegunaan informasi RLS adalah untuk mengetahui kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya RLS menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi pula jenjang pendidikan yang ditamatkan. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Grafik 2.12

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Boalemo Tahun 2014 - 2016



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Boalemo, 2017

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 RLS di Kabupaten Boalemo adalah 6,15 tahun, tahun 2015 adalah 6,23 tahun dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 6,30 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap penduduk Boalemo mengenyam pendidikan selama sekitar 6 tahun atau sampai dengan kelas 6 SD. Banyak faktor yang jadi penyebab dari ketidak tercapaiannya RLS 12 tahun, antara lain persepsi masyarakat tentang pendidikan yang dianggap belum menjanjikan, serta mahalny biaya pendidikan.

## B. Aspek Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan modal utama bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas secara optimal sehingga dapat menciptakan produktivitas yang tinggi sehingga dapat menciptakan pembangunan yang lebih berkualitas. Aspek kesehatan terdiri dari Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Harapan Hidup, dan Balita Gizi Buruk.

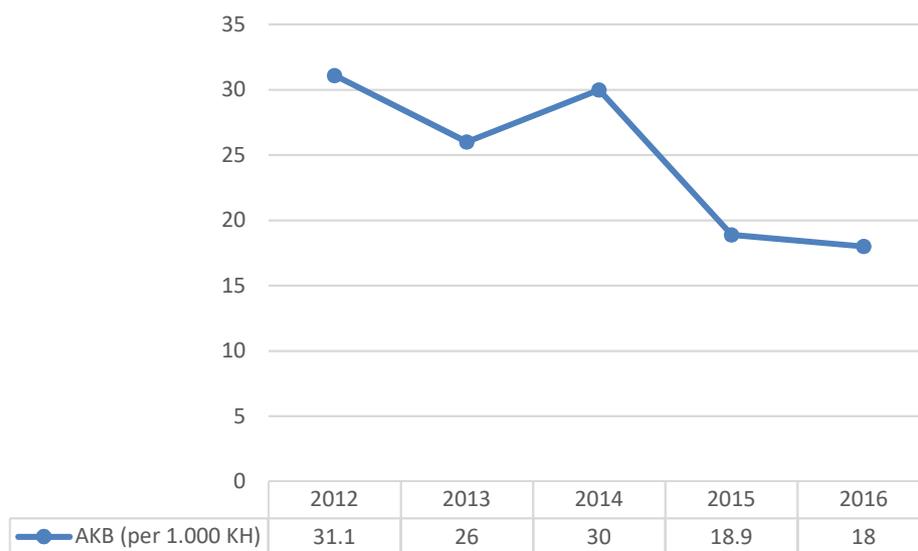
### 1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, AKB merupakan tolak ukur yang sensitive dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di

bidang kesehatan. Gambaran perkembangan AKB di Kabupaten Boalemo dari tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 2.13

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Boalemo, 2017

Berdasarkan grafik diatas, AKB di Kabupaten Boalemo dari tahun 2012 – 2015 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 AKB di Kabupaten Boalemo sebesar 31,1/1000 KH, pada tahun 2013 sebesar 26/1000 KH; pada tahun 2014 sebesar 30/1000 KH dan pada tahun 2015 sebesar 18,9/1000 KH, serta pada tahun 2016 sebesar 18/1000 KH. AKB di Kabupaten Boalemo disebabkan beberapa factor, diantaranya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), Gangguan Fungsi Multi Organ, Bronkopneomoni, Gizi Buruk, Asfiksia, Kelainan Kongenital, Tetanus Neonatorum, Infeksi, dan Trauma Lahir.

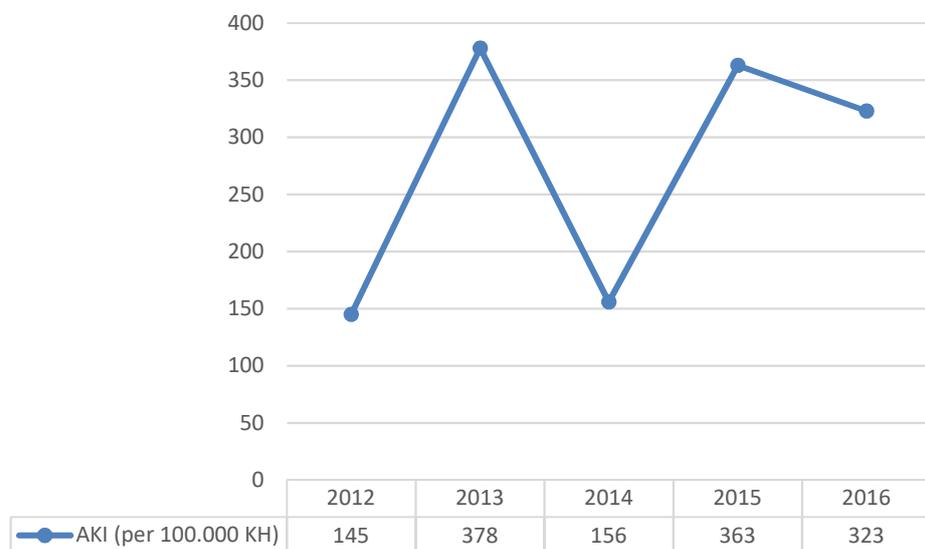
## 2. Angka Kematian Ibu Hamil

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil serta pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Gambaran perkembangan angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Boalemo dari tahun 2012 – 2015 adalah sebagai berikut :

Grafik 2.14

### Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Boalemo

Tahun 2012 - 2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Boalemo, 2017

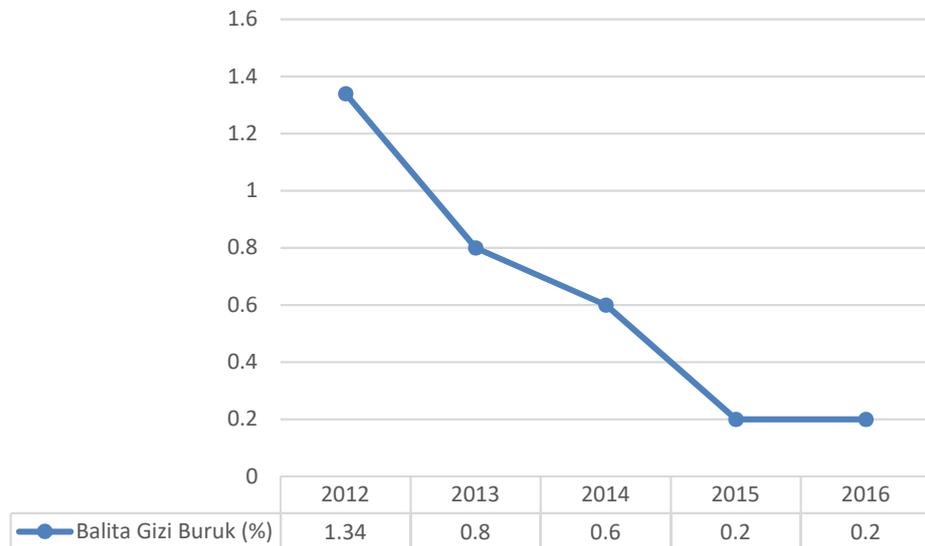
Berdasarkan grafik diatas, AKI di Kabupaten Boalemo dari tahun 2012 – 2015 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 AKI di Kabupaten Boalemo sebesar 145/100.000 KH, pada tahun 2013 sebesar 378/100.000 KH; pada tahun 2014 sebesar 156/100.000

KH dan pada tahun 2015 sebesar 363/100.000 KH, serta pada tahun 2016 sebesar 323/100.000 KH. Penyebab Kematian Ibu Melahirkan diantaranya yaitu Penyebab langsung seperti Eklamsi, pendarahan, HEG, Infeksi dan adanya penyakit penyerta. Sedangkan penyebab tidak langsung seperti 4 TERLALU melahirkan (terlalu muda, terlalu dekat, terlalu tua dan terlalu banyak) dan 3 TERLAMBAT (terlambat memutuskan, terlambat mencapai tempat pelayanan kesehatan dan terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan). Disamping itu faktor lain yang menyebabkan AKI meningkat pada tahun 2015 adalah tidak tersedianya lagi dana Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) dari Kementerian Kesehatan yang khusus diperuntukkan untuk membiayai persalinan bagi masyarakat ekonomi dibawah (masyarakat miskin).

### 3. Balita Gizi Buruk

Jumlah Balita dengan status gizi buruk dihitung berdasarkan berat badan balita dibandingkan dengan tinggi badan balita (BB/TB). Status gizi buruk pada balita dapat menimbulkan pengaruh pertumbuhan fisik dan mental maupun kemampuan berfikir sehingga pada akhirnya akan menurunkan kualitas sumber daya manusia. Gambaran perkembangan angka balita dengan status gizi buruk di Kabupaten Boalemo tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

**Grafik 2.15**  
**Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Boalemo**  
**Tahun 2012 - 2016**



*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Boalemo, 2017*

Berdasarkan grafik diatas, persentase balita gizi buruk di Kabupaten Boalemo dalam rentang waktu tahun 2012 – 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2012, persentase balita gizi buruk di Kabupaten Boalemo sebesar 1,34 %, pada tahun 2013 sebesar 0,8 %, pada tahun 2014 sebesar 0,6 % serta pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 0,2 %. Penurunan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Boalemo disebabkan oleh keterlibatan lintas sektor dan peran aktif

Tim Penggerak PKK mulai dari tingkat Kabupaten hingga ke tingkat Desa serta tersedianya fasilitas gedung TFC yang berfungsi untuk perawata bagi balita gizi buruk.

### C. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan

melalui pengukuran angka harapan hidup (AHH), pendidikan melalui pengukuran angka harapan lama sekolah (AHH) dan rata-rata lama sekolah (RLS), serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita

Tabel 2. 27  
Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Boalemo  
Tahun 2012 – 2016

Uraian	2103	2014	2015	2016
IPM	61.71	62.18	62.86	63.42

Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2017

Pada tahun 2016, Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Boalemo adalah 67,67 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,34 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 6,30 tahun dan Pengeluaran Perkapita sebesar Rp. 7.895.000,00

### 2.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

##### 1. Pendidikan

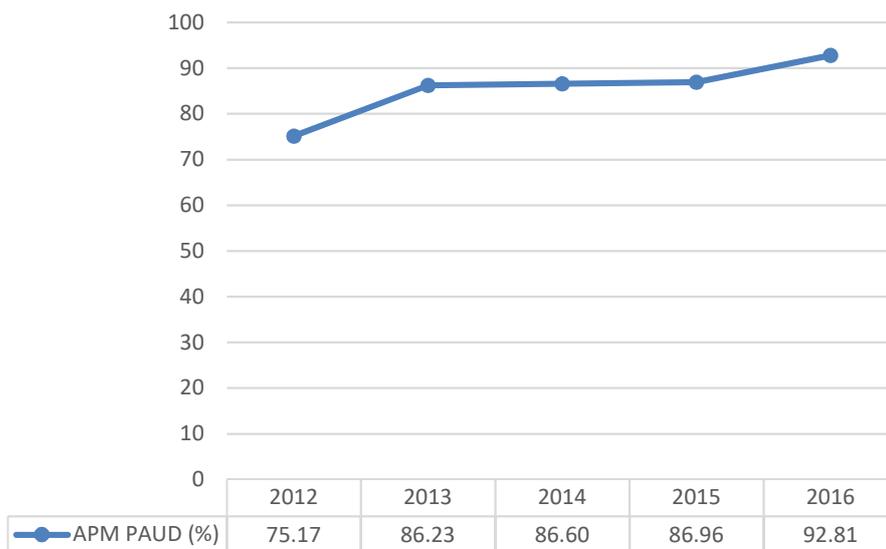
##### a. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun.

## 1) Angka Partisipasi Murni PAUD

Grafik 2.16

Angka Partisipasi Murni PAUD di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2012 - 2016



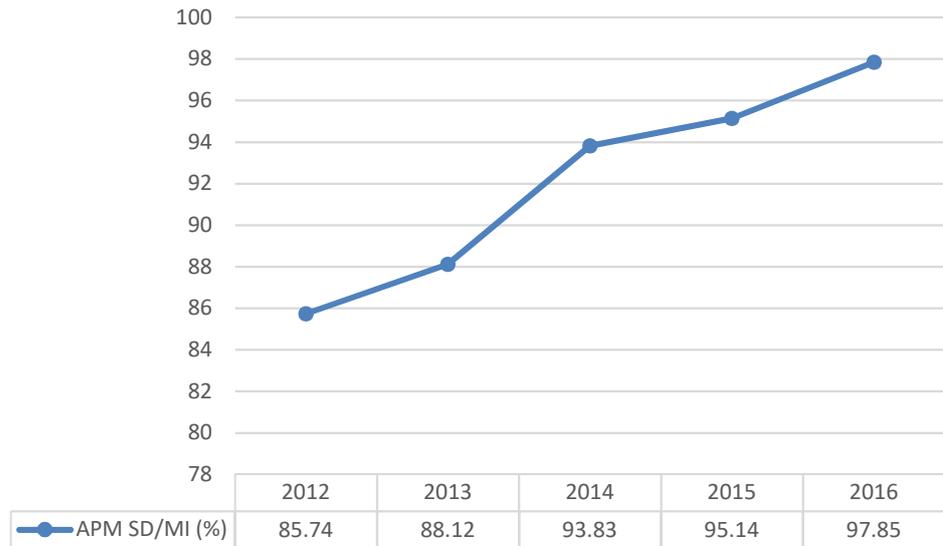
*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Boalemo, 2017*

Berdasarkan grafik diatas, angka partisipasi murni PAUD di Kabupaten Boalemo selama kurun waktu tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, angka partisipasi murni PAUD di Kabupaten Boalemo sebesar 75,17 %, pada tahun 2013 sebesar 86,23 %, pada tahun 2014 sebesar 86,60 % dan pada tahun 2015 sebesar 86,96 % serta pada tahun 2016 meningkat sebesar 92,81%.

## 2) Angka Partisipasi Murni SD/MI

Grafik 2.17

Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2012 - 2016



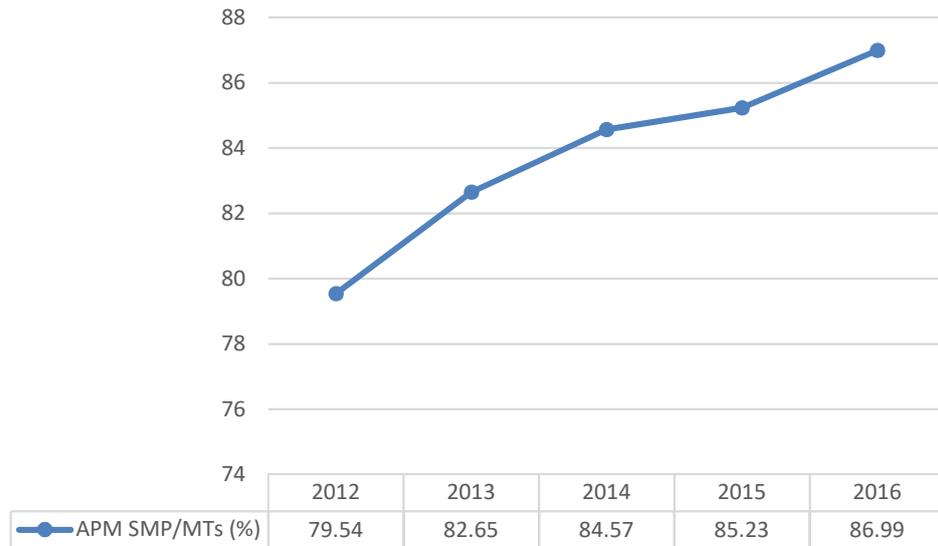
*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Boalemo, 2017*

Berdasarkan grafik diatas, angka partisipasi murni SD/MI di Kabupaten Boalemo selama kurun waktu tahun 2012 – 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, angka partisipasi murni SD/MI di Kabupaten Boalemo sebesar 85,74 %, pada tahun 2013 sebesar 88,12 %, pada tahun 2014 sebesar 93,83 % dan pada tahun 2015 sebesar 95,14 % serta pada tahu 2016 meningkat sebesar 97,85%.

### 3) Angka Partisipasi Murni SMP/MTS

Grafik 2.18

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2012 - 2016



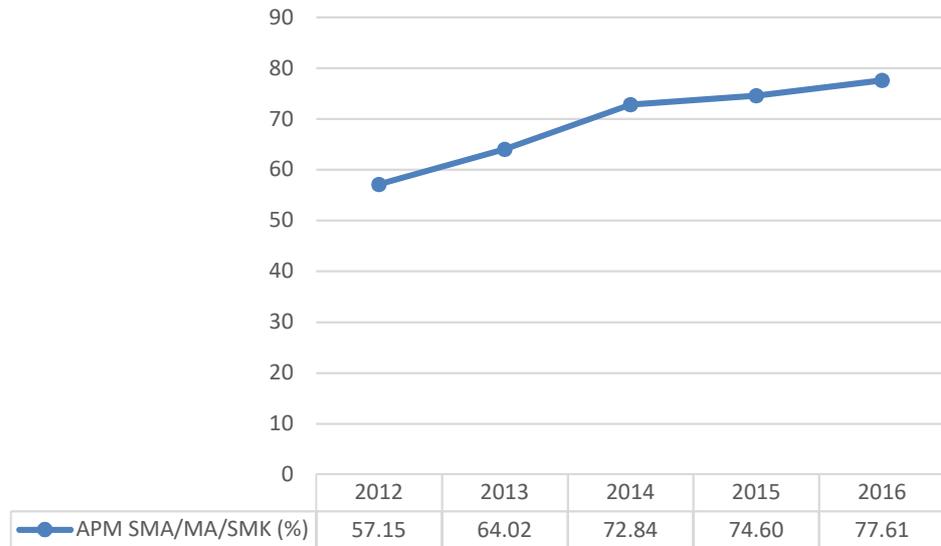
*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Boalemo, 2017*

Berdasarkan grafik diatas, angka partisipasi murni SMP/MTs di Kabupaten Boalemo selama kurun waktu tahun 2012 – 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, angka partisipasi murni SMP/MTs di Kabupaten Boalemo sebesar 79,54 %, pada tahun 2013 sebesar 82,65 %, pada tahun 2014 sebesar 84,57 % dan pada tahun 2015 sebesar 85,23 % serta pada tahun 2016 meningkat sebesar 86,99%.

#### 4) Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA

Grafik 2.19

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2012 - 2016



*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Boalemo, 2017*

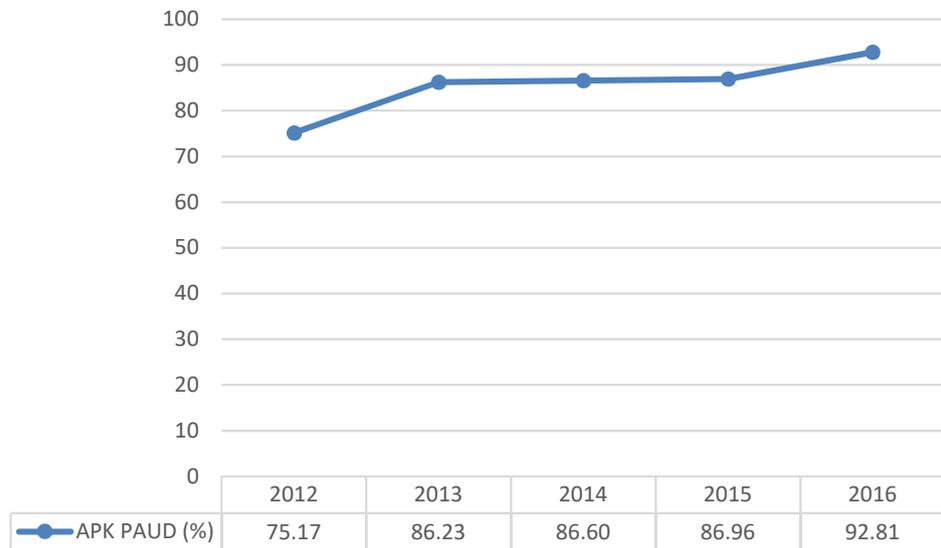
Berdasarkan grafik diatas, angka partisipasi murni SMA/MA/SMK di Kabupaten Boalemo selama kurun waktu tahun 2012 – 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, angka partisipasi murni SMA/MA/SMK di Kabupaten Boalemo sebesar 57,15 %, pada tahun 2013 sebesar 64,02 %, pada tahun 2014 sebesar 72,84 % dan pada tahun 2015 sebesar 74,60 %, serta pada tahun 2016 meningkat sebesar 77,61%.

#### b. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan jumlah seluruh siswa pada setiap jenjang pendidikan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun

##### 1) Angka Partisipasi Kasar PAUD

**Grafik 2.20**  
**Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kabupaten Boalemo**  
**Tahun 2012 - 2016**



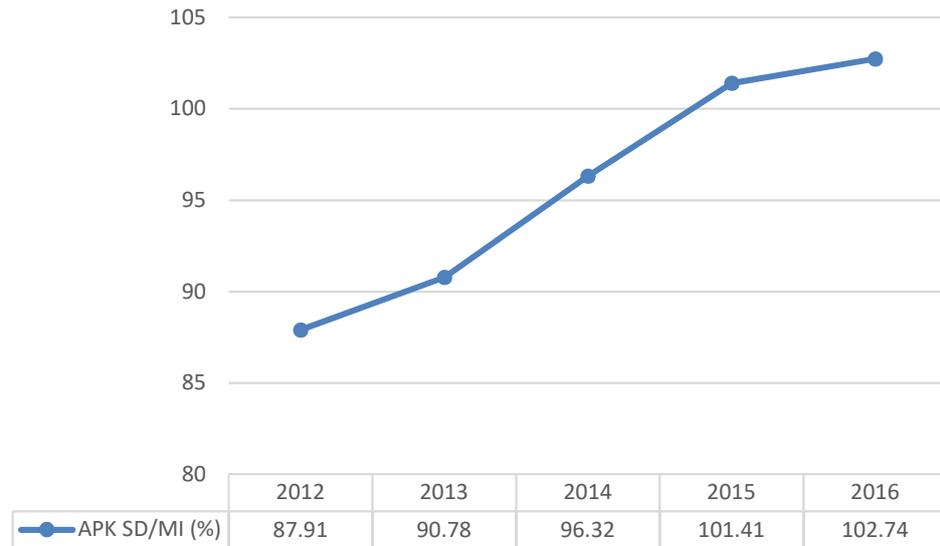
*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Boalemo, 2017*

Berdasarkan grafik diatas, angka partisipasi kasar PAUD di Kabupaten Boalemo selama kurun waktu tahun 2012 – 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, angka partisipasi kasar PAUD di Kabupaten Boalemo sebesar 75,17 %, pada tahun 2013 sebesar 86,23 %, pada tahun 2014 sebesar 86,60 % dan pada tahun 2015 sebesar 86,96 % serta pada tahun 2016 meningkat sebesar 92,81%.

## 2) Angka Partisipasi Kasar SD/MI

Grafik 2.21

Angka Partisipasi Kasar SD/MI di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2012 - 2016



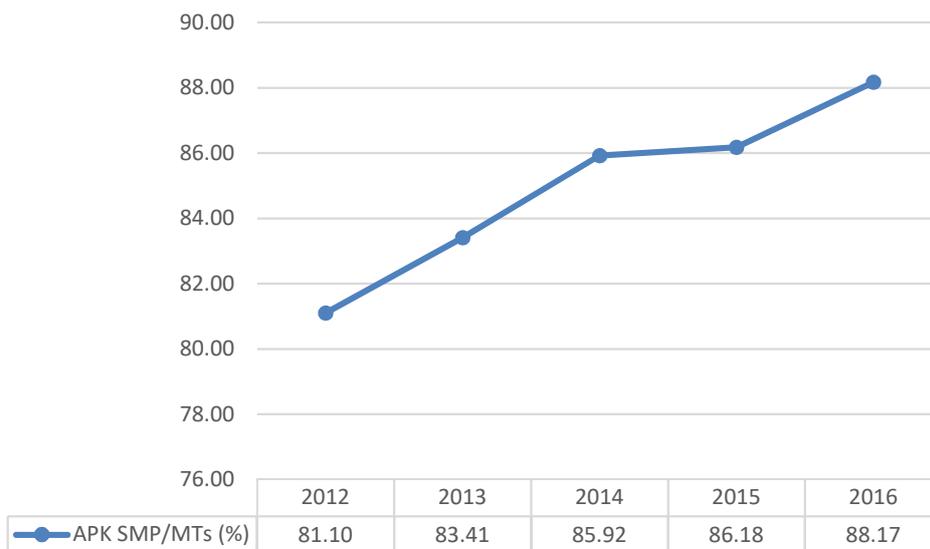
*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Boalemo, 2017*

Berdasarkan grafik diatas, angka partisipasi kasar SD/MI di Kabupaten Boalemo selama kurun waktu tahun 2012 – 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, angka partisipasi kasar SD/MI di Kabupaten Boalemo sebesar 87,91 %, pada tahun 2013 sebesar 90,78 %, pada tahun 2014 sebesar 96,32 % dan pada tahun 2015 sebesar 101,41 % serta pada tahun 2016 meningkat sebesar 102,74%.

### 3) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs

Grafik 2.22

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2012 - 2016



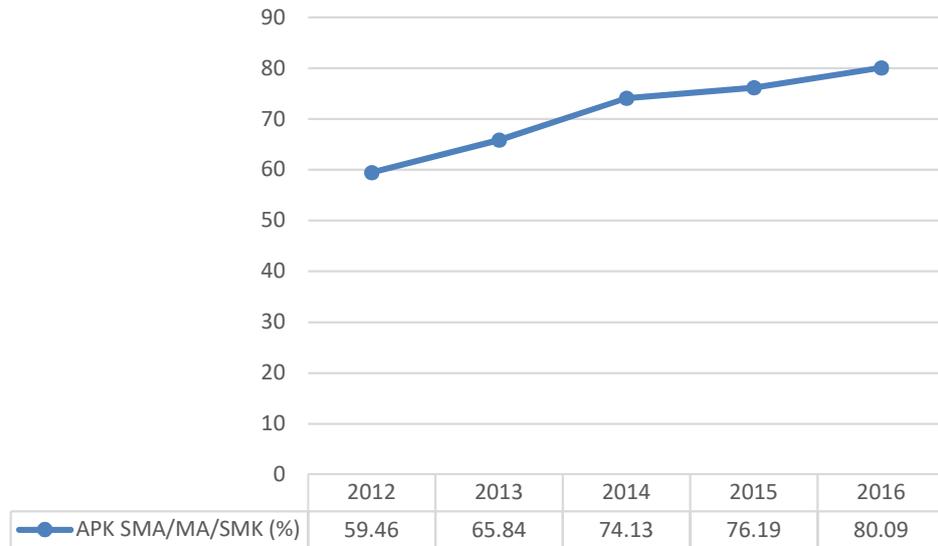
*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Boalemo, 2017*

Berdasarkan grafik diatas, angka partisipasi kasar SMP/MTs di Kabupaten Boalemo selama kurun waktu tahun 2012 – 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, angka partisipasi kasar SMP/MTs di Kabupaten Boalemo sebesar 81,10%, pada tahun 2013 sebesar 83,4%, pada tahun 2014 sebesar 85,92% dan pada tahun 2015 sebesar 86,18 %, serta pada tahun 2017 meningkat sebesar 88,17%.

#### 4) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA

Grafik 2.23

Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA  
di Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2016



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Boalemo, 2017

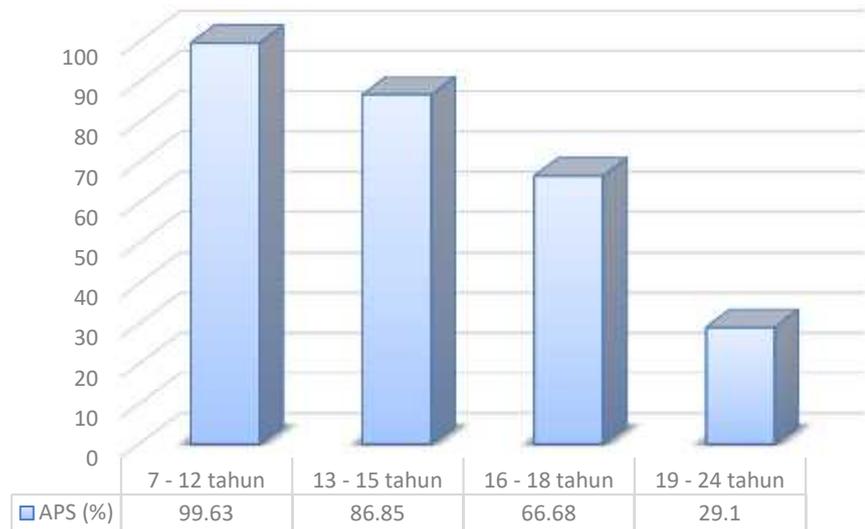
Berdasarkan grafik diatas, angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK di Kabupaten Boalemo selama kurun waktu tahun 2012 – 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK di Kabupaten Boalemo sebesar 59,46 %, pada tahun 2013 sebesar 65,84 %, pada tahun 2014 sebesar 74,13 % dan pada tahun 2015 sebesar 76,19 %, serta pada tahun 2016 meningkat sebesar 80,09%.

#### c. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.

Grafik 2.24

Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Boalemo Tahun 2016



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Boalemo, 2017

Berdasarkan grafik diatas, pada kelompok umur 7 - 12 tahun, penduduk yang aktif mengikuti pendidikan di sekolah sebesar 99,63%. Sedangkan pada kelompok umur 13 – 15 tahun, penduduk yang aktif sekolah sebesar 86,85%. Selanjutnya untuk Kelompok umur 16 – 18 tahun dan 19 - 24 tahun masing-masing yang bersekolah hanya 66,68% dan 29,21%.

d. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan merupakan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir. Data perkembangan angka kelulusan Kabupaten Boalemo tahun 2012 – 2016 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.28  
Tingkat Kelulusan Siswa pada Setiap Jenjang Pendidikan di  
Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Uraian	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
1	2012	Jumlah Peserta	2.796	1.949	842	562
		Tidak Lulus	0	0	0	0
		%	100 %	100%	100%	100%
2	2013	Jumlah Peserta	2.747	1.926	704	669
		Tidak Lulus	0	0	0	0
		%	100,%	100%	100%	100%
3	2014	Jumlah Peserta	2.689	1.988	968	565
		Tidak Lulus	0	0	0	0
		%	100%	100%	100%	100%
4	2015	Jumlah Peserta	2.905	2.374	997	637
		Tidak Lulus	0	0	0	0
		%	100%	100%	100%	100%
5	2016	Jumlah Peserta	3.073	2.287	958	640
		Tidak Lulus	0	0	0	0
		%	100%	100%	100%	100%

*Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Boalemo, 2017*

Berdasarkan tabel diatas, tingkat kelulusan dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Kabupaten Boalemo dari tahun 2012 – 2016 mencapai 100 %.

e. Kompetensi Guru

Kompetensi guru merupakan jumlah guru yang memenuhi standar kompetensi akademik dibandingkan jumlah seluruh guru pada setiap jenjang pendidikan. Deskripsi tentang tingkat kompetensi guru pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Boalemo dalam rentang 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.29  
Standar Kompetensi Akademik Lulus pada Setiap Jenjang  
Pendidikan di Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	PAUD	27	61	61	61	70
2	SD/MI	493	507	741	752	759
3	SMP/MTs	315	317	329	353	434
4	SMA/MA/SMK	282	284	340	341	312

*Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Boalemo, 2017*

f. Jumlah Sekolah, Murid dan Guru

Jumlah sekolah, murid dan guru sangat mempengaruhi kualitas tingkat pendidikan di Kabupaten Boalemo. Tabel berikut ini merupakan deskripsi jumlah sekola, murid dan guru pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Boalemo tahun 2016.

Tabel 2. 30  
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru pada Setiap  
Jenjang Pendidikan di Kabupaten Boalemo Tahun 2016

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru
1	SD	133	22.624	1.226	18,45
2	MI	13	1.257	143	8,79
3	SMP	53	7.189	745	9,65
4	MTs	8	1.596	125	12,77
5	SMA	9	4.212	258	16,33
6	MA	5	570	60	9,50
7	SMK	10	2.988	253	11,81

*Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Boalemo, 2017*

## 2. Kesehatan

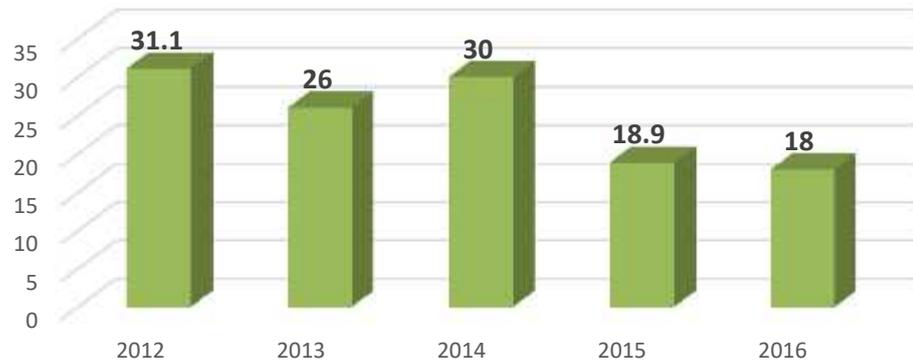
Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah derajat kesehatan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan urusan kesehatan antara lain untuk meningkatkan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan kesadaran keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, balita, dan usia produktif, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

### a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) merupakan jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup ini menggambarkan jumlah kematian bayi pada setiap 1.000 kelahiran. Gambaran perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Boalemo dari tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 2.25

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2016



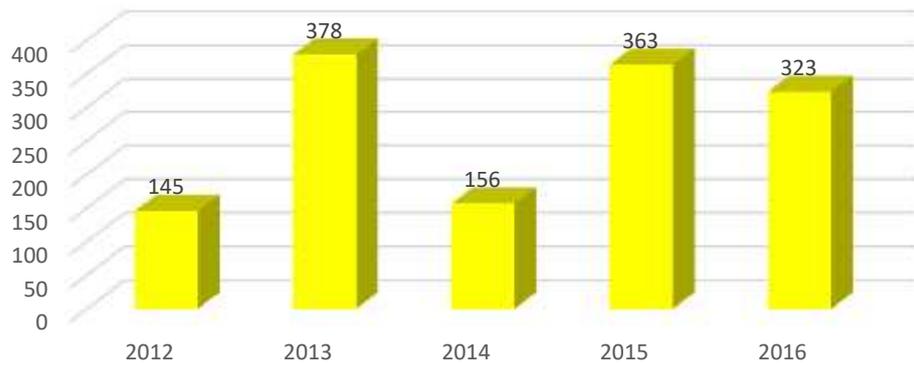
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Boalemo, 2017

Berdasarkan grafik diatas, AKB di Kabupaten Boalemo dari tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012, AKB di Kabupaten Boalemo sebesar 31,1/1.000 KH, tahun 2013 sebesar 26/1.000 KH, tahun 2014 sebesar 30/1.000 KH, tahun 2015 sebesar 18,9 1.000 KH dan tahun 2016 sebesar 18/1.000 KH.

b. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) melahirkan per 100.000 persalinan hidup menggambarkan jumlah kematian ibu melahirkan pada setiap 100.000 kelahiran. Gambaran perkembangan angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Boalemo dari tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 2.26  
Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2012 - 2016



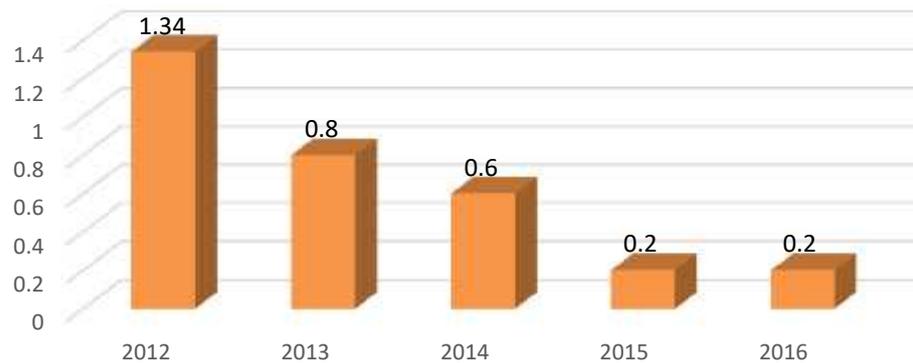
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Boalemo, 2017

Berdasarkan grafik diatas, AKI di Kabupaten Boalemo dari tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012, AKI di Kabupaten Boalemo sebesar 145/100.000 KH, tahun 2013 sebesar 378/100.000 KH, tahun 2014 sebesar 156/100.000 KH, tahun 2015 sebesar 363/100.000 KH dan tahun 2016 sebesar 323/100.000 KH.

c. Balita Gizi Buruk

Jumlah Balita dengan status gizi buruk dihitung berdasarkan berat badan balita dibandingkan dengan tinggi badan balita (BB/TB). Gambaran perkembangan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Boalemo dari tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 2.27  
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2012 - 2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Boalemo, 2017

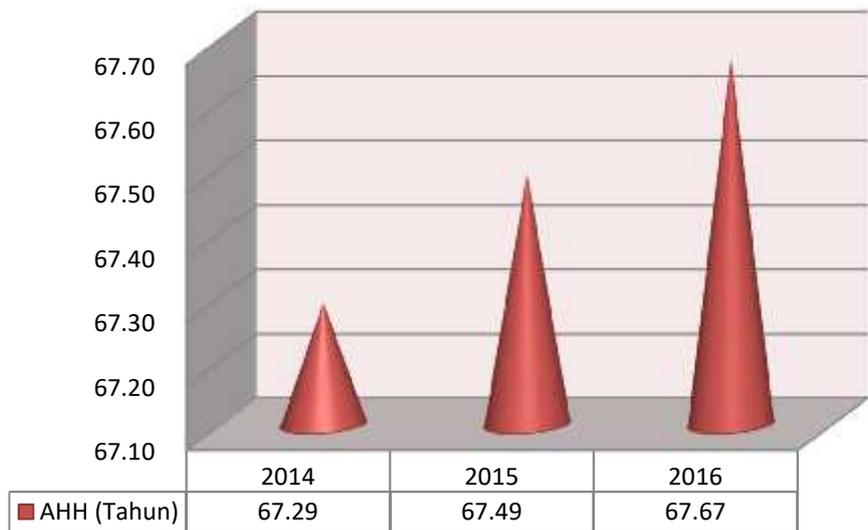
Berdasarkan grafik diatas, jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Boalemo dari tahun 2012 – 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2012, jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Boalemo sebesar 1,34 %, tahun 2013 sebesar 0,8 %, tahun 2014 sebesar 0,6 %, tahun 2015 dan 2016 sebesar 0,2 %.

d. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan

program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Besarnya AHH di Kabupaten Boalemo dari tahun 2014 – 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.28  
 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Boalemo  
 Tahun 2014 - 2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Boalemo, 2017

Berdasarkan grafik diatas, AHH di Kabupaten Boalemo dari tahun 2014 – 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, AHH di Kabupaten Boalemo sebesar 67,29 tahun dan tahun 2015 sebesar 67,49 tahun serta pada tahun 2016 meningkat sebesar 67,67 tahun. Faktor yang mempengaruhi besarnya AHH adalah kualitas lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan, pola hidup dan gaya hidup individu.

e. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sejak tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Boalemo telah banyak menyiapkan dan membangun semua jenis sarana dan prasarana kesehatan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan sejak tahun 2012 - 2016 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.31

Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2012 - 2016

No	Sarana & Prasarana	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rumah Sakit	1	1	1	1	1
2	Puskesmas Rawat Jalan	5	6	7	8	8
3	Puskesmas Rawat Inap	3	3	3	3	3
4	Puskesmas Pembantu	33	35	35	35	35
5	Puskesmas Keliling Darat (Roda 4)	11	11	12	13	13
6	Puskesmas Keliling Perairan	3	3	3	3	3
7	Polindes	22	22	15	15	15
8	Posyandu	153	151	151	149	149
9	Poskesdes	42	42	42	42	42
10	Apotek	2	4	4	5	5
11	Toko Obat	2	4	4	4	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Boalemo, 2017

f. Jumlah Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan merupakan sumber daya yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya

kesehatan. Tenaga kesehatan sangat penting disiapkan dalam rangka pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. perkembangan tenaga kesehatan di Kabupaten Boalemo Selang Tahun 2012-2016 digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.32  
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2012 - 2016

No	Jenis Tenaga	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dokter Umum	29	28	26	26	20
2	Dokter Spesialis	1	1	3	3	5
3	Dokter Gigi	6	6	7	7	7
4	Kesmas	55	56	73	66	84
5	Apoteker	7	6	3	6	2
6	Perawat	183	165	160	184	165
7	Bidan	106	122	119	128	118
8	Perawat Gigi	7	8	8	8	8
9	Ahli Gizi	41	41	46	46	44
10	Sanitasi	21	22	13	15	14
11	Asisten Apoteker	9	12	16	11	12
12	Analisis Laboratorium	4	4	4	4	4
13	Penata Rontgen	3	3	3	2	2
14	Fisioterapi	1	1	1	1	1

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Boalemo, 2017*

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan adalah infrastruktur jalan dan jembatan. Selain itu juga melaksanakan kegiatan pembangunan dan reabilitasi sarana prasarana aparatur yang menitikberatkan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana bangunan perkantoran.

a. Jaringan Jalan

Pemerintah daerah telah banyak melakukan pemeliharaan dan pembangunan jalan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat. Persentase panjang jalan di Kabupaten Boalemo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan serta mengoptimalkan fungsi jalan. Kondisi jalan di Kabupaten Boalemo dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.33

Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan  
di Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2016

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kondisi Baik	320,92	324,10	305,84	297,20	327,60
2	Kondisi Sedang	102,65	101,25	109,80	106,97	150,75
3	Kondisi Rusak	118,16	108,76	125,51	160,64	108,41
4	Kondisi Rusak Berat	123,37	139,47	157,98	160,66	117,51

Sumber : Dinas PU dan PR Kab. Boalemo, 2017

Tabel 2.34

Panjang Jalan menurut Pemerintahan yang Berwenang  
Mengelolanya di Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2016

No	Pemerintahan yang Berwenang Mengelola	2012	2013	2014	2015	2016
1	Negara	102,00	102,00	102,00	150,24	150,24
2	Provinsi	55,00	73,00	73,00	73,00	73,00
3	Kabupaten	665,62	673,58	699,13	724,15	704,27

Sumber : Dinas PU dan PR Kab. Boalemo, 2017

b. Jaringan Irigasi

Pembangunan jaringan irigasi sangat mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat akan kebutuhan irigasi untuk kegiatan yang mendukung sektor pertanian. Perkembangan panjang jaringan irigasi dari tahun 2012-2016 digambarkan dalam tabel dibawah berikut ini.

Tabel 2.35

Jaringan Irigasi di Kabupaten Boalemo Tahun 2016

No	Daerah Irigasi (D.I)	Lokasi Kecamatan	Luas (Ha)
1	D.I Tabulo / Latula, Kaaruyan, Kramat Kec. Mananggu	Mananggu	586
2	D.I. Karya Agung	Paguyaman	1.045
3	D.I. Tutulo Kec. Botumoito	Botumoito	75
4	D.I. Tangga Barito	Dulupi	650
5	D.I Bongo Tua Kec. Ds Bongo Tua Paguyaman	Paguyaman	263
6	D.I Mekar Jaya Ds Mekar Jaya Kec. Wonosari	Wonosari	100
7	D.I Sari Tani Kec. Wonosari	Wonosari	850

Sumber : Dinas PU Kab. Boalemo, 2016

c. Penataan Ruang

Kabupaten Boalemo telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo tahun 2011 – 2031. Dengan semakin berkembangnya Kabupaten Boalemo, maka perlu meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang yang terintegrasi

dengan rencana-rencana sektoral lainnya. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Boalemo. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kabupaten, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi rekomendasi pemanfaatan ruang kabupaten.

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan, dapat menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarannya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK ) dan sistem drainase lingkungan yang masih kurang.

Berdasarkan SK Bupati Boalemo nomor 334 tahun 2016 tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Boalemo, bahwa luas kawasan perumahan dan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Boalemo sebesar 174,616 Ha. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.36

## Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Boalemo Tahun 2016

No	Kecamatan	Desa	Dusun	Luas (ha)	Kategori
1	Tilamuta	Pentadu Barat	II dan III	16,43	Kumuh Berat
2	Tilamuta	Pentadu Barat	I	6,571	Kumuh Berat
3	Tilamuta	Pentadu Timur	II	2.438	Kumuh Berat
4	Tilamuta	Pentadu Timur	I	8.733	Kumuh Berat
5	Tilamuta	Bajo	I & II	9,398	Kumuh Berat
6	Tilamuta	Modelomo	I	9,234	Kumuh Ringan
7	Tilamuta	Modelomo	II	17,202	Kumuh Ringan
8	Tilamuta	Hungayonaa	III	5,966	Kumuh Ringan
9	Tilamuta	Mohungo	II, III & IV	15,677	Kumuh Sedang
10	Tilamuta	Hungayonaa	IV	14,564	Kumuh Ringan
11	Tilamuta	Hungayonaa	III & IV	7,645	Kumuh Ringan
12	Tilamuta	Limbato	I	2,538	Kumuh Ringan
13	Tilamuta	Limbato	II	3,764	Kumuh Ringan
14	Tilamuta	Ayuhulalo	II	18,477	Kumuh Ringan
15	Tilamuta	Ayuhulalo	II dan III	6,183	Kumuh Ringan
16	Tilamuta	Piloliyanga	I, II & III	13,930	Kumuh Ringan
17	Tilamuta	Piloliyanga	V Modini	3,572	Kumuh Ringan
18	Tilamuta	Lamu	II & III	7,216	Kumuh Ringan
19	Tilamuta	Lahumbo	II	5,074	Kumuh Ringan
<b>Jumlah Total</b>				<b>174,616</b>	

Sumber : Dinas PU Kab. Boalemo, 2016

Berdasarkan tabel diatas, kawasan perumahan dan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Boalemo hanya terletak di Kecamatan Tilamuta. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman diantaranya jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung program nasional 100 – 0 – 100. Pada tahun 2016, cakupan layanan air minum di Kabupaten Boalemo mencapai 85 % sedangkan cakupan sanitasi mencapai 57 %.

Sumber air minum yang paling banyak dikonsumsi rumah tangga di Kabupaten Boalemo berasal dari sumur terlindung yaitu 46,44 % rumah tangga. Persentase rumah tangga menurut sumber air minum di Kabupaten Boalemo tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.37

Persentase rumah tangga menurut sumber air minum di Kabupaten Boalemo tahun 2015

No	Sumber Air Minum	Persentase
1	Air isi ulang/kemasan bermerk	14,61
2	Leding meteran/eceran	10,84
3	Sumur bor/pompa	15,06
4	Sumur terlindung	46,44
5	Sumur tak terlindung	6,77
6	Mata Air	4,64
7	Air permukaan	1,64
8	Lainnya	0,00

Sumber : Dinas PU Kab. Boalemo, 2016

Sebagian besar masyarakat di Boalemo sudah menggunakan listrik dalam memenuhi sumber penerangan. Pada tahun 2015, sebanyak

81,10 % rumah tangga sudah menggunakan sumber penerangan listrik PLN, 8,00 % rumah tangga menggunakan listrik non PLN, dan 10,90 % bukan listrik.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut merupakan amanat dari Permendagri nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Boalemo mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

a. Kesatuan Polisi Pamong Praja

Kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan merupakan salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.38  
 Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Boalemo  
 Tahun 2012 - 2016

Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
	PNS	PTT								
Jumlah Personil	35	133	33	116	28	106	30	126	30	126

*Sumber : Kantor Satpol PP Kab. Boalemo, 2017*

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

b. Kesatuan Bangsa dan politik

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Adapun data ormas yang aktif sampai dengan bulan Mei tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.39  
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan  
Di Kabupaten Boalemo Tahun 2017

No	Uraian	Mei 2017
1.	LSM	19
2.	Orkemas	18
3.	Orsos	13
4.	OKP	12
5.	Ormas	5

*Sumber : Kantor Kesbangpol Linmas Kab. Boalemo, 2017*

#### 6. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan permasalahan sosial yang selalu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Boalemo. PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan social) secara memadai dan wajar. Pada Tahun 2016, jumlah penerima Beras Sejahtera (Rastra) di Kabupaten Boalemo sebanyak 13.099 KK sedangkan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 5.239 KK serta Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2015 sebanyak 17.478 jiwa

Adapun jumlah rumah tangga miskin Kabupaten Boalemo hasil Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.40  
Jumlah Rumah Tangga Miskin menurut Kecamatan  
Di Kabupaten Boalemo (Hasil BDT) Tahun 2015

Kecamatan	Desil I	Desil II	Desil III	Desil IV	Jumlah
Tilamuta	158	158	180	1.539	2.035
Botumoito	126	163	140	1.338	1.767
Mananggu	112	108	98	1.042	1.360
Dulupi	133	121	118	1.581	1.953
Wonosari	237	357	208	2.137	2.939
Paguyaman	306	287	193	2.693	3.479
Paguyaman Pantai	76	88	61	978	1.203
<b>Jumlah</b>	<b>1.148</b>	<b>1.282</b>	<b>998</b>	<b>11.308</b>	<b>14.736</b>

*Sumber : BPS, Tahun 2016*

### 2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 1. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah indikator penunjang dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Kondisi perekonomian suatu daerah ditentukan juga oleh kemampuan (skill) dan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, informasi tetnatng ketenagakerjaan sangat diperlukan agar perencanaan pembangunan dibidang ketenagakerjaan tepat sasaran.

Pada tahun 2015, Penduduk usia kerja di Kabupaten Boalemo sebanyak 105.557 orang dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 67.186 orang. Sedangkan jumlah pengangguran dari seluruh angkatan kerja adalah 3.069 orang. Oleh karena itu, Tingkat Pengguran Terbuka (TPT) sebesar 4,57%. Nilai ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,08%. Selain TPT yang meningkat, pada tahun 2015 juga terjadi peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana nilai TPAK pada tahun ini sebesar 63,65% naik tipis dari tahun sebelumnya yang sebesar 63,52%. Tabel berikut ini merupakan penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utamanya.

Tabel 2.41

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Boalemo, 2013 – 2015

Jenis Kegiatan Utama	2013	2014	2015
Angkatan Kerja	63.643	64.856	67.186
Bekerja	62.586	63.504	64.117
Pengangguran	1.057	1.352	3.069
Bukan Angkatan Kerja	31.898	37.243	38.371
Jumlah	95.541	102.099	105.557
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,61	63,52	63,65
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,66	2,08	4,57

Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2016

Lapangan usaha dengan tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan dengan 37.997 orang yang bergantung pada lapangan usaha tersebut. Namun demikian lapangan usaha ini mengalami pengurangan tenaga kerja terbanyak, dari 41.282 orang pada tahun 2014 menjadi 37.997 orang di tahun 2015, atau berkurang sebanyak 3.285 orang.

Dilihat dari segi pendidikan, tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Boalemo masih tergolong rendah, mayoritas pekerja hanya memiliki ijazah SMP kebawah yaitu sebesar 46.064 orang atau sekitar 72,53%.

Pengangguran dilihat dari ijazah tertinggi yang dimiliki adalah penganggur yang memiliki ijazah SMA/Sederajat yaitu sebanyak 2.414 orang atau 78,66 persen. Penganggur dengan ijazah Perguruan Tinggi paling sedikit yaitu 229 orang atau 7,46%. Walaupun jumlah pengangguran hanya 3.069 orang, tetapi jumlah pekerja setengah penganggur masih besar yaitu 16.787 orang.

Tabel 2.42  
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja  
Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama  
di Kabupaten Boalemo, 2014 – 2015

Lapangan Usaha	2014		2015	
	Orang	%	Orang	%
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	41.282	65.01	37.997	59,26
Industri	2.200	3.46	3.374	5,26
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	5.128	8.08	5.795	9,04
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	10.472	16.49	10.343	16,13
Lainnya	4.422	6.96	6.608	10,31
<b>Total</b>	<b>63.504</b>	<b>100.00</b>	<b>64.117</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2016

Tabel 2.43  
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah yang  
Dimiliki dan Jenis Keingatannya di Kabupaten Boalemo Tahun 2015

Ijazah Tertinggi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya
SMP/ Sederajat	46.064	426	7.939	21.513	1.797
SMA/ Sederajat	11.793	2.414	2.470	3.456	286
PT	6.260	229	223	687	-
<b>Total</b>	<b>64.117</b>	<b>3.069</b>	<b>10.632</b>	<b>25.656</b>	<b>2.083</b>

Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2016

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak sangat perlu diupayakan, hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak.

Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah Pesentase Organisasi yang beranggotakan Gender, Persentase Permasalahan Perempuan dan Anak yang Tertangani dan Partisipasi angkatan kerja perempuan. Tabel berikut merupakan jumlah penduduk 15 tahun keatas berjenis kelamin perempuan yang bekerja di Kabupaten Boalemo tahun 2015.

Tabel 2.44

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Berjenis Kelamin Perempuan Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Boalemo Tahun 2015

No	Lapangan Usaha	Jumlah
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	9.238
2	Industri	872
3	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	3.967
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	6.261
5	Lainnya	264
	Jumlah Total	64.117

Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2016

### 3. Pangan

Ketahanan Pangan di Kabupaten Boalemo diukur dari ketersediaan pangan utama (beras) dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Pada tahun 2016, ketersediaan pangan di Kabupaten Boalemo sebesar 17.688 Ton. Sedangkan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 kkal/kap/hr dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 gr/kap/hr.

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan dapat diukur menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola

pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Pada tahun 2016, skor PPH di Kabupaten Boalemo adalah sebesar 60

#### 4. Pertanian

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Boalemo, maka kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Namun demikian, ketersediaan lahan aset Pemerintah Kabupaten Boalemo yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Boalemo berupaya memenuhi kebutuhan tersebut melalui lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari keseluruhan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo masih ada yang belum bersertifikat. Hal tersebut membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah untuk pengamanan administrasi terhadap lahan pemerintah daerah.

Selain itu permasalahan/kasus tanah masih banyak yang belum tertangani sehingga hal tersebut membutuh perhatian juga dari Pemerinrah Daerah.

#### 5. Lingkungan Hidup

Perkembangan daerah serta pertumbuhan penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Komposisi timbulan sampah terbesar Kabupaten Boalemo merupakan sampah organik. Jenis sampah organik ini mendominasi terhadap keseluruhan sampah yang berasal dari berbagai sumber sampah, antara lain sampah yang berasal dari permukiman, jalan, pasar, terminal, pertokoan, perkantoran, dan lain-lain.

Tabel 2.45

Timbulan Sampah Kabupaten Boalemo

No	Lokasi	Timbulan Sampah (m <sup>3</sup> /hari)	Sampah Terangkut (m <sup>3</sup> /hari)
1	Permukiman	6,25	3
2	Sarana Kota	3,50	3
3	Perairan Terbuka	1,00	0
4	Pantai Wisata	1,00	0
5	Lokasi Lainnya	7,20	0
	<b>Total</b>	<b>18,7</b>	<b>6</b>

Sumber : Dok. Teknis RTRW Kab. Boalemo, tahun 2011-2031

Dari tabel tersebut, dapat diketahui timbulan sampah Kabupaten Boalemo setiap harinya mencapai  $\pm 18,7 \text{ m}^3$ , sedangkan yang terangkut baru mencapai  $\pm 6 \text{ m}^3$ . Jadi ada  $\pm 12,7 \text{ m}^3$  sampah yang belum terangkut. Sampah yang belum terangkut ini dikelola sendiri oleh masyarakat secara konvensional (ditimbun dan/atau dibakar). Pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Boalemo baru pada Kecamatan Tilamuta saja, sementara dari hasil pemantauan pada wilayah TPA Polohungo, kinerja pengelolaan IPAL TPA tidak berjalan sehingga air lindi dari TPA tidak terkelola secara baik yang berpotensi mencemari lingkungan perairan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo tahun 2017 juga telah melakukan pemantauan kualitas air permukaan untuk S. Botumoito, S. Tilamuta, S. Pangi, dan S. Wonosari.

Pemantauan kualitas air Sungai Tilamuta tahun 2017 menunjukkan pada bagian hulu pH 7,85, DO 7,86 mg/L, BOD < 2 mg/L, dan COD

< 10 mg/L. Pada bagian hilir S. Tilamuta pH 7,92, DO 8,04 mg/L, BOD < 2 mg/L, dan COD < 10 mg/L.

Pemantauan kualitas air sungai Botumoito tahun 2017 menunjukkan pada bagian hulu pH 8,15, DO 8,50 mg/L, BOD < 2 mg/L, dan COD < 10 mg/L. Pada bagian hilir S. Botumoito pH 8,20, DO 8,56 mg/L, BOD < 2 mg/L, dan COD < 10 mg/L.

Pemantauan kualitas air Sungai Pangi menunjukkan pada bagian hulu pH 7,96, DO 6,33 mg/L, BOD < 2 mg/L, dan COD < 10 mg/L. Pada bagian hilir S. Pangi pH 7,94, DO 5,70 mg/L, BOD < 2 mg/L, dan COD < 10 mg/L.

Pemantauan kualitas air Sungai Wonosari menunjukkan pada bagian hulu pH 7,79, DO 8,58 mg/L, BOD < 2 mg/L, dan COD < 10 mg/L. Pada bagian hilir S. Wonosari pH 7,75, DO 7,79 mg/L, BOD < 2 mg/L, dan COD < 10 mg/L.

Berdasarkan kriteria mutu air pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, maka parameter-parameter yang diukur pada keempat sungai tersebut masih memenuhi persyaratan untuk air kelas II

#### 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.46  
Jumlah Penduduk Kabupaten Boalemo yang Memiliki KTP  
Tahun 2012 - 2016

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2012	94.017	88.461
2013	95.015	90.054
2014	96.151	93.709
2015	97.276	79.926
2016	98.985	85.679

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2017*

Data di atas menggambarkan semakin meningkatnya persentasi kepemilikan Kartu Tanda Penduduk terhadap wajib KTP. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2014 Pemerintah telah membebaskan biaya terhadap pengurusan dokumen kependudukan termasuk KTP. Peningkatan juga terjadi terhadap penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga (KK). Penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.47  
Jumlah Penduduk Kabupaten Boalemo yang Memiliki KK  
Tahun 2012 - 2016

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KK	Jumlah Penduduk yang Memiliki KK
2012	40.958	20.071
2013	41.011	23.307
2014	41.983	27.606
2015	42.103	34.712
2016	43.923	37.684

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2017*

Demikian pun halnya dengan persentasi pasangan nikah yang berakte nikah juga mengalami peningkatan sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.48  
Jumlah Penduduk Kabupaten Boalemo yang Memiliki Akte Nikah  
Tahun 2012 - 2016

Tahun	Jumlah Pasangan Nikah	Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah
2012	40.958	11.481
2013	41.011	12.629
2014	41.983	14.523
2015	42.103	16.304
2016	43.923	17.119

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2017*

#### 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan masyarakat desa, maka pembangunan di desa di arahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui :

- Peningkatan investasi ekonomi desa
- Pembentukan lembaga ekonomi desa, misalnya melalui pembentukan dan pengembangan BUM Desa
- Mengaktifkan peran masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan
- Peningkatan peran serta masyarakat desa di bidang pertanian.

#### 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian angka kelahiran dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas. Penduduk

Kabupaten Boalemo pada tahun 2016 sebanyak 143.259 orang yang terdiri dari 73.176 laki-laki dan 70.083 perempuan. Dimana angka ketergantungan sebesar 43,25 hal ini berarti 100 orang usia produktif menanggung 43 - 44 orang usia tidak produktif.

Tabel 2.49  
 Persentase Jumlah Penduduk Per Kelompok Umur dan Per Jenis Kelamin Kabupaten Boalemo, 2016

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0 - 4	4.529	4.278	8.807
5 - 9	6.676	6.150	12.826
10 - 14	8.162	7.828	15.990
15 - 19	7.610	6.935	14.545
20 - 24	7.272	7.081	14.353
25 - 29	5.847	5.541	11.388
30 - 34	5.879	5.807	11.686
35 - 39	5.624	5.665	11.289
40 - 44	5.732	5.544	11.276
45 - 49	4.872	4.385	9.257
50 - 54	3.579	3.345	6.924
55 - 59	2.640	2.633	5.273
60 - 64	2.002	2.013	4.015
65 - 69	1.289	1.296	2.585
70 - 74	814	829	1.643
75+	649	753	1.402
<b>Jumlah</b>	<b>73.176</b>	<b>70.083</b>	<b>143.259</b>
Rasio jenis kelamin			<b>104,41</b>
Dependency Ratio			<b>43,25</b>

Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2016

Dilihat dari piramida penduduk Kabupaten Boalemo tahun 2016, diketahui bahwa penduduk di Kabupaten Boalemo termasuk usia muda. Hal ini dapat dilihat dari bentuk piramida yang cenderung segitiga tegak. Usia 15-49 tahun merupakan usia produktif untuk

perempuan dapat hamil atau mempunyai keturunan, untuk itu diperlukan perencanaan dalam mempunyai keturunan atau anak. Hal tersebut tidak lepas dari program KB dari pemerintah, jika dilihat dari penggunaan alat/cara KB sebanyak 70,63% sedang menggunakan KB, lalu sebanyak 22,99% tidak menggunakan dan sisanya 6,38% sudah tidak menggunakan lagi. Dilihat dari alat/cara KB yang digunakan, ada 3 alat KB yang paling banyak yaitu suntikan, susuk dan pil KB. Namun demikian yang paling banyak menggunakan suntikan KB yaitu 36,65%.

Tabel 2.50  
Rasio Akseptor KB di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2012 – 2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Akseptor KB	19.809	22.473	23.468	24.637	20.586
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	27.744	27.549	27.787	27.900	27.133
3	Rasio Akseptor KB	71,40	81,57	84,46	88,30	75,87

*Sumber : BKKBD Kab. Boalemo, 2017*

Tabel 2.51  
Persentase Perempuan Kawin Usia 15 - 49 menurut Penggunaan  
Alat KB di Kab. Boalemo, 2016

No	Penggunaan KB	Persentase
1	Ya, pernah	6,38
2	Ya, sedang	70,63
3	Tidak	22,99

*Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2017*

Selain penggunaan alat/cara KB, dapat diketahui juga tingkat kesuburan perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun di Kabupaten Boalemo dengan melihat jumlah anak lahir hidup yang pernah dilahirkan. Ditinjau dari jumlah anak lahir hidup yang pernah dilahirkan, paling banyak perempuan pernah melahirkan 1-2 anak yaitu 59,37% perempuan. Ada sebanyak 1,14% perempuan pernah melahirkan lebih dari 7 anak.

Tabel 2.52

Persentase Perempuan Kawin Usia 15 - 49 Tahun menurut Alat/Cara KB yang Digunakan di Kab. Boalemo, 2016

No	Penggunaan KB	Jumlah (PUS)
1	IUD	1.197
2	MOW	433
3	MOP	228
4	Kondom	209
5	Implan	6.378
6	Suntikan	7.312
7	Pil	4.820

Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2017

## 9. Perhubungan

Pengembangan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Ketersediaan aksesibilitas transportasi dapat pemererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, sangat penting dikembangkan sistem transportasi dalam wujud sarana (kendaraan) dan prasarana (jaringan jalan). Wujud transportasi berupa sarana (kendaraan) inilah yang menjadi aspek utama dalam sektor perhubungan. Disamping itu, unsur penting dalam urusan perhubungan di Kabupaten Boalemo adalah lalu lintas, angkutan jalan darat dan angkutan laut. Oleh karena itu, urusan perhubungan

berkaitan dengan layanan angkutan umum, layanan pengujian kendaraan bermotor, dan layanan kelancaran lalu lintas (penyediaan kelengkapan atribut jalan). Di tahun 2015, panjang jalan negara di Kabupaten Boalemo tercatat sepanjang 150,24 km, bertambah 48,24 km dari tahun 2014. Panjang jalan provinsi tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2014, yaitu 73 km. Sementara itu, jalan kabupaten semakin panjang daripada tahun 2014, dengan nilai 724,15 km.

Tabel 2.53

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kab. Boalemo

No	Angkutan Umum	2012			2013			2014			2015		
		Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%
1	Mobil Penumpang Umum	101	161	159	110	124	113	118	139	118	126	153	121
2	Mobil Bus	1	1	100	1	1	100	1	0	0	1	1	100
3	Mobil Barang	781	904	116	955	1.135	119	1.151	1.281	111	1.264	1.056	84
	Jumlah	883	1.066	121	1.066	1.260	118	1.270	1.420	112	1.391	1.210	87

Sumber : Dinas Perhubkominfo Kab. Boalemo, 2016

Tabel 2.54

Izin Trayek di Kab. Boalemo

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Izin Trayek Perdesaan	170	158	147	88

Sumber : Dinas Perhubkominfo Kab. Boalemo, 2016

#### 10. Komunikasi dan Informatika

Kebutuhan informasi melalui media online dalam hal ini website merupakan kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Boalemo telah memiliki website yaitu [www.boalemokab.go.id](http://www.boalemokab.go.id) yang memuat berbagai informasi tentang

Kabupaten Boalemo dapat secara mudah diakses oleh siapapun. Kebutuhan akan telepon seluler dan kemudahan akses internet bagi masyarakat di Kabupaten Boalemo sudah dirasa cukup besar. Namun demikian masih ada 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Paguyaman Pantai masih belum mendapat akses telepon seluler dan internet. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan tugas utama bagi pemerintah Kabupaten Boalemo pada saat ini untuk membuka akses telepon seluler dan internet di kecamatan tersebut.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, seluruh SOPD di Kabupaten Boalemo telah terkoneksi dengan jaringan internet. Selain itu, beberapa SOPD telah menggunakan aplikasi atau program informasi sesuai tupoksi SOPD yang berbasis internet, sehingga ada kemudahan akses oleh siapa dan dimanapun akan kebutuhan informasi terhadap SOPD yang bersangkutan.

#### 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kabupaten Boalemo adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kabupaten Boalemo, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Boalemo melalui peningkatan produktivitas usaha.

Jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Boalemo mengalami peningkatan. Adapun jumlah koperasi aktif di Kabupaten Boalemo dari tahun 2012 – 2016, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.55  
Presentasi Koperasi Aktif di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Koperasi Aktif	51	58	64	65	78
2	Jumlah Koperasi	114	121	125	126	139
3	Persentase Koperasi aktif	44,7%	47,9%	51,2%	51,6%	56,1%

*Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kab. Boalemo, 2017*

Demikian pun halnya dengan perkembangan jumlah UKM non Lembaga perkreditan maupun lembaga perkreditan yang ada di Kabupaten Boalemo mengalami kondisi yang fluktuatif seperti diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.56  
Jumlah UKM non BPR/LKM di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Seluruh UKM	6,294	6,069	6,069	4,272	4,272
2	Jumlah BPR/LKM	8	8	9	9	9
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	6,286	6,061	6,061	4,263	4,263

*Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kab. Boalemo, 2017*

Tabel 2.57  
Jumlah UKM BPR/LKM di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Seluruh BPR	6	6	7	7	7
2	Jumlah LKM	2	2	2	2	2
3	Jumlah UKM BPR dan LKM	8	8	9	9	9

*Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kab. Boalemo, 2017*

## 12. Penanaman Modal

Proses pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor penanaman modal. Kondisi iklim investasi di Kabupaten Boalemo mengalami fluktuatif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai investasi setiap tahunnya yang cenderung berubah-ubah (meningkat dan turun). Realisasi investasi swasta murni terbesar di Kabupaten Boalemo terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 28.897.250.000,00 sedangkan pada kondisi terakhir yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 26.227.200.000,00. Adapun gambaran realisasi investasi di Kabupten Boalemo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.58  
Realisasi Investasi Swasta Murni (Non Fasilitas)  
Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2012	11.205.000.000,00
2	2013	18.940.558.978,00
3	2014	28.897.250.000,00
4	2015	24.755.000.000,00
5	2016	26.227.200.000,00

*Sumber : Dinas PM & ESDM, Kab. Boalemo, 2017*

Berbagai upaya diperlukan dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan-kegiatan usaha penanaman modal, agar mencapai tujuan yang diharapkan dan sekaligus mencegah akibat negatif yang mungkin timbul. Diantaranya melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah, penciptaan birokrasi yang efektif dan efisien, kepastian hukum, biaya ekonomi yang berdaya saing, iklim usaha yang kondusif dan keamanan berusaha.

Adanya kegiatan investasi di Kabupaten Boalemo menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja. Peningkatan nilai investasi berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja. Tabel berikut ini merupakan gambaran penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan swasta murni di Kabupaten Boalemo.

Tabel 2.59

Penyerapan Tenaga Kerja dan Jumlah Perusahaan Swasta Murni  
Kabupaten Boalemo Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	Perusahaan	Tenaga Kerja
1	2012	107	166
2	2013	111	219
3	2014	248	2127
4	2015	124	414
5	2016	129	582

Sumber : Dinas PM & ESDM, Kab. Boalemo, 2017

Tabel 2.60

Realisasi Investasi Swasta Murni berdasarkan Sektor Usaha  
Kabupaten Boalemo sampai dengan Tahun 2016

No	Sektor	Jml Unit Usaha	Nilai Investasi (Rp)
1	Pertanian	8	1.210.000.000,00
2	Industri	11	1.615.000.000,00
3	Perdagangan besar (grosir), eceran, rumah makan	96	5.048.200.000,00
4	Kehutanan	-	-
5	Pertambangan/Penggalian	-	-
6	Perikanan	1	100.000.000,00
7	Perkebunan	-	-
8	Peternakan	3	200.000.000,00
9	Koperasi	-	-
10	Pengangkutan dan Komunikasi	-	-
11	Bangunan	-	-
12	Jasa	56	17.179.000.000,00
13	Lain-lain	2	150.000.000,00

Sumber : Dinas PM & ESDM, Kab. Boalemo, 2017

Adapun jumlah perizinan usaha berdasarkan SK Bupati yang telah diterbitkan di Kabupaten Boalemo sampai dengan tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.61

Jumlah Perizinan Usaha Berdasarkan SK yang Terbit  
Kabupaten Boalemo sampai dengan Tahun 2016

No	Uraian	Jml Izin s.d. 2016
1	Izin Prinsip;	20
2	Izin Prinsip Penanaman Modal;	20
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;	-
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;	-
5	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;	1
6	Izin Usaha Penanaman Modal;	5

7	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;	1
8	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;	-
9	Izin Usaha Penggabungan / Merger Penanaman Modal;	-
10	Izin Pembukaan Kantor Cabang;	-
11	Izin Lokasi;	10
12	Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang;	-
13	Izin Angka Pengenal Impor;	-
14	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);	2
15	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUDP);	2
16	Izin Usaha Toko Modern (IUTM);	2
17	Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK);	2
18	Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);	50
19	Izin Trayek;	200
20	Rekomendasi Usaha Biro Perjalanan Wisata;	3
21	Rekomendasi Usaha Jasa Penginapan dan Hotel;	10
22	Izin Usaha Tanaman Pangan;	1
23	Izin Usaha Hortikultura ;	1
24	Izin Usaha Perkebunan;	-
25	Izin Usaha Peternakan;	1
26	Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen;	1
27	Izin Mendirikan Bangunan (IMB);	125
28	Izin Gangguan / Hinder Ordonantie (HO);	310
29	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	175
30	Tanda Daftar Perusahaan (TDP);	150
31	Tanda Daftar Gudang (TDG);	50
32	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (SIPSLB3);	-
33	Izin Usaha Industri (IUI);	1
34	Tanda Daftar Industri (TDI);	10
35	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP-KAN);	50
36	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);	75
37	Surat izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);	1
38	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);	1
39	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);	115
40	Izin Penyaluran Bahan Bakar Minyak (IPBBM);	2
41	Izin Pembuangan Air Limbah;	1
42	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);	-
43	Izin Kesehatan;	-
44	Izin penggunaan kekayaan daerah berupa tanah	-

	dan bangunan;	
45	Pelayanan Fiskal;	310
46	Izin Reklame;	100
47	Izin Penyelenggaraan Hiburan Rakyat dan Pameran;	5
48	Izin Pertambangan Rakyat;	10
49	Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPT);	-
50	Surat Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah (SIPA);	1
51	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;	-
52	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri/Izin Operasi (IO);	-
53	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTL);	-
54	Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;	10
55	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);	-
56	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);	-
57	Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR);	-
58	Izin Tempat Penampungan Kayu Olahan (TPT-KO)	-
59	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR);	-
	<b>Jumlah</b>	1.834

Sumber : Dinas PM & ESDM Kab. Boalemo, 2017

### 13. Kepemudaan dan Olahraga

Kegiatan kepemudaan merupakan cermin dinamika gerak masyarakat. Kinerja kepemudaan menunjukkan trend yang menarik dari segi capaian realisasi anggaran. Namun demikian berbagai permasalahan generasi muda yang muncul menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Masih banyaknya jumlah pengangguran pemuda dan lemahnya kemampuan kemampuan dan perilaku kewirausahaan di kalangan pemuda merupakan masalah yang paling serius sehingga pemerintah daerah harus mampu mengatasinya.

Demikian halnya dalam bidang olah raga, keterbatasan sarana dan prasarana olahraga serta sumberdaya manusia dalam melatih dan

memberdayakan olah raga merupakan permasalahan daerah yang harus ditangani.

#### 14. Statistik

Salah satu upaya dalam penyediaan data statistik daerah adalah dengan melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Buku Kabupaten Boalemo Dalam Angka selalu tersedia setiap tahunnya sampai dengan tahun 2017. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Boalemo dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Boalemo selama periode 2012 - 2016 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Boalemo.

#### 15. Kebudayaan

Masyarakat Kabupaten Boalemo sangat majemuk. Hal tersebut juga mempengaruhi jumlah budaya yang berkembang di Kabupaten Boalemo. Budaya yang berkembang di Kabupaten Boalemo berupa kelompok seni/etnis. Adapun nama kelompok seni/etnis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.62

Nama Kelompok Seni/Etnis di Kabupaten Boalemo

No	Nama Kelompok Seni/Etnis	Lokasi
1	Kelompok Seni Etnis Gorontalo	Kecamatan Tilamuta
2	Kelompok Seni Etnis Bajo	Kecamatan Tilamuta
3	Kelompok Seni Etnis Lombok (NTB)	Kecamatan Wonosari

No	Nama Kelompok Seni/Etnis	Lokasi
4	Kelompok Seni Etnis Bali	Kecamatan Wonosari
5	Kelompok Seni Etnis Jawa	Kecamatan Wonosari
6	Kelompok Seni Etnis Jatun (Jawa Tondano)	Kecamatan Mananggu
7	Kelompok Seni Etnis Arab	Kecamatan Tilamuta
8	Kelompok Seni Etnis Sangehe Talaud	Kecamatan Mananggu
9	Kelompok Seni Etnis Minahasa	Kecamatan Mananggu

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Boalemo, 2017

#### 16. Perpustakaan

Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai merupakan salah satu penyebab minimnya pengunjung perpustakaan. Selain itu, makin mudahnya akses internet juga mempegaruhi jumlah pengunjung. Namun demikian setiap tahunnya, pengunjung perpustakaan di Kabupaten Boalemo mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.63

Jumlah Pengunjung Perpustakaan  
di Kabupaten Boalemo Tahun 2014 – 2015

Uraian	2014	2015
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	1.128	1.436

Sumber : Dinas Perpustakaan & Arsip Kab. Boalemo, 2016

Pada tahun 2015, pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada Tahun 2014 pengunjung perpustakaan sebanyak 1.128 orang, sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.436 orang. Dilihat dari jumlah buku, perpustakaan Kabupaten Boalemo setiap

tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.64  
Jumlah Buku dan Judul Buku Perpustakaan  
di Kabupaten Boalemo Tahun 2014 – 2015

Uraian	2014	2015
Koleksi Judul Buku yang tersedia di Perpustakaan	750	908
Koleksi Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan	1.500	2.417

Sumber : Dinas Perpustakaan & Arsip Kab. Boalemo, 2016

#### 17. Kearsipan

Kearsipan merupakan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu system kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan kearsipan di Kabupaten Boalemo masih perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar arsip dapat dijamin keselamatannya, baik secara fisik maupun informasinya.

### 2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 1. Pertanian

Sektor Pertanian memberikan kontribusi paling besar terhadap besarnya nilai PDRB di Kabupaten Boalemo. Pada tahun 2016, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 54,64% terhadap nilai PDRB. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Boalemo merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang mayoritas bermatapencaharian di sektor pertanian. Adapun komoditas yang mempunyai jumlah produksi terbesar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.65

## Produksi Padi dan Jagung di Kabupaten Boalemo

No	Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi	43.239	50.826	52.400	49.513	55.584
2	Jagung	193.720	202.937	215.825	146.535	151.261

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Boalemo, 2017

Berdasarkan tabel diatas, jumlah produksi padi dan jagung setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya penggunaan varietas unggul dan terpenuhinya sarana prasarana pertanian, misalnya jaringan irigasi dan penggunaan alsintan dengan teknologi yang memadai. Sedangkan perkembangan populasi ternak di Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.66

## Populasi Ternak di Kabupaten Boalemo

No	Jenis Ternak	Jumlah Populasi (Ekor)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Sapi	37.209	38.183	33.560	33.600	43.000
2	Kambing	3.753	4.243	5.184	5.220	7.600
3	Unggas	156.501	161.013	152.492	166.727	149.904

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Boalemo, 2017

## 2. Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Boalemo. Oleh karena ini, sektor ini mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya, perbaikan ekonomi masyarakat pesisir dan perbaikan peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap dan perikanan budidaya dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan pada sektor kelautan dan

perikanan. Adapun jumlah produksi perikanan di Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.67

Jumlah Produksi Perikanan di Kabupaten Boalemo

No	Uraian	Jumlah Produksi (Ton)		
		2014	2015	2016
1	Perikanan Tangkap	14.663	16.196	17.608
2	Perikanan Budidaya	1.247	1.411	520

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Boalemo, 2017

Berdasarkan tabel diatas, jumlah produksi perikanan tangkap setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah produksi perikanan budidaya mengalami fluktuatif. Namun demikian upaya peningkatan produktivitas pada sektor perikanan dan kelautan masih sangat diperlukan.

### 3. Kehutanan

Kewenangan urusan kehutanan yang ada di Kabupaten/Kota telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mempunyai kewenangan dengan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura). Kabupaten Boalemo masih belum mempunyai Tahura. Namun demikian, Pemerintah Daerah akan mewujudkan keberadaan Tahura mengingat potensi lokasi yang ada di Kabupaten Boalemo masih banyak untuk dijadikan Tahura.

### 4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Boalemo mempunyai banyak potensi pertambangan seperti bahan galian C dan bahan tambangan golongan B. Jenis bahan galian C yang ada di Kabupaten Boalemo adalah Granit, Dasit, Sirtu dan Lempung. Untuk potensi tambang galian B, berdasarkan penelitian di Kabupaten Boalemo ditemukan 6 (Enam) lokasi prospek mineralisasi

emas dengan dua jenis endapan yaitu endapan primer dalam bentuk urat (Vein) yang termasuk epitermal dengan alterasi potasik serta endapan sedimenter (Plaser/letakan). Keenam tersebut meliputi Kecamatan Paguyaman, Dulupi, Tilamuta dan Mananggu yang dikelompokkan dalam empat blok. Sedangkan untuk kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Boalemo, telah didukung oleh energy alternative yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

#### 5. Transmigrasi

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi di Provinsi Gorontalo. Kabupaten Boalemo mempunyai 2 (dua) Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yaitu RKT Pawonsari (Paguyaman dan Wonosari) serta RKT Paguyaman Pantai. Jumlah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang sudah terbangun sebanyak 12 UPT. Sedangkan jumlah UPT mandiri yang terbangun sebanyak 9 UPT. Sampai dengan tahun 2016, jumlah transmigran yang telah ditempatkan di Kabupaten Boalemo sebanyak 3.794 Kepala Keluarga. Selain itu, Kabupaten Boalemo mempunyai Kawasan Kota Mandiri (KTM) yang berlokasi di Kecamatan Wonosari.

#### 6. Industri

Perkembangan industri di Kabupaten Boalemo mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dengan adanya dukungan sumberdaya manusia dan potensi lokal/daerah kedepan industri di Kabupaten Boalemo diprediksi akan semakin berkembang. Dengan semakin berkembangnya industri maka akan mempengaruhi juga dengan penyerapan tenaga kerja. Jumlah perusahaan menurut klasifikasi industri beserta jumlah tenaga kerjanya di kabupaten Boalemo dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.68  
Jumlah Perusahaan Menurut Klasifikasi Industri  
di Kabupaten Boalemo, 2016

No	Klasifikasi Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
1	Pangan	94	475
2	Kimia dan Bahan Bangunan	81	391
3	Kerajinan	76	198
4	Sandang	114	339
<b>Jumlah</b>		<b>365</b>	<b>1.403</b>

*Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Boalemo, 2017*

Berdasarkan tabel diatas jumlah industri di Kabupaten Boalemo paling banyak bergerak di sektor sandang yaitu sebanyak 114 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 339 orang. Secara keseluruhan, jumlah perusahaan di Kabupaten Boalemo pada tahun 2016 sebanyak 365 perusahaan dengan serapan tenaga kerja sebanyak 1.403 orang.

#### 7. Perdagangan

Berdasarkan hasil pendataan Sensus Ekonomi tahun 2016, bahwa terdapat 18.651 usaha/perusahaan di Kabupaten Boalemo dengan 37.943 orang tenaga kerja. Adapun 46% usaha/perusahaan di Kabupaten Boalemo merupakan usaha di sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan jumlah pedagang pasar pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Jumlah pedagang pasar kelas I sebanyak 4.468 pedagang
- Jumlah pedagang pasar kelas II sebanyak 612 pedagang
- Jumlah pedagang pasar kelas III sebanyak 506 pedagang

Sarana perdagangan yang telah tersedia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.69

## Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Boalemo

No	Pasar	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pasar Umum	15	15	15	15	16
2	Pasar Desa	14	14	14	14	15
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>31</b>

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Boalemo, 2017

Berdasarkan tabel diatas, jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Boalemo mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 jumlah Pasar Umum sebanyak 16 pasar dan Pasar Desa sebanyak 15 pasar.

## 8. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Boalemo. Jenis pariwisata yang berkembang pesat adalah pariwisata alam dan pariwisata budaya. Terobosan dalam ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan sumber daya manusia kepariwisataan menjadi salah satu perhatian penting untuk meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Boalemo.

Berikut ini merupakan kawasan desa wisata di wilayah Kabupaten Boalemo :

Tabel 2.70

## Desa Wisata di Kabupaten Boalemo

No	Desa	Kecamatan	Wisata Unggulan
1	Buti	Mananggu	Wisata Budaya
2	Salilama	Mananggu	Wisata Alam
3	Kaaruyan	Mananggu	Wisata Budaya Religi
4	Bolihutuo	Botumoito	Wisata Alam, Budaya, Bahari, dan Buatan
5	Patoameme	Botumoito	Wisata Bahari dan Budaya
6	Tutulo	Botumoito	Wisata Bahari dan Budaya
7	Hutamonu	Botumoito	Wisata Bahari dan Budaya
8	Pentadu Timur	Tilamuta	Wisata Bahari dan Budaya

9	Limbato	Tilamuta	Wisata Budaya dan Kuliner
10	Ayuhulalo	Tilamuta	Wisata Budaya, Alam dan Buatan
11	Bajo	Tilamuta	Wisata Bahari dan Budaya
12	Tenilo	Tilamuta	Wisata Bahari dan Budaya
13	Tabongo	Dulupi	Wisata Bahari dan Budaya
14	Bongo I	Wonosari	Wisata Budaya
15	Bongo II	Wonosari	Wisata Budaya
16	Pangea	Wonosari	Wisata Alam
17	Tri Rukun	Wonosari	Wisata Budaya
18	Dimito	Wonosari	Agrowisata
19	Bangga	Paguyaman Pantai	Wisata Bahari dan Kuliner
20	Limbatihu	Paguyaman Pantai	Wisata Bahari dan Kuliner
21	Lito	Paguyaman Pantai	Wisata Alam dan Bahari

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Boalemo, 2017

Sedangkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.71

Destinasi Wisata di Kabupaten Boalemo

No	Nama Destinasi Wisata	Lokasi
1	Pulo Cinta Eco Resort	Kec. Botumoito
2	Pantai Bolihutuo	Kec. Botumoito
3	Teluk Bubaa	Kec. Paguyaman Pantai
4	Pulau Limbatihu	Kec. Paguyaman Pantai
5	Pantai Pasir Panjang Olibuu	Kec. Tilamuta
6	Pulau Mohupomba Kiki	Kec. Tilamuta
7	Pulau Mohupomba Daa	Kec. Tilamuta
8	Pulau Pasir Putih Botumoito	Kec. Botumoito
9	Pulau Monduli	Kec. Tilamuta
10	Pulau Asiangi	Kec. Tilamuta
11	Pulau Paniki	Kec. Tilamuta
12	Danau Teratai	Kec. Mananggu
13	Pantai Langala	Kec. Dulupi
14	Pantai Keramat	Kec. Mananggu
15	Pantai Batu Buaya	Kec. Mananggu

16	Air Terjun Ayuhulalo	Kec. Tilamuta
17	Air Terjun Tenilo	Kec. Tilamuta
18	Air Panas Dulangeya	Kec. Botumoito
19	Suaka Marga Satwa Nantu	Kec. Paguyaman
20	Wisata Bawah Laut Dulupi (Pulau Kambing)	Kec. Dulupi

*Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Boalemo, 2017*

#### **2.3.4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

##### **1. Administrasi Pemerintahan**

Urusan pemerintahan fungsi penunjang Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Boalemo dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Kantor Kecamatan

##### **a. Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah. Secara singkat, Sekretariat Kabupaten Boalemo mempunyai fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah di Kabupaten Boalemo terdiri dari 9 (Sembilan) Bagian, yaitu : Bagian Hukum dan Ortala, Bagian Ekonomi Pembangunan, Bagian Layanan Pengadaan, Bagian Umum, Bagian Humas, Bagian Keuangan, Bagian Kesra, Bagian Tata Pemerintahan, dan Bagian Korpri

##### **b. Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam

menunjang kinerja wakil rakyat mulai dari perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang kerap difasilitasi oleh sekretariat DPRD. Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) juga tidak terlepas dari keberadaan fasilitas Sekretariat DPRD. Pada periode tahun 2015 – 2019, anggota DPRD Kabupaten Boalemo sebanyak 25 orang dengan 20% diantaranya berjenis kelamin perempuan. Jumlah keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Boalemo di tahun 2016 mencapai 74 keputusan.

c. Kantor Kecamatan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan merupakan bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Secara filosofis, kecamatan sangat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, system administrasi, keuangan, dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Kabupaten Boalemo secara administrasi mempunyai 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Manangu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman Pantai.

2. Pengawasan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan di Kabupaten Boalemo dilaksanakan oleh Inspektorat. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat mempunyai beberapa fungsi. Pertama perencanaan program pengawasan. Kedua, merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan. Ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian

dan penialaian tugas pengawasan. Pada tahun 2016, Kabupaten Boalemo mempunyai tenaga auditor sebanyak 11 orang.

### 3. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda). Perencanaan pembangunan di Kabupaten Boalemo dilaksanakan dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Adapun rencana strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan adalah RPJPD, RPJMD dan RKPD. RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Tingkat Keberhasilan Pembangunan dapat ditunjukkan melalui penyerapan anggaran, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan secara lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2015, relisasi belanja Kabupaten Boalemo mencapai 88,48% dan pada tahun 2016 mencapai 84,17%.

### 4. Keuangan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kabupaten Boalemo dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Secara spesifik pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Boalemo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Asas umum dan struktur APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi keuangan daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta sistem informasi keuangan daerah. Adapun capaian pengelolaan keuangan di Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.72  
Realisasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Boalemo  
Tahun 2012-2016

No	Uraian	Persentase Realisasi (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pendapatan	99,30	98,29	101,21	98,42	94
2	Belanja	95,37	94,65	90,51	88,48	84,17
3	Pembiayaan					
	- Penerimaan	99,88	99,38	75,12	96,10	99,94
	- Pengeluaran	100	100	100	64	87,60

Sumber : BKAD Kab. Boalemo, 2017

#### 5. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ASN

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ASN di Kabupaten Boalemo dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Boalemo pada tahun 2016 adalah 3 616 orang. Proporsi PNS perempuan di Boalemo lebih besar dibanding pegawai laki-laki, yaitu 59,87% dan 40,13% sisanya adalah laki-laki. Sebagian besar PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Boalemo berpendidikan S1 yaitu sebesar 59,6%. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Boalemo pada tahun 2016, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.73

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Boalemo Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	SD	20	3	23
2	SMP	20	12	32
3	SMA	440	430	870
4	Diploma I	24	38	62
5	Diploma II	38	71	109
6	Diploma III	82	176	258
7	S1	769	1386	2155
8	S2	58	49	107
	<b>Jumlah</b>	<b>1.451</b>	<b>2.165</b>	<b>3.616</b>

Sumber : BKD-Diklat Kab. Boalemo, 2017

#### 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing Kabupaten Boalemo merupakan kemampuan perekonomian Kabupaten Boalemo dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten/kota di sekitar Provinsi Gorontalo khususnya dan tingkat nasional maupun internasional. Aspek daya saing terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

##### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Sektor pertanian di Kabupaten Boalemo mendominasi struktur perekonomian masyarakat terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Boalemo. Pada tahun 2016, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 54,64% terhadap pembentukan nilai PDRB. Hal ini dikarenakan penduduk Kabupaten Boalemo sebagian besar berada di daerah pedesaan, sehingga mata penaharian didominasi oleh bidang pertanian/perkebunan. Sebagai sektor yang menjadi tumpuan bagi ketahanan pangan dan mata pencaharian sebagian rakyat, maka pembangunan pertanian merupakan

generator bagi pembangunan di Kabupaten Boalemo. Oleh karena itu, peran pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) di Kabupaten Boalemo adalah sebagai pendukung pemenuhan pangan bagi masyarakat serta memberikan lapangan pekerjaan bagi rumah tangga tani.

Namun demikian, seiring berjalannya waktu terjadi tren penurunan kontribusi sektor pertanian dan perikanan selama 5 tahun terakhir (2012-2016) berturut-turut yaitu 56,52%, 56,24%, 55,63%, 54,87% dan 54,64%. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Boalemo sebesar 5,12% pada tahun 2016 dari sebelumnya 4,54% tahun 2015.

Kemampuan ekonomi daerah tersebut dapat dilihat pula dari gambaran peran finansial perbankan di Kabupaten Boalemo. Sesuai data Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo (Publikasi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, Volume19, September 2017, menyebutkan bahwa ;

- Jumlah Aktiva Rupiah dan Valuta Asing menurut kelompok Bank umum dan BPR di Boalemo Tahun 2016 sebesar Rp.456.360.000.000,-
- Posisi Simpanan Masyarakat pada Bank Umum dan BPR berdasarkan lokasi kantor penghimpun dana di Boalemo, Tahun 2017 (Agustus) sebesar Rp. 212.807.000.000,- dengan rincian yaitu Giro Rp. 11.192.000.000, rekening (satuan) 650; Simpanan Berjangka Rp. 52.930.000.000, rekening (satuan) 180, Tabungan Rp. 148.684.000.000, jumlah bilyet (satuan) 9.647.
- Posisi Pinjaman yang diberikan perbankan menurut sektor ekonomi (9 sektor) di Boalemo Tahun 2016 sebesar Rp. 788.147.000.000,- dimana ada 3 sector dominan adalah sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 263.080.000.000,- dan menyusul sector Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar Rp.

146.624.000.000, kemudian sector Jasa-jasa sebesar Rp. 12.468.000.000-.

- Posisi Pinjaman yang diberikan Perbankan menurut Jenis Penggunaan dan lokasi proyek di Boalemo Tahun 2016 yaitu ; Rp. 788.147.000.000,-  
Modal Kerja sebesar Rp. 210.586.000.000.  
Investasi sebesar Rp. 52.504.000.000.  
Konsumsi sebesar Rp.525.057.000.000.
- Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diberikan Perbankan berdasarkan lokasi proyek yaitu sebesar Rp. 258.144.000.000, terdiri dari  
Usaha Mikro sebesar Rp. 104.014.000.  
Usaha Kecil sebesar Rp. 112.003.000.  
Usaha Menengah sebesar Rp. 42.127.000.
- Posisi Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diberikan Bank Umum menurut Jenis penggunaan berdasarkan lokasi proyek di Boalemo Tahun 2016 sebesar Rp. 258.144.000.000, terdiri dari Modal Kerja sebesar Rp. 207.614.000.000, Investasi sebesar Rp. 50.530.000.000.

Kontribusi Perdagangan, Hotel dan Restoran memberikan peran yang cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa pendukung sector Pariwisata di Kab. Boalemo mulai berkembang pesat. Oleh karena itu sector pariwisata menjadi daya ungkit baru bagi perekonomian di Kab. Boalemo

Disamping itu, Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator nilai tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani maupun biaya produksi dan pembentukan barang modal. Nilai Tukar Petani di Kabupaten Boalemo pada tahun 2016 sebesar 106. permasalahan yang masih dihadapi oleh petani adalah mahalannya harga sarana produksi pertanian dan fluktuatifnya harga komoditas pertanian. Sehingga upaya tindak lanjut yang perlu dipertimbangkan adalah dengan memberikan subsidi atau insentif bagi

petani. Sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2016 sebesar 107,86.

Apabila dilihat dari pengeluaran penduduk, dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok barang makanan dan non makanan. Pada 2016, persentase pengeluaran barang makanan adalah 57,85% dan barang non makanan sebesar 42,15%. Pengeluaran barang makanan 2016 mengalami kenaikan sebesar 4,56% dibandingkan dengan tahun 2015.

Diantara kelompok barang bahan makanan yang memiliki rata-rata per kapita per bulan dikeluarkan paling besar adalah untuk konsumsi padi-padian, makanan dan minuman jadi, dan rokok yaitu sebesar Rp 66.276,00; Rp 67.593,00 dan Rp 45.716,00.

Untuk kelompok barang non makanan, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terbesar di 2016 adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga, yaitu sebesar Rp 124.852,00.

Secara total pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kabupaten Boalemo.

Dengan demikian yang menjadi penggerak ekonomi di Kabupaten Boalemo untuk 5 tahun kedepan, meliputi Sektor Unggulan, sebagai berikut ;

- (1) Pertanian
- (2) Perikanan dan Kelautan
- (3) Sumberdaya Manusia
- (4) Infrastruktur
- (5) Pariwisata.

#### **2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Fasilitas wilayah/infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Pada sektor perhubungan, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai adalah faktor yang sangat penting. Panjang jalan dan kondisi jalan merupakan salah satu indikator penting terhadap aksesibilitas daerah dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Ketersediaan jalan di Kabupaten Boalemo sangat memadai, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara efektif.

Apabila dilihat dari potensi kawasan, Kabupaten Boalemo mempunyai Kawasan Budidaya seluas 71.002,28 Ha. Dari kawasan budidaya tersebut terdapat kawasan produktif antara lain berupa kawasan pertanian, kawasan minapolitan, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, kawasan komersial, dan kawasan industri. Sedangkan kawasan rawan banjir terdapat di semua kecamatan, hal ini dipengaruhi oleh kondisi alam di Kabupaten Boalemo.

Dilihat dari ketersediaan hotel dan rumah makan di Kabupaten Boalemo setiap tahunnya semakin meningkat. Semakin berkembangnya hotel dan rumah makan menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Perkembangan hotel dan rumah makan adalah indikator tumbuhnya pariwisata daerah. Tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi harus dibarengi dengan ketersediaan hotel, restoran dan rumah makan serta fasilitas akomodasi lainnya yang representatif. Pada tahun 2016 jumlah usaha perhotelan di Kabupaten Boalemo sebanyak 18 usaha yang seluruhnya merupakan hotel non bintang.. Jumlah ini meningkat sangat signifikan apabila dibandingkan dengan kondisi perhotelan di Kabupaten Boalemo pada tahun 2010 yaitu hanya sebanyak 6 usaha. Sedangkan jumlah rumah makan yang sangat representatif sebanyak 19 rumah makan. Dilihat dari ketersediaan infrastruktur air bersih, cakupan layanan air minum di Kabupaten Boalemo pada tahun 2016 sudah mencapai 85%.

Salah satu sumber air minum di Kabupaten Boalemo adalah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Adapun jumlah pelanggan PDAM menurut jenis pelanggannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.74  
Jumlah Pelanggan PDAM menurut Jenis Pelanggan  
di Kabupaten Boalemo, 2016

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Air Disalurkan (m <sup>3</sup> )
1	Sosial	150	33.757
2	Rumah Tangga	7.383	941.001
3	Instansi Pemerintah	131	89.999
4	Niaga	114	28.526
5	Industri	8	11.320
6	Khusus	5	4.310
<b>Jumlah</b>		<b>7.791</b>	<b>1.108.913</b>

Sumber : PDAM Kab. Boalemo, 2017

#### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu komponen penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Para investor dalam melakukan investasi pasti akan memperhatikan iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam setiap proses investasi bahkan rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak. Salah satu indikator yang berpengaruh adalah masalah keamanan suatu daerah, keamanan suatu daerah dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi setiap tahun. Faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya, oleh karena itu penting bagi Pemerintah Kabupaten Boalemo diharapkan memiliki berbagai strategi dalam menjaga kestabilan penurunan angka kriminalitas.

Angka kejadian kriminalitas di Kabupaten Boalemo cukup fluktuatif. Pada tahun 2016 jenis tindak pidana yang paling besar adalah Penganiayaan

dengan jumlah laporan sebanyak 116 kasus dan yang sudah terselesaikan sebanyak 98 kasus. Tabel berikut ini merupakan tindak pidana terbesar yang terjadi di Kabupaten Boalemo :

Tabel 2.75

Tindak Pidana Terbesar di Kabupaten Boalemo, 2017

No	Tindak Pidana	Jumlah Kasus	
		Dilaporkan	Diselesaikan
1	Penganiayaan	116	98
2	Pencurian	82	61
3	Penghinaan	41	38
4	Pengrusakan	39	13
5	Penipuan	31	23
6	Penggelapan	29	19
7	Pengancaman	25	22
8	Pengeroyokan	16	16
9	Perbuatan Cabul/Asusila	16	16
10	KDRT	16	9

*Sumber : Polres Boalemo, 2017*

Selain itu kegiatan demonstrasi yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu cerminan demokrasi di daerah, namun yang perlu ditekan adalah kegiatan demonstrasi yang mengarah pada aksi anarkisme, brutalisme, maupun rasisme, yang mempunyai potensi kerusuhan massa. Maka perlu adanya sebuah sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Boalemo.

Selain itu, faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan investasi adalah proses perizinan usaha. Proses perijinan usaha telah menjadi isu utama dalam peningkatan iklim investasi di Indonesia secara umum. Pemerintah Kabupaten Boalemo telah mengambil suatu kebijakan dalam proses perizinan usaha yaitu pelayanan terpadu satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan ESDM. Namun demikian kinerja pelayanan, terutama terkait dengan lama proses perizinan masih membutuhkan

perbaikan secara berkelanjutan melalui penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada sektor perizinan usaha.

#### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan daerah. Tingginya kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci terciptanya daya saing daerah. Ketersediaan potensi SDM di Kabupaten Boalemo, meliputi :

##### 1. Ketenagakerjaan

Pendidikan tenaga kerja sangat mempengaruhi skill atau kemampuan tenaga kerja tersebut yang nantinya akan berdampak terhadap produktifitas pekerjaan. Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja menurut umur dan ijazah yang dimiliki dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.76

Penduduk 15 Tahun Keatas yang Masuk Angkatan Kerja Menurut Umur dan Ijazah yang Dimiliki di Kabupaten Boalemo, 2016

No	Umur	Ijazah Tertinggi		
		SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	PT
1	15 – 34	16.083	9.372	4.368
2	35 – 49	18.679	3.432	1.842
3	50+	11.728	1.403	279
<b>Total</b>		<b>46.490</b>	<b>14.207</b>	<b>6.489</b>

Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2017

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2016, jumlah angkatan kerja terbesar berijazah SMP/ sederajat yaitu sebesar 46.490 orang, selanjutnya berijazah SMA/ sederajat sebesar 14.207 orang dan berijazah Perguruan Tinggi sebesar 6.489 orang.

Adapun gambaran penduduk 15 tahun keatas menurut ijazah yang dimiliki dan jenis kegiatannya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.77  
Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah yang Dimiliki dan Jenis kegiatannya di Kabupaten Boalemo, 2016

No	Ijazah Tertinggi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya
1	SMP/Sederajat	46.064	426	7.939	21.513	1.797
2	SMA/Sederajat	11.793	2.414	2.470	3.456	286
3	PT	6.260	229	223	687	-
<b>Jumlah</b>		<b>64.117</b>	<b>3.069</b>	<b>10.632</b>	<b>25.656</b>	<b>2.083</b>

Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2017

## 2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (dependency ratio) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun keatas dengan jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.78  
Rasio Ketergantungan Kabupaten Boalemo, 2016

No	Uraian	2016
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	37.623
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	5.630
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	43.253
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	100.006
5	Rasio ketergantungan	43,25

Sumber : BPS Kab. Boalemo, 2017

## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu**

Kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun yang lalu dapat dilihat dari anggaran pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini diarahkan dan bertujuan untuk dapat menampung aspirasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Namun demikian, agar ada jaminan bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, efektif, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat dalam penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam perumusannya memperhatikan beberapa faktor, diantaranya faktor keseimbangan antara pendapatan dengan belanja serta pembiayaan. Berdasarkan data realisasi keuangan daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2016 sebagai gambaran kinerja keuangan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar analisis yang mencakup analisis pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang diuraikan sebagai berikut :

### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Boalemo sejak lima tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1  
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  
Tahun 2012 sd Tahun 2016 Kabupaten Boalemo

KODE REKENING	U R A I A N	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>405,443,629,061.00</b>	<b>487,378,818,979.00</b>	<b>565,294,289,283.57</b>	<b>710,800,689,088.00</b>	<b>785,937,545,310.61</b>	15%
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>23,638,470,050.00</b>	<b>23,883,446,281.00</b>	<b>37,352,461,970.57</b>	<b>43,432,090,348.00</b>	<b>48,794,270,892.61</b>	17%
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6,099,592,849.00	2,740,360,009.00	4,826,219,379.00	5,762,709,760.00	5,873,819,775.00	8%
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3,441,105,597.00	3,235,614,552.00	3,067,784,136.00	2,790,728,690.00	2,028,891,078.00	-9%
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,933,760,998.00	6,099,481,831.00	6,647,326,446.00	7,020,407,143.00	3,827,745,236.00	5%
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	10,164,010,606.00	11,807,989,889.00	22,811,132,009.57	27,858,244,755.00	37,063,814,803.61	33%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>355,954,508,558.00</b>	<b>425,580,925,850.00</b>	<b>474,016,061,219.00</b>	<b>592,552,343,952.00</b>	<b>647,891,440,112.00</b>	13%
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20,583,244,558.00	18,088,970,850.00	12,060,091,219.00	11,654,907,952.00		
4.2.2	Dana Alokasi Umum						
4.2.3	Dana Alokasi Khusus						
4.2.4	Dana Transfer Umum	299,140,794,000.00	341,152,435,000.00	389,548,660,000.00	405,948,366,000.00	472,959,633,000.00	10%
4.2.5	Dana Transfer Khusus	36,230,470,000.00	66,339,520,000.00	72,407,310,000.00	174,949,070,000.00	174,931,807,112.00	47%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA</b>	<b>25,850,650,453.00</b>	<b>37,914,446,848.00</b>	<b>53,925,766,094.00</b>	<b>74,816,254,788.00</b>	<b>89,251,834,306.00</b>	29%
4.3.1	Pendapatan Hibah	0.00			2,117,931,500.00	12,253,350,900.00	96%
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4,798,079,453.00	7,828,658,348.00	11,310,794,594.00	12,819,575,288.00	16,623,489,006.00	30%
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	21,052,571,000.00	26,748,417,000.00	40,007,547,000.00	57,620,444,000.00	57,216,975,000.00	24%
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0.00	3,337,259,000.00	2,607,424,500.00	2,258,304,000.00	3,158,019,400.00	0
4.3.6	Pendapatan Lainnya		112,500.00	0.00			-20%
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>414,972,428,002.00</b>	<b>479,986,223,172.00</b>	<b>565,765,408,840.76</b>	<b>688,156,716,089.00</b>	<b>758,742,621,786.02</b>	13%
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>222,982,015,464.00</b>	<b>250,631,593,034.00</b>	<b>263,984,203,893.00</b>	<b>305,024,933,609.00</b>	<b>382,149,038,469.00</b>	12%
5.1.1	Belanja Pegawai	195,935,307,048.00	216,546,051,766.00	237,869,284,673.00	257,221,647,267.00	270,104,418,404.00	7%

5.1.2	Belanja Bunga	0.00	0.00	589,142,012.00	3,631,736,405.00	3,777,501,893.00	520%
5.1.3	Belanja Subsidi	2,552,670,000.00	0.00	0	0.00	0	0%
5.1.4	Belanja Hibah	3,626,839,500.00	16,903,899,364.00	3,716,110,000.00	3,429,380,000.00	28,195,745,550.00	201%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2,577,150,000.00	672,400,000.00	1,055,177,500.00	220,000,000.00	0.00	-39%
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	16.840.329.780	0.00	19,982,814,826.00	40,522,169,937.00	79,947,589,622.00	20%
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	934,007,000.00	0.00	255,874,885.00	0.00	123,783,000.00	40%
5.1.9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	515,712,136.00	16,509,241,904.00	515,799,997.00	0.00	0.00	-39%
5.2	BELANJA LANGSUNG	<b>191,990,412,538.00</b>	<b>229,354,630,138.00</b>	<b>301,781,204,947.76</b>	<b>383,131,782,480.00</b>	<b>376,593,583,317.02</b>	15%
5.2.1	Belanja Pegawai	24,717,244,667.00	24,799,772,553.00	29,831,269,900.00	32,500,929,643.00	42,133,491,696.82	12%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73,668,413,302.00	68,660,309,953.00	98,248,313,103.76	145,257,088,914.00	146,891,037,764.20	17%
5.2.3	Belanja Modal	93,604,754,569.00	135,894,547,632.00	173,701,621,944.00	205,373,763,923.00	187,569,053,856.00	17%
	SURPLUS / DEFISIT	<b>(9,528,798,941.00)</b>	<b>7,392,595,807.00</b>	<b>(471,119,557.19)</b>	<b>22,643,972,999.00</b>	<b>27,194,923,524.59</b>	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	<b>34,265,978,277.00</b>	<b>17,130,826,525.00</b>	<b>52,223,479,332.00</b>	<b>63,474,465,774.81</b>	<b>79,316,927,660.81</b>	40%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	<b>34,265,978,277.00</b>	17,130,826,525.00	18,523,422,332.00	48,752,359,774.81	79,316,927,660.81	37%
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			33,700,057,000.00	14,722,106,000.00	0.00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	<b>7,500,000,000.00</b>	<b>6,000,000,000.00</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>6,801,511,113.00</b>	<b>16,206,044,452.00</b>	31%
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7,500,000,000.00	6,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,500,000,000.00	3,000,000,000.00	-14%
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang				3,301,511,113.00	13,206,044,452.00	60%
	PEMBIAYAAN NETTO	<b>26,765,978,277.00</b>	<b>11,130,826,525.00</b>	<b>49,223,479,332.00</b>	<b>56,672,954,661.81</b>	<b>63,110,883,208.81</b>	62%
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	<b>17,237,179,336.00</b>	<b>18,523,422,332.00</b>	<b>48,752,359,774.81</b>	<b>79,316,927,660.81</b>	<b>90,305,806,733.40</b>	49%

Sumber : BPKAD Kab. Boalemo Tahun 2017

## 1. Pendapatan

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah mulai tahun 2012 hingga tahun 2017 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 pendapatan daerah Kabupaten

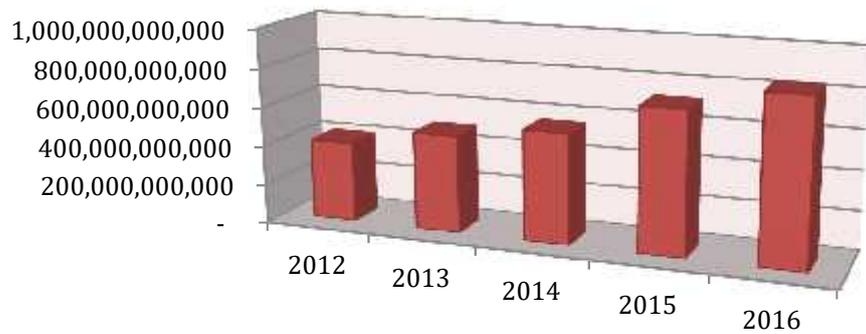
Boalemo sebesar Rp. 408.311.454.397.-. Tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 495.865.273.397.-. Tahun 2014 meningkat lagi menjadi Rp. 558.545.028.573.-. selanjutnya Tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup besar yakni sebesar Rp. 722.214.816.303.-, dan pada Tahun 2016 meningkat lagi menjadi Rp. 834.058.442.500.-. untuk peningkatan pendapatan asli masih didominasi oleh pendapatan yang berasal dari penerimaan Deviden atas penyertaan modal Pemerintah Daerah dan Penerimaan BLUD serta Dana Kapitasi, namun demikian sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

Untuk dana perimbangan sendiri masih memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan daerah, khususnya dana alokasi khusus yang setiap tahun menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan kecuali untuk tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan, hal ini disebabkan target penerimaan Negara yang berasal dari sektor pajak tidak tercapai sehingga berdampak pada penyesuaian alokasi belanja Negara termasuk dana transfer ke daerah.

Untuk lain – lain pendapatan daerah yang sah, dimana dana desa, dana insentif daerah, pendapatan hibah dari pemerintah pusat masih menjadi dominan dalam memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah selain bantuan keuangan serta bagi hasil yang berasal dari pemerintah provinsi Gorontalo.

Grafik peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini :

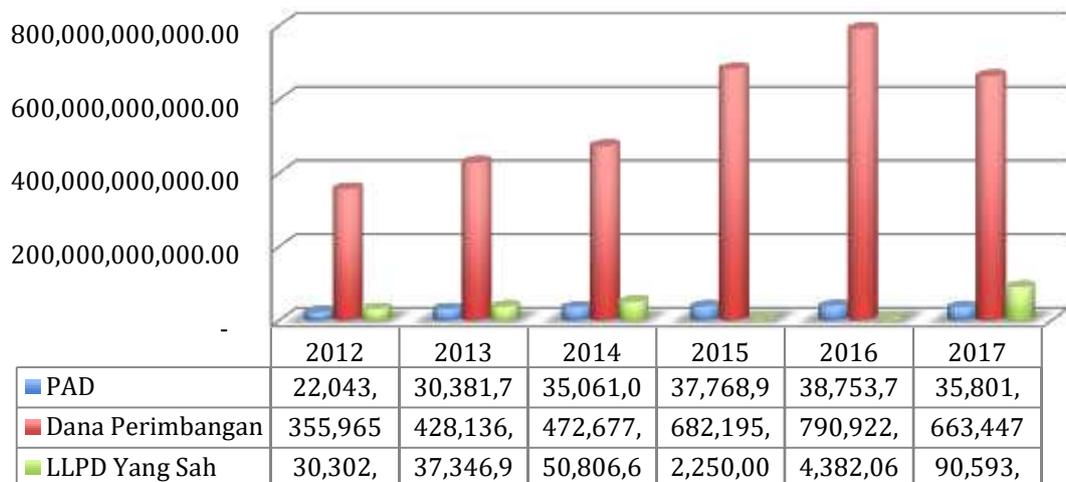
Grafik 3.1  
Perkembangan Pendapatan Daerah  
Tahun 2012 - 2016



Sumber : BKAD Kab. Boalemo, 2017

Gambaran perkembangan Pendapatan menurut sumber pendapatan selang tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik 3.2 berikut :

Grafik 3.2  
Perkembangan Pendapatan Daerah  
Tahun 2012 – 2016



Sumber : BKAD Kab. Boalemo, 2017

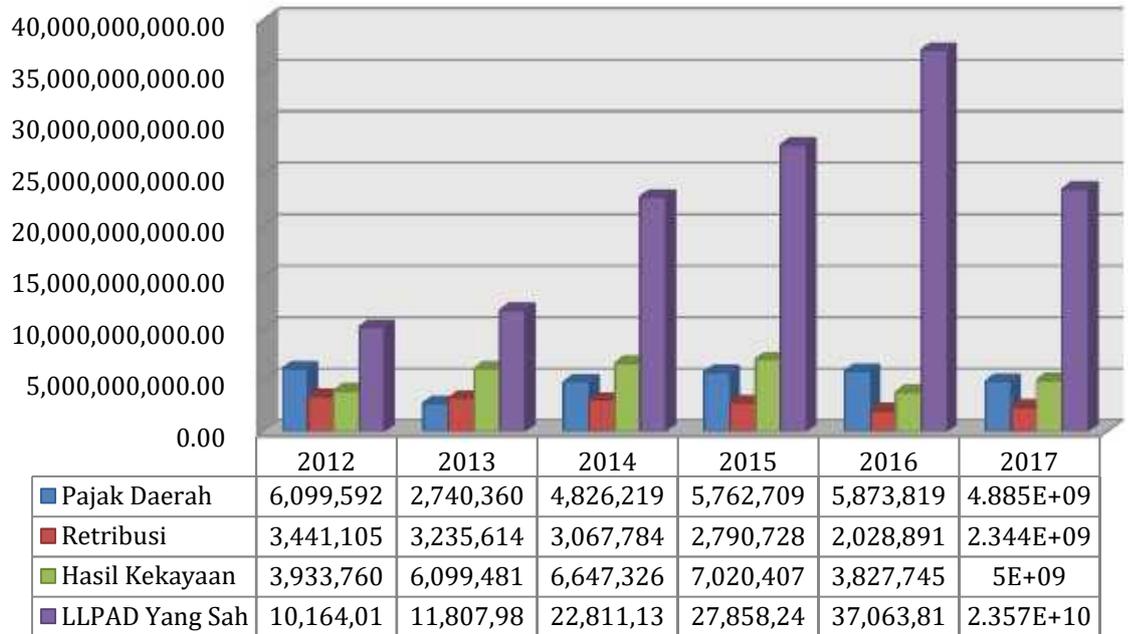
Berdasarkan data diatas, masing-masing sumber pendapatan daerah dalam APBD selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang berbeda-beda. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

) Pendapatan Asli Daerah,

Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Boalemo sejak tahun 2012-2016 mengalami peningkatan tidak terlalu signifikan yakni rata-rata hanya sebesar 22%. Pada Tahun 2012 realisasi PAD Kabupaten Boalemo hanya sebesar Rp. 23.638.470.050.-. Tahun 2013 meningkat sebesar 1% yakni sebesar Rp. 23.883.446.281.-. Namun pada tahun 2014, PAD Kabupaten Boalemo meningkat sebesar 56% atau sebesar Rp. 37.352.461.970,57.- selanjutnya pada tahun 2015 meningkat sebesar 16% atau sebanyak Rp. 43.432.090.348.-, dan pada Tahun 2016 meningkat lagi sebesar 12 % atau sebanyak Rp. 48.794.270.892,61.-

Namun jika dilihat menurut sumbernya, penyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boalemo mulai Tahun 2013-2016 lebih besar berasal dari Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo dan Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan besaran perbulan yang dibayarkan dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Gambaran realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada grafik dibawah :

Grafik 3.3  
Perkembangan Pendapatan Daerah  
Tahun 2012 – 2016



Sumber : BKAD Kab. Boalemo, 2017

#### ) Dana Perimbangan

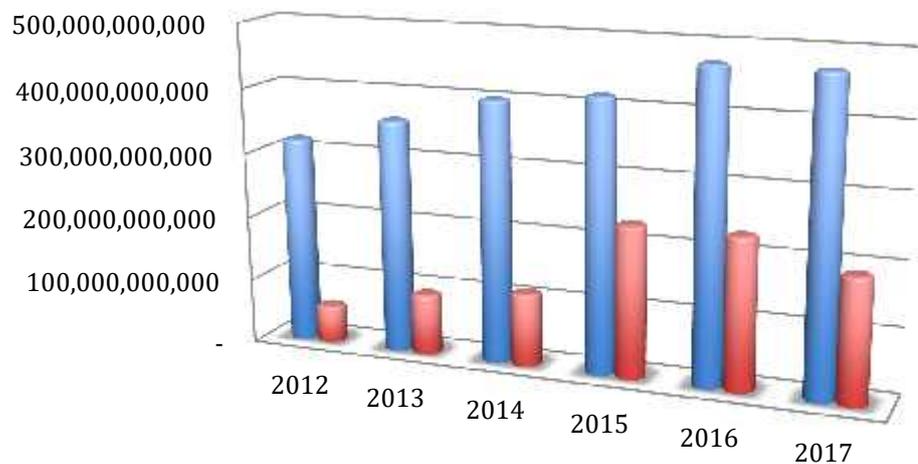
Salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Kabupaten Boalemo adalah Dana Perimbangan, dan berdasarkan perubahan kebijakan transfer ke daerah dimana dana perimbangan terbagi menjadi dua bagian yakni;

- Dana Transfer Umum (*General Purpose Grant*) yang terdiri dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum;
- Dana Transfer Khusus (*Specifik Purpose Grant*) yang terdiri dari dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik;

untuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dengan rata-rata kenaikan setiap tahunnya sebesar 20%. Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Boalemo Tahun 2012 sebesar Rp. 355.945.508.558.- hingga tahun 2016 meningkat sangat

signifikan yakni sebesar Rp. 724.889.923.518.-. Peningkatan tersebut terjadi pada Alokasi Dana Khusus yang mulai tahun 2014 sudah menerapkan sistem Bottom up atau pengalokasian Dana DAK berdasarkan usulan daerah melalui e-proposal, sementara untuk dana bagi hasil penerimaan hanya bersifat sementara (*prognosa*) sehingga penerimaan DBH cenderung fluktuasi, hal ini diakibatkan penerimaan DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Negara pada satu tahun anggaran tertentu. Gambaran peningkatan Dana Perimbangan berdasarkan sumber pendapatannya dapat dilihat pada grafik dibawah :

Grafik 3.4  
Perkembangan Dana Perimbangan  
Tahun 2012 – 2017



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TRANSFER UMUM	319,724,033	359,241,404	401,608,754	417,603,274	472,959,634	472,604,09
TRANSFER KHUSUS	57,283,041	93,087,937	112,414,852	232,569,512	232,148,781	190,843,31

Sumber : BKAD Kab. Boalemo, 2017

## J) Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber pendapatan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri atas Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Desa yang bersumber dari APBN, serta Dana Insentif Daerah. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Boalemo selama 5 (lima) tahun terakhir sangat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada keadaan tahun 2012-2016 yakni pada Tahun 2012 sebesar Rp. 25.850.650.453.-, selanjutnya pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 37.914.446.848.-, dan pada tahun 2014 meningkat sangat signifikan sebesar Rp. 53.925.766.094.-, namun pada tahun 2015 menurun drastis sebesar Rp. 2.117.931.500.- dan pada tahun 2016 sedikit meningkat menjadi sebesar Rp. 12.253.350.900.-

Keadaan yang sangat fluktuatif tersebut diakibatkan oleh :

- penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi didasarkan pada realisasi tahun anggaran sebelumnya dan peraturan perundang-undangan setiap tahun anggaran.
- Penganggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN didasarkan pada presentase dana desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan dan kinerja pelaksanaan dana desa.
- Penganggaran Dana Insentif Daerah juga didasarkan pada penilaian terhadap perbaikan indikator kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

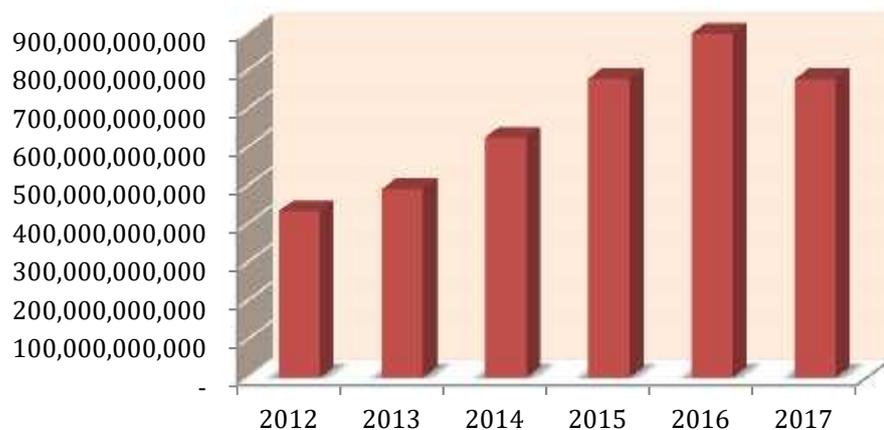
## 2. Belanja

Belanja daerah merupakan salah satu komponen kebijakan keuangan yang pengalokasiannya disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, dan kebutuhan

pembangunan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Komposisi belanja daerah terdiri dari 2 (dua) komponen yakni: *belanja tidak langsung* dan *belanja langsung*. Belanja tidak langsung adalah bagian belanja berupa belanja pegawai, belanja hibah, belanja subsidi dan belanja tak terduga yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasilnya, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik), sedangkan belanja langsung adalah bagian belanja berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasilnya, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari sisi belanja daerah selama periode tertentu yang biasanya selama 5 (lima) tahun. Kinerja ini ditunjukkan oleh seberapa besar penerimaan daerah digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan belanja daerah, baik belanja yang sifatnya rutin maupun belanja non rutin.

Gambaran trend perkembangan belanja daerah Kabupaten Boalemo tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.5  
Perkembangan Belanja Tahun 2012 – 2017



Sumber : BKAD Kab. Boalemo, 2017

Secara rinci rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2  
Pertumbuhan Belanja Tahun 2012 – 2017

<b>NO</b>	<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE ( % )</b>
<b>1</b>	<b>2012</b>	<b>435.117.047.508</b>	<b>414.972.428.002</b>	<b>95,37%</b>
<b>2</b>	<b>2013</b>	<b>507.102.452.733</b>	<b>479.986.223.172</b>	<b>94,65%</b>
<b>3</b>	<b>2014</b>	<b>625.068.450.905</b>	<b>565.765.408.841</b>	<b>90,51%</b>
<b>4</b>	<b>2015</b>	<b>732.586.729.862</b>	<b>647.634.546.152</b>	<b>88,40%</b>
<b>5</b>	<b>2016</b>	<b>814.294.983.537</b>	<b>678.795.032.164</b>	<b>83,36%</b>
<b>6</b>	<b>2017</b>	<b>776.913.718.875</b>		
	<b>Rata-rata</b>			<b>90,46%</b>

Sumber : BKAD Kab. Boalemo, 2017

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan sebagai salah satu kelompok jenis penerimaan dan pengeluaran daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dengan demikian, pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa pembiayaan penerimaan daerah terdiri dari :

#### a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari dari sisa anggaran tahun lalu yang dapat berasal dari program/kegiatan pembangunan yang belum selesai pada tahun anggaran yang lalu

dan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berjalan, serta berasal dari pelampauan target penerimaan dan sisa belanja dari program dan kegiatan.

b. Transfer dari Dana Cadangan

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari kegiatan transfer sumber-sumber ekonomi dari pemilik, serta penerimaan kembali pencairan Dana Cadangan yang telah dicadangkan untuk beberapa tahun anggaran.

c. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari kegiatan meminjam dana dan menerbitkan obligasi.

d. Hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari penjualan aktiva tetap milik pemerintah daerah.

Sedangkan pengeluaran daerah adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran. Kelompok pembiayaan pengeluaran daerah terdiri atas jenis pembiayaan sebagai berikut:

a. Transfer ke Dana Cadangan

Merupakan sumber pembiayaan yang berupa kegiatan transfer sumber-sumber ekonomi kepada pemilik.

b. Penyertaan Modal

Merupakan sumber pembiayaan yang berupa kegiatan penyertaan modal (investasi).

c. Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo

Merupakan sumber pembiayaan yang berupa pelunasan utang pokok yang telah jatuh tempo.

e. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Merupakan sumber pembiayaan yang berupa dari sisa anggaran tahun berjalan yang dapat berasal dari surplus anggaran tahun berjalan.

Gambaran realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Boalemo terinci pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2012 - 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata2
Penerimaan Pembiayaan	<b>34.265.978.277</b>	<b>17.130.826.525</b>	<b>52.223.479.332</b>	<b>48.752.359.775</b>	<b>79.316.927.661</b>	<b>42%</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34.265.978.277	17.130.826.525	18.523.422.332,00	48.752.359.774,81	79.316.927.661	<b>37%</b>
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	33.700.057.000,00	-	-	<b>-20%</b>
						<b>0%</b>
						<b>0%</b>
Pengeluaran Pembiayaan	<b>7.500.000.000,0</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>6.801.511.113</b>	<b>16.206.044.452</b>	<b>39%</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000,0	6.000.000.000	-	3.500.000.000,00	3.000.000.000,00	<b>-27%</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ke BUMD	-	-	3.000.000.000	3.301.511.113,00	0,00	<b>-18%</b>
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat					13.206.044.452	

Sumber : BKAD Kab. Boalemo 2017

### 3.1.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah serta pihak legislasi sebagai gambaran atas posisi keuangan tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.

Dengan membaca serta menganalisa laporan keuangan dimaksud pihak manajemen pemerintah daerah dapat memprediksi langkah-langkah yang akan ditempuh sebagai dasar pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah

Daerah Kabupaten Boalemo selama kurun waktu 2012-2016 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4  
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah  
Kabupaten Boalemo

KD. REK	Uraian	Rata - rata Pertumbuhan
<b>1</b>	<b>ASET</b>	
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Kas</b>	46%
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0%
1.1.3	Piutang	257%
1.1.4	Piutang Lain-lain	72%
1.1.5	Persediaan	-11%
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	63%
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	
1.2.1	Investasi Non Permanen	0%
1.2.2	Investasi Permanen	30%
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	30%
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	
1.3.1	Tanah	43%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	5%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	11%
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	15%
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	2%
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	10%
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	1%
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	6%
<b>1.4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>	
1.4.1	Dana Cadangan	0%
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	0%
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0%
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-1%
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0%
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	98%
1.5.5	Aset Lain-lain	311%
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	141%
	<b>JUMLAH ASET</b>	11%
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	

2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0%
2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	14%
2.1.2	Utang Bunga	0%
2.1.3	Utang Pajak	-30%
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0%
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	0%
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	121%
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>85%</b>
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0%
2.2.1	Utang Dalam Negeri	1%
2.2.2	Utang Luar Negeri	0%
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>1%</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>201%</b>
3	EKUITAS DANA	
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	0%
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	48%
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	223%
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	-11%
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	121%
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	229%
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>63%</b>
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	30%
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	9%
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	-4%
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>8%</b>
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN	0%
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0%
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN</b>	<b>0%</b>
3.4	KOREKSI EKUITAS	
3.4.1	Koreksi Ekuitas	-3%
	<b>JUMLAH KOREKSI EKUITAS</b>	<b>-3%</b>
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>10%</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>11%</b>

Sumber : BPKAD Kab. Boalemo Tahun 2017

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Rata-rata pertumbuhan jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo mencapai 10 % yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Boalemo meningkat sebesar 10 % setiap tahun. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan. Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai 41%. Tingginya pertumbuhan aset lancar ini menunjukkan bahwa kondisi aset pemerintah Kabupaten Boalemo berada pada kondisi sehat.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan kegiatan atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam kurun waktu 2012-2016 dengan rata-rata sebesar 48 %, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo selama kurun waktu tersebut selalu dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang cukup tinggi secara tepat waktu.

Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo selama kurun waktu 4 tahun mengalami pertumbuhan sebesar 10% yang berarti bahwa ekuitas dananya cukup tinggi.

Disamping itu pula kinerja keuangan Kabupaten Boalemo dapat dianalisis sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5  
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Boalemo

<b>Analisis Ratio</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Current ratio</b>	<b>413%</b>	<b>477%</b>	<b>1233%</b>	<b>762%</b>	<b>796%</b>
	Hutang Rp 1 dijamin dengan aset lancar Rp 413	Hutang Rp 1 dijamin dengan aset lancar Rp 477	Hutang Rp 1 dijamin dengan aset lancar Rp 1.233	Hutang Rp 1 dijamin dengan aset lancar Rp 762	Hutang Rp 1 dijamin dengan aset lancar Rp 796
Quick ratio	394%	449%	1130%	675%	796%
Hutang Terhadap Modal	5,773%	7,037%	3,040%	0,338%	0,339%

*Sumber: BKAD Kab. Boalemo, 2017*

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel di atas dapat diuraikan analisis Rasio keuangan daerah yakni untuk rasio lancar (current ratio) merupakan rasio yang paling umum digunakan dalam menganalisa modal kerja suatu organisasi, rasio ini menunjukkan perbandingan antara aset lancar dengan hutang lancar di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Curent ratio atau rasio lancar menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) kabupaten Boalemo dalam jangka pendek untuk membayar hutang-hutangnya. Pada tahun 2016 current ratio sejumlah 413% atau 413:1 yang berarti setiap hutang lancar Rp 1 dijamin dengan nilai aset lancar sejumlah Rp 413.

Quick ratio adalah perbandingan nilai aset lancar setelah dikurangi nilai persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini jika dibandingkan dengan current ratio lebih tajam karena membandingkan aset/aktiva yang sangat liquid (mudah dicairkan atau diuangkan). Pada tahun 2016 jumlah quick ratio sejumlah 394% atau 394:1 yang artinya setiap Rp 1 dari hutang lancar di jamin dengan Rp 394 Kas.

Rasio hutang terhadap modal merupakan perbandingan antara total hutang terhadap total modal yang menggambarkan seberapa besar hutang dijamin oleh ketersediaan modal dari pada suatu organisasi. Untuk Kabupaten Boalemo rasio hutang terhadap modal adalah 5,77% dari modal menggambarkan bahwa modal yang dimiliki oleh pemerintah daerah apat menjamin kewajiban yang harus dipenuhi oleh kabupaten boalemo pada saat liquidasi.

### **3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu**

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dapat diuraikan berdasarkan arah dan kebijakan pendapatan daerah, arah dan kebijakan belanja daerah, serta arah dan kebijakan pembiayaan daerah, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Arah dan Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah khususnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud. Hal ini diarahkan agar penerimaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan jumlah penduduk, geografis dan luas wilayah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

Dengan mengacu pada uraian di atas, pendapatan daerah diarahkan agar dalam penerimaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dapat mewujudkan Kabupaten Boalemo sejajar dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Gorontalo. Dengan arahan tersebut, maka kebijakan pendapatan daerah meliputi :

- a. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan pendapatan dari sumberdaya yang ada.

Dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki, khususnya bahan galian golongan C, yang masih menjadi primadona hendaknya memperhatikan pengembangan dan kelestariannya.

b. Intensifikasi pemungutan PBB

Dusahakan agar terjadi kesesuaian antara target PBB dengan potensi PBB untuk sektor pedesaan yang ditunjang oleh akuratnya data potensi PBB, sarana dan prasarana Pendukung yang memadai, di samping peningkatan pengawasan dan keterpaduan tugas serta pengembangan sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah.

c. Penyempurnaan dan penambahan jenis pajak dan retribusi Atas dasar kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak dan retribusi, maka diperlukan evaluasi dan pengkajian ulang jenis Obyek pajak dan retribusi dalam rangka penyempurnaan dan penambahannya.

## 2. Arah dan Kebijakan Belanja Daerah

Fokus kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan kinerja pengelolaan belanja daerah dan tetap mengacu pada ketiga fungsinya yaitu **pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas**.

Kebijakan umum belanja daerah mengacu pada kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2022 yang merupakan payung atau dokumen induk perencanaan pembangunan yang mengarahkan seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan sehingga berkedudukan sebagai acuan bagi semua pelaku utama pembangunan dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengembangkan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Boalemo.

Dengan dasar norma perencanaan dan pelaksanaan anggaran, maka dalam penyusunan belanja daerah Kabupaten Boalemo tetap memperhatikan prinsip-prinsip anggaran, yaitu prinsip keadilan, prinsip

efisiensi dan efektifitas serta prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Bertitik tolak pada arah kebijakan dimaksud, maka pemerintah telah mengadakan beberapa langkah penyempurnaan dan peningkatan alokasi dana perimbangan keuangan berupa peningkatan alokasi dana ke daerah dengan :

- a. Meningkatkan penerimaan daerah baik dana Bagi Hasil pusat maupun dana Bagi Hasil Provinsi yang didalamnya termasuk dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna memberikan keleluasaan dan kemandirian daerah dalam merencanakan dan melaksanakan penggunaan dana tersebut.
- b. Memberikan kewenangan perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui pendelegasian pemrosesan DIPA dan Dokumen anggaran lainnya di daerah dan dilaksanakan dengan bertumpu pada ketentuan penatausahaan dan pengelolaan keuangan Daerah.

### **3. Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah diarahkan untuk penambahan penyertaan modal investasi pemerintah dan pengelolaan pembiayaan untuk menutupi defisit antara pendapatan dan belanja pada tahun berjalan.

Disamping itu pengeluaran pembiayaan antara lain diarahkan untuk membayar cicilan pokok hutang kepada Pusat Invesatsi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan RI (sekarang beralih ke BUMN yaitu PT. SMI Sarana Multi Infrastruktur). Juga penyertaan modal pada PT. Bank SULUTGO.

#### **3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

Proporsi Penggunaan Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Boalemo sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 prosentasenya semakin menurun. Hal ini menggambarkan bahwa proporsi belanja untuk kepentingan publik lebih besar dibandingkan

dengan belanja paratur. Adapun Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Boalemo diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6  
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur  
Kabupaten Boalemo

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Belanja Aparatur	total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	T.A 2014	267,700,554,573.00	568,765,408,840.76	47%
2	T.A 2015	289,722,576,910.00	694,958,227,202.00	42%
3	T.A 2016	316,263,310,100.82	774,948,666,238.02	41%

*Sumber: BKAD Kab. Boalemo, 2017*

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari jenis penerimaan dan pengeluaran daerah yang merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dengan demikian, pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Adapun Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan silpa tahun berjalan.

Adapun gambaran analisis pembiayaan Kabupaten Boalemo dapat diuraikan dalam tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7  
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Boalemo

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Pendapatan Daerah	565,294,289,283.57	710,800,689,088.00	785,937,545,310.61
2	Belanja Daerah	565,765,408,840.76	688,156,716,089.00	758,742,621,786.02
3	Pengeluaran Pembiayaan	3,000,000,000.00	6,801,511,113.00	16,206,044,452.00
	<b>Defisit Riil</b>	<b>(3,471,119,557.19)</b>	<b>15,842,461,886.00</b>	<b>10,988,879,072.59</b>

*Sumber: BKAD Kab. Boalemo, 2017*

Selanjutnya penutup defisit riil anggaran Kabupaten Boalemo diuraikan dalam tabel 3.8.

Tabel 3.8  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Boalemo

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit		
		2014	2015	2016
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	52,223,479,332.00	48,752,359,774.81	79,316,927,660.81
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	33,700,057,000.00	14,722,106,000.00	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6	Penerimaan Piutang Daerah			

*Sumber: BKAD Kab. Boalemo, 2017*

Sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kabupaten Boalemo dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.9

## Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Boalemo

No	Uraian	2014		2015		2016	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	48,752,359,774.81		79,316,927,660.81		90,305,806,733.40	
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	0%		0%		0%
3	Pelampauan penerimaan dana Perimbangan	1,338,728,326.00	3%		0%		0%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	0%		0%		0%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	47,413,631,448.81	97%	79,316,927,660.81	100%	90,305,806,733.40	100%
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan		0%		0%		0%

Sumber: BKAD Kab. Boalemo, 2017

### 3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan totalitas anggaran yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan selama lima tahun akan datang. Kerangka pendanaan ini terdiri dari proyeksi pendapatan dan belanja daerah

#### 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Tabel 3.10  
 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  
 Tahun 2018-2022

KODE REKENING	URAIAN	Pertumbuhan %	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>		<b>789,842,218,875.00</b>	<b>809,588,274,346.88</b>	<b>829,827,981,205.55</b>	<b>850,573,680,735.69</b>	<b>871,838,022,754.08</b>	<b>893,633,973,322.93</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>35,801,410,875.00</b>	<b>36,696,446,146.88</b>	<b>37,613,857,300.55</b>	<b>38,554,203,733.06</b>	<b>39,518,058,826.39</b>	<b>40,506,010,297.05</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.50%	4,885,018,000.00	5,007,143,450.00	5,132,322,036.25	5,260,630,087.16	5,392,145,839.34	5,526,949,485.32
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.50%	2,344,169,000.00	2,402,773,225.00	2,462,842,555.63	2,524,413,619.52	2,587,523,960.00	2,652,212,059.00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.50%	5,000,000,000.00	5,125,000,000.00	5,253,125,000.00	5,384,453,125.00	5,519,064,453.13	5,657,041,064.45
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	2.50%	23,572,223,875.00	24,161,529,471.88	24,765,567,708.67	25,384,706,901.39	26,019,324,573.92	26,669,807,688.27
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>663,447,410,000.00</b>	<b>680,033,595,250.00</b>	<b>697,034,435,131.25</b>	<b>714,460,296,009.53</b>	<b>732,321,803,409.77</b>	<b>750,629,848,495.01</b>
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	2.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	2.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.4	Dana Transfer Umum	2.50%	472,604,092,000.00	484,419,194,300.00	496,529,674,157.50	508,942,916,011.44	521,666,488,911.72	534,708,151,134.52
4.2.5	Dana Transfer Khusus	2.50%	190,843,318,000.00	195,614,400,950.00	200,504,760,973.75	205,517,379,998.09	210,655,314,498.05	215,921,697,360.50
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>		<b>90,593,398,000.00</b>	<b>92,858,232,950.00</b>	<b>95,179,688,773.75</b>	<b>97,559,180,993.09</b>	<b>99,998,160,517.92</b>	<b>102,498,114,530.87</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.50%	1,737,200,000.00	1,780,630,000.00	1,825,145,750.00	1,870,774,393.75	1,917,543,753.59	1,965,482,347.43
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2.50%	15,000,000,000.00	15,375,000,000.00	15,759,375,000.00	16,153,359,375.00	16,557,193,359.38	16,971,123,193.36
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2.50%	73,688,198,000.00	75,530,402,950.00	77,418,663,023.75	79,354,129,599.34	81,337,982,839.33	83,371,432,410.31
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	2.50%	168,000,000.00	172,200,000.00	176,505,000.00	180,917,625.00	185,440,565.63	190,076,579.77
4.3.6	Pendapatan Lainnya	2.50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>		<b>776,913,718,875.00</b>	<b>796,674,061,846.88</b>	<b>816,590,913,393.05</b>	<b>850,843,186,227.87</b>	<b>872,114,265,883.57</b>	<b>893,917,122,530.66</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>407,872,530,910.00</b>	<b>418,069,344,182.75</b>	<b>428,521,077,787.32</b>	<b>446,152,854,732.00</b>	<b>457,306,676,100.30</b>	<b>468,739,343,002.81</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	2.50%	295,912,407,978.00	303,310,218,177.45	310,892,973,631.89	325,584,047,972.68	333,723,649,172.00	342,066,740,401.30
5.1.2	Belanja Bunga	2.50%	5,000,000,000.00	5,125,000,000.00	5,253,125,000.00	5,384,453,125.00	5,519,064,453.13	5,657,041,064.45
5.1.3	Belanja Subsidi	2.50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.4	Belanja Hibah	2.50%	12,246,240,500.00	12,552,396,512.50	12,866,206,425.31	13,187,861,585.95	13,517,558,125.59	13,855,497,078.73
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.50%	93,078,140,216.00	95,405,093,721.40	97,790,221,064.44	100,234,976,591.05	102,740,851,005.82	105,309,372,280.97
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.50%	1,000,000,000.00	1,025,000,000.00	1,050,625,000.00	1,076,890,625.00	1,103,812,890.63	1,131,408,212.89
5.1.9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.50%	635,742,216.00	651,635,771.40	667,926,665.69	684,624,832.33	701,740,453.14	719,283,964.46
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>369,041,187,965.00</b>	<b>378,604,717,664.13</b>	<b>388,069,835,605.73</b>	<b>404,690,331,495.87</b>	<b>414,807,589,783.27</b>	<b>425,177,779,527.85</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	2.50%	50,796,973,563.00	52,404,397,902.08	53,714,507,849.63	55,057,370,545.87	56,433,804,809.51	57,844,649,929.75

5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.50%	137,281,813,052.00	140,713,858,378.30	144,231,704,837.76	154,756,247,458.70	158,625,153,645.17	162,590,782,486.30
5.2.3	Belanja Modal	2.50%	180,962,401,350.00	185,486,461,383.75	190,123,622,918.34	194,876,713,491.30	199,748,631,328.59	204,742,347,111.80
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>		<b>12,928,500,000.00</b>	<b>12,914,212,500.00</b>	<b>13,237,067,812.50</b>	<b>(269,505,492.19)</b>	<b>(276,243,129.49)</b>	<b>(283,149,207.73)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>							
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>571,500,000.00</b>	<b>585,787,500.00</b>	<b>600,432,187.50</b>	<b>615,442,992.19</b>	<b>630,829,066.99</b>	<b>646,599,793.67</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2.50%	571,500,000.00	585,787,500.00	600,432,187.50	615,442,992.19	630,829,066.99	646,599,793.67
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.50%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>13,500,000,000.00</b>	<b>13,500,000,000.00</b>	<b>13,837,500,000.00</b>	<b>345,937,500.00</b>	<b>354,585,937.50</b>	<b>363,450,585.94</b>
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.50%	-	0.00	337,500,000.00	345,937,500.00	354,585,937.50	363,450,585.94
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00%	13,500,000,000.00	13,500,000,000.00	13,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>(12,928,500,000.00)</b>	<b>(12,914,212,500.00)</b>	<b>(13,237,067,812.50)</b>	<b>269,505,492.19</b>	<b>276,243,129.49</b>	<b>283,149,207.73</b>
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sumber: BKAD Kab. Boalemo, 2017

### 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Tabel 3.11

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah  
Kabupaten Boalemo

No.	Uraian	Proyeksi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan	809,588,274,346.88	829,827,981,205.55	850,573,680,735.69	871,838,022,754.08	893,633,973,322.93
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	585,787,500.00	600,432,187.50	615,442,992.19	630,829,066.99	646,599,793.67
	<b>Total penerimaan</b>	<b>810,174,061,846.88</b>	<b>830,428,413,393.05</b>	<b>851,189,123,727.87</b>	<b>872,468,851,821.07</b>	<b>894,280,573,116.60</b>
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	418,069,344,182.75	428,521,077,787.32	446,152,854,732.00	457,306,676,100.30	468,739,343,002.81
5	Pengeluaran Pembiayaan	13,500,000,000.00	13,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>378,604,717,664.13</b>	<b>388,407,335,605.73</b>	<b>405,036,268,995.87</b>	<b>415,162,175,720.77</b>	<b>425,541,230,113.79</b>

Sumber: BKAD Kab. Boalemo, 2017

Kapasitas riil kemampuan keuangan merupakan hasil dari total rencana penerimaan dikurangi dengan belanja tidak langsung periodik yang wajib mengikat serta prioritas utama, belanja langsung yang wajib mengikat serta prioritas utama kemudian pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama.

Untuk belanja langsung (termasuk belanja untuk urusan pendidikan yaitu dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah). Belanja langsung tersebut kemudian dikurangi dengan belanja langsung yang mengikat serta prioritas utama, pengeluaran pembiayaan yang wajib serta prioritas utama, sehingga menghasilkan total rencana pengeluaran prioritas utama I, sedangkan sisa kapasitas riil kemampuan keuangan adalah total kapasitas riil dikurangi dengan total rencana prioritas I.

Pada rencana alokasi pengeluaran prioritas II, untuk belanja tidak langsung (diluar prioritas bidang pendidikan) dikurangi dengan belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sehingga menghasilkan total rencana pengeluaran prioritas II.

Sedangkan untuk melihat surplus anggaran lebih atau berimbang dilakukan dengan menjumlahkan sisa kapasitas riil kemampuan keuangan dikurangi dengan total rencana pengeluaran prioritas II. Surplus tersebut nantinya, dalam struktur APBD dimasukkan pada jenis penerimaan pembiayaan daerah.

Tabel 3.12  
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Kabupaten Boalemo

No.	Uraian	Proyeksi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	378,604,717,664.13	388,407,335,605.73	405,036,268,995.87	415,162,175,720.77	425,541,230,113.79
2	Prioritas I	239,302,358,832.06	244,203,667,802.86	252,518,134,497.94	257,581,087,860.38	262,770,615,056.89
3	Prioritas II	139,302,358,832.06	144,203,667,802.86	152,518,134,497.94	157,581,087,860.38	162,770,615,056.89

*Sumber: BKAD Kab. Boalemo, 2017*

Tabel 3.13  
 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan  
 Mengikat serta Prioritas Utama  
 Kabupaten Boalemo

URAIAN	2017 (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>394,626,290,410.00</b>	<b>0.05</b>	<b>404,366,947,670.25</b>	<b>414,351,121,362.01</b>	<b>419,584,899,396.06</b>	<b>430,074,521,880.96</b>	<b>440,826,384,927.98</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	295,912,407,978.00	2.5%	303,310,218,177.45	310,892,973,631.89	318,665,297,972.68	326,631,930,422.00	334,797,728,682.55
Belanja Bunga	5,000,000,000.00	0	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00			
Belanja bagi hasil	93,713,882,432.00	2.5%	96,056,729,492.80	98,458,147,730.12	100,919,601,423.37	103,442,591,458.96	106,028,656,245.43
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>13,500,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>13,500,000,000.00</b>	<b>13,500,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pembentukan Dana Cadangan							
Pembayaran pokok utang	13,500,000,000.00	0%	13,500,000,000.00	13,500,000,000.00	-	-	
<b>TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA</b>	<b>408,126,290,410.00</b>		<b>417,866,947,670.25</b>	<b>427,851,121,362.01</b>	<b>419,584,899,396.06</b>	<b>430,074,521,880.96</b>	<b>440,826,384,927.98</b>

*Sumber: BKAD Kab. Boalemo, 2017*

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Dalam merumuskan permasalahan pembangunan daerah, maka akan dikemukakan terlebih dahulu gambaran rencana pembangunan secara general yang termuat dalam berbagai dokumen yang meliputi ; RPJPD Kabupaten, RTRW Kabupaten, RPJM Nasional, dan RPJMD Provinsi Gorontalo, sebagaimana berikut ini.

##### **4.1.1. Telaahan Atas RPJP Berjalan**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD, karena RPJMD Tahun 2017 - 2022 merupakan tahapan kedua pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Boalemo. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua terus berkesinambungan dari periode satu ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang pembangunan yang telah disusun. Visi RPJPD Kabupaten Boalemo adalah : **“Boalemo yang Maju, Mandiri dan Religius”**, dengan misi adalah sebagai berikut:

**Misi 1:**

Mewujudkan Perekonomian Boalemo yang Handal dan Berdaya Saing;

**Misi 2 :**

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Religius;

**Misi 3 :**

Mewujudkan Pemerintahan Daerah Boalemo yang Amanah.

Pada RPJPD Tahun 2011 - 2025 diarahkan konsep pembangunan yang jelas dan relevan serta menginspirasi sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh stakeholder untuk berpartisipasi secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Boalemo.

Untuk mewujudkan Perekonomian Boalemo yang handal dan berdaya saing maka diarahkan untuk pengembangan :

#### **1. Pertanian**

Kegiatan pertanian tanaman pangan akan diarahkan pada pengembangan komoditi unggulan daerah dengan pola pengelolaan bernuansa agribisnis yang utuh dan menyeluruh berdasarkan keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif. Oleh karena itu pengembangan pertanian tanaman pangan akan memperhatikan pewilayahan komoditas serta mempertahankan kelestarian plasma nutfah dan keseimbangan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan. Disamping itu, pembangunan pertanian tanaman pangan harus mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas ketahanan pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan Kabupaten Boalemo.

#### **2. Perkebunan**

Kegiatan sub sektor perkebunan diarahkan pada pengembangan komoditi tanaman perkebunan unggulan, tanaman perkebunan potensil dan tanaman perkebunan harapan yang pola pengelolaannya dilakukan berdasarkan sistem agribisnis yang utuh dan menyeluruh, mempertimbangkan keunggulan wilayah, memperhatikan kelestarian flasmah nutfah dan lingkungan serta berkontribusi pada ketahanan pangan Kabupaten Boalemo.

#### **3. Peternakan**

Kegiatan peternakan diarahkan pada pengembangan ternak unggulan daerah yang berintegrasi dengan pengembangan tanaman pangan dan perkebunan dan dilakukan dengan pola agribisnis serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

#### **4. Perikanan**

Pengembangan sektor perikanan diarahkan pada pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan serta berorientasi pada peningkatan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat.

## **5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup**

Pembangunan kehutanan diarahkan pada pengelolaan sektor kehutanan yang memperhatikan prinsip tata kelola lingkungan dan kehidupan berkelanjutan. Sedangkan untuk pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada penciptaan kenyamanan dan keasrian kawasan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan bermanfaat.

## **6. Pertambangan dan Energi**

Pembangunan pertambangan diarahkan pada usaha pertambangan yang menunjang ekonomi lokal, padat teknologi dan ramah lingkungan. Pembangunan energi diarahkan pada pengembangan potensi sumber daya listrik yang dimiliki Boalemo terutama sumberdaya energi yang terbarukan.

## **7. Industri**

Pembangunan dan pengembangan industri diarahkan pada industri skala kecil yang mampu menciptakan dan meningkatkan nilai tambah, menunjang pertumbuhan ekonomi lokal dan memiliki perspektif pasar yang dalam penerapannya bersifat ramah lingkungan baik teknis maupun sosial.

## **8. Koperasi, UKM dan Lembaga Ekonomi Mikro**

Pengembangan koperasi, UKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan penciptaan daya saing sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

## **9. Perdagangan dan Jasa**

Pembangunan perdagangan dan jasa diarahkan pada penciptaan Boalemo sebagai penyangga simpul perdagangan di Kawasan Teluk Tomini dan Sulawesi yang didukung oleh infrastruktur fisik dan aturan yang berkualitas dan relevan serta sistem informasi dan komunikasi yang handal dan menggugah inspirasi dalam menghadapi perdagangan bebas.

## **10. Kependudukan dan Ketenagakerjaan**

Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dan terciptanya keluarga sejahtera. Sedangkan pembangunan

ketenaga-kerjaan diarahkan pada peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip non-diskriminasi.

#### **11. Pariwisata**

Arah pembangunan pariwisata diarahkan pada pengembangan wisata berlandaskan nilai tradisi, budaya, sejarah dan keunikan alam Boalemo serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku pada masyarakat dan pelestarian lingkungan.

#### **12. Investasi**

Pengembangan investasi diarahkan pada investasi yang mendorong sektor riil dengan memperhatikan sektor publik disertai dengan jaminan kepastian berusaha serta tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya dan agama serta lingkungan.

#### **13. Penelitian dan Pengembangan**

Penelitian dan pengembangan diarahkan pada usaha-usaha penciptaan nilai tambah dan peningkatan manfaat ekonomi dari produk dan jasa, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kualitas pemerintahan, serta pencegahan penurunan kualitas lingkungan.

#### **14. Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur (fisik dan non-fisik) diarahkan pada kemampuan memfasilitasi peningkatan inovasi, daya saing dan kehandalan ekonomi serta peningkatan kualitas layanan termasuk penyediaan infrastruktur perumahan bagi KK miskin dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

#### **15. Tata Ruang**

Pengembangan tata ruang diarahkan ke penataan ruang yang komprehensif secara kewilayahan maupun administrasi agar tercipta keharmonisan kebutuhan dan daya dukung ruang sehingga keserasian, kelestarian dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

Selanjutnya untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta religius diarahkan kepada :

1) Pendidikan

Pengembangan pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses terhadap sumber-sumber belajar terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, peningkatan kualitas dan relevansi proses pelaksanaan pendidikan sesuai dengan tuntutan *stakeholder*, dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung serta manajemen internal institusi-institusi pendidikan dan pengelola sumber-sumber belajar lainnya. Proses pendidikan yang dijalankan harus mampu menciptakan insan berkarakter dan cerdas secara intelektual, emosional, sosial dan kinestetik serta membangkitkan dan mengembangkan kapasitas, bakat dan kreatifitas peserta didik pada semua jenjang dan jenis pendidikan termasuk pendidikan non-formal dan pendidikan luar biasa. Proses pendidikan dimaksud tetap harus menjunjung tinggi nilai moral dan etika serta agama.

2) Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan individu keluarga masyarakat untuk hidup sehat melalui peningkatan upaya pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative), secara holistik (fisik, psikis, dan sosial) dengan memperhatikan asas manfaat, adil, merata, dan bermutu mulai dari aspek layanan kesehatan dasar sampai layanan kesehatan lanjutan. Disamping pelayanan kesehatan masyarakat peningkatan status gizi masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian informasi kesehatan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dengan melibatkan stakeholder kesehatan.

3) Inovasi

Pengembangan inovasi diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintah dan swasta termasuk lembaga pendidikan dalam memfasilitasi masyarakat mengembangkan inovasi-inovasi kreatif yang mampu memberikan nilai tambah baik yang sifatnya terukur (*tangible*) maupun yang tidak terukur

(*intangible*) dalam peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

4) Keagamaan

Pembangunan keagamaan diarahkan pada peningkatan kesadaran dan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai dan ajaran agama yang dianut setiap individu sehingga masing-masing individu mampu memaknai kehidupannya terutama dalam menghidupkan khasanah nilai-nilai luhur agama.

5) Adat Istiadat

Pembangunan adat istiadat diarahkan pada peningkatan dan pelestarian peran adat istiadat sebagai spirit bagi kehidupan masyarakat yang religius, serta berpedoman pada falsafah Gorontalo yakni “Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendiikan Kitabullah”.

6) Sosial Budaya

Pembangunan sosial budaya diarahkan pada eksplorasi, peningkatan kualitas pemahaman dan pengejawantahan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan aspek-aspek budaya sehingga memperkuat modal sosial dan identitas diri masyarakat Boalemo di tengah-tengah lingkungan strategisnya yang dinamis.

7) Jaminan Perlindungan Sosial

Pembangunan pada aspek ini diarahkan pada penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga masalah-masalah sosial dapat dikelola agar kualitas tatanan masyarakat tetap terjaga. Penguatan dimaksud termasuk didalamnya usaha-usaha perlindungan terhadap anak yatim, dan penyandang cacat serta peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat sebagai bagian dari warga negara Indonesia, dan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Boalemo.

Serta untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah diarahkan pada:

a) Pelayanan Publik

Diarahkan untuk menggerakkan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima dan berkualitas yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

b) Pengembangan Kualitas Aparatur

Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif diarahkan pada pembentukan dan peningkatan kualitas individu sehingga memiliki kesadaran dan integritas dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Governance*, bernuansa religius, serta dapat bersinergi secara harmonis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

c) Penguatan Pemerintah Desa/Kelurahan

Penguatan pemerintahan desa dan kelurahan diarahkan pada kemandirian desa dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal ini ke depan tidak menutup kemungkinan untuk pembentukan Kelurahan maupun perubahan status Desa menjadi Kelurahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

d) Kapasitas Perencanaan Daerah

Perencanaan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas, kualitas dan sensitifitas perencana dalam membangun strategi dan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pembangunan.

e) Keuangan Daerah

Pembangunan keuangan dan aset daerah diarahkan pada terciptanya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas, serta disertai dengan pengawasan yang handal. Inovasi harus terus dikembangkan untuk mengidentifikasi dan menciptakan sumber-sumber anggaran dan sumber sumber keuangan daerah yang sejalan dengan usaha-usaha peningkatan ketahanan ekonomi, peningkatan kualitas dan intensitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

f) **Infrastruktur Pemerintahan**

Pengembangan infrastruktur pemerintahan diarahkan pada peningkatan kapasitas, kualitas dan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi yang didukung dengan teknologi yang relevan serta sistem data yang handal dan mutakhir.

g) **Kemitraan Pembangunan**

Kemitraan pembangunan diarahkan pada peningkatan intensitas dan kualitas kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pengambilan keputusan kebijakan publik, termasuk didalamnya peningkatan keterkaitan ekonomi Boalemo dengan jejaring ekonomi di Provinsi Gorontalo dan Teluk Tomini, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional. Penguatan kemitraan ini harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip non-diskriminasi dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam tetap terjaga.

h) **Hukum dan Perundang-Undangan**

Pembangunan hukum dan perundang-undangan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan hukum dan perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta memperhatikan perlindungan anak dan perempuan, serta diarahkan untuk peningkatan kualitas kesadaran dan budaya hukum masyarakat dalam rangka penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban.

i) **Koordinasi Pemerintahan**

Koordinasi pemerintahan diarahkan untuk menciptakan keharmonisan hubungan antar wilayah, lembaga pemerintahan baik vertikal maupun horisontal dan masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif.

j) **Keamanan dan Ketertiban**

Pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada upaya untuk mendorong kemampuan aparaturnya pemerintahan dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengelola keamanan dan ketertiban di daerah.

k) Sosial dan Politik

Pembangunan sosial dan politik diarahkan pada peningkatan kesadaran sosial dan politik demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan dinamis.

#### **4.1.2. Telaahan Atas RTRW Kabupaten Boalemo**

a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan visi misi pengembangan wilayah Kabupaten Boalemo yang didasarkan pada RPJPD Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2025, maka tujuan dari penataan ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031, adalah :

Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Boalemo yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai daerah pusat agribisnis, industri, pariwisata, dan jasa melalui sinergisasi pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berhirarki.

b. Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, terdiri atas:

1. Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan;
2. Pengembangan prasarana wilayah;
3. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
4. Peningkatan sumber daya hutan produksi;
5. Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
6. Pengembangan potensi pariwisata;
7. Pengembangan potensi pertambangan;
8. Pengembangan potensi industri;
9. Pengembangan potensi perdagangan;
10. Pengembangan potensi pendidikan;
11. Pengembangan potensi permukiman; dan
12. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### c. Strategi Penataan Ruang

Strategi Penataan Kabupaten Boalemo dalam rangka mewujudkan tujuan dan arah kebijakan penataan ruang daerah adalah sebagai berikut :

#### 1. Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Kegiatan

Strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan Kabupaten Boalemo terdiri atas:

- a. Meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi PKW, PKL eksisting, PKLp, dan PPK antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
- b. Mempromosikan PKLp berupa kota-kota satelit penyangga Wonosari dan Manangu;
- c. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
- d. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah rawan longsor di perbukitan dan rawan banjir di tepi sungai dan pantai;
- e. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
- f. Meningkatkan sinergitas, sistem transportasi dan komunikasi antarkawasan perkotaan, antar pusat-pusat kegiatan seperti PKW, PKL, PKLp, dan PPK;
- g. Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah perbukitan, bantaran sungai dan sempadan pantai; dan
- h. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.

#### 2. Pengembangan Prasarana Wilayah;

Strategi pengembangan prasarana wilayah Kabupaten Boalemo, terdiri atas:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang hierarkis, sinergis, terpadu dan merata PKW, PKL, PKLp, dan PPK di seluruh wilayah kabupaten;
- b. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara secara terpadu;
- c. Mendorong pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
- d. Meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro, dibanding pemanfaatan sumber daya yang tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- e. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
- f. Meningkatkan jaringan distribusi BBM dan gas kabupaten yang terpadu dengan jaringan dalam tataran nasional secara optimal;
- g. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
- h. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana persampahan secara terpadu dengan penerapan konsep 4R (rethinking, reduce, reuse dan recycling) dengan paradigma sampah sebagai bahan baku industri menggunakan teknik pengolahan modern di perkotaan berbentuk Tempat Pengolahan Akhir (TPA), dan teknik pengolahan konvensional di perdesaan yang menghasilkan kompos maupun bahan baku setengah jadi;
- i. Mengarahkan sistem pengelolaan akhir sampah dengan metode sanitary landfill; dan
- j. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi melalui pengelolaan limbah terpadu melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

### 3. Peningkatan Fungsi Kawasan Lindung;

Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung di wilayah Kabupaten Boalemo, terdiri atas:

- a. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis dan pesisir pantai.
- b. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
- c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah kabupaten.
- d. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- e. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; dan
- f. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

### 4. Peningkatan Sumber Daya Hutan Produksi

Strategi peningkatan sumber daya hutan produksi di wilayah Kabupaten Boalemo, terdiri atas:

- a. Mengembangkan areal lahan hutan produksi secara selektif; dan
- b. Mengembangkan agro forestry (hutan perkebunan) di areal sekitar hutan lindung sebagai zona penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan kawasan budidaya terbangun.

## 5. Peningkatan Sumber Daya Lahan Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan

Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, wilayah Kabupaten Boalemo, terdiri atas:

- a. Mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah di perdesaan;
- b. Meningkatkan kualitas lahan pertanian;
- c. Mengembangkan areal lahan komoditas perkebunan khususnya di daerah perdesaan seluruh kabupaten secara selektif;
- d. Meningkatkan intensitas budidaya peternakan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan teknologi budidaya perikanan air tawar;
- f. Mengembangkan budidaya perikanan air tawar, air payau dan laut.
- g. Mengembangkan komoditas perikanan dilakukan secara luas oleh masyarakat maupun badan usaha yang diberi izin di wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah setempat. dan
- h. Mengembangkan sektor perikanan yang terpadu dengan kegiatan wisata serta memenuhi kebutuhan kawasan lain di luar wilayah.

## 6. Pengembangan Potensi Pariwisata

Strategi pengembangan potensi pariwisata wilayah Kabupaten Boalemo, terdiri atas:

- a. Pengembangan industri pariwisata budaya dan alam yang ramah lingkungan;
- b. Mengembangkan penerapan ragam nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat;
- c. Melestarikan situs warisan budaya komunitas lokal masyarakat Kabupaten Boalemo;
- d. Mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;
- e. Mengembangkan promosi dan jaringan industri pariwisata secara global.

## 7. Pengembangan Potensi Pertambangan

Strategi pengembangan potensi pertambangan wilayah Kabupaten Boalemo, terdiri atas:

- a. Mengendalikan penambangan batuan di sungai maupun di gunung agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan dan bahaya banjir, abrasi maupun longsor;
- b. Mengembangkan budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan; dan
- c. Mengembangkan sumber daya baru pengganti bahan tambang yang akan habis.

## 8. Pengembangan Potensi Industri

Strategi pengembangan potensi industri wilayah Kabupaten Boalemo, terdiri atas:

- a. Mengembangkan agro industri terutama yang berbasis hasil komoditi sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- b. Mengembangkan kawasan agro industri skala sedang di PKW, PKL dan PKLp;
- c. Mengembangkan usaha industri kecil dan industri rumah tangga yang tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman.

## 9. Pengembangan Potensi Perdagangan

Strategi pengembangan potensi perdagangan wilayah Kabupaten Boalemo, terdiri atas:

- a. Mengembangkan kawasan potensi ekonomi di PKW, PKL dan PKLp;
- b. Mengembangkan pasar hasil industri pertanian; dan
- c. Meningkatkan akses koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan pasar.

## 10. Pengembangan Potensi Pendidikan

Strategi pengembangan potensi pendidikan wilayah Kabupaten Boalemo, terdiri atas:

- a. Menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan terutama guna mendukung pengembangan sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, industri kerajinan, perdagangan, dan pariwisata;
- b. Memenuhi kapasitas dan mendistribusi secara proporsional pendidikan di PKW, PKL, PKLp, dan PPK;

#### 11. Pengembangan Potensi Permukiman

Strategi pengembangan potensi permukiman wilayah Kabupaten Boalemo, terdiri atas:

- a. Mencegah tumbuh berkembangnya perumahan di kawasan lindung termasuk kawasan lindung setempat, seperti hutan lindung, lahan dengan kemiringan di atas 30%, bantaran sungai, dan sempadan pantai;
- b. Mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti longsor, banjir, dan gempa.
- c. Bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKW dan PKL yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal dengan ketinggian sedang; dan
- d. Pengembangan permukiman perdesaan berlandaskan kearifan nilai budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

#### 12. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Boalemo, terdiri atas:

- a. Membangun kompetensi dan kapasitas baik melalui pendidikan formal maupun non formal bagi angkatan kerja di sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, permukiman, sarana, prasarana, dan pemerintahan.

Mengembangkan sistem konsultasi, pendampingan, monitoring, evaluasi dan penghargaan berbasis kinerja bagi pelaku kegiatan sektor.

#### **4.1.3. Keselarasan Dengan RPJM Nasional 2015-2019**

RPJMN Tahun 2015-2019 memiliki visi “**Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”. Dalam Rangka Mewujudkan Visi Tersebut, maka RPJMN menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas- aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 7) Mewujudkan masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi tersebut, maka agenda pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 yang merupakan program **Nawa Cita** sebagai berikut:

- 1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.;
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa;
- 9) Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Tabel 4.1  
Prioritas Nasional, Program Prioritas dalam RPJMN 2015-2019

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
1	<b>PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT</b>	
1.1	Revolusi Mental	Reformasi birokrasi pemerintahan Penegakan hukum dan kelembagaan politik; Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa; Peneguhan jati diri dan karakter bangsa; Daya rekat sosial dalam kemajemukan.
1.2	Kesehatan	Penguatan promotif dan preventif: “Gerakan Masyarakat Sehat”; Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; Percepatan perbaikan gizi masyarakat Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
1.3	Pendidikan	Penyediaan guru dan dosen yang berkualitas dan penempatan yang merata; Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan; Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif Pengembangan pembelajaran yang berkualitas; Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter; Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas; Penguatan kelembagaan perguruan tinggi; Peningkatan kapasitas iptek, inovasi dan daya saing perguruan tinggi Peningkatan relevansi pendidikan.
1.4	Perumahan dan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan hunian layak baru; Fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman (termasuk kawasan kumuh); Penyediaan akses air minum dan sanitasi; Peningkatan ketersediaan air baku.
2	<b>PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN</b>	
2.1	Kedaulatan Pangan	Peningkatan, mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; Peningkatan produksi padi dan pangan lain; Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat; Penanganan gangguan terhadap produksi pangan.
2.2	Maritim dan Kelautan	Konektivitas (Tol) laut dan industri maritim; Industri perikanan dan hasil laut;

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
		Tata ruang laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari;
		Kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
		Penanggulangan dan penyelesaian IUU <i>Fishing</i> dan Keamanan Laut;
		Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil.
2.3	Kedaulatan Energi	Peningkatan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi;
		Peningkatan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi;
		Peningkatan aksesibilitas energi;
		Pengembangan cadangan energi;
		Penyediaan energi primer;
		Efisiensi dan konservasi energi;
		Pengelolaan subsidi energi yang lebih efisien, transparan dan tepat sasaran.
2.4	Pembangunan Pariwisata	Promosi wisata Indonesia;
		Pengembangan 10 destinasi wisata;
		SDM dan kelembagaan pariwisata;
		Layanan kemudahan wisman masuk;
		Penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat; (Promosi Wisata Indonesia)
		Jaminan keselamatan kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi wisata.
2.5	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Pengembangan kawasan industri/KEK;
		Penumbuhan populasi industri;
		Penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif;
		SDM industri yang Kompeten dan Disiplin;
		Produktivitas dan daya saing industri;
		Ketersediaan infrastruktur dan energi;
		Ketersediaan dan kualitas bahan baku bagi industri;
		Hubungan industrial yang harmonis;
		Pemberian insentif fiskal yang harmonis;
		Pembiayaan dengan akses dan biaya yang kompetitif.
3	<b>PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN</b>	
3.1	Antar Kelompok Pendapatan	Penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja;
		Perhatian khusus kepada usaha mikro, kecil dan koperasi;
		Pengembangan kewirausahaan;
		Perkuatan basis perekonomian perdesaan;
		Perluasan pelayanan dasar;
		Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.
		Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah
3.2	Reforma Agraria	Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria;
		Penataan penguasaan dan kepemilikan tanah obyek reforma agraria;
		Kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria;
		Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
		dan produksi atas TORA
		Kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah.
3.3	Daerah Perbatasan	Pembangunan PLBN Terpadu;
		Pembangunan 10 PKSN Sebagai pusat pengembangan perbatasan negara;
		Membuka isolasi Lokpri, peningkatan sarpras, peningkatan SDM dan penguatan sosial ekonomi serta penyediaan air baku;
		Pengamanan sumber daya dan batas wilayah darat, laut dan udara
		Peningkatan kualitas diplomasi, kerja sama sosial-ekonomi.
3.4	Daerah Tertinggal	Pengembangan ekonomi lokal;
		Peningkatan aksesibilitas;
		Pemenuhan pelayanan dasar publik;
		Peningkatan SDM dan IPTEK.
3.5	Desa dan Kawasan Perdesaan	Pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk kawasan transmigrasi;
		Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa di kawasan transmigrasi;
		Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;
		Penguatan pemerintahan desa;
		Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan;
		Pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa kota;
		Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.
3.6	Perkotaan	Mewujudkan sistem perkotaan;
		Pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP);
		Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana;
		Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK;
		Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota.
3.7	Konektivitas	Pembangunan dan pengembangan transportasi laut;
		Pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan daya saing wilayah;
		Pembangunan dan pengembangan kapasitas bandara pengumpul dan pengumpan;
		Pembangunan dan pengembangan pita lebar dan penyiaran;
		Pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian;
		Pembangunan dan pengembangan jaringan sabuk penyeberangan serta angkutan sungai dan danau ( <i>Inland Waterway</i> );
		Pembangunan dan pengembangan transportasi umum massal perkotaan;
		Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi.
4	<b>PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN</b>	
4.1	Kepastian dan penegakan hukum	Penegakan hukum yang berkualitas

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
		Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan
4.2	Stabilitas keamanan dan ketertiban	Deteksi dini dan bebas ancaman terorisme; Keselamatan dan keamanan laut yang terkendali; Lingkungan bersih penyalahgunaan narkoba; Pelayanan prima kepolisian; Postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan wilayah perbatasan yang aman; Keamanan data dan informasi (keamanan cyber).
4.3	Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi	Penguatan lembaga demokrasi; Peningkatan akses dan kualitas informasi publik; Pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik; Pencegahan konflik sosial politik dan penanggulangan terorisme; Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan; Perlindungan WNI/BHI di luar negeri; Penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan; Pemantapan peran di ASEAN; Penguatan diplomasi <i>Soft Power</i> .
4.4	Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; Penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi perijinan; Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan.
5	<b>PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	
	Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha	Peningkatan kemudahan berusaha; Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan investasi pusat dan daerah; Pengembangan layanan perizinan terpadu; Peningkatan persaingan usaha yang sehat; Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi; Pembenahan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang harmonis; Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis.
5.1	Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor; Peningkatan Realisasi Investasi Berorientasi Ekspor; Peningkatan Ekspor Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Pengembangan Industri Pengolah Sumber Daya Alam Berorientasi Ekspor; Pengembangan Fasilitas Ekspor; Peningkatan Efektivitas Kerjasama Perdagangan Internasional ( <i>Market Access</i> ); Penguatan <i>Market Intelligence</i> , Promosi, dan Asistensi Ekspor.
5.2	Reformasi Fiskal (Pengoptimalan Pendapatan Negara)	Pengoptimalan Perpajakan;

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
		Dukungan Regulasi;
		Pengoptimalan PNBPN;
		Penguatan Institusi
		Perbaikan pelaksanaan anggaran;
		Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja produktif;
		Peningkatan efektivitas dan efisiensi transfer ke daerah dan dana desa;
		Belanja subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

Sumber : RPJMN 2015-2019

#### 4.1.4. Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 - 2022

RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017 – 2022 dewasa ini dalam tahap dokumen teknokratik atau finalisasi rancangan akhir, namun materi yang dimuat pada uraian ini secara substansi tidak banyak berubah. Adapun waktu penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017 - 2022 hampir bersamaan waktu dengan RPJMD Kab. Boalemo tahun 2017-2022. Oleh sebab itu uraian yang akan dijelaskan dibawah ini secara umum memuat rumusan Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang terpilih periode 2017-2022.

Adapun Visi dalam rancangan RPJMD Provinsi Gorontalo yaitu sebagai berikut :

**“Mewujudkan Masyarakat Gorontalo Yang Unggul, Maju dan Sejahtera”**

Misi :

- 1) Mewujudkan Pengelolaan Pariwisata dan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Merata dan Adil
- 3) Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah
- 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 5) Terciptanya Pemerintahan Yang Baik dan Melayani

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2017 – 2022, adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan

Meningkatnya kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta kualifikasi tenaga pengajar dengan target akhir kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing secara global.

2. Kesehatan

meningkatkan kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan mengcover seluruh masyarakat Gorontalo.

3. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi, penyediaan energy serta air bersih, meningkatnya sarana prasarana dipedesaan dan kota secara adil dan lebih merata, serta layanan teknologi informasi yang lebih menjangkau seluruh masyarakat Gorontalo.

4. Ekonomi

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta bertumpu pada sector pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berbasis komoditas unggulan.

5. Pemerintahan

melakukan reformasi birokrasi yang fokus pada upaya menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah serta lebih aman.

6. Agama dan Budaya

Sebagai daerah dengan filosofi “adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah” maka peningkatan minat masyarakat terhadap terhadap pelestarian budaya daerah dan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan umat beragama serta dukungan pemerintah terhadap semua kegiatan budaya dan keagamaan agar lebih semarak.

7. Pariwisata

Perbaikan infrastruktur sector pariwisata agar memenuhi standar International dengan target meningkatnya kunjungan wisatawan local dan international.

8. Lingkungan

pengelolaan berbagai potensi sumberdaya alam, terutama pariwisata, pertanian, kelautan, pertambangan yang ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan yang paling utama tetap mengutamakan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya terkait dengan pembangunan kawasan untuk Kabupaten Boalemo telah pula dirancang target yang bersifat indikatif untuk sasaran pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, sebagai kontribusi terhadap pembangunan Provinsi Gorontalo, yaitu :

Tabel 4.2  
Target Pertumbuhan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan  
di Kabupaten Boalemo

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Presentase Angka Kemiskinan (%)
2018	7,5 %	20.95
2019	7,7 %	20.71
2020	7,9 %	20.47
2021	8,1 %	20.23
2022	8,3 %	19.99

Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo, 2017

**Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yaitu sebagai berikut :**

**1) Urusan Wajib**

*Pelayanan Dasar (6 Urusan )*

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan

- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat an Kawasan Permukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- f. Sosial

*Non Pelayanan Dasar (18 Urusan)*

- a. Tenaga Kerja
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan Hidup
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan Informatika
- k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga
- l. Penanaman Modal
- m. Kepemudaan dan Olahraga
- n. Statistik
- o. Persadian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

**2) Urusan Pilihan (8 Urusan )**

- a. Kelautan dan Perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Perdagangan

- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

### **3) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (6 Urusan)**

- a. Administrasi Pemerintahan
- b. Pengawasan
- c. Perencanaan
- d. Keuangan
- e. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ASN
- f. Penelitian dan Pengembangan

Selanjutnya sejumlah urusan diatas dilaksanakan oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di Kabupaten Boalemo yang dibentuk sesuai Peraturan Pemerintah RI nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yaitu :

1. Sekretariat Daerah
  - 1) Bagian Tata Pemerintahan
  - 2) Bagian Hukum dan Organisasi
  - 3) Bagian Umum dan Humas
  - 4) Bagian Ekonomi Pembangunan
  - 5) Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - 6) Bagian Keuangan
  - 7) Bagian Layanan Pengadaan
  - 8) Bagian Sekretariat Korpri
2. Sekretariat Dewan
3. Inspektorat Daerah
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

10. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Pertanahan
11. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
14. Dinas Pangan
15. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
18. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
19. Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
20. Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral
21. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
22. Dinas Pertanian
23. Dinas Kelautan dan Perikanan
24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
25. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
26. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
27. Kantor Kecamatan

Adapun permasalahan pembangunan berdasarkan urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3  
Permasalahan Berdasarkan Urusan dan indikator  
Penyelenggaraan Pemerintahan daerah

No	Pembagian Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>	
1.2	Angka melek huruf	) Belum tercapainya akses pendidikan wajib belajar 12 tahun; ) Kurang Optimalnya layanan pendidikan Inklusif ) Terbatasnya jumlah guru terutama pada daerah terpencil. ) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana
1.3	Angka rata-rata lama sekolah	
1.4	Pendidikan dasar:	
1.4.1.	Angka partisipasi sekolah	
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>	
2.1	Angka Kematian Ibu	) Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar ) Belum optimalnya ketersediaan dan mutu sediaan farmasi, pembekalan dan alat kesehatan ) Masih kurangnya akses dan kualitas lingkungan sehat ) Masih kurangnya kualitas layanan kesehatan di rumah sakit
2.2	Angka usia harapan hidup	
2.3	Persentase balita gizi buruk	
2.4	Angka Kematian Bayi	
2.5	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana umum. ) Belum optimalnya perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum. ) Belum optimalnya penguatan tata ruang
3.2	Jaringan irigasi dalam kondisi baik	
3.3	Panjang jembatan dalam kondisi baik	
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	) Jangkauan pelayanan air bersih masih perlu ditingkatkan.
4.2	Rumah layak huni	

No	Pembagian Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
4.3	Akses sanitasi Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Belum optimalnya penyediaan akses sanitasi</li> <li>) Masih tingginya angka rumah yang tidak layak huni</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>	
5.1	Deteksi Dini Ancaman dari luar	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Masih perlunya sinergitas antara eksekutif dan legislative</li> <li>) Perlunya menjaga wawasan kebangsaan.</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Sosial</b>	
6.1	Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Masih tingginya jumlah masyarakat miskin</li> </ul>
6.2	Penyalahgunaan NAPZA	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan</li> </ul>
6.3	Penyakit Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Belum optimalnya pengendalian peredaran Miras.</li> </ul>
<b>7</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	
7.1	Pengangguran Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Terbatasnya lapangan kerja.</li> </ul>
7.2	Kualitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Kurangnya pelatihan bagi tenaga kerja/magang.</li> <li>) Masih kurangnya pemahaman terhadap aturan ketenagakerjaan</li> </ul>
<b>8</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	
8.1	Kasus KDRT	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Masih Kurangnya peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan</li> </ul>
8.2	Pengarusutamaan Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>) Masih kurangnya keberpihakan pembangunan terhadap anak</li> </ul>
<b>9</b>	<b>Pangan</b>	
9.1	Ketersediaan Pangan Pokok	Masih kurangnya diversifikasi pangan masyarakat
<b>10</b>	<b>Pertanahan</b>	
10.1	Rasio Tanah Bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Masih tingginya tanah yang belum</li> </ul>

No	Pembagian Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
10.2	Pengelolaan HGU	bersertifikat ) Pengelolaan HGU belum optimal ) Pemanfaatan Tanah Terlantar Belum Optimal
<b>11</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	
11.1	Persampahan	) Produksi sampah lebih besar dari kapasitas angkutan ke TPA. ) Pencemaran sungai pada tingkat sedang
11.2	Pencemaran Air	
11.3	Pencemaran Tanah	
11.4	Penaatan Lingkungan	
<b>12</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	
12.1	Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
<b>13</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	
13.1	Partisipasi dan keswadanaan Masyarakat dalam Pembangunan	) Besarnya tuntutan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ) Terbatasnya kapasitas pemerintahan pemerintah desa ) Belum optimalnya pelayanan publik di tingkat desa ) Belum optimalnya Bumdes
<b>14</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	
14.1	Pertumbuhan Penduduk	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk belum optimal.
14.2	Kualitas keluarga	
<b>15</b>	<b>Perhubungan</b>	
15.1	Perhubungan Laut	) Belum terpenuhinya prasarana keselamatan lalu lintas ) Belum optimalnya pembangunan Pelabuhan Tilamuta
15.2	Perhubungan darat	
<b>16</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	
16.1	Jaringan Komunikasi dan Informasi	) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi ) Belum optimalnya integrasi system
16.2	Penyebarluasan Informasi	
16.3	Prasarana dan Sarana Komunikasi dan Informasi	

No	Pembagian Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
16.4	SDM Bidang Kominfo	informasi daerah yang telah tersedia dan cukup baik dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan
<b>17</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>	
17.1	Jumlah koperasi yang aktif	) Kurangnya tingkat pertumbuhan wirausaha baru. ) Kuranya kepercayaan bank terhadap pelaku usaha. ) Keterbatasan akses jaminan pinjaman. ) Rendahnya kualitas produk (packaging)
17.2	Jumlah UMKM	
17.3	Permodalan Koperasi dan UKM	
<b>18.</b>	<b>Penanaman Modal Daerah:</b>	
18.1	Pelayanan Perizinan bidang Investasi	) Belum didukung oleh kapasitas SDM Perizinan dan belum didukung sapsras IT ) Terbatasnya infrastruktur. ) Kurangnya promosi dan kerjasama investasi
18.2	Nilai Investasi	
<b>19.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	
19.1	Sarana dan Prasarana Olahraga	) Belum adanya sarana prasarana olahraga yang representative berskala kabupaten ) Masih kurangnya pembinaan dan pelatihan
19.2	Pengelolaan organisasi kepemudaan	
19.3	Prestasi	
<b>20.</b>	<b>Statistik</b>	
20.1	Ketersediaan Data Statistik dan Informasi Pembangunan	Penyebarluasan data dan informasi pembangunan belum optimal
<b>21.</b>	<b>Persandian</b>	
	Identifikasi persandian	Belum adanya SDM bidang persandian
<b>22.</b>	<b>Kebudayaan</b>	
22.1	Usaha Pelestarian Budaya	) Masih kurangnya promosi seni dan budaya ) Wadah pelestarian budaya yang belum optimal
22.2	Promosi Seni dan Budaya	
<b>23</b>	<b>Perpustakaan</b>	
23.1	Jumlah dan koleksi buku	Belum optimalnya pengelolaan kearsipan dengan menggunakan system teknologi informasi

No	Pembagian Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
<b>24</b>	<b>Kearsipan</b>	
24.1	Penataan Sistem Kearsipan	) Kurangnya kompetensi petugas arsiparis.
24.2	Kepatuhan terhadap tata naskah dinas.	) Belum optimalnya pengelolaan kearsipan dengan menggunakan system teknologi informasi
<b>25</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	
	Produksi Perikanan Tangkap	) Masih perlu penambahan armada penangkapan ikan
	Produksi Perikanan Budidaya	) Masih perlu penambahan alat bantu penangkapan
	Produksi hasil olahan perikanan	) Keterbatasan permodalan. ) Kurangnya pemanfaatan lahan potensi perikanan budidaya ) Belum optimalnya pengolahan hasil produksi perikanan
<b>26</b>	<b>Pariwisata</b>	
26.1	Jumlah Wisatawan	) Belum intensifnya pemasaran pariwisata berbasis IT
26.2	Pengembangan Objek Wisata	) Perlunya perluasan jaringan kemitraan pariwisata
<b>27</b>	<b>Pertanian</b>	
27.1	Produksi dan Produktivitas Komoditas Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura	) Masih perlu peningkatan produksi dan produktivitas ) Belum optimal pemanfaatan lahan potensi untuk perkebunan
27.2	Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	) Belum optimalnya penyediaan jaringan irigasi dan jalan di tingkat usaha tani.
27.3	Sarana dan Prasarana PLA	) Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan pertanian
27.6	Peran Penyuluh Pertanian dalam Penerapan Teknologi	) Masih tingginya kehilangan hasil dan rendahnya kualitas produk pertanian. ) Rendahnya SDM Petani ) Rendahnya kompetensi SDM Penyuluh. ) Kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan
<b>28</b>	<b>Kehutanan</b>	
28.1	Luas Hutan dan Lahan Kritis	) Laju degradasi hutan dan deforestasi
28.2	Kerusakan kawasan hutan	) tidak sesuai/tidak seimbang dengan laju

<b>No</b>	<b>Pembagian Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	<b>Permasalahan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
28.3	Perambahan hutan, kebakaran hutan, peladang berpindah dan illegal logging	<p>pemulihan/penanganan rehabilitasi kawasan.</p> <p>) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan.</p> <p>) Kurangnya peran serta masyarakat di sekitar hutan dalam upaya pengamanan hutan</p>
<b>29</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	
29.1	Penggunaan Energi Alternatif	Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan energi alternatif.
<b>30</b>	<b>Perdagangan</b>	
30.1	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional	) Belum adanya ketersediaan informasi harga pasar bagi masyarakat.
30.2	Ketersediaan Informasi Pasar	) Belum optimalnya fasilitas/ infrastruktur untuk kegiatan perdagangan antar daerah dan ekspor.
30.3	Volume Perdagangan antar Daerah dan Ekspor	) Belum tersedianya kawasan perdagangan yang representatif.
30.4	Kawasan Perdagangan	<p>) Masih kurangnya aparatur pengawas.</p> <p>) Belum tersedianya fasilitas pengawasan kemetrolgian</p>
<b>31</b>	<b>Perindustrian</b>	
31.1	Sentra Industri Kecil Potensial	) Belum adanya sentra industri potensial
31.2	Industri Pengolahan berbahan baku lokal	<p>) Belum ada pemanfaatan bahan baku lokal untuk industri pengolahan</p> <p>) Rendahnya kualitas SDM untuk Industri Pengolahan</p>
<b>32</b>	<b>Transmigrasi</b>	
32.1	Kesejahteraan Transmigran	) Belum optimalnya penyediaan saprotan dan saprodi
32.2	Tingkat Keterampilan	<p>) Belum optimalnya fungsi lembaga ekonomi warga.</p> <p>) Rendahnya tingkat pendidikan.</p>

## 4.2 Isu Strategis

Secara umum perumusan isu strategis didasarkan dari permasalahan umum yang ada serta topiknya menjadi urgen, dan membutuhkan solusi melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Adapun isu strategis yang sudah dirumuskan melalui hasil konsultasi publik yaitu sebagai berikut :

- a. Persentase angka kemiskinan di Kab. Boalemo masih tinggi dan membutuhkan penanganan serta update data secara simultan;
- b. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemda dalam rangka reformasi birokrasi guna optimalnya pengelolaan pembangunan daerah dan pelayanan bagi masyarakat;
- c. Pelayanan Dasar bagi masyarakat di pedesaan terkait sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial masih rendah;
- d. Infrastruktur ekonomi berupa jalan, jembatan, saluran irigasi, listrik, perumahan dan pemukiman, Air bersih, sanitasi dan telekomunikasi yang belum memadai;
- e. Lapangan kerja yang kurang sehingga perlunya mendukung angkatan kerja muda di daerah agar lebih produktif dan kreatif, yang pada akhirnya akan mampu menyediakan/menciptakan lapangan kerja;
- f. Belum optimalnya Pengembangan sektor Pertanian secara luas (tanaman pangan, perkebunan, peternakan) sebagai sumber utama mata pencaharian penduduk;
- g. Belum optimalnya Peningkatan sektor Perikanan dan Kelautan sebagai penggerak ekonomi di kawasan pesisir, serta peningkatan kesejahteraan nelayan;
- h. Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata yang mendapat perhatian luas secara regional dan nasional, didukung peran jasa lainnya UMKM, Perdagangan dan Home Industri serta peran investor;
- i. Terwujudnya masyarakat Boalemo yang Damai, ditandai terjaganya stabilitas daerah, pencegahan konflik antar warga, suku, agama, dan terkendalinya organisasi radikal dan garis keras yang mengganggu

masyarakat, penegakan demokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi;

- j. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari untuk mencegah terjadinya bencana alam.

## BAB V

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 5.1. Visi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi pemerintah daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pemerintah daerah untuk periode RPJMD 2017 - 2022 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

**“KABUPATEN YANG DAMAI, CERDAS, SEJAHTERA DALAM  
SUASANA YANG RELIGIUS TAHUN 2022”**

Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud, menghasilkan Pokok-pokok Visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.1

Visi, Pokok-Pokok Visi dan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mewujudkan dan Menciptakan rasa damai pada seluruh lapisan masyarakat melalui upaya peningkatan keamanan dan ketertiban.</li> <li>➤ Berusaha memberi rasa</li> </ul>	Upaya untuk meningkatkan kedamaian merupakan salah satu tugas dari pemerintah daerah. Dengan terciptanya kedamaian maka dapat dipastikan akan terwujudnya

	<p>keadilan kepada seluruh kelompok dan profesi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menciptakan suasana harmonis dan kekeluargaan antara pimpinan daerah/muspida dengan seluruh lapisan masyarakat.</li> </ul>	<p>pemerintahan yang <i>clean and clear</i>. Perwujudan Kedamaian dapat ditempuh melalui aspek peningkatan aspek keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan sosial masyarakat, Peningkatan suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan, serta peningkatan kenyamanan atas layanan kebutuhan dasar masyarakat</p>
<p>Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Cerdas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan Kualitas atau mutu pendidikan disemua jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai tingkat sekolah lanjutan.</li> <li>➤ Memfasilitasi upaya peningkatan sumber Daya manusia (SDM) melalui penguasaan IPTEK, Bahasa Asing dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi</li> <li>➤ Peningkatan angka partisipasi pendidikan dari tingkat dasar, menengah serta tingkat atas.</li> <li>➤ Mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD Kabupaten Boalemo berdasarkan ketentuan perundang-</li> </ul>	<p>Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui : peningkatan kualitas</p>

	<p>undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan Kemampuan dan Kesejahteraan Guru.</li> <li>➤ Pengembangan Pendidikan berbasis kawasan dan potensi Kabupaten Boalemo.</li> <li>➤ Meningkatkan pemahaman tentang bahaya KKN dan upaya menghindari NARKOBA.</li> </ul>	SDM
Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan kesejahteraan aparat baik PNS maupun aparat pemerintahan desa, kepala dusun, guru ngaji, Pendeta, Dasawisma, BPD dan LPM.</li> <li>➤ Peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian (ekstensifikasi dan intensifikasi) dan produktivitas di bidang peternakan, perikanan dan kelautan.</li> <li>➤ Pengembangan UKM melalui pembinaan dan penguatan modal.</li> <li>➤ Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pengusaha lokal untuk mengembangkan kegiatan usahanya</li> </ul>	Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan merupakan modal untuk melakukan pembangunan ekonomi daerah maupun masyarakat. Peningkatan kesejahteraan dapat ditempuh melalui: Peningkatan pemerataan ekonomi masyarakat, peningkatan daya saing ekonomi daerah dan masyarakat, Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat, peningkatan investasi berorientasi pelayanan kemudahan perizinan, pengembangan kawasan perdesaan, transmigrasi sebagai basis ekonomi yang baru, serta peningkatan kesejahteraan aparat ASN serta non ASN.

	<p>secara professional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemberian dan peningkatan keahlian bagi tenaga produktif.</li> <li>➤ Pengembangan mata pencaharian alternative (Home Industri) bagi kaum ibu untuk mengembangkan ekonomi keluarga</li> </ul>	
Misi 4 Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Religius	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menciptakan suasana keagamaan bagi pemeluk semua agama.</li> <li>➤ Terselenggaranya proses baca tulis alquran dan kursus bahasa arab bagi anak-anak tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi</li> <li>➤ Membina dan meningkatkan kehidupan beragama dengan memfasilitasi sarana peribadatan dan pembangunan lembaga pendidikan agama dalam rangka peningkatan kualitas umat dan kerukunan antar umat beragama.</li> <li>➤ Lebih menggiatkan dan mengadakan kegiatan keagamaan termasuk perayaan hari-hari besar islam dan hari-hari besar agama lainnya.</li> </ul>	<p>Mengamalkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu keharusan bagi daerah yang mayoritasnya muslim. Perwujudan Kabupaten Boalemo yang religius dapat di tempuh melalui :</p> <p>meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan bagi pemeluk agama Islam dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama.</p>

## 5.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Boalemo yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boalemo 2017 - 2022 sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai
- b. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Cerdas
- c. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera
- d. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Religius

Empat butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai

Yaitu suatu upaya pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kedamaian melalui peningkatan kemandirian, ketertiban umum, dan perlindungan sosial masyarakat.

- b. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Cerdas

Yaitu suatu upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia agar menjadi manusia berilmu pengetahuan, menguasai teknologi dan informasi, sehat jasmani dengan dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- c. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera

Artinya suatu upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya teknologi (buatan) guna memenuhi kebutuhan masyarakat Boalemo secara lahir dan batin. Dalam konteks ini, pemerintah daerah melakukan pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang merata, dan peningkatan iklim investasi yang kondusif. Termasuk pula upaya peningkatan kesejahteraan aparat baik Tenaga Negeri Sipil (melalui TPP/TKD), serta aparat pemerintah di tingkat Desa (melalui insentif) guna peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

d. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Religius

Artinya suatu upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai religiusitas, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan bagi seluruh pemeluk agama, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam praktek pemerintahan

### **5.3. Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

#### **A. Misi I : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai**

Dalam rangka Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menciptakan suasana Kedamaian dari aspek keamanan, Ketertiban umum, Ketentraman dan perlindungan sosial masyarakat, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
  1. Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat
  2. Meningkatnya Perlindungan sosial bagi masyarakat
  3. Meningkatnya Pengendalian Penduduk
  4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Meningkatkan suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
  1. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan daerah yang baik dan bersih, disertai penerapan e-government
  2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- c. Mewujudkan suasana kenyamanan atas Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
  1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pangan;
  2. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
  3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan hutan diluar kawasan

4. Terwujudnya kawasan perumahan, permukiman yang sehat dan layak huni
5. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan keterpaduan tata ruang wilayah

#### **B. Misi II : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Cerdas**

Dalam rangka Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang cerdas, maka tujuan pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas SDM, dengan sasaran sebagai berikut :
  1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Semua Jenjang.
  2. Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan.
  3. Meningkatnya Pelestarian Seni, Budaya, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

#### **C. Misi III : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera**

Dalam rangka Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera, maka tujuan pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut:
  1. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
  2. Meningkatkan Pendapatan dan Daya Beli Petani, Nelayan serta Masyarakat
  3. Menurunnya Angka kemiskinan.
- b. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut:
  1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
  2. Menurunnya kesenjangan Antar Wilayah
- c. Mengembangkan kawasan perdesaan, transmigrasi sebagai basis ekonomi yang baru, dengan sasaran sebagai berikut:
  1. Berkembangnya Lembaga Usaha Ekonomi Milik Desa

#### **D. Misi IV : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Religius**

Dalam rangka Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang religius, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan bagi Semua Pemeluk Agama, dengan sasaran sebagai berikut:
  1. Meningkatnya aktifitas Peribadatan
  2. Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dengan Sistem Non Formal yang berbasis masyarakat
  3. Mendorong Lembaga Pondok Pesantren Mewujudkan Kota Santri

#### **5.4. Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini.

**Tabel 5.2**

**Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Boalemo**

**VISI : KABUPATEN YANG DAMAI, CERDAS, SEJAHTERA DALAM SUASANA YANG RELIGIUS TAHUN 2022**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN						
					KONDISI AWAL	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	KONDISI AKHIR
1	MISI I : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai	Menciptakan suasana Kedamaian dari aspek keamanan, Ketertiban umum, Ketentraman dan perlindungan sosial masyarakat	Meningkatnya Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat	Volume Deteksi Dini Ancaman dan Gangguan Masyarakat secara Reguler	3 Masalah	7 Masalah	11 Masalah	15 Masalah	19 Masalah	23 Masalah	23 Masalah
			Meningkatnya Perlindungan sosial bagi masyarakat	Persentase cakupan yang mendapatkan perlindungan sosial Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)	102.401 Jiwa	107.000 Jiwa	113.000 Jiwa	123.000 Jiwa	133.000 Jiwa	143.000 Jiwa	143.000 Jiwa
				Persentase KK yang mendapatkan perlindungan sosial berupa Beras Sejahtera (Rastra)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Angka Fertilitas penduduk	2,60	2.58	2.56	2.54	2.52	2.5	2,5
			Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	-	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
		Meningkatkan suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan daerah yang baik dan bersih, disertai	Maturitas SPIP	Level 1,42	Level 2	Level 3				

		pemerintahan	penerapan e-government								
				Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
				Persentase OPD yang Menerapkan teknologi informasi (Aplikasi Sistem)	63%	70%	75%	80%	90%	100%	100%
				Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	B	B	B	B
				Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, Perizinan)	2,51 – 3,25 (Baik)						
					2,51 – 3,25 (Baik)						
					2,51 – 3,25 (Baik)						
		Mewujudkan suasana kenyamanan atas Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	49,14%	53,07%	57,32%	61,90%	66,85%	100%	100 %
			Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	68,2 Tahun	68,5 Tahun	68,7 Tahun	68,9 Tahun	69 Tahun	69,2 Tahun	69,2 Tahun
				Angka Kematian Ibu Melahirkan	323	283	242	202	161	121	121
				Angka Kematian Bayi	19,8	13,8	9,7	8,9	8,5	8,1	8,1
				Prevalensi	0,2 %	0,18%	0,17%	0,16%	0,15%	0,14 %	0,14 %

				kekurangan Gizi pada anak balita							
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan hutan diluar kawasan	Persentase Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau)	30%	35%	40%	45%	50%	50%	50%
			Terwujudnya kawasan perumahan, permukiman yang sehat dan layak huni	Persentase pemenuhan air minum	85%	86%	87%	88%	89%	90%	90%
				Persentase cakupan sanitasi dasar	57%	60%	63%	66%	69%	72%	72%
			Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan keterpaduan tata ruang wilayah	Persentase ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik	53%	54%	55%	56%	57%	58%	58%
				Jumlah jembatan dalam kondisi baik	48%	49%	50%	51%	52%	53%	53%
				Persentase Jaringan Irigasi dengan kondisi baik	70%	76%	82%	88%	94%	100%	100%
	MISI II : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Cerdas	Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	6,3 Tahun	6,8 Tahun	6,9 Tahun	7 Tahun	7,1 Tahun	7,2 Tahun	7,2 Tahun
				Persentase Kelulusan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan	Prosentasi guru yang tersertifikasi	27,18 %	30%	32%	35%	37%	40 %	40 %
			Meningkatnya Pelestarian Seni, Budaya, Pariwisata, Kepemudaan dan	Jumlah Adat Budaya Etnis yang Dilestarikan	9 Etnis	9 Etnis	9 Etnis	9 Etnis	9 Etnis	9 Etnis	9 Etnis

			Olahraga								
	MISI III : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera	Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	Jumlah UMKM Aktif	4.983	5.198	5.428	5.683	5.933	6.233	6.233
				Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat	20	25	30	35	40	45	45
			Meningkatkan Pendapatan dan daya beli masyarakat Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	106	106	106	107	107	107	107
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,86	108,09	108,32	108,55	108,78	109,01	109,01
			Menurunnya Angka kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	21,11%	20,86%	20,61%	20,36%	20,11%	19,86%	19,86%
		Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Masyarakat	Meningkatnya Daya Ungkit Baru Sektor Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	93.176 Orang	150.000 Orang	200.000 Orang	250.000 Orang	300.000 Orang	350.000 Orang	350.000 Orang
		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Masyarakat	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6,29%	6,39%	6,49%	6,59%	6,59%	6,69%	6,69%
			Menurunnya kesenjangan Antar Wilayah	Indeks Gini	0,398	0,367	0,336	0,305	0,274	0,243	0,243
		Mengembangkan kawasan perdesaan, transmigrasi sebagai basis ekonomi yang baru	Berkembangnya Lembaga Usaha Ekonomi Milik Desa	Jumlah BUMDes yang terbentuk	48	55	60	65	70	82	82
	MISI IV : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Religius	Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan bagi Semua Pemeluk Agama	Meningkatnya aktifitas Peribadatan	Persentase Sarana Peribadatan yang difasilitasi Stimulan	-	25%	30%	35%	40%	50%	50%
			Meningkatnya	Persentase Siswa	-	30%	40%	50%	60%	70%	70%

			kualitas Pendidikan Agama dengan Sistem Non Formal yang berbasis masyarakat	Tingkat SD dan Menengah yang Melek Huruf Al-Quran							
			Mendorong Lembaga Pondok Pesantren Mewujudkan Kota Santri	Rasio Jumlah Santri terhadap Usia Sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)	-	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30

## **BAB VI**

# **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**

Strategi dan arah pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Boalemo. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang serta Ancaman.

### **6.1. Strategi**

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Boalemo. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting

mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advis aktifitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal.

Analisis SWOT memungkinkan dirumuskan empat strategi utama. *Pertama*, adalah strategi S-O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. *Kedua*, adalah strategi W-O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. *Ketiga*, adalah strategi S-T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan. *Keempat* adalah strategi W-T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Melalui analisis demikian, strategi yang dibuat diharapkan bisa lebih maksimal di dalam mendayagunakan apa yang ada untuk kepentingan masa depan, karena didasarkan pada kondisi lingkungan yang riil.

Adapun gambaran identifikasi faktor internal dan eksternal diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 6.1**

**Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT**

<b>INTERNAL</b>	<b>Kekuatan (Strength = S)</b>	<b>Kelemahan (Weakness = W)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemda dalam rangka reformasi birokrasi guna optimalnya pengelolaan pembangunan daerah.</li> <li>2. Pemberdayaan struktur organisasi pemerintahan daerah berdasarkan keseimbangan beban kerja setiap SOPD.</li> <li>3. Terpeliharanya hubungan masyarakat yang harmonis, damai dan toleran mewujudkan masyarakat yang religius</li> <li>4. Pendayagunaan sumber daya anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang berbasis masyarakat.</li> <li>5. Peningkatan pelayanan publik yang terintegrasi secara cepat, tepat dan memenuhi standar pelayanan minimal serta terjangkau bagi masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih tingginya persentase angka kemiskinan .</li> <li>2. Masih rendahnya peran swasta dan investor dalam mengelola kekayaan sumber daya alam.</li> <li>3. Rendahnya kapasitas fiskal daerah.</li> <li>4. Terbatasnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan daya beli masyarakat.</li> <li>5. Rendahnya cakupan pemenuhan sanitasi dasar, air minum dan rumah layak huni.</li> <li>6. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor aparatur.</li> </ol>
<b>EKSTERNAL</b>	<b>Peluang (Opportunity = O)</b>	<b>Ancaman (Threat = T)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produktivitas pertanian (perkebunan dan peternakan), perikanan serta pariwisata.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah.</li> <li>3. Optimalisasi pengelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi kawasan perdesaan.</li> <li>4. Potensi sumber daya pesisir, pulau dan kelautan untuk peningkatan pendapatan masyarakat.</li> <li>5. Pengembangan pelabuhan Tilamuta sebagai akses utama perdagangan antar pulau.</li> <li>6. Peningkatan infrastruktur ekonomi dan sosial yang memadai dan fungsional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seringnya terjadi bencana alam (banjir)</li> <li>2. Konsekuensi dari letak daerah yang berada di lintasan trans Sulawesi dan adanya era keterbukaan informasi dan komunikasi</li> <li>3. Masih tingginya kesenjangan infrastruktur di kawasan perdesaan terisolir akibat rendahnya akses telekomunikasi.</li> <li>4. Belum optimalnya wirausaha muda dalam mendayagunakan keahlian dan keterampilan untuk penciptaan lapangan kerja.</li> <li>5. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.</li> <li>6. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan</li> </ol>

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dirumuskan penetapan strategi pembangunan daerah untuk menjawab tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai visi dan misi yang diemban oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun rumusan dimaksud sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 6.2**

**Analisis SWOT dalam Penetapan Strategi Pembangunan Daerah**

Strategi S – O	Strategi W - O
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Inklusif dan Responsif</li> <li>2. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik</li> <li>3. Strategi yang ditetapkan adalah Penyediaan Infrastruktur Wilayah yang Fungsional, Berkualitas dan Representatif</li> <li>4. Pemerataan Pembangunan pada Semua Sektor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Ketahanan Pangan Wilayah</li> <li>2. Pengembangan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.</li> <li>3. Pengembangan Akses bagi Petani dan Nelayan terhadap Informasi dan Permintaan Pasar</li> <li>4. Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Wisata Alam dan Adat Budaya</li> <li>5. Pemberdayaan Unit-Unit Usaha Baru Berbasis Pembangunan Ekonomi Lokal Daerah (PELD)</li> </ol>
Strategi S – T	Strategi W - T
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Berjiwa Pancasila dan Sadar Hukum</li> <li>2. Pengembangan Manajemen Usaha dan Permodalan bagi UMKM dan Koperasi</li> <li>3. Mewujudkan Kemajuan Daerah melalui Optimalisasi Sumber Daya Ekonomi</li> <li>4. Peningkatan Pembinaan Kegiatan Keagamaan</li> <li>5. Mendorong Pembentukan Taman Pengajian Al-Quran (TPA)</li> <li>6. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pondok Pesantren</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Sejahtera</li> <li>2. Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk</li> <li>3. Mengutamakan Pengarusutamaan Gender serta Menyiapkan Kelangsungan Generasi Muda yang Berkualitas</li> <li>4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>5. Menjaga Keseimbangan Lingkungan yang Optimal</li> <li>6. Menciptakan Kawasan Tinggal Masyarakat yang Nyaman</li> <li>7. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan bagi Masyarakat</li> <li>8. Peningkatan Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Tambahan Penghasilan Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan</li> <li>9. Peningkatan Upaya Kemandirian Berusaha bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS)</li> </ol>

Strategi S-O ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, daerah memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi yang harus diterapkan dalam adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategi). Strategi ini memberikan penekanan pada metode pemerintah daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada.

Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Boalemo untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai mobilization strategy, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada pemerintah di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Pemerintah daerah menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat investment dan yang bersifat divestment. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar- benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki.

Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive atau strategi untuk survive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan diatas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai demage control, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki.

Selanjutnya rumusan strategi pembangunan untuk 5 (lima) tahun dalam rangka mencapai visi, misi sasaran dan tujuan pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Misi I : Mewujudkan Boalemo yang Damai

Tujuan Misi I adalah :

a. Menciptakan Suasana Kedamaian Dari Aspek Keamanan, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Sosial Masyarakat, dengan sasaran, yaitu :

1) Meningkatkan Keamanan, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat

Strategi yang ditetapkan adalah Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Berjiwa Pancasila dan Sadar Hukum

2) Meningkatkan Perlindungan sosial bagi masyarakat

Strategi yang ditetapkan adalah Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Sejahtera

- 3) Meningkatkan Pengendalian Penduduk  
Strategi yang ditetapkan adalah Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk
  - 4) Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Strategi yang ditetapkan adalah Mengedepankan Pengarusutamaan Gender serta Menyiapkan Kelangsungan Generasi Muda yang Handal dan Berkualitas
- b. Meningkatkan suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan, dengan sasaran yaitu :
- 1) Meningkatkan tata kelola Pemerintahan daerah yang baik dan bersih, disertai penerapan e-government  
Strategi yang ditetapkan adalah Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Inklusif dan Responsif
  - 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik  
Strategi yang ditetapkan adalah Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik
- c. Mewujudkan suasana kenyamanan atas Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dengan sasaran yaitu :
- 1) Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan.  
Strategi yang ditetapkan adalah Penguatan Ketahanan Pangan Wilayah.
  - 2) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.  
Strategi yang ditetapkan adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan.
  - 3) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Hutan di Luar Kawasan.  
Strategi yang ditetapkan adalah Menjaga Keseimbangan Lingkungan yang Optimal.
  - 4) Terwujudnya Kawasan Perumahan, Permukiman yang Sehat dan Layak Huni.

Strategi yang ditetapkan adalah Menciptakan Kawasan Permukiman yang Nyaman.

- 5) Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan keterpaduan tata ruang wilayah.

Strategi yang ditetapkan adalah Penyediaan Infrastruktur Wilayah yang Fungsional, Berkualitas dan Representatif

## 2. Misi II : Mewujudkan Boalemo yang Cerdas

Tujuan Misi II adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas SDM, dengan sasaran yaitu :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan.

Strategi yang ditetapkan adalah Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan bagi Masyarakat.

- 2) Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan.

Strategi yang ditetapkan adalah Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Tambahan Penghasilan Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan

- 3) Meningkatnya Pelestarian seni dan budaya sebagai Pendukung Objek Pariwisata.

Strategi yang ditetapkan adalah Pengembangan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

## 3. Misi III : Mewujudkan Boalemo yang Sejahtera

Tujuan Misi III adalah :

- a. Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan sasaran, yaitu :

- 1) Terbinanya Pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

Strategi yang ditetapkan adalah Pengembangan Manajemen Usaha dan Permodalan bagi UMKM dan Koperasi.

- 2) Meningkatkan Pendapatan dan daya beli masyarakat Petani dan Nelayan.

Strategi yang ditetapkan adalah Pengembangan Akses bagi Petani dan Nelayan terhadap Informasi dan Permintaan Pasar.

3) Menurunnya Angka kemiskinan.

Strategi yang ditetapkan adalah Peningkatan Upaya Kemandirian Berusaha bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS).

b. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Masyarakat, dengan sasaran, yaitu :

1) Meningkatnya Daya Ungkit Baru Sektor Pariwisata

Strategi yang ditetapkan adalah Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Wisata Alam dan Adat Budaya

c. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Masyarakat, dengan sasaran, yaitu :

1) Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan.

Strategi yang ditetapkan adalah Mewujudkan Kemajuan Daerah melalui Optimalisasi Sumber Daya Ekonomi.

2) Menurunnya kesenjangan Antar Wilayah

Strategi yang ditetapkan adalah Pemerataan Pembangunan pada Semua Sektor.

d. Mengembangkan Kawasan Perdesaan, Transmigrasi sebagai Basis Ekonomi yang Baru, dengan sasaran, yaitu :

1) Berkembangnya Lembaga Usaha Ekonomi Milik Desa.

Strategi yang ditetapkan adalah Pemberdayaan Unit-Unit Usaha Baru Berbasis Pembangunan Ekonomi Lokal Daerah (PELD).

4. Misi IV : Mewujudkan Boalemo yang Religius

Tujuan Misi IV, adalah :

a. Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan bagi Semua Pemeluk Agama, dengan sasaran, yaitu :

1) Meningkatnya aktifitas Peribadatan.

Strategi yang ditetapkan adalah Peningkatan Pembinaan Kegiatan Keagamaan

2) Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dengan Sistem Non Formal yang berbasis masyarakat.

Strategi yang ditetapkan adalah Mendorong Pembentukan Taman Pengajian Al-Quran (TPA).

3) Mendorong Lembaga Pondok Pesantren Mewujudkan Kota Santri

Strategi yang ditetapkan adalah Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pondok Pesantren

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Boalemo dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.3

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
MISI I : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG DAMAI					
1.1	Menciptakan suasana Kedamaian dari aspek keamanan, Ketertiban umum, Ketentraman dan perlindungan sosial masyarakat	1.1.1	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat	1.1.1.1	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Berjiwa Pancasila dan Sadar Hukum
		1.1.2	Meningkatnya Perlindungan sosial bagi masyarakat	1.1.2.1	Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Sejahtera
		1.1.3	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	1.1.3.1	Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk
		1.1.4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.3.2	Mengutamakan Pengarusutamaan Gender serta Menyiapkan Kelangsungan Generasi Muda yang Berkualitas
1.2	Meningkatkan suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan	1.2.1	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan daerah yang baik dan bersih, disertai penerapan e-government	1.2.1.1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Inklusif dan Responsif
		1.2.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.2.2.1	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik
1.3	Mewujudkan suasana kenyamanan atas Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	1.3.1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pangan	1.3.1.1	Penguatan Ketahanan Pangan Wilayah
		1.3.2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	1.3.2.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		1.3.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan hutan diluar kawasan	1.3.3.1	Menjaga Keseimbangan Lingkungan yang Optimal

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
		1.3.4	Terwujudnya kawasan perumahan, permukiman yang sehat dan layak huni	1.3.4.1	Menciptakan Kawasan Permukiman yang Nyaman
		1.3.5	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan keterpaduan tata ruang wilayah	1.3.5.1	Penyediaan Infrastruktur Wilayah yang Fungsional, Berkualitas dan Representatif
<b>MISI II : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG CERDAS</b>					
2.1	Meningkatkan Kualitas SDM	2.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	2.1.1.1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan bagi Masyarakat
		2.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan	2.1.2.1	Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Tambahan Penghasilan Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan
		2.1.3	Meningkatnya Pelestarian Seni, Budaya, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2.1.3.1	Pengembangan Pengembangan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
<b>MISI III : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG SEJAHTERA</b>					
3.1	Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Masyarakat	3.1.2	Terbinanya Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	3.1.2.1	Pengembangan Manajemen Usaha dan Permodalan bagi UMKM dan Koperasi
		3.1.3	Meningkatkan Pendapatan dan daya beli masyarakat Petani dan Nelayan	3.1.3.1	Pengembangan Akses bagi Petani dan Nelayan terhadap Informasi dan Permintaan Pasar
		3.1.4	Menurunnya Angka kemiskinan	3.1.4.1	Peningkatan Upaya Kemandirian Berusaha bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS)
3.2	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Masyarakat	3.2.1	Meningkatnya Daya Ungkit Baru Sektor Pariwisata	3.2.1.1	Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Wisata Alam dan Adat Budaya
3.3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Masyarakat	3.3.1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	3.3.1.1	Mewujudkan Kemajuan Daerah melalui Optimalisasi Sumber Daya Ekonomi
		3.3.2	Menurunnya kesenjangan Antar Wilayah	3.3.2.1	Pemerataan Pembangunan pada Semua Sektor
3.4	Mengembangkan kawasan perdesaan, transmigrasi sebagai basis ekonomi yang baru	3.4.1	Berkembangnya Lembaga Usaha Ekonomi Milik Desa	3.4.1.1	Pemberdayaan Unit-Unit Usaha Baru Berbasis Pembangunan Ekonomi Lokal Daerah (PELD)
<b>MISI IV : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG RELIGIUS</b>					
4.2	Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan bagi semua Pemeluk Agama	4.2.1	Meningkatnya aktifitas Peribadatan	4.2.1.1	Peningkatan Pembinaan Kegiatan Keagamaan
		4.2.2	Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dengan Sistem Non Formal yang berbasis masyarakat	4.2.2.1	Mendorong Pembentukan Taman Pengajian Al-Quran (TPA)
		4.2.3	Mendorong Lembaga Pondok Pesantren Mewujudkan Kota Santri	4.2.3.1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pondok Pesantren

## **6.2. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah Kebijakan harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Kebijakan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk skenario strategi, yang selanjutnya menjadi arah pembangunan untuk tiap tahunnya.

Adapun Arah Kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan, adalah sebagai berikut :

### **1. Misi I :**

- a. Strategi Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Berjiwa Pancasila dan Sadar Hukum, mempunyai arah kebijakan Penciptaan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenram dan Damai;
- b. Strategi Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Sejahtera, mempunyai arah kebijakan Peningkatan Penyelenggaraan Kehidupan Sosial yang Berkualitas dan Konprehensif;
- c. Strategi Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk, mempunyai arah kebijakan Pengembangan Norma Kehidupan Keluarga Bahagia dan Sejahtera;
- d. Strategi Mengutamakan Pengarusutamaan Gender serta Menyiapkan Kelangsungan Generasi Muda yang Handal dan Berkualitas, mempunyai arah kebijakan Mengedepankan Peran Gender dan Generasi Muda dalam Pembangunan menuju Sustainable Development Goals (SDG's);
- e. Strategi Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Inklusif dan Responsif, mempunyai arah kebijakan Mengimplementasikan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- f. Strategi Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik, mempunyai arah kebijakan Peningkatan Sistem Pelayanan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - g. Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Wilayah, mempunyai arah kebijakan Mewujudkan Kedaulatan Pangan;
  - h. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, mempunyai arah kebijakan Mewujudkan Masyarakat yang Sehat;
  - i. Strategi Menjaga Keseimbangan Lingkungan yang Optimal, mempunyai arah kebijakan Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Bersih, Lestari, Asri dan Nyaman;
  - j. Strategi Menciptakan Kawasan Permukiman yang Nyaman, mempunyai arah kebijakan Pemenuhan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman;
  - k. Strategi Penyediaan Infrastruktur Wilayah yang Fungsional, Berkualitas dan Representatif, mempunyai arah kebijakan Peningkatan Layanan Infrastruktur Publik.
2. Misi II :
- a. Strategi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan bagi Masyarakat, mempunyai arah kebijakan Optimalisasi Pronas Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
  - b. Strategi Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Tambahan Penghasilan Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan, mempunyai arah kebijakan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
  - c. Strategi Pengembangan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, mempunyai arah kebijakan Pembinaan Seni, Budaya, dan pemuda serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berdasarkan Kearifan Lokal.
3. Misi III :
- a. Strategi Pengembangan Manajemen Usaha dan Permodalan bagi UMKM dan Koperasi, mempunyai arah kebijakan Mewujudkan Kelembagaan UMKM dan Koperasi yang Aktif dan Sehat;

- b. Strategi Pengembangan Akses bagi Petani dan Nelayan terhadap Informasi dan Permintaan Pasar, mempunyai arah kebijakan Peningkatan Kemampuan Petani dan Nelayan dalam Meningkatkan Produksi yang Berkualitas guna Memperoleh Nilai Jual yang Tinggi
  - c. Strategi Peningkatan Upaya Kemandirian Berusaha bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS), mempunyai arah kebijakan Pengembangan Produktifitas Berbasis Rumah Tangga Sasaran;
  - d. Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Wisata Alam dan Adat Budaya, mempunyai arah kebijakan Peningkatan Fasilitas, Aksesibilitas dan Amenitas Destinasi Wisata;
  - e. Strategi Mewujudkan Kemajuan Daerah melalui Optimalisasi Sumber Daya Ekonomi, mempunyai arah kebijakan Peningkatan Kontribusi Sektor Primer yang Menunjang Perekonomian Daerah;
  - f. Strategi Pemerataan Pembangunan pada Semua Sektor, mempunyai arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Publik yang Berkualitas dan Fungsional;
  - g. Strategi Pemberdayaan Unit-Unit Usaha Baru Berbasis Pembangunan Ekonomi Lokal Daerah (PELD), mempunyai arah kebijakan Perluasan Akses Berusaha bagi Lembaga Ekonomi di Perdesaan.
4. Misi IV :
- a. Strategi Peningkatan Derajat Keimanan dan Ketakwaan, mempunyai arah kebijakan Peningkatan Pembinaan Kegiatan Keagamaan
  - b. Strategi Mendorong Pembentukan Taman Pengajian Al-Quran (TPA), mempunyai arah kebijakan Menuntaskan Buta Huruf Al-Quran bagi Siswa SD dan Menengah
  - c. Strategi mengembangkan dan menata sistem pendidikan pondok pesantren, mempunyai arah kebijakan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pondok Pesantren

Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.3

## Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1.1.1.1	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Berjiwa Pancasila dan Sadar Hukum	1.1.1.1.1	Penciptaan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tentram dan Damai
1.1.2.1	Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Sejahtera	1.1.2.1.1	Peningkatan Penyelenggaraan Kehidupan Sosial yang Berkualitas dan Konprehensif
1.1.3.1	Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk	1.1.3.1.1	Pengembangan Norma Kehidupan Keluarga Bahagia dan Sejahtera
1.1.3.2	Mengutamakan Pengarusutamaan Gender serta Menyiapkan Kelangsungan Generasi Muda yang Handal dan Berkualitas	1.1.3.2.1	Mengedepankan Peran Gender dan Generasi Muda dalam Pembangunan menuju Sustainable Development Goals (SDGs)
1.2.1.1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Inklusif dan Responsif	1.2.1.1.1	Mengimplementasikan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1.2.2.1	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik	1.2.2.1.1	Peningkatan Sistem Pelayanan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
1.3.1.1	Penguatan Ketahanan Pangan Wilayah	1.3.1.1.1	Mewujudkan Kedaulatan Pangan
1.3.2.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1.3.2.1.1	Mewujudkan Masyarakat yang Sehat
1.3.3.1	Menjaga Keseimbangan Lingkungan yang Optimal	1.3.3.1.1	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Bersih, Lestari, Asri dan Nyaman
1.3.4.1	Menciptakan Kawasan Permukiman yang Nyaman	1.3.4.1.1	Pemenuhan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman
1.3.5.1	Strategi Penyediaan Infrastruktur Wilayah yang Fungsional, Berkualitas dan Representatif	1.3.5.1.1	Peningkatan Layanan Infrastruktur Publik
2.1.1.1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan bagi Masyarakat	2.1.1.1.1	Optimalisasi Pronas Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
2.1.2.1	Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Tambahan Penghasilan Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan	2.1.2.1.1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
2.1.3.1	Pengembangan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.1.3.1.1	Pembinaan Seni, Budaya, dan pemuda serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berdasarkan Kearifan Lokal
3.1.2.1	Pengembangan Manajemen Usaha dan Permodalan bagi UMKM dan Koperasi	3.1.2.1.1	Mewujudkan Kelembagaan UMKM dan Koperasi yang Aktif dan Sehat
3.1.3.1	Pengembangan Akses bagi Petani dan Nelayan terhadap Informasi dan Permintaan Pasar	3.1.3.1.1	Peningkatan Kemampuan Petani dan Nelayan dalam Meningkatkan Produksi yang Berkualitas guna Memperoleh Nilai Jual yang Tinggi
3.1.4.1	Peningkatan Upaya Kemandirian Berusaha bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS)	3.1.4.1.1	Pengembangan Produktifitas Berbasis Rumah Tangga Sasaran
3.2.1.1	Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Wisata Alam dan Adat Budaya	3.2.1.1.1	Peningkatan Fasilitas, Aksesibilitas dan Amenitas Destinasi Wisata
3.3.1.1	Mewujudkan Kemajuan Daerah melalui Optimalisasi Sumber Daya Ekonomi	3.3.1.1.1	Peningkatan Kontribusi Sektor Primer yang Menunjang Perekonomian Daerah
3.3.2.1	Pemerataan Pembangunan pada Semua Sektor	3.3.2.1.1	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Publik yang Berkualitas dan Fungsional
3.4.1.1	Pemberdayaan Unit-Unit Usaha Baru Berbasis Pembangunan Ekonomi Lokal	3.4.1.1.1	Perluasan Akses Berusaha bagi Lembaga Ekonomi di Perdesaan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
	Daerah (PELD)		
4.2.1.1	Peningkatan Derajat Keimanan dan Ketakwaan	4.2.1.1.1	Peningkatan Pembinaan Kegiatan Keagamaan
4.2.2.1	Mendorong Pembentukan Taman Pengajian Al-Quran (TPA)	4.2.2.1.1	Menuntaskan Buta Huruf Al-Quran bagi Siswa SD dan Menengah
4.2.3.1	Mengembangkan dan Menata Sistem Pendidikan Pondok Pesantren	4.2.3.1.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pondok Pesantren

### 6.3. Program Pembangunan Daerah

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun. Adapun Program Pembangunan Daerah dari Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

#### a. Misi I : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai

Program Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan misi ini adalah :

1. Strategi Mendorong Kehidupan Masyarakat yang Damai dan Tenram Berbasis Revolusi Mental dengan arah kebijakan Peningkatan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai program sebagai berikut :
  - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - Program Pendidikan Politik Masyarakat
  - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan
2. Strategi Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Sejahtera Mengedepankan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak dengan arah kebijakan Peningkatan Penyelenggaraan Kehidupan Sosial yang Berkualitas dan Konprehensif, mempunyai program sebagai berikut :
  - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
  - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Sosial

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
3. Strategi Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk dengan arah kebijakan Pengembangan Norma Kehidupan Keluarga Bahagia dan Sejahtera, mempunyai program sebagai berikut :
    - Program Keluarga Berencana
    - Program Pelayanan Kontrasepsi
  4. Strategi Mengutamakan Pengarusutamaan Gender serta Menyiapkan Kelangsungan Generasi Muda yang Handal dan Berkualitas dengan arah kebijakan Mengedepankan Peran Gender dan Generasi Muda dalam Pembangunan menuju Sustainable Development Goals (SDG's), mempunyai program sebagai berikut :
    - Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
    - Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
  5. Strategi Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Inklusif dan Responsif dengan arah kebijakan Mengimplementasikan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempunyai program sebagai berikut :
    - Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerintah dan Aparatur Pengawasan
    - Program Penataan Daerah Otonomi Baru
    - Program Pengkajian Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
    - Program Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa
    - Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH
    - Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
  6. Strategi Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik dengan arah kebijakan Peningkatan Sistem Pelayanan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, mempunyai program sebagai berikut :

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
  - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
  - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perizinan
7. Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Wilayah dengan arah kebijakan Mewujudkan Kedaulatan Pangan, mempunyai program sebagai berikut :
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
8. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan arah kebijakan Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, mempunyai program sebagai berikut :
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - Program Pengembangan Lingkungan Sehat
  - Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
  - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
  - Program Perbaikan Gizi Masyarakat
9. Strategi Menjaga Keseimbangan Lingkungan yang Optimal dengan arah kebijakan Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Bersih, Lestari, Asri dan Nyaman, mempunyai program sebagai berikut :
- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
10. Strategi Menciptakan Kawasan Permukiman yang Nyaman dengan arah kebijakan Pemenuhan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman, mempunyai program sebagai berikut :
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
  - Program Lingkungan Sehat Perumahan
11. Strategi Penyediaan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Representatif dengan arah kebijakan Peningkatan Layanan Infrastruktur Publik, mempunyai program sebagai berikut :
- Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
  - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

**b. Misi II : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Cerdas**

Program Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan misi ini adalah :

1. Strategi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan bagi Masyarakat dengan arah kebijakan Optimalisasi Pronas Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, mempunyai program sebagai berikut :
  - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
  - Program Pendidikan Anak Usia Dini
  - Program Pendidikan Menengah
2. Strategi Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Tambahan Penghasilan Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan dengan arah kebijakan Revitalisasi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mempunyai program sebagai berikut :
  - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Pengembangan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan arah kebijakan Pembinaan Seni, Budaya, pemuda dan Olahraga serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berdasarkan Kearifan Lokal, mempunyai program sebagai berikut :
  - Program Pengembangan Nilai Budaya

**c. Misi III : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera**

Program Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan misi ini adalah :

1. Strategi Pengembangan Manajemen Usaha dan Permodalan bagi UMKM dan Koperasi dengan arah kebijakan Mewujudkan Kelembagaan UMKM dan Koperasi yang Aktif dan Sehat, mempunyai program sebagai berikut:
  - Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
  - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
  - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Strategi Pengembangan Akses bagi Petani dan Nelayan terhadap Informasi dan Permintaan Pasar dengan arah kebijakan Peningkatan Kemampuan Petani dan Nelayan dalam Meningkatkan Produksi yang Berkualitas guna Memperoleh Nilai Jual yang Tinggi, mempunyai program sebagai berikut :
    - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
    - Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
    - Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
    - Program Pengembangan Budidaya perikanan
    - Program pengembangan perikanan tangkap
    - Program Optimalisasi dan Pemasaran Produksi Perikanan
  3. Strategi Peningkatan Upaya Kemandirian Berusaha bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan arah kebijakan Pengembangan Produktifitas Berbasis Rumah Tangga Sasaran, mempunyai program sebagai berikut :
    - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
    - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
  4. Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Wisata Alam dan Adat Budaya dengan arah kebijakan Peningkatan Fasilitas, Aksesibilitas dan Amenitas Destinasi Wisata, mempunyai program sebagai berikut :
    - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
    - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
  5. Strategi Mewujudkan Kemajuan Daerah melalui Optimalisasi Sumber Daya Ekonomi dengan arah kebijakan Peningkatan Kontribusi Sektor Primer yang Menunjang Perekonomian Daerah, mempunyai program sebagai berikut :
    - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
  6. Strategi Pemerataan Pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan dan optimaslisasi potensi wilayah dengan arah kebijakan Percepatan

Pembangunan melalui pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT) yang mempunyai program antara lain :

- Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
7. Strategi Pemberdayaan Unit-Unit Usaha Baru Berbasis Pembangunan Ekonomi Lokal Daerah (PELD) dengan arah kebijakan Perluasan Akses Berusaha bagi Lembaga Ekonomi di Perdesaan, mempunyai program sebagai berikut :
- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

**d. Misi IV : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Religius**

Program Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan misi ini adalah :

1. Strategi Peningkatan Pembangunan Sarana Peribadatan dengan arah kebijakan Peningkatan Derajat Keimanan dan Ketakwaan, mempunyai program sebagai berikut :
  - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Strategi Mendorong Pembentukan Taman Pengajian Al-Quran (TPA) dengan arah kebijakan Menuntaskan Buta Huruf Al-Quran bagi Siswa SD dan Menengah, mempunyai program sebagai berikut :
  - Program Pendidikan Non Formal
3. Strategi Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pondok Pesantren, dengan arah kebijakan Mengembangkan dan Menata Sistem Pendidikan Pondok Pesantren, mempunyai program sebagai berikut :
  - Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tabel 6.4

## Program Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp. (Dalam Jutaan)	Target	Rp. (Dalam Jutaan)	Target	Rp. (Dalam Jutaan)	Target	Rp. (Dalam Jutaan)	Target	Rp. (Dalam Jutaan)	Target		Rp. (Dalam Jutaan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	<b>MISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG DAMAI</b>																
	Menciptakan suasana Kedamaian dari aspek keamanan, Ketertiban umum, Ketentraman dan perlindungan sosial masyarakat	Persentase KK yang mendapatkan perlindungan sosial berupa Beras Sejahtera (Rastra)										100%		100%			Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat	Volume Deteksi Dini Ancaman dan Gangguan Masyarakat secara Reguler	3 Masalah	7 Masalah		11 Masalah		15 Masalah		19 Masalah		23 Masalah		23 Masalah			- Kesbang Politik dan Limnas - Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				3.050,85		3.075,98		3.100,98		3.127,23		3.153,43		3.153,43		Kesbang Politik dan Limnas
	Program Pendidikan Politik Masyarakat				594,90		621,12		658,23		679,98		701,00		701,00		
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				387,80		318,15		335,15		367,34		392,43		392,43		Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya Perlindungan sosial bagi masyarakat	Persentase cakupan yang mendapatkan perlindungan sosial Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)	102.401 Jiwa	107.000 Jiwa		113.000 Jiwa		123.000 Jiwa		133.000 Jiwa		143.000 Jiwa		143.000 Jiwa			Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase KK yang mendapatkan perlindungan sosial berupa Beras Sejahtera (Rastra)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				373,40		398,67		425,67		450,75		476,98		476,98		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pelayanan dan				292,99		325,23		351,53		376,56		407,56		407,56		

		Rehabilitasi Pelayanan Sosial															
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				3.747,67		3.773,72		3.799,72		3.825,13		3.851,75		3.851,75	
		Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Angka Fertilitas penduduk	2,60	2,58		2,56		2,54		2,52		2,5		2,5	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Keluarga Berencana				831,09		827,19		853,49		879,12		907,12		907,12	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pelayanan Kontrasepsi				325,65		345,76		360,76		390,87		404,12		404,12	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	-	72,00		74,00		76,00		78,00		80,00		80,00	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				205,65		231,11		258,00		283,10		311,45		311,45	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan				45,35		70,00		98,87		128,00		158,10		158,10	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatkan suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan	Nilai/Kategori Akuntabilitas Kinerja										BB (71-80)		BB (71-80)	Inpektorat	
		Meningkatnya tata kelola Pemerintahan daerah yang baik dan bersih, disertai penerapan e-government	Maturitas SPIP	Level 1,42	Level 2		Level 3	Inpektorat									
			Nilai Laporan Penyelenggaraan	Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sekreteria Daerah									

			Pemerintahan Daerah												
			Nilai/Kategori Akuntabilitas Kinerja	CC (50,87)	B (61-70)	B (61-70)	B (61-70)	B (61-70)	BB (71-80)	Inpektorat					
			Persentase OPD yang Menerapkan teknologi informasi (Aplikasi Sistem)	63%	70%	75%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah									
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerintah dan Aparatur Pengawasan			487,65	514,75	539,95	554,75	565,25	565,25	565,25	Inpektorat		
			Program Penataan Daerah Otonomi Baru			67,89	92,90	118,75	135,80	160,75	160,75	160,75	Sekretariat Daerah		
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			2.065,87	2.090,25	2.115,95	2.159,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	Inpektorat		
			Program Pengkajian Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi			175,20	200,20	227,10	253,87	279,87	279,87	279,87	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
			Program Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa			345,67	379,00	407,10	428,99	459,23	459,23	459,23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan			5.465,98	5.495,25	5.534,00	5.560,25	5.585,25	5.585,25	5.585,25	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pendidikan	2,51 – 3,25 (Baik)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga									
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kesehatan	2,51 – 3,25 (Baik)	Dinas Kesehatan									
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan	2,51 – 3,25 (Baik)	Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral									
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			150,30	175,23	200,24	225,76	250,82	250,82	250,82	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			1.287,02	1.308,44	1.333,09	1.358,09	1.383,32	1.383,32	1.383,32	Dinas Kesehatan		
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perizinan			227,30	258,34	307,99	328,98	354,54	354,54	354,54	Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral		

		Mewujudkan suasana kenyamanan atas Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama									100%		100%	Dinas Pangan	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	49,14%	53,07%		57,32%		61,90%		66,85%	100%		100%	Dinas Pangan	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)				362,00		387,12		407,33		432,12		457,45	457,45	Dinas Pangan
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	68,2 Tahun	68,5 Tahun		68,7 Tahun		68,9 Tahun		69 Tahun	69,2 Tahun		69,2 Tahun		Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Ibu Melahirkan	323	283		242		202		161	121		121		
			Angka Kematian Bayi	19,8	13,8		9,7		8,9		8,5	8,1		8,1		
			Prevalensi kekurangan Gizi pada anak balita	0,2 %	0,18%		0,17%		0,16%		0,15%	0,14 %		0,14 %		
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				20.006,15		20.031,15		20.086,64		20.177,64		20.202,64	20.202,64	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat				98,60		126,67		163,67		188,67		215,67	215,67	
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak				169,70		174,80		199,80		213,32		239,55	239,55	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita				273,65		306,77		328,76		345,87		367,22	367,22	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat				220,13		257,76		303,76		328,76		353,76	353,76	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan hutan diluar kawasan	Persentase Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau)	30%	35%		40%		45%		50%	50%		50%		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				850,00		876,34		892,39		921,98		947,98	947,98	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Terwujudnya kawasan perumahan, permukiman yang sehat dan layak huni	Persentase pemenuhan air minum	81%	85%		89%		93%		97%	100%		100%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan
			Persentase cakupan sanitasi dasar	57%	60%		70%		80%		90%	100%		100%		
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				9.919,83		9.934,88		9.959,91		9.981,97		10.012,11	10.012,11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan
		Program Lingkungan Sehat Perumahan				325,65		350,65		375,65		405,54		430,34	430,34	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan keterpaduan tata ruang wilayah	Persentase ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik	53%	60%		70%		80%		90%	100%		100%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah jembatan dalam kondisi baik	48%	50%		65%		75%		90%	100%		100%		

			Persentase Jaringan Irigasi dengan kondisi baik	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%					
			Program Peningkatan Jalan dan Jembatan			11.528,79	11.554,22	11.599,22	11.604,45	11.629,54	11.629,54	11.629,54			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			2.348,60	2.376,12	2.401,12	2.427,45	2.452,54	2.452,54	2.452,54			
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			22.839,11	23.864,75	24.889,75	25.902,75	26.927,86	26.927,86	26.927,86			
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			6.298,81	6.312,88	6.327,88	6.352,88	6.377,91	6.377,91	6.377,91			
			<b>MISI II : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG CERDAS</b>												
			Meningkatkan Kualitas SDM	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)						10 Tahun	10 Tahun	10 Tahun			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,1 Tahun	8,5 Tahun	8,91 Tahun	9 Tahun	9,5 Tahun	10 Tahun	10 Tahun	10 Tahun			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				Persentase Kelulusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			9.140,68	9.165,97	9.190,95	9.215,95	9.231,99	9.231,99	9.231,99			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Program Pendidikan Anak Usia Dini			557,96	578,99	607,87	631,87	100%	656,87	656,87			
			Program Pendidikan Menengah			2.155,98	2.175,88	2.198,76	2.224,98	2.250,87	2.250,87	2.250,87			
			Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan	Prosentasi guru yang tersertifikasi	27,18 %	30%	32%	35%	37%	40 %	40 %	40 %			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			10.860,40	10.885,49	10.906,76	10.931,76	10.957,98	10.957,98	10.957,98			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya Pelestarian Seni, Budaya, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Adat Budaya Etnis yang Dilestarikan	9 Etnis	9 Etnis	9 Etnis	9 Etnis	9 Etnis	9 Etnis	9 Etnis	9 Etnis			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Nilai Budaya			576,80	600,80	625,90	651,00	676,25	676,25	676,25			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			<b>MISI III : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG SEJAHTERA</b>												
			Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Masyarakat	Persentase angka kemiskinan						19,86%	19,86%	19,86%			Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pemberdayaan UMKM dan	Jumlah UMKM	4.983	5.198	5.428	5.683	5.933	6.233	6.233	6.233			Dinas Koperasi,

Koperasi	Aktif															Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat	20	25	30	35	40	45	45								
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif					288,75	319,10	334,19	360,34	386,00	386,00						Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM					171,56	198,00	224,30	259,67	275,02	275,02						
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM					293,60	319,80	344,80	369,98	369,98	369,98						
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					272,18	298,98	316,98	342,01	368,88	368,88						
Meningkatkan Pendapatan dan daya beli masyarakat Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	106	106	106	107	107	107	107	107	107						Dinas Pertanian
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,86	108,09	108,32	108,55	108,78	109,01	109,01	109,01	109,01						Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					240,18	265,18	290,25	315,75	340,95	340,95						Dinas Pertanian
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan					296,33	325,00	351,00	377,00	406,20	406,20						
Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertanian/Perkebunan					8.451,56	8.477,00	8.502,20	8.527,25	8.553,00	8.553,00						
Program Peningkatan Divesifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					624,65	653,65	678,98	702,98	728,34	728,34						Dinas Pangan
Program Pengembangan Budidaya perikanan					2.307,50	2.333,75	2.359,75	2.385,25	2.410,30	2.410,30						Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pengembangan perikanan tangkap					4.337,02	4.365,75	4.390,00	4.405,20	4.431,25	4.431,25						
Program Optimalisasi dan Pemasaran Produksi Perikanan					1.723,01	1.749,23	1.773,25	1.798,65	1.823,75	1.823,75						
Menurunnya Angka kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	21,11%	20,86%	20,61%	20,36%	20,11%	19,86%	19,86%	19,86%	19,86%						Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					3.747,67	3.773,72	3.799,72	3.825,13	3.851,75	3.851,75						Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					373,40	398,67	425,67	450,75	476,98	476,98						
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Masyarakat	Jumlah Kunjungan Wisatawan								350.000 Orang	350.000 Orang						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Meningkatnya Daya Ungkit Baru Sektor Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	93.176 Orang	150.000 Orang	200.000 Orang	250.000 Orang	300.000 Orang	350.000 Orang	350.000 Orang	350.000 Orang	350.000 Orang						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				350,00		375,25		400,75		426,25		451,35		451,35	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				3.876,25		3.902,50		3.928,50		4.031,90		4.057,90		4.057,90	
			Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Ekonomi										6,69%		6,69%		Bappeda
			Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6,29%	6,39%	6,49%		6,59%		6,59%			6,69%		6,69%		Bappeda
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				507,09		535,79		561,25		590,55		620,00		620,00	Bappeda
			Menurunkan kesenjangan Antar Wilayah	Indeks Gini	0,398	0,367	0,336		0,305		0,274		0,243		0,243		0,243	Bappeda
			Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)				519,76		545,00		575,00		601,34		627,54		627,54	Bappeda
			Mengembangkan kawasan perdesaan, transmigrasi sebagai basis ekonomi yang baru	Jumlah BUMDes yang terbentuk										82		82		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Berkembangnya Lembaga Usaha Ekonomi Milik Desa	Jumlah BUMDes yang terbentuk	48	55	60		65		70			82		82		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				168,11		197,10		202,60		257,60		282,90		282,90	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<b>MISI IV : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG RELIGIUS</b>															
			Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan bagi semua Pemeluk Agama	Persentase Siswa Tingkat SD dan Menengah yang Melek Huruf Al-Quran										70%		70%		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Meningkatnya aktifitas Peribadatan	Persentase Sarana Peribadatan yang difasilitasi Stimulan	-	25%	30%		35%		40%			50%		50%		Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				212,54		255,65		297,50		340,54		425,76		425,76	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
			Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dengan Sistem Non Formal yang berbasis masyarakat	Persentase Siswa Tingkat SD dan Menengah yang Melek Huruf Al-Quran	-	30%	40%		50%		60%			70%		70%		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Program Pendidikan Non Formal				258,28		283,88		306,76		331,76		357,76		357,76	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Mendorong Lembaga Pondok	Rasio Jumlah Santri	-	0,10	0,15		0,20		0,25			0,30		0,30		Sekretariat Daerah

			Pesantren Mewujudkan Kota Santri	terhadap Usia Sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)													(Bagian Kesra)
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			290,87		310,32		326,54		350,77		380,56		380,56	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)

**Keterangan :**

-  : Misi
-  : Tujuan Pembangunan Daerah
-  : Sasaran Pembangunan Daerah
-  : Program Pembangunan Daerah

## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

#### **7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1  
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Program  
Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Proyeksi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan	809,588,274,346.88	829,827,981,205.55	850,573,680,735.69	871,838,022,754.08	893,633,973,322.93
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	585,787,500.00	600,432,187.50	615,442,992.19	630,829,066.99	646,599,793.67
	<b>Total penerimaan</b>	<b>810,174,061,846.88</b>	<b>830,428,413,393.05</b>	<b>851,189,123,727.87</b>	<b>872,468,851,821.07</b>	<b>894,280,573,116.60</b>
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	418,069,344,182.75	428,521,077,787.32	446,152,854,732.00	457,306,676,100.30	468,739,343,002.81
5	Pengeluaran Pembiayaan	13,500,000,000.00	13,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>378,604,717,664.13</b>	<b>388,407,335,605.73</b>	<b>405,036,268,995.87</b>	<b>415,162,175,720.77</b>	<b>425,541,230,113.79</b>

Sumber : BKAD Kabupaten Boalemo, 2017

## 7.2. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022 pada setiap Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

### Urusan Wajib Pelayanan Dasar

#### ➤ Pendidikan

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Program Pendidikan Menengah
- Program Pendidikan Non Formal
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

➤ Kesehatan

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pengawasan Obat dan Makanan
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata.
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakirt Mata.
- Program Kemitraan Penigkatan Pelayanan Kesehatan
- Program Kemitraan Penigkatan Pelayanan Kesehatan (BULD)

➤ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  - Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
  - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
  - Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
  - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
  - Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
  - Program Pengendalian Banjir
  - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
  - Program Perencanaan Tata Ruang
  - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
  - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Program Pengembangan Perumahan
  - Program Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
  - Program Lingkungan Sehat Perumahan
  - Program Pembangunan Infrastruktur Desa
  - Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial
  - Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
  - Program Pengendalian Banjir
  - Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

- Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - Program Pendidikan Politik Masyarakat
  - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  
- Sosial
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
  - Program Peningkatan Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Sosial bagi PMKS
  - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
  - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

#### **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

- Tenaga Kerja
  - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
  - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
  
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
  - Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Jender dalam Pembangunan

- Pangan
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Program Peningkatan Divesifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
  - Program Peningkatan Ketahanan Pangan
  
- Pertanahan
  - Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
  - Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
  - Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
  
- Lingkungan Hidup
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  - Program Pengeloan Ruang Terbuka Hijau
  - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Program Penataan Admnistrasi Kependudukan
  
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
  - Program Penigkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membanguna Desa
  - Program Penigkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Program Keluarga Berencana
  - Program Kesehatan Reproduksi Remaja
  - Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
  - Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
  - Program Pelayanan Kontrasepsi
  
- Perhubungan
  - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
  - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
  - Program Sarana dan Prasarana Perhubungan
  - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
  - Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
  - Program Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur
  
- Komunikasi dan Informatika
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
  - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  - Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Program Penciptaan Iklim Usaha - Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
  - Program Pembangunan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah
  - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  
- Penanaman Modal
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Promosi dan Kerjasama Investasi
  - Program Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi
  - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perizinan
  
- Kepemudaan dan Olahraga
  - Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda
  - Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
  - Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olah Raga
  
- Statistik
  - Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
  
- Persandian
  - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  
- Kebudayaan
  - Program Pengembangan Nilai Budaya

- Program Kekayaan Budaya
- Program Pengelolaan Keragaman Budaya
  
- Perpustakaan
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Pengembangan Perpustakaan dan Arsip
  - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
  - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  
- Kearsipan
  - Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
  - Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
  - Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

#### **Urusan Pilihan**

- Kelautan dan Perikanan
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Program Pengembangan Budidaya Perikanan
  - Program Pengembangan Perikanan Tangkap
  - Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
  
- Pariwisata
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
  - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- Program Pengembangan Kemitraan
- Pertanian
    - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
    - Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)
    - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
    - Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
    - Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
    - Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
    - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
    - Program Peningkatan Produksi Peternakan
- Kehutanan
    - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- Energi dan Sumber Daya Mineral
    - Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrik
- Perdagangan
    - Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
    - Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor
    - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
    - Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
- Perindustrian
    - Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
    - Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

➤ Transmigrasi

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- Program Transmigrasi Lokal
- Program Transmigrasi Regional
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

➤ Administrasi Pemerintahan

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan
- Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- Program Kedinasan Pemerintah Daerah
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Program Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
  - Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah
- Pengawasan
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  - Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- Perencanaan
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Program Pengembangan Data / Informasi
  - Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
  - Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar
  - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
  - Program Perencanaan Sosial dan Budaya
  - Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- Keuangan
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  
- Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ASN
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
  
- Penelitian dan Pengembangan
  - Program Penelitian dan Pengembangan
  - Program Desiminasi dan Informasi

Tabel 7.2

## Program Perangkat Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp. (Dalam Jutaan)	Target	Rp. (Dalam Jutaan)	Target	Rp. (Dalam Jutaan)	Target	Rp. (Dalam Jutaan)	Target	Rp. (Dalam Jutaan)	Target	Rp. (Dalam Jutaan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	<b>Urusan Wajib</b>																
	<b>Pelayanan Dasar</b>																
	<b>Pendidikan</b>																
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APM PAUD	92,81 %	97,73%	557,96	98 %	578,99	98,19 %	607,87	99,10 %	631,87	100 %	656,87	100 %	656,87	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		APK PAUD	92,81 %	92,91 %		93,1%		94 %		94,6 %		95 %		95 %			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100 %	100 %	2.757,94	100%	3.033,74	100%	3.337,12	100%	3.670,82	100%	4.037,90	100%	4.037,90		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur	93,81%	95%	803,2	96%	803,2	97%	803,2	98%	803,2	100%	803,2	100%	4.017		
	Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/Sederajat	92,25 %	93 %	9.140,68	94,03 %	9.165,97	95 %	9.190,95	96 %	9.215,95	98 %	9.231,99	98 %	9.231,99		
		APK SD/Sederajat	96,04 %	96,04 %		97,01 %		98,98 %		99%		100%		100%			
	Program Pendidikan Menengah	APM SMP/Sederajat	77,23 %	79 %		81 %		81,92 %		82,32 %		85 %		85 %			
		APM SMA/Sederajat	88,12 %	88,82 %		89 %		90 %		91 %		92 %		92 %			
		APK SMP/Sederajat	97,73 %	98,08 %		98,95 %		99 %		100%		100%		100%			
		APK SMA/Sederajat	91,12 %	91,89 %		92 %		93,1 %		93,89%		95%		95%			
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Siswa Tingkat SD dan Menengah yang Melek Huruf Al-Quran	-	60%	258,28	65%	283,88	70%	306,76	75%	331,76	80%	357,76	80%	357,76		
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	6,3 Tahun	6,8 Tahun	10.860,40	6,9 Thn	10.885,49	7 Tahun	10.906,76	7,1 Tahun	10.931,76	7,2 Tahun	10.957,98	7,2 Tahun	10.957,98		
		Persentase Kelulusan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			

			Persentase Guru yang tersertifikasi	27,18%	30 %		32 %		35 %		37 %		40 %		40 %			
			Angka Melek Huruf	99,56%	99,60%		99,7%		98%		99%		100%		100%			
			Angka Partisipasi Sekolah (APS)	76,10%	77%		78,18%		79%		79,98%		82%		82%			
			Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,07 Tahun	12,15 Tahun		12,30 Tahun		12,45 Tahun		12,60 Tahun		12,75 Tahun		12,75 Tahun			
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2,51 – 3,25 (Baik)	2,51 – 3,25 (Baik)	150,3	2,51 – 3,25 (Baik)	175,2	2,51 – 3,25 (Baik)	200,2	2,51 – 3,25 (Baik)	225,7	2,51 – 3,25 (Baik)	250,8	2,51 – 3,25 (Baik)	250,8		
			<b>Kesehatan</b>															
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat	-	100%	2.957,65	100%	2.982,95	100%	2.996,55	100%	3.019,55	100%	3.044,55	100%	3.044,55	Dinas Kesehatan
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Prima	100%	100%	5.828,88	100%	6.411,75	100%	7.052,95	100%	7.758,25	100%	8.534,07	100%	8.534,07	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	68,2 Tahun	68,5 Tahun	20.006,15	68,7 Tahun	20.031,15	68,9 Tahun	20.086,64	69 Tahun	20.177,64	69,2 Tahun	20.202,64	69,2 Tahun	20.202,64	
			Program Pengawasan Obat dan Makanan	Intensitas Inspeksi Obat dan Makanan	-	2 kali	58,86	2 kali	87,84	4 kali	105,22	4 kali	130,22	12 kali	156,22	12 kali	156,22	
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Capaian Aspek Kabupaten Sehat	-	60%	160,52	70%	186,87	75%	205,87	80%	230,87	85%	256,87	85%	256,87	
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi kekurangan Gizi pada anak balita	0,2 %	0,18%	220,13	0,17%	257,76	0,16%	303,76	0,15%	328,76	0,14 %	353,76	0,14 %	353,76	
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Cakupan penduduk Akses Air Bersih layak	60,4%	67,2%	98,60	67,7%	126,67	70%	163,67	75%	188,67	75%	215,67	75%	215,67	
				Persentase Cakupan penduduk akses Sanitasi Layak	49,5%	52,4%		55,4%		52,2%		60%		65%		65%		
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	75%	76%	492,85	77%	517,65	78%	537,77	79%	563,98	80%	588,98	80%	588,98	
				Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	30%	40%		50%		60%		70%		75%		75%		
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	2,51 – 3,25 (Baik)	2,51 – 3,25 (Baik)	1.287,02	2,51 – 3,25 (Baik)	1.308,44	2,51 – 3,25 (Baik)	1.333,09	2,51 – 3,25 (Baik)	1.358,09	2,51 – 3,25 (Baik)	1.383,32	2,51 – 3,25 (Baik)	1.383,32	
			Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	-	60%	2.660,82	65%	2.685,76	70%	2.701,99	75%	2.726,99	80%	2.751,76	80%	2.751,76	
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah	Persentase Fasilitas Kesehatan Dalam	-	60%	37.760,00	65%	37.867,00	70%	37.892,99	75%	37.925,99	80%	37.951,98	80%	37.951,98	

			Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata.	Kondisi Baik														
			Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakirt Mata	Pesentase Sarana dan Prasarana Runah Sakit yang berfungsi dengan baik.	-	80%	340,76	85%	365,54	90%	390,49	95%	315,26	100%	340,12	100%	340,12	
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu Melahirkan (/100.000 KH)	323	283	169,70	242	174,80	202	199,80	161	213,32	121	239,55	121	239,55	
				Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin melalui persalinan di fasyankes	70,4%	75%		77%		80%		85%		90%		90%		
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Bayi (/1.000 KH)	19,8	13,8	273,65	9,7	306,77	8,9	328,76	8,5	345,87	8,1	367,22	8,1	367,22	
			Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	52%	60%	278,65	70%	221,76	80%	260,54	90%	295,88	100%	315,54	100%	315,54	
			Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan Desa UCI	76%	80%	345,45	85%	378,87	90%	401,76	95%	423,98	100%	450,87	100%	450,87	
			Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan terhadap Lansia	-	60%	190,67	70%	215,89	80%	260,34	90%	289,32	100%	315,44	100%	315,44	
			Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Persyaratan Kesehatan	63%	70%	124,45	75%	156,54	80%	180,65	85%	205,88	90%	245,76	90	245,76	
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat sesuai formularium rumah sakit	92%	100%	1.000,00	100%	1.025,00	100%	1.050,00	100%	1.075,87	100%	1.100,00	100%	1.100,00	Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Prima	100%	100%	2.473,59	100%	2.720,73	100%	2.992,80	100%	3.292,08	100%	3.621,29	100%	3.621,29	
			Program Pengadaan, Peningkatan Saran Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakirt Mata.	Persentase ketersediaan peralatan kesehatan sesuai type RS (type B)	33%	40%	37.153,09	49%	37.178,09	60%	37.183,88	73%	37.201,10	90%	37.227,76	90%	37.227,76	
			Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakirt Mata.	Persentase ketersediaan Sarana Prasarana kesehatan sesuai type RS (type B)	70%	70%	455,90	75%	480,90	80%	505,90	85%	531,76	90%	556,44	90%	556,44	
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat	2,51 – 3,25 (Baik)	2,51 – 3,25 (Baik)	2.653,39	2,51 – 3,25 (Baik)	2.678,87	2,51 – 3,25 (Baik)	2.703,99	2,51 – 3,25 (Baik)	2.758,99	2,51 – 3,25 (Baik)	2.783,99	2,51 – 3,25 (Baik)	2.783,99	

			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Persentase Ketersediaan tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan perawat sesuai dengan standar RS type B	66%	79%	14.911,11	86%	14.936,89	92%	14.963,34	100%	14.988,34	100%	15.005,34	100%	15.005,34	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	20%	625,00	40%	625,00	60%	625,00	80%	625,00	100%	625,00	100%	3.125,00	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>															
			Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	48%	49%	11.528,79	50%	11.554,22	51%	11.599,22	52%	11.604,45	53%	11.629,54	53%	11.629,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Prima	100%	100%	3.055,00	100%	3.055,00	100%	3.055,00	100%	3.055,00	100%	3.055,00	100%	15.275,00	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur	70%	72%	625,00	74%	625,00	76%	625,00	78%	625,00	81%	625,00	81%	3.125,00	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	15%	20%	550,00	40%	550,00	60%	550,00	80%	550,00	100%	550,00	100%	2.750,00	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan Kinerja dan keuangan yang tersusun	100%	100%	125,00	100%	125,00	100%	125,00	100%	125,00	100%	125,00	100%	625,00	
			Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Penambahan Jalan Baru	-	4 km	2.348,60	4 km	2.376,12	4 km	2.401,12	4 km	2.427,45	4 km	2.452,54	4 km	2.452,54	
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	53%	60%	22.839,11	70%	23.864,75	80%	24.889,75	90%	25.902,75	100%	26.927,86	100%	26.927,86	
			Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Prosentase Inspeksi terhadap Kondisi Jalan dan Jembatan	80%	80%	150,56	80%	175,55	80%	200,23	90%	236,25	90%	250,88	90%	250,88	
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinarmargaan	Jumlah Alat Berat yang dimiliki dan berfungsi dengan baik	2 Unit	-	-	1 Unit	2.500	1 Unit	151,00	2.500	1 Unit	2.500	1 Unit	10.000	6 Unit	
			Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Persentase Penanganan Kerusakan terhadap jalan dan jembatan akibat bencana	-	80%	10.566,56	80%	10.589,87	80%	10.606,98	90%	10.645,87	90%	10.698,87	90%	10.698,87	
			Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	53,5%	59,5%	6.298,81	65,5%	6.312,88	71,5%	6.327,88	77,5%	6.352,88	83,5%	6.377,91	83,5%	6.377,91	

			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Drainase Jalan Terbangun	46%	48%	157,56	50%	189,65	52%	203,65	54%	245,87	56%	276,32	56%	276,32	
			Program Pembangunan Turap/Talud bronjong	Persentase Bronjong/Talud Terbangun	45%	47%	1.655,54	49%	1.678,65	51%	1.700,65	53%	1.713,65	55%	1.725,65	55%	1.725,65	
			Program Pengendalian Banjir	Persentase drainase dalam kondisi baik	50%	60%	444,00	65%	475,00	70%	494,00	75%	509,00	80%	531,12	80%	531,12	
				Persentase pembangunan turap di aliran sungai rawan longsor	-	60%	789,76	65%	807,66	70%	834,67	75%	876,65	80%	900,43	80%	900,43	
			Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Persentase areal kawasan kumuh perkotaan	23%	20%	1.730,00	15%	1.756,12	12%	1.781,12	10%	1.806,34	7%	1.831,34	7%	1.831,34	
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan	95%	100%	100	100%	125	100%	150	100%	175	100%	200	100%	200	
			Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Regulasi tentang Penataan Ruang	1	2	282,50	2	307,55	3	363,55	3	388,55	4	401,57	4	401,57	
			<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>															
			Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	-	0,6	2.112,59	0,65	2.137,65	0,70	2.172,67	0,75	2.197,78	0,80	2.217,12	0,80	2.217,12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan
				Rasio permukiman layak huni	-	0,6		0,65		0,70		0,75		0,80		0,80		
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Persentase pemenuhan air minum	81%	85%	9.919,83	89%	9.934,88	93%	9.959,91	97%	9.981,97	100%	10.012,11	100%	10.012,11	
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Lingkungan Perumahan yang sehat	97%	97,6%	325,65	98,2%	350,65	98,8%	375,65	99,4%	405,54	100%	430,34	100%	430,34	
			Program Pembangunan Infrastruktur Desa	Persentase Infrastruktur Desa yang Terbangun	66%	66,2%	476,65	74,74%	503,76	83,28%	530,54	91,82%	560,44	100%	589,65	100%	589,65	
			Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial	Persentase rumah yang diperbaiki akibat bencana alam/sosial	-	70%	252,33	75%	277,41	80%	302,45	85%	327,65	90%	352,65	90%	352,65	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administasi Perkantoran yang tertib dan lancar	90%	90%	2.024	90%	2.301	90%	2.658,50	90%	2.726	90%	2.971	100%	4.840	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase tersedianya sarana	90%	98%	1.180	98%	1.680	98%	1.445	98%	1595	98%	1.980	100%	7.880	

				dan prasarana aparaturnya yang memadai														
			Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase korban bencana alam yang tertanggulangi	-	80%	490,98	85%	516,12	90%	531,23	95%	556,33	100%	583,13	100%	583,13	
			Program Pengendalian Banjir	Persentase Kawasan yang rawan genangan	-	22%	143,77	20%	168,79	17%	173,87	15%	195,87	12%	230,87	10%	230,87	
			Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Respon Time Pemadam Kebakaran	-	1 Km/2 menit	135,25	1 Km/2 menit	160,29	1 Km/2 menit	185,36	1 Km/2 menit	210,54	1 Km/2 menit	235,67	1 Km/2 menit	235,67	Satuan Polisi Pamong Praja
			<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>															
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan	-	10%	89,00	15%	105,10	20%	131,10	25%	156,40	30%	182,70	30%	182,70	Kesbang Politik dan Limnas
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100%	100%	250,34	100%	280,54	100%	314,34	100%	330,37	100%	350,23	100%	350,23	
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Deteksi Dini Ancaman dan Gangguan Masyarakat secara Reguler	3 Masalah	4 Masalah	3.050,85	4 Masalah	3.075,98	4 Masalah	3.100,98	4 Masalah	3.127,23	4 Masalah	3.153,43	4 Masalah	3.153,43	
				Frekuensi Penurunan Jumlah demonstrasi	8 Kali	7 Kali		6 Kali		5 Kali		5 Kali		5 Kali		5 Kali		
			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Ormas/LSM yang ber-SKT	70	75	594,90	80	621,12	85	658,23	90	679,98	95	701,00	95	701,00	
				Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	81,3%	-		84%		-		-		85%		85%		
				Penurunan Jumlah konflik berlatar belakang Politik	-	3 Masalah		3 Masalah		3 Masalah		3 Masalah		4 Masalah		4 Masalah		
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Bagi Masyarakat	48%	60%	387,80	70%	318,15	92%	335,15	92%	367,34	100%	392,43	100%	392,43	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Penyelesaian Pelanggaran Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah	10%	80%		75%		74%		60%		50%		50%		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100%	100%	117,40	100%	145,39	100%	175,23	100%	206,43	100%	265,87	100%	265,87	

			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Dasar POL-PP	25	125	135,65	135	150,23	150	175,29	150	180,45	150	200,38	150	200,38	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	65%	280,66	70%	290,34	75%	326,34	80%	340,23	85%	360,28	85%	360,28	
			<b>Sosial</b>															
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase KK yang mendapatkan perlindungan Sosial berupa Beras Sejahtera (Rastra)	100%	100%	3.747,67	100%	3.773,72	100%	3.799,72	100%	3.825,13	100%	3.851,75	100%	3.851,75	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100%	100%	456,76	100%	476,22	100%	502,12	100%	523,98	100%	549,43	100%	549,43	
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan yang mendapat perlindungan jaminan 20social kesehatan masyarakat (Jamkesmas)	102.401 Jiwa	107.000 Jiwa	292,99	113.000 Jiwa	325,23	123.000 Jiwa	351,53	133.000 Jiwa	376,56	143.000 Jiwa	407,56	143.000 Jiwa	407,56	
			Program Peningkatan Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	Persentase angka kemiskinan	21,11%	20,86%	467,98	20,61%	498,12	20,36%	521,42	20,11%	548,12	19,86%	573,12	19,86%	573,12	
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang aktif	38%	40%	373,40	50%	398,67	60%	425,67	70%	450,75	80%	476,98	80%	476,98	
			<b>Non Pelayanan Dasar</b>															
			<b>Tenaga Kerja</b>															
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang produktif dan berkualitas	36.566 Orang	36.716 Orang	567,87	36.866 Orang	594,87	37.016 Orang	528,11	37.166 Orang	554,16	37.316 Orang	577,16	37.316 Orang	577,16	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Jumlah tenaga kerja yang memiliki akreditasi keahlian	-	700 Orang		1400 Orang		2100 Orang		2800 Orang		3500 Orang		3500 Orang		
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang terlindungi	100 Orang	150 Orang	20%	200 Orang	40%	250 Orang	60%	300 Orang	80%	350 Orang	100%	350 Orang	100%	
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Lapangan Kerja Baru	5 UB	7 UB	335,76	14 UB	370,12	21 UB	397,12	28 UB	427,12	35 UB	482,12	35 UB	482,12	
				Persentase menurunnya angka pengangguran	4,54%	4,32%		4,07%		3,82%		3,57%		3,22%		3,22%		
			<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>															

			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	Pesentase Organisasi yang beranggotakan Gender	-	60%	423,60	65%	451,65	70%	426,89	75%	452,21	80%	477,98	80%	477,98	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Permasalahan Perempuan dan Anak yang Tertangani	-	70%	205,65	75%	231,11	80%	258,00	85%	283,10	90%	311,45	90%	311,45	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	-	10%	45,35	15%	70,00	20%	98,87	25%	128,00	30%	158,10	30%	158,10		
			<b>Pangan</b>																
			Program Peningkatan Divesifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	17.688 Ton	19.103 Ton	624,65	20.631 Ton	653,65	22.281 Ton	678,98	24.063 Ton	702,98	35.992 Ton	728,34	35.992 Ton	728,34	Dinas Pangan	
				Jumlah Desa yang Memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	25	35		45		55		65		84		84			
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Angka Kecukupan Energi /AKE (kkal/kap/hr)	2.150	2.200	362,00	2.250	387,12	2.300	407,33	2.350	432,12	2.400	457,45	2.400	457,45		
				Angka Kecukupan Protein /AKP (gr/kap/hr)	57	58		59		60		61		63		63			
				Pola Pangan Harapan (PPH)	60%	79,4%		84,6%		95%		98%		100%		100%			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi yang tertata dengan baik	100%	1.063,35	100%	1.063,35	100%	1.063,35	100%	1.063,35	100%	1.063,35	100%	1.063,35	100%		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	70%	75%	350,49	80%	378,37	85%	401,76	90%	439,48	95%	458,31	95%	458,31		
			<b>Pertanahan</b>																
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat	50%	60%	461,00	70%	486,88	80%	507,88	90%	532,90	100%	557,34	100%	557,34	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan	
			Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang tertangani	100%	100%	356,87	100%	382,12	100%	407,42	100%	432,45	100%	458,45	100%	458,45		
			Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Database/Aplikasi tentang pertanahan	-	1	245,65	1	272,00	2	298,11	2	327,00	3	353,00	3	353,00		

<b>Lingkungan Hidup</b>																		
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Izin Lingkungan yang diterbitkan	21	25	245,34	27	270,67	30	296,23	33	324,00	35	350,60	35	350,60	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau)	30%	35%	850,00	40%	876,34	45%	892,39	50%	921,98	50%	947,98	50%	947,98	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase TPST yang Berfungsi dengan baik	70%	80%	244,67	90%	269,98	100%	295,98	100%	324,00	100%	360,10	100%	360,10	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi yang tertata dengan baik	98,99 %	100%	4.530,29	100%	4.983,32	100%	5.481,65	100%	6.029,82	100%	6.632,80	100%	6.632,80	
<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>																		
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capil	2,51 – 3,25 (Baik)	2,51 – 3,25 (Baik)	1.468,05	2,51 – 3,25 (Baik)	1.494,75	2,51 – 3,25 (Baik)	1.521,85	2,51 – 3,25 (Baik)	1.568,12	2,51 – 3,25 (Baik)	1.594,15	2,51 – 3,25 (Baik)	1.594,15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Penduduk yang pemilik KTP	90,21%	92,01%		93,42%		95,52%		97,21%	99,10%		99,10%			
				Persentase Penduduk yang pemilik KK	80,50%	82,52%		84,43%		87,62%		93,38%	99,50%		99,50%			
				Persentase Penduduk yang pemilik Akta Kelahiran Semua Umur	70,31%	76,20%		77,60%		82,73%		93,27%	99,23%		99,23%			
				Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	-	25,30%		50,72%		75,42%		84,72%	90,01%		90,01%			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi yang tertata dengan baik	98,99 %	100%	1.490,90	100%	1.490,90	100%	1.490,90	100%	1.490,90	100%	1.490,90	100%	1.490,90	7.454,5
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	65%	380,66	70%	390,34	75%	426,34	80%	440,23	85%	460,28	85%	460,28	
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>																		
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang aktif	85%	90%	476,36	90%	502,96	95%	529,55	95%	555,22	95%	581,27	95%	581,27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDES yang terbentuk	48	55	168,11	60	197,10	65	202,60	70	257,60	82	282,90	82	282,90	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun	Jumlah Desa yang mendirikan	48	55	203,30	60	229,39	65	235,78	70	261,12	82	286,15	82	286,15	

		Desa	BUMDES														
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur desa yang mendapatkan pelatihan di bidang pemerintahan desa	-	60%	539,80	65%	567,90	70%	594,65	75%	617,00	80%	642,10	80%	642,10	Sekretariat Daerah
		<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>															
		Program Keluarga Berencana	Angka Fertilitas Penduduk	2,60	2,58	831,09	2,56	827,19	2,54	853,49	2,52	879,12	2,5	907,12	2,5	907,12	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Pasanangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 tahun (per 1.000 WUS)	-	200	250,27	200	276,97	150	302,01	150	328,24	100	354,74	100	354,74	
		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri	Ratio Akseptor KB	26	22	96,46	22	121,16	22	153,16	21	179,45	21	205,75	21	205,75	
		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV / AIDS	Persentase penanggulangan remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	-	100%	50,99	100%	76,34	100%	102,14	100%	129,35	100%	154,85	100%	154,85	
		Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Pasutri yang menggunakan kontrasepsi	-	40%	207,65	45%	230,43	50%	267,76	55%	301,34	60%	330,56	60%	330,56	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	90%	100%	354,76	100%	390,87	100%	430,87	100%	576,89	100%	499,70	100%	499,70	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	-	60%	234,87	65%	276,76	70%	305,65	75%	335,40	80%	360,43	80%	360,43	
		<b>Perhubungan</b>															
		Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Persentase terminal yang Berfungsi dengan Baik	70%	75%	3.110,46	80%	3.135,98	85%	3.161,32	90%	3.186,78	100%	3.217,99	100%	3.217,99	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rasio izin trayek	0,5	0,6	1.150,90	0,7	1.176,23	0,8	1.202,23	0,85	1.228,76	0,90	1.259,76	0,90	1.259,76	
		Program Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Terminal	2	3	130,04	4	157,74	5	185,74	6	211,54	7	236,44	7	236,44	
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan	Persentase rambu-rambu Lalu Lintas	60%	70%	150,65	80%	175,85	90%	203,12	95%	230,34	100%	270,54	100%	270,54	

		Fasilitas LLAJ	yang terpelihara														
		Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase uji kir angkutan umum	-	50%	125,66	55%	150,65	60%	175,32	65%	205,91	70%	230,87	70%	230,87	
		Program Pengendalian Pengaman Lalu Lintas	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	60%	65%	163,21	70%	198,94	80%	220,39	90%	255,32	100%	270,62	100%	270,62	
		Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang bermompten di bidang perhubungan	13 Orang	7 Org	205	3 Org	135	8 Org	255	2 Org	85	7 Org	195	27 Org	875	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	80%	90%	123,76	95%	156,78	100%	180,34	100%	207,34	100%	234,19	100%	234,19	
		<b>Komunikasi dan Informatika</b>															
		Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi	Persentase SOPD yang mempunyai akses Internet	100%	100%	175,20	100%	200,20	100%	227,10	100%	253,87	100%	279,87	100%	279,87	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang menerapkan teknologi informasi	63%	70%	345,67	75%	379,00	80%	407,10	90%	428,99	100%	459,23	100%	459,23	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	90%	100%	348,34	100%	356,76	100%	375,98	100%	407,22	100%	435,98	100%	435,98	
		Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Jumlah Berita yang termuat dalam Media Cetak dan Elektronik	-	300 Berita	1.258,87	360 Berita	1.376,87	360 Berita	1.459,23	360 Berita	1.576,54	360 Berita	1.687,88	360 Berita	1.687,88	Sekretariat Daerah
		<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>															
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Keahlian	-	10%	123,90	12%	159,23	15%	185,83	17%	201,98	20%	227,01	20%	227,01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UMKM Aktif	4.983	5.198	288,75	5.428	319,10	5.683	334,19	5.933	360,34	6.233	386,00	6.233	386,00	
		Program Pembangunan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Unit Usaha Sektor Perdagangan Formal yang Meningkatkan Statusnya dari Pedagang Mikro ke Pedagang Kecil	10	12	171,56	15	198,00	18	224,30	22	259,67	25	275,02	25	275,02	
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah	Jumlah Unit Usaha Sektor Perdagangan Formal yang Meningkatkan Statusnya dari	5	6	293,60	7	319,80	8	344,80	9	369,98	10	369,98	10	369,98	



			Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Adat Budaya Etnis yang Dilestarikan	9	9	576,80	9	600,80	9	625,90	9	651,00	9	676,25	9	676,25	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Program Kekayaan Budaya	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya	10	20	245,76	30	278,98	40	301,65	50	326,76	60	356,87	60	356,87	
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Organisasi Kemasyarakatan di bidang seni dan budaya	-	5%	134,67	10%	178,98	12%	205,76	15%	239,76	17%	260,76	17%	260,76	
			Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Kegiatan Adat Daerah	100%	100%	404,38	100%	429,50	100%	455,50	100%	461,70	100%	486,75	100%	486,75	Sekretariat Daerah
			<b>Perpustakaan</b>															
			Program Pengembangan Perpustakaan Dan Arsip	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perpustakaan	2,51 – 3,25 (Baik)	2,51 – 3,25 (Baik)	729,00	2,51 – 3,25 (Baik)	755,00	2,51 – 3,25 (Baik)	762,00	2,51 – 3,25 (Baik)	787,50	2,51 – 3,25 (Baik)	816,50	2,51 – 3,25 (Baik)	816,50	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Persentase Perpustakaan Desa di Kab. Boalemo	62%	65,64%		65,85%		66,46%		67,07%		67,68%		67,68%		
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	22,32%	25,32%	112,98	26,08%	134,87	26,86%	177,65	27,66%	198,29	28,49%	209,38	28,49%	209,38	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Prima	100%	20%	785,00	40%	785,00	60%	785,00	80%	785,00	100%	785,00	100%	3.925,00	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	60%	65%	125,68	70%	150,34	75%	180,34	80%	208,23	85%	245,88	85%	245,88	
			<b>Kearsipan</b>															
			Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah	Persentase Peningkatan Pengunjung Layanan Arsip	21,27%	26,27%	488,50	31,27%	513,10	36,27%	538,10	41,27%	564,00	46,27%	589,50	46,27%	589,50	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Arsip yang Tertata	-	90%	110,56	90%	139,65	95%	167,45	100%	186,87	100%	205,98	100%	205,98	
			Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase Sarana dan Prasarana Kearsipan dalam kondisi baik	-	70%	87,65	75%	109,76	80%	120,43	85%	145,54	90%	160,41	90%	160,41	
			<b>Urusan Pilihan</b>															
			<b>Kelautan dan Perikanan</b>															
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	520 Ton	1.878 Ton	2.307,50	2.066 Ton	2.333,75	2.272 Ton	2.359,75	2.500 Ton	2.385,25	2.750 Ton	2.410,30	2.750 Ton	2.410,30	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	17.608 Ton	22.000 Ton	4.337,02	24.200 Ton	4.365,75	26.620 Ton	4.390,00	29.282 Ton	4.405,20	32.210 Ton	4.431,25	32.210 Ton	4.431,25	
			Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,86	108,09	1.723,01	108,32	1.749,23	108,55	1.773,25	108,78	1.798,65	109,01	1.823,75	109,01	1.823,75	
				Tingkat Konsumsi	43,27	43,67		44,24		46,36		49,85		52,92		52,92		





			Pengembangan Bidang Keternaga Listrik	Tangga yang terlayani listrik													Modal, energi dan Sumber Daya Mineral	
			<b>Perdagangan</b>															
			Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen	100%	100%	1.198,00	100%	1.226,30	100%	1.253,75	100%	1.279,75	100%	1.297,25	100%	1.297,25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Jumlah Potensi Komoditas Ekspor	1	2	71,25	3	97,25	3	118,75	3	143,90	4	170,25	4	170,25	
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pasar Terbangun yang Representatif di Tiap Kecamatan	3	5	1.718,94	6	1.745,25	7	1.775,25	8	1.800,25	9	1.825,75	9	1.825,75	
			Program Pembinaan Pedagang Kakilima Dan Asongan	Jumlah UMKM Aktif	4.983	5.198	403,60	5.428	428,75	5.683	459,25	5.933	484,05	6.233	520,25	6.233	520,25	
			<b>Perindustrian</b>															
			Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah Pelaku Usaha Sektor Perdagangan Formal	12.330	12.335	233,60	12.340	258,00	12.347	285,90	12.350	315,75	12.360	345,00	12.360	345,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Jumlah Unit Usaha Sektor Perdagangan Formal yang Meningkatkan Statusnya dari Pedagang Mikro ke Pedagang Kecil	10	12	167,94	15	192,75	18	207,25	22	232,95	25	257,90	25	257,90	
				Jumlah Unit Usaha Sektor Perdagangan Formal yang Meningkatkan Statusnya dari Pedagang Kecil ke Pedagang Menengah	5	6		7		8		9		10		10		
			<b>Transmigrasi</b>															
			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Unit Permukiman Transmigrasi yang terbangun	12 UPT	12 UPT	1.502,29	12 UPT	1.527,50	13 UPT	1.554,25	13 UPT	1.580,25	13 UPT	1.605,00	13 UPT	1.605,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Program Transmigrasi Lokal	Jumlah Unit permukiman transmigrasi yang mandiri.	9 UPT	10 UPT	203,60	10 UPT	229,25	10 UPT	254,75	11 UPT	275,70	12 UPT	300,75	12 UPT	300,75	
			Program Transmigrasi Regional	Jumlah Transmigran yang ditempatkan	3.794 KK	36.716 KK	336,96	36.866 KK	365,34	37.016 KK	390,25	37.166 KK	415,00	37.316 KK	440,70	37.316 KK	440,70	
			Program penyiapan kawasan dan pembangunan pemukiman	Persentase KTM menjadi Kawasan	35%	40%	2.235,87	45%	2.397,34	50%	2.464,65	55%	2.582,97	60%	2.692,76	60%	2.692,76	

			transmigrasi	Perkotaan Baru														
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	95%	100%	650,54	100%	679,34	100%	705,76	100%	729,40	100%	775,99	100%	775,99	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan akuntabel	1	1	123,75	1	145,71	1	176,28	1	190,54	1	221,34	1	221,34	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	-	40%	430,23	50%	478,34	55%	501,34	60%	534,24	65%	567,23	65%	567,23	
			<b>Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>															
			<b>Administrasi Pemerintahan</b>															
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	70%	75%	373,85	80%	399,00	85%	425,20	90%	450,75	95%	475,75	95%	475,75	Sekretariat Daerah
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100%	100%	798,34	100%	824,76	100%	857,34	100%	889,92	100%	903,29	100%	903,29	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	70%	75%	450,49	80%	478,37	85%	501,76	90%	539,48	95%	558,31	95%	558,31	
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	100%	6.258,75	100%	6.285,05	100%	6.310,75	100%	6.335,25	100%	6.360,65	100%	6.360,65	
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	179,96	100%	205,00	100%	230,90	100%	267,25	100%	295,05	100%	295,05	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Kontraktor Lokal yang Mengikuti Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	-	25	150,45	50	180,67	75	203,45	100	225,65	125	240,23	150	240,23	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pengawasan Internal secara berkala	-	4 Kali	67,89	4 Kali	92,90	4 Kali	118,75	4 Kali	135,80	4 Kali	160,75	4 Kali	160,75	
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase SOPD yang telah berakses internet	100%	100%	1.129,68	100%	1.155,75	100%	1.180,75	100%	1.205,25	100%	1.235,40	100%	1.235,40	
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Kerjasama antar Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dengan Baik	100%	100%	435,89	100%	460,90	100%	485,90	100%	520,25	100%	545,50	100%	545,50	
			Program Penataan Peraturan	Persentase	100%	100%	713,98	100%	748,00	100%	775,20	100%	800,50	100%	825,75	100%	825,75	



		Antar Pemerintah Daerah	Masyarakat (IPK) Kecamatan	(Baik)	3,25 (Baik)		3,25 (Baik)	Paguyaman Pantai									
		Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK) Kecamatan	2,51 – 3,25 (Baik)	2,51 – 3,25 (Baik)	575,00	2,51 – 3,25 (Baik)	600,00	2,51 – 3,25 (Baik)	625,00	2,51 – 3,25 (Baik)	650,00	2,51 – 3,25 (Baik)	700,00	2,51 – 3,25 (Baik)	700,00	Kantor Camat Botumoito
		<b>Pengawasan</b>															
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja	CC	B	2.065,87	B	2.090,25	B	2.115,95	B	2.159,00	B	2.185,00	B	2.185,00	Inspektorat Daerah
			Maturitas SPIP	Level 1,42	Level 2		Level 3										
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	9	12	487,65	15	514,75	18	539,95	20	554,75	22	565,25	22	565,25	
		Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	100%	100%	120,65	100%	145,75	100%	175,00	100%	200,50	100%	230,25	100%	230,25	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	90%	90%	430,54	90%	476,87	90%	490,19	90%	503,87	90%	549,54	90%	549,54	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	100%	340,67	100%	397,76	100%	407,54	100%	456,76	100%	490,87	100%	490,87	
		<b>Perencanaan</b>															
		Program Pelayanan Administasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100%	100%	343,76	100%	376,87	100%	402,87	100%	430,76	100%	476,87	100%	476,87	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	100%	307,67	100%	350,76	100%	398,54	100%	434,76	100%	484,87	100%	484,87	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	40%	50%	506,65	55%	545,76	60%	580,65	65%	607,29	70%	659,54	75%	659,54	
		Program Pengembangan Data / Informasi	Persentase Data/Informasi yang tersedia dan valid	100%	100%	435,98	100%	465,00	100%	490,90	100%	524,75	100%	554,75	100%	554,75	
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Indeks Gini	0,398	0,367	519,76	0,336	545,00	0,305	575,00	0,274	601,34	0,243	627,54	0,243	627,54	
		Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan	4	5	297,54	6	325,25	7	355,00	8	380,70	9	408,90	9	408,90	

			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan perencanaan	20%	25%	245,87	30%	270,75	35%	295,75	40%	320,25	50%	345,75	50%	345,75	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	957,56	100%	980,96	100%	1.005,00	100%	1.035,25	100%	1.060,75	100%	1.060,75	
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	6,29	6,39	507,09	6,49	535,79	6,59	561,25	6,59	590,55	6,69	620,00	6,69	620,00	
			Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	Persentase Ketersediaan Data Sosial dan Budaya yang update	100%	100%	576,87	100%	603,75	100%	630,25	100%	655,75	100%	680,95	100%	680,95	
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	-	1	178,00	2	215,55	3	250,25	4	275,55	5	305,75	5	305,75	
			<b>Keuangan</b>															
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WTP	5.465,98	WTP	5.495,25	WTP	5.534,00	WTP	5.560,25	WTP	5.585,25	WTP	5.585,25	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	95%	100%	706,45	100%	756,20	100%	789,34	100%	804,54	100%	845,34	100%	845,34	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur	96%	100%	458,34	100%	489,54	100%	508,43	100%	538,34	100%	570,45	100%	570,45	
			<b>Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ASN</b>															
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase aparatur yang telah mengikuti diklat PIM, diklat teknis dan diklat fungsional	20,86%	40%	1.330,78	50%	1.355,79	60%	1.380,00	70%	1.405,00	80%	1.430,75	80%	1.430,75	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100%	100%	245,76	100%	283,34	100%	308,54	100%	330,34	100%	380,65	100%	380,65	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	100%	456,65	100%	480,54	100%	507,45	100%	530,43	100%	570,76	100%	570,76	
			Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan akuntabel	1	1	125,34	1	175,34	1	200,54	1	230,45	1	265,99	1	265,99	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Prosentase indeks kepuasan pelayanan	90 (Baik)	92 (Baik)	1.756,99	94 (Baik)	1.780,25	95 (Baik)	1.805,50	96 (Baik)	1.830,75	96 (Baik)	1.855,75	96 (Baik)	1.855,75	

			kepegawaian															
			<b>Penelitian dan Pengembangan</b>															
			Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintahan	-	2	350,00	4	375,25	5	400,90	6	425,75	7	450,25	7	475,45	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Desiminasi dan Informasi	Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang telah diseminasikan	-	2	250,50	4	275,25	5	300,54	6	325,80	7	350,75	7	350,75	

## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Daerah merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Boalemo berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SOPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah Terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SOPD dalam penyusunan Renstra SOPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah

prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun kriteria setiap prioritas adalah sebagai berikut :

a. Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SOPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SOPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SOPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

c. Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

### **8.1. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala SOPD. Tujuan dalam penetapan IKU Kepala SOPD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKU Kepala SOPD dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 8.1

## Indikator Kinerja Utama Kabupaten Boalemo

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
	Volume Deteksi Dini Ancaman dan Gangguan Masyarakat secara Reguler	7 Masalah	11 Masalah	15 Masalah	19 Masalah	23 Masalah
	Persentase cakupan yang mendapatkan perlindungan sosial Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)	107.000 Jiwa	113.000 Jiwa	123.000 Jiwa	133.000 Jiwa	143.000 Jiwa
	Persentase KK yang mendapatkan perlindungan sosial berupa Beras Sejahtera (Rastra)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Angka Fertilitas penduduk	2.58	2.56	2.54	2.52	2.5
	Indeks Pembangunan Gender	72,00	74,00	76,00	78,00	80.00
	Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sangat Tinggi				
	Persentase OPD yang Menerapkan teknologi informasi (Aplikasi Sistem)	70%	75%	80%	90%	100%
	Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pendidikan	2,51 – 3,25 (Baik)				
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	2,51 – 3,25 (Baik)				

Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	2,51 – 3,25 (Baik)				
Persentase Ketersediaan Pangan Utama	53,07%	57,32%	61,90%	66,85%	100%
Usia Harapan Hidup	68,5 Tahun	68,7 Tahun	68,9 Tahun	69 Tahun	69,2 Tahun
Angka Kematian Ibu Melahirkan	283	242	202	161	121
Angka Kematian Bayi	13,8	9,7	8,9	8,5	8,1
Prevalensi kekurangan Gizi pada anak balita	0,18%	0,17%	0,16%	0,15%	0,14 %
Persentase Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau)	35%	40%	45%	50%	50%
Persentase pemenuhan air minum	87%	90%	95%	97%	100%
Persentase cakupan sanitasi dasar	60%	70%	80%	90%	100%
Persentase ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik	60%	70%	80%	90%	100%
Jumlah jembatan dalam kondisi baik	50%	65%	75%	90%	100%
Persentase Jaringan Irigasi dengan kondisi baik	75%	80%	85%	90%	100%
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,5 Tahun	8,91 Tahun	9 Tahun	9,5 Tahun	10 Tahun
Persentase Kelulusan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Prosentasi guru yang tersertifikasi	30%	32%	35%	37%	40 %
Jumlah Adat Budaya Etnis yang Dilestarikan	9 Etnis				
Jumlah UMKM Aktif	5.198	5.428	5.683	5.933	6.233
Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat	25	30	35	40	45
Nilai Tukar Petani (NTP)	106	106	107	107	107
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	108,09	108,32	108,55	108,78	109,01
Persentase angka kemiskinan	20,86%	20,61%	20,36%	20,11%	19,86%
Jumlah Kunjungan Wisatawan	150.000 Orang	200.000 Orang	250.000 Orang	300.000 Orang	350.000 Orang
Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6,39%	6,49%	6,59%	6,59%	6,69%
Indeks Gini	0,367	0,336	0,305	0,274	0,243

	Jumlah BUMDes yang terbentuk	55	60	65	70	82
	Persentase Sarana Peribadatan yang difasilitasi Stimulan	25%	30%	35%	40%	50%
	Persentase Siswa Tingkat SD dan Menengah yang Melek Huruf Al-Quran	30%	40%	50%	60%	70%
	Rasio Jumlah Santri terhadap Usia Sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30

## **8.2. Program dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Boalemo, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh denganmendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi. Penyajian indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 8.2

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(17)
	<b>Urusan Wajib</b>									
	<b>Pelayanan Dasar</b>									
	<b>Pendidikan</b>									
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APM PAUD	92,81 %	97,73%	98 %	98,19 %	99,10 %	100 %	100 %	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		APK PAUD	92,81 %	92,91 %	93,1%	94 %	94,6 %	95 %	95 %	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	93.81%	95%	96%	97%	98%	100%	100%	

		Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/Sederajat	92,25 %	93 %	94,03 %	95 %	96 %	98 %	98 %	
			APK SD/Sederajat	96,04 %	96,04 %	97,01 %	98,98 %	99%	100%	100%	
		Program Pendidikan Menengah	APM SMP/Sederajat	77,23 %	79 %	81 %	81,92 %	82,32 %	85 %	85 %	
			APM SMA/Sederajat	88,12 %	88,82 %	89 %	90 %	91 %	92 %	92 %	
			APK SMP/Sederajat	97,73 %	98,08 %	98,95 %	99 %	100%	100%	100%	
			APK SMA/Sederajat	91,12 %	91,89 %	92 %	93,1 %	93,89%	95%	95%	
		Program Pendidikan Non Formal	Persentase Siswa Tingkat SD dan Menengah yang Melek Huruf Al-Quran	-	60%	65%	70%	75%	80%	80%	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	6,3 Tahun	6,8 Tahun	6,9 Thn	7 Tahun	7,1 Tahun	7,2 Tahun	7,2 Tahun	
			Persentase Kelulusan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Persentase Guru yang tersertifikasi	27,18%	30 %	32 %	35 %	37 %	40 %	40 %	
			Angka Melek Huruf	99,56%	99,60%	99,7%	98%	99%	100%	100%	
			Angka	76,10%	77%	78,18%	79%	79,98%	82%	82%	

			Partisipasi Sekolah (APS)								
			Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,07 Tahun	12,15 Tahun	12,30 Tahun	12,45 Tahun	12,60 Tahun	12,75 Tahun	12,75 Tahun	
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pendidikan	2,51 – 3,25 (Baik)							
		<b>Kesehatan</b>									
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Prima	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	68,2 Tahun	68,5 Tahun	68,7 Tahun	68,9 Tahun	69 Tahun	69,2 Tahun	69,2 Tahun	
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Intensitas Inspeksi Obat dan Makanan	-	2 kali	2 kali	4 kali	4 kali	12 kali	12 kali	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Capaian Aspek Kabupaten Sehat	-	60%	70%	75%	80%	85%	85%	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi kekurangan Gizi pada anak balita	0,2 %	0,18%	0,17%	0,16%	0,15%	0,14 %	0,14 %	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Cakupan	60,4%	67,2%	67,7%	70%	75%	75%	75%	

			penduduk Akses Air Bersih layak								
			Persentase Cakupan penduduk akses Sanitasi Layak	49,5%	52,4%	55,4%	52,2%	60%	65%	65%	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	75%	76%	77%	78%	79%	80%	80%	
			Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	30%	40%	50%	60%	70%	75%	75%	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	2,51 – 3,25 (Baik)							
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	-	60%	65%	70%	75%	80%	80%	
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah	Persentase Fasilitas Kesehatan Dalam Kondisi Baik	-	60%	65%	70%	75%	80%	80%	

		Sakit Mata.									
		Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakirt Mata	Pesentase Sarana dan Prasarana Runah Sakit yang berfungsi dengan baik.	-	80%	85%	90%	95%	100%	100%	
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu Melahirkan (/100.000 KH)	323	283	242	202	161	121	121	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin melalui persalinan di fasyankes	70,4%	75%	77%	80%	85%	90%	90%	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Bayi (/1.000 KH)	19,8	13,8	9,7	8,9	8,5	8,1	8,1	
		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	52%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan Desa UCI	76%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan	-	60%	70%	80%	90%	100%	100%	

			terhadap Lansia								
		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Persyaratan Kesehatan	63%	70%	75%	80%	85%	90%	90	
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat sesuai formularium rumah sakit	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Prima	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Pengadaan, Peningkatan Saran Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakirt Mata.	Persentase ketersediaan peralatan kesehatan sesuai type RS (type B)	33%	40%	49%	60%	73%	90%	90%	
		Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakirt Mata.	Persentase ketersediaan Sarana Prasarana kesehatan sesuai type RS (type B)	70%	70%	75%	80%	85%	90%	90%	
		Program Kemitraan Penigkatan Pelayanan Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat	2,51 – 3,25 (Baik)							
		Program Kemitraan	Persentase	66%	79%	86%	92%	100%	100%	100%	

		Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Ketersediaan tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan perawat sesuai dengan standar RS type B								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
		<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
		Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	48%	49%	50%	51%	52%	53%	53%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Prima	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur	70%	72%	74%	76%	78%	81%	81%	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatiha	15%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	

			n								
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan Kinerja dan keuangan yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Penambahan Jalan Baru	-	4 km	4 km	4 km	4 km	4 km	4 km	
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	53%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Prosentase Inspeksi terhadap Kondisi Jalan dan Jembatan	80%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	
		Program Penigkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah Alat Berat yang dimiliki dan berfungsi dengan baik	2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1Unit	6 Unit	
		Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Persentase Penanganan Kerusakan terhadap jalan dan jembatan akibat bencana	-	80%	80%	80%	90%	90%	90%	
		Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	53,5%	59,5%	65,5%	71,5%	77,5%	83,5%	83,5%	

		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Drainase Jalan Terbangun	46%	48%	50%	52%	54%	56%	56%	
		Program Pembangunan Turap/Talud bronjong	Persentase Bronjong/Talud Terbangun	45%	47%	49%	51%	53%	55%	55%	
		Program Pengendalian Banjir	Persentase drainase dalam kondisi baik	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	
			Persentase pembangunan turap di aliran sungai rawan longsor	-	60%	65%	70%	75%	80%	80%	
		Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Persentase areal kawasan kumuh perkotaan	23%	20%	15%	12%	10%	7%	7%	
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Regulasi tentang Penataan Ruang	1	2	2	3	3	4	4	
		<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>									
		Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	-	0,6	0,65	0,70	0,75	0,80	0,80	Dinas Perumahan Rakyat,

												Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan
			Rasio permukiman layak huni	-	0,6	0,65	0,70	0,75	0,80	0,80		
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Persentase pemenuhan air minum	81%	85%	89%	93%	97%	100%	100%		
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Lingkungan Perumahan yang sehat	97%	97,6%	98,2%	98,8%	99,4%	100%	100%		
		Program Pembangunan Infrastruktur Desa	Persentase Infrastruktur Desa yang Terbangun	66%	66,2%	74,74%	83,28%	91,82%	100%	100%		
		Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial	Persentase rumah yang diperbaiki akibat bencana alam/sosial	-	70%	75%	80%	85%	90%	90%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administasi Perkantoran yang tertib dan lancar	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Prosentase tersedianya	90%	98%	98%	98%	98%	98%	100%		

		Aparatur	sarana dan prasarana aparatur yang memadai								
		Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase korban bencana alam yang tertanggulangi	-	80%	85%	90%	95%	100%	100%	
		Program Pengendalian Banjir	Persentase Kawasan yang rawan genangan	-	22%	20%	17%	15%	12%	10%	
		Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencagahan Bahaya Kebakaran	Respon Time Pemadam Kebakaran	-	1 Km/2 menit	Satuan Polisi Pamong Praja					
		<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>									
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan	-	10%	15%	20%	25%	30%	30%	Kesbang Politik dan Limnas
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	-	40%	50%	60%	70%	80%	80%	
		Program Pengembangan	Jumlah Deteksi	3	4 Masalah	4 Masalah	4	4	4	4	

		Wawasan Kebangsaan	Dini Ancaman dan Ganggaun Masyarakat secara Reguler	Masalah			Masalah	Masalah	Masalah	Masalah	
			Frekuensi Penurunan Jumlah demonstrasi	8 Kali	7 Kali	6 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Ormas/LSM yang ber-SKT	70	75	80	85	90	95	95	
			Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	81,3%	-	84%	-	-	85%	85%	
			Penurunan Jumlah konflik berlatar belakang Politik	-	3 Masalah	3 Masalah	3 Masalah	3 Masalah	4 Masalah	4 Masalah	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Bagi Masyarakat	48%	60%	70%	92%	92%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah	10%	80%	75%	74%	60%	50%	50%	

		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Dasar POL-PP	25	125	135	150	150	150	150	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%	
		<b>Sosial</b>									
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase KK yang mendapatkan perlindungan Sosial berupa Beras Sejahtera (Rastra)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan yang mendapat perlindungan jaminan 20ocial kesehatan masyarakat	102.401 Jiwa	107.000 Jiwa	113.000 Jiwa	123.000 Jiwa	133.000 Jiwa	143.000 Jiwa	143.000 Jiwa	

			(Jamkesmas)								
		Program Peningkatan Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	Persentase angka kemiskinan	21,11%	20.86%	20,61%	20,36%	20,11%	19,86%	19,86%	
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang aktif	38%	40%	50%	60%	70%	80%	80%	
		<b>Non Pelayanan Dasar</b>									
		<b>Tenaga Kerja</b>									
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang produktif dan berkualitas	36.566 Orang	36.716 Orang	36.866 Orang	37.016 Orang	37.166 Orang	37.316 Orang	37.316 Orang	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Jumlah tenaga kerja yang memiliki akreditasi keahlian	-	700 Orang	1400 Orang	2100 Orang	2800 Orang	3500 Orang	3500 Orang	
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang terlindungi	100 Orang	150 Orang	200 Orang	250 Orang	300 Orang	350 Orang	350 Orang	
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Lapangan Kerja Baru	5 UB	7 UB	14 UB	21 UB	28 UB	35 UB	35 UB	
			Persentase menurunnya angka	4,54%	4,32%	4,07%	3,82%	3,57%	3,22%	3,22%	

			pengangguran									
			<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>									
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	Pesentase Organisasi yang beranggotakan Gender	-	60%	65%	70%	75%	80%	80%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Permasalahan Perempuan dan Anak yang Tertangani	-	70%	75%	80%	85%	90%	90%	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	-	10%	15%	20%	25%	30%	30%	
			<b>Pangan</b>									
			Program Peningkatan Divesifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	17.688 Ton	19.103 Ton	20.631 Ton	22.281 Ton	24.063 Ton	35.992 Ton	35.992 Ton	Dinas Pangan
				Jumlah Desa yang Memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	25	35	45	55	65	84	84	

		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Angka Kecukupan Energi /AKE (kkal/kap/hr)	2.150	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400	2.400	
			Angka Kecukupan Protein /AKP (gr/kap/hr)	57	58	59	60	61	63	63	
			Pola Pangan Harapan (PPH)	60%	79,4%	84,6%	95%	98%	100%	100%	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi yang tertata dengan baik	100%	1.063,35	1.063,35	1.063,35	1.063,35	1.063,35	100%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	
		<b>Pertanahan</b>									
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan
		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Database/Aplikasi tentang pertanahan	-	1	1	2	2	3	3	
		<b>Lingkungan Hidup</b>									
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Izin Lingkungan yang diterbitkan	21	25	27	30	33	35	35	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau)	30%	35%	40%	45%	50%	50%	50%	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase TPST yang Berfungsi dengan baik	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi yang tertata dengan baik	98,99 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>									
		Program Penataan Admnistrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capil	2,51 – 3,25 (Baik)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
			Persentase Penduduk yang	90,21%	92,01%	93,42%	95,52%	97,21%	99,10%	99,10%	

			memilik KTP								
			Persentase Penduduk yang memilik KK	80,50%	82,52%	84,43%	87,62%	93,38%	99,50%	99,50%	
			Persentase Penduduk yang memilik Akta Kelahiran Semua Umur	70,31%	76,20%	77,60%	82,73%	93,27%	99,23%	99,23%	
			Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	-	25,30%	50,72%	75,42%	84,72%	90,01%	90,01%	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi yang tertata dengan baik	98,99 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%	
		<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>									
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang aktif	85%	90%	90%	95%	95%	95%	95%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi	Jumlah BUMDES yang	48	55	60	65	70	82	82	

		Pedesaan	terbentuk								
		Program Penigkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah Desa yang mendirikan BUMDES	48	55	60	65	70	82	82	
		Program Penigkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparaturnya yang mendapatkan pelatihan di bidang pemerintahan desa	-	60%	65%	70%	75%	80%	80%	Sekretariat Daerah
		<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
		Program Keluarga Berencana	Angka Fertilitas Penduduk	2,60	2,58	2,56	2,54	2,52	2,5	2,5	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Pasanagan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 tahun (per 1.000 WUS)	-	200	200	150	150	100	100	
		Program Pembinaan Peran	Ratio Akseptor	26	22	22	22	21	21	21	

		Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri	KB								
		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV / AIDS	Persentase penanggulangan remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Pasutri yang menggunakan kontrasepsi	-	40%	45%	50%	55%	60%	60%	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	-	60%	65%	70%	75%	80%	80%	
		<b>Perhubungan</b>									
		Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Persentase terminal yang Berfungsi dengan Baik	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan

		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rasio izin trayek	0,5	0,6	0,7	0,8	0,85	0,90	0,90	
		Program Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Terminal	2	3	4	5	6	7	7	
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase rambu-rambu Lalu Lintas yang terpelihara	60%	70%	80%	90%	95%	100%	100%	
		Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase uji kir angkutan umum	-	50%	55%	60%	65%	70%	70%	
		Program Pengendalian Pengaman Lalu Lintas	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	60%	65%	70%	80%	90%	100%	100%	
		Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang bermompten di bidang perhubungan	13 Orang	7 Org	3 Org	8 Org	2 Org	7 Org	27 Org	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	
		<b>Komunikasi dan Informatika</b>									
		Program Pengkajian Dan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas

		Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi	SOPD yang mempunyai akses Internet								Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang menerapkan teknologi informasi	63%	70%	75%	80%	90%	100%	100%	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Jumlah Berita yang termuat dalam Media Cetak dan Elektronik	-	300 Berita	360 Berita	Sekretariat Daerah				
		<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>									
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Keahlian	-	10%	12%	15%	17%	20%	20%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UMKM Aktif	4.983	5.198	5.428	5.683	5.933	6.233	6.233	
		Program Pembangunan Kewirausahaan Dan	Jumlah Unit Usaha Sektor	10	12	15	18	22	25	25	

		Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Perdagangan Formal yang Meningkatkan Statusnya dari Pedagang Mikro ke Pedagang Kecil								
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah	Jumlah Unit Usaha Sektor Perdagangan Formal yang Meningkatkan Statusnya dari Pedagang Kecil ke Pedagang Menengah	5	6	7	8	9	10	10	
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang memperoleh dana penguatan modal	-	3,5%	7%	10,5%	14%	15%	15%	
			Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat	20	25	30	35	40	45	45	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		<b>Penanaman Modal</b>									
		Program Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Perusahaan (PMDN/PMA)	1.073	1.079	1.090	1.101	1.112	1.135	1.135	Dinas Penanaman Modal, Energi

			yang berinvestasi								dan Sumber Daya Mineral
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Izin yang diterbitkan	316	360	470	580	690	800	800	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan	2,51 – 3,25 (Baik)							
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pameran Pembangunan yang diikuti	3	4	4	4	4	4	4	Sekretariat Daerah
		<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>									
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Berprestasi	6	8	10	12	14	15	15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Pemuda cakap Berwirausaha	0	25	30	35	45	50	50	
		Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	19	21	22	23	24	25	25	
		<b>Statistik</b>									

		Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Jumlah Jenis Publikasi Statistik	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		<b>Persandian</b>									
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Pesentase Kegiatan Persandian yang terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		<b>Kebudayaan</b>									
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Adat Budaya Etnis yang Dilestarikan	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Kekayaan Budaya	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya	10	20	30	40	50	60	60	
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Organisasi Kemasyarakatan di bidang seni dan budaya	-	5%	10%	12%	15%	17%	17%	
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Kegiatan Adat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
		<b>Perpustakaan</b>									
		Program Pengembangan	Indeks	2,51 – 3,25 (Baik)	2,51 –	2,51 –	2,51 –	2,51 –	2,51 –	2,51 – 3,25	Dinas

		Perpustakaan Dan Arsip	Kepuasan Masyarakat (IKM) Perpustakaan		3,25 (Baik)	(Baik)	Perpustakaan dan Arsip Daerah				
			Persentase Perpustakaan Desa di Kab. Boalemo	62%	65,64%	65,85%	66,46%	67,07%	67,68%	67,68%	
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	22,32%	25,32%	26,08%	26,86%	27,66%	28,49%	28,49%	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Prima	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%	
		<b>Kearsipan</b>									
		Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah	Persentase Peningkatan Pengunjung Layanan Arsip	21,27%	26,27%	31,27%	36,27%	41,27%	46,27%	46,27%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Arsip yang Tertata	-	90%	90%	95%	100%	100%	100%	
		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase Sarana dan Prasarana Kearsipan dalam kondisi baik	-	70%	75%	80%	85%	90%	90%	

<b>Urusan Pilihan</b>											
<b>Kelautan dan Perikanan</b>											
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	520 Ton	1.878 Ton	2.066 Ton	2.272 Ton	2.500 Ton	2.750 Ton	2.750 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	17.608 Ton	22.000 Ton	24.200 Ton	26.620 Ton	29.282 Ton	32.210 Ton	32.210 Ton	
		Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,86	108,09	108,32	108,55	108,78	109,01	109,01	
			Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	43,27	43,67	44,24	46,36	49,85	52,92	52,92	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Keahlian	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	
<b>Pariwisata</b>											
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	93.176	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	350.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Jumlah	1.175	2.500	3.500	4.500	5.500	6.500	6.500	

			Kunjungan Wisata Manca Negara								
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang Berkembang	2	3	3	4	5	6	6	
			Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata yang Memiliki Sertifikat Profesi	-	10	20	40	60	90	90	
		Program Pengembangan Kemitraan	Terbinanya Hubungan kelembagaan antar pelaku usaha jasa pariwisata	-	1 Kali						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Keahlian	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	

Pertanian											
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	106	106	106	107	107	107	107	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Jumlah Produksi Padi	55.373 Ton	56.000 Ton	56.500 Ton	57.000 Ton	57.500 Ton	58.000 Ton	58.000 Ton	
			Jumlah Produksi Jagung	159.000 Ton	160.000 Ton	180.000 Ton	200.000 Ton	220.000 Ton	250.000 Ton	250.000 Ton	
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	Jumlah produktifitas Padi	5,5 Kw/Ha	5,6 Kw/Ha						
			Jumlah produktifitas Jagung	4,9 Kw/Ha	5 Kw/Ha	5,2 Kw/Ha	5,3 Kw/Ha	5,4 Kw/Ha	5,5 Kw/Ha	5,5 Kw/Ha	5,5 Kw/Ha
			Jumlah produktifitas Kedelai	1,13 Kw/Ha	1,25 Kw/Ha	1,35 Kw/Ha	1,4 Kw/Ha	1,45 Kw/Ha	1,5 Kw/Ha	1,5 Kw/Ha	1,5 Kw/Ha
			Jumlah produktifitas Cabe Rawit	11,5 Kw/Ha	12 Kw/Ha	12,5 Kw/Ha	13 Kw/Ha	13,5 Kw/Ha	14 Kw/Ha	14 Kw/Ha	14 Kw/Ha
			Jumlah produktifitas Tomat	29,6 Kw/Ha	30 Kw/Ha	31 Kw/Ha	32 Kw/Ha	33 Kw/Ha	34 Kw/Ha	34 Kw/Ha	34 Kw/Ha
			Jumlah produktifitas Kelapa	1,36 Kw/Ha	1,4 Kw/Ha	1,42 Kw/Ha	1,43 Kw/Ha	1,44 Kw/Ha	1,45 Kw/Ha	1,45 Kw/Ha	1,45 Kw/Ha
			Jumlah produktifitas Kakao	0,71 Kw/Ha	0,75 Kw/Ha	0,78 Kw/Ha	0,8 Kw/Ha	0,85 Kw/Ha	0,9 Kw/Ha	0,9 Kw/Ha	0,9 Kw/Ha
		Program Peningkatan	Jumlah Produksi	8,40 Ton	250 Ton	275 Ton	300 Ton	350 Ton	420 Ton	420 Ton	

		Produksi Pertanian / Perkebunan	Kedelai								
			Jumlah Produksi Cabe Rawit	23.108 Ton	24.000 Ton	24.500 Ton	25.000 Ton	25.500 Ton	26.000 Ton	26.000 Ton	
			Jumlah Produksi Tomat	7.410 Ton	7.500 Ton	7.600 Ton	7.700 Ton	7.800 Ton	8.000 Ton	8.000 Ton	
			Jumlah Produksi Kelapa	8.400 Ton	8.500 Ton	8.600 Ton	8.700 Ton	8.800 Ton	9.000 Ton	9.000 Ton	
			Jumlah Produksi Kakao	1.053 Ton	1.150 Ton	1.250 Ton	1.350 Ton	1.450 Ton	1.500 Ton	1.500 Ton	
			Panjang Jalan Usaha Tani	96,37 Km	106,37 Km	116,37 Km	126,37 Km	136,37 Km	146,37 Km	146,37 Km	
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok	5%	10%	15%	20%	25%	30%	30%	
		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penyakit Ternak yang Tertanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Telur Ayam	110.262 Butir	120.000 Butir	122.000 Butir	124.000 Butir	126.000 Butir	127.000 Butir	127.000 Butir	
		Program Peningkatan Produksi Peternakan	Jumlah Populasi Sapi	37.110 Ekor	40.000 Ekor	45.000 Ekor	50.000 Ekor	55.000 Ekor	60.000 Ekor	60.000 Ekor	
			Jumlah Populasi Kambing	7.961 Ekor	8.000 Ekor	8.500 Ekor	9.000 Ekor	9.500 Ekor	10.000 Ekor	10.000 Ekor	
			Jumlah Populasi Ayam/Unggas	286.103 Ekor	300.000 Ekor	350.000 Ekor	400.000 Ekor	450.000 Ekor	500.000 Ekor	500.000 Ekor	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

			baik								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	80%	85%	85%	90%	90%	90%	
		<b>Kehutanan</b>									
		Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase Luas Hutan/Taman Kota	30 %	35%	40%	45%	50%	50%	50%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>									
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrik	Persentase Rumah Tangga yang terlayani listrik	71%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal, energi dan Sumber Daya Mineral
		<b>Perdagangan</b>									
		Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Jumlah Potensi Komoditas Ekspor	1	2	3	3	3	4	4	
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	Jumlah Pasar Terbangun yang	3	5	6	7	8	9	9	

		Dalam Negeri	Representatif di Tiap Kecamatan								
		Program Pembinaan Pedagang Kakilima Dan Asongan	Jumlah UMKM Aktif	4.983	5.198	5.428	5.683	5.933	6.233	6.233	
		<b>Perindustrian</b>									
		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah Pelaku Usaha Sektor Perdagangan Formal	12.330	12.335	12.340	12.347	12.350	12.360	12.360	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Jumlah Unit Usaha Sektor Perdagangan Formal yang Meningkat Statusnya dari Pedagang Mikro ke Pedagang Kecil	10	12	15	18	22	25	25	
			Jumlah Unit Usaha Sektor Perdagangan Formal yang Meningkat Statusnya dari Pedagang Kecil ke Pedagang Menengah	5	6	7	8	9	10	10	
		<b>Transmigrasi</b>									

		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Unit Permukiman Transmigrasi yang terbangun	12 UPT	12 UPT	12 UPT	13 UPT	13 UPT	13 UPT	13 UPT	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Program Transmigrasi Lokal	Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri.	9 UPT	10 UPT	10 UPT	10 UPT	11 UPT	12 UPT	12 UPT	
		Program Transmigrasi Regional	Jumlah Transmigran yang ditempatkan	3.794 KK	36.716 KK	36.866 KK	37.016 KK	37.166 KK	37.316 KK	37.316 KK	
		Program penyiapan kawasan dan pembangunan pemukiman transmigrasi	Persentase KTM menjadi Kawasan Perkotaan Baru	35%	40%	45%	50%	55%	60%	60%	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan akuntabel	1	1	1	1	1	1	1	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	-	40%	50%	55%	60%	65%	65%	
		<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>									

Administrasi Pemerintahan											
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	Sekretariat Daerah
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Jumlah Kontraktor	-	25	50	75	100	125	150	

		Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Lokal yang Mengikuti Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa								
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pengawasan Internal secara berkala	-	4 Kali						
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase SOPD yang telah berakses internet	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Kerjasama antar Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Hukung yang tertangani	-	75%	80%	85%	90%	95%	95%	
		Program Penataan Daerah	Nilai Laporan	Tinggi	Sangat	Sangat	Tinggi	Sangat	Sangat	Sangat	

		Otonomi Baru	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Tinggi	Tinggi	Sangat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
		Program Kedinasan Pemerintah Daerah	Persentase Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penempatan PNS sesuai dengan analisis Jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	78%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Aparatur yang	55%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	

		Aparatur	mengikuti Bimtek/Pelatihan								
		Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK) Kecamatan	2,51 – 3,25 (Baik)	Kantor Camat Paguyaman						
		Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK) Kecamatan	2,51 – 3,25 (Baik)	Kantor Camat Tilamuta						
		Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK) Kecamatan	2,51 – 3,25 (Baik)	Kantor Camat Mananggu						
		Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK) Kecamatan	2,51 – 3,25 (Baik)	Kantor Camat Wonosari						
		Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK) Kecamatan	2,51 – 3,25 (Baik)	Kantor Camat Dulupi						
		Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	2,51 – 3,25 (Baik)	Kantor Camat Paguyaman Pantai						

			(IPK) Kecamatan								
		Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK) Kecamatan	2,51 – 3,25 (Baik)	Kantor Camat Botumoito						
		<b>Pengawasan</b>									
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	B	B	B	B	Inspektorat Daerah
			Maturitas SPIP	Level 1,42	Level 2	Level 3					
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	9	12	15	18	20	22	22	
		Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

			Prasarana Aparatur								
			<b>Perencanaan</b>								
			Program Pelayanan Administasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	40%	50%	55%	60%	65%	70%	75%
			Program Pengembangan Data / Informasi	Persentase Data/Informasi yang tersedia dan valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Indeks Gini	0,398	0,367	0,336	0,305	0,274	0,243	0,243
			Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan	4	5	6	7	8	9	9

		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan perencanaan	20%	25%	30%	35%	40%	50%	50%	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	6,29	6,39	6,49	6,59	6,59	6,69	6,69	
		Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	Persentase Ketersediaan Data Sosial dan Budaya yang update	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	-	1	2	3	4	5	5	
		<b>Keuangan</b>									
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pelayanan	Persentase	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

		Administrasi Perkantoran	Administrasi tertata dengan baik								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		<b>Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ASN</b>									
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase aparatur yang telah mengikuti diklat PIM, diklat teknis dan diklat fungsional	20,86%	40%	50%	60%	70%	80%	80%	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi tertata dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan akuntabel	1	1	1	1	1	1	1	
		Program Pembinaan Dan	Prosentase	90 (Baik)	92 (Baik)	94 (Baik)	95 (Baik)	96 (Baik)	96	96 (Baik)	

		Pengembangan Aparatur	indeks kepuasan pelayanan kepegawaian						(Baik)		
		<b>Penelitian dan Pengembangan</b>									
		Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintahan	-	2	4	5	6	7	7	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Desiminasi dan Informasi	Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang telah diseminasikan	-	2	4	5	6	7	7	

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022, sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati, disusun selain dengan pendekatan teknokratik yaitu proses persiapan penyusunan yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Boalemo, *top-down bottom-up* yaitu metode penyusunan yang saling berkaitan antara rancangan RPJMD dengan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah, pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders yaitu melalui proses Konsultasi Publik, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta pendekatan politis, yaitu proses penetapan di dalam kerangka penetapan RPJMD sebagai Peraturan Daerah.

Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah disusun, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022 menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dengan menekankan kepada inovasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Boalemo. Keberhasilan pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan Kabupaten yang Damai Cerdas Sejahtera dalam Nuansa Religius Tahun 2022.

Akhirnya, atas segala partisipasi dan dukungan semua pihak dalam penyusunan RPJMD ini diucapkan terima kasih. Semoga capaian pembangunan daerah lima tahun mendatang, lebih baik dari lima tahun sebelumnya. Semoga pula Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan dan kearifan-Nya kepada kita sekalian.